DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KEDIRI

RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN TAHUN 2025 - 2029



DISUSUN OLEH :
TIM RENSTRA DINKES
KABUPATEN KEDIRI
Jl. Pamenang 1-C Sukorejo, Ngasem, Kediri
0354-683756 dinkes.kedirikab.go.id

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR 46 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2025-2029

SALINAN

BUPATI KEDIRI

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI KEDIRI

NOMOR 46 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan sesuai Nota Dinas dari Plt. Kepala Bappeda Kabupaten Kediri Nomor 000.7.2.2/61/418.54/2025 tanggal 16 September 2025 hal Rancangan Penetapan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten Kediri Tahun 2025-2029 serta Berita Acara Nomor 000.7.2.2/2710/418.54/2025 tanggal 18 September 2025 tentang Penetapan Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2025-2029, perlu menetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2025-2029;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 94) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 105);
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 127);
28. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 Nomor 18 Seri E);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 176);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kediri Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 182);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 190);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 132);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

(1) Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
(2) Renstra PD Kabupaten Kediri Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Renstra PD sebagai berikut:
    1. Dinas Pendidikan;
    2. Dinas Kesehatan;
    3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
    4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
    5. Satuan Polisi Pamong Praja;
    6. Dinas Sosial;
    7. Dinas Tenaga Kerja;
    8. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan;
    9. Dinas Lingkungan Hidup;
    10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
    11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
    12. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

13. Dinas Perhubungan;
14. Dinas Komunikasi dan Informatika;
15. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
16. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
17. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
18. Dinas Perikanan;
19. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
20. Dinas Pertanian dan Perkebunan;
21. Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
22. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
23. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
24. Badan Pendapatan Daerah;
25. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
26. Badan Riset dan Inovasi Daerah;
27. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
28. Inspektorat;
29. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
30. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
31. Sekretariat Daerah;
32. Kecamatan Mojo;
33. Kecamatan Kras;
34. Kecamatan Ngadiluwih;
35. Kecamatan Kandat;
36. Kecamatan Wates;
37. Kecamatan Ngancar;
38. Kecamatan Puncu;
39. Kecamatan Plosoklaten;
40. Kecamatan Gurah;
41. Kecamatan Pagu;
42. Kecamatan Gampengrejo;
43. Kecamatan Grogol;
44. Kecamatan Papar;
45. Kecamatan Purwoasri;
46. Kecamatan Plemahan;
47. Kecamatan Pare;
48. Kecamatan Kepung;
49. Kecamatan Kandangan;
50. Kecamatan Tarokan;
51. Kecamatan Kunjang;
52. Kecamatan Banyakan;
53. Kecamatan Ringinrejo;
54. Kecamatan Kayen Kidul;

55. Kecamatan Ngasem;
56. Kecamatan Badas; dan
57. Kecamatan Semen.

Pasal 2

Renstra PD Kabupaten Kediri Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran LVII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

(1) Renstra PD Kabupaten Kediri Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2025-2029.
(2) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 19 - 9 - 2025

BUPATI KEDIRI,

ttd

HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 19 - 9 - 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,

ttd

MOHAMAD SOLIKIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2025 NOMOR 46

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
u.b.
Kepala Bagian Hukum

DWI SUDIARTANTI, S.H.,M.H.
Pembina Tingkat I
NIP.19740120 199803 2 006

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri Tahun 2025-2029. Renstra ini akan menjadi acuan dalam penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kediri yang telah disusun. Rancangan Rencana Strategis memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan selama tahun 2025-2029. Dalam Rencana Strategis juga memuat sasaran kegiatan berupa indikator output kegiatan sebagai upaya untuk menyusun suatu perencanaan yang terpadu dan berorientasi hasil.

Penyusunan Rencana Strategis ini secara teknis berpedoman pada Permendagri nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Rencana Strategis Tahun 2025-2029 ini disusun dengan tujuan untuk menyesuaikan Visi, Misi,Tujuan, Sasaran, Strategi Bupati dan Wakil Bupati Kediri terpilih dengan program, kegiatan dan indikator-indikator sasaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri sehingga nantinya dapat untuk menyediakan pedoman bagi seluruh aktivitas penyelenggaraan upaya kesehatan di Kabupaten Kediri. Selain itu dokumen ini dapat dijadikan rujukan dalam menilai kinerja Dinas Kesehatan secara keseluruhan pada setiap akhir tahun.

Akhirnya, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh Bidang di Dinas Kesehatan yang telah bersama-sama menyusun Rencana Strategis ini, juga kepada BAPPEDA yang telah memverifikasi serta seluruh SKPD dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri yang telah memberikan masukan bagi penyempurnaan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2025-2029 ini. Mudah-mudahan dokumen ini benar-benar memberi manfaat dalam menyelenggarakan pembangunan kesehatan di Kabupaten Kediri.

Kediri, 2025
Kepala Dinas Kesehatan
KabupatenKediri

AHMAD KHOTIB

DAFTAR ISI

Halaman Judul i
Peraturan Bupati Kediri Nomor 46 Tahun 2025 ii
Kata Pengantar iii
Daftar Isi iv
Daftar Tabel vi
Daftar Gambar ix
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Dasar Hukum 8
1.3 Maksud dan Tujuan 11
1.4 Sistematika Penulisan 12
BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan, Dan Isu Strategis Dinas Kesehatan 15
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan 15
2.1.1 Sekretaris 15
2.1.2 Kepala Bidang Kesehatan masyarakat 17
2.1.3 Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 17
2.1.4 Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan 18
2.1.5 Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan 19
2.1.6 Kelompok Jabatan Fungsional 20
2.2 Sumber Daya Pada Dinas Kesehatan 21
2.2.1 Sumber Daya Manusia Kesehatan 21
2.2.2 Sarana Prasarana 36
2.2.3 Pendanaan Kesehatan 62
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 66
2.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah 181
2.5 Permasalahan dan Isu Strategis pada Dinas Kesehatan 183
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN 190
3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah..... 190
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029 194

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 199
4.1 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaannya 199
4.1.1 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota..... 200
4.1.2 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 201
4.1.3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan 203
4.1.4 Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman 204
4.1.5 Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan 205
BAB V PENUTUP 254

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi SDMK Kabupaten Kediri (Agregat Individu Berdasarkan STR) Tahun 2024	24
Tabel 2.2	Rekapitulasi Tenaga Medis (Regristrasi Perizinan Praktik) Pada Fasilitas Kesehatan Kabupaten Kediri Tahun 2024.	26
Tabel 2.3	Rekapitulasi Tenaga Keperawatan (Registrasi Perizinan Praktik) Pada Fasilitas Kesehatan Kabupaten Kediri Tahun 2024.....	27
Tabel 2.4	Rekapitulasi Tenaga Kebidanan (Registrasi Perizinan Praktik) Pada Fasilitas Kesehatan Kabupaten Kediri Tahun 2024	28
Tabel 2.5	Rekapitulasi Tenaga Kefarmasian (Registrasi Perizinan Praktik) Pada Fasilitas Kesehatan Kabupaten Kediri Tahun 2024.....	29
Tabel 2.6	Rekapitulasi Tenaga Kesehatan Masyarakat Pada Fasilitas Kesehatan Kabupaten Kediri Tahun 2024	30
Tabel 2.7	Rekapitulasi Tenaga Kesehatan Lingkungan (Registrasi Perizinan Praktik) Pada Fasilitas Kesehatan Kabupaten Kediri Tahun 2024.....	30
Tabel 2.8	Rekapitulasi Tenaga Gizi (Registrasi Perizinan Praktik) Pada Fasilitas Kesehatan Kabupaten Kediri Tahun 2024.	31
Tabel 2.9	Rekapitulasi Tenaga Keterapian Fisik (Registrasi Perizinan Praktik) Pada Fasilitas Kesehatan Kabupaten Kediri Tahun 2024.....	32
Tabel 2.10	Rekapitulasi Tenaga Keteknisian Medis (Registrasi Perizinan Praktik) Pada Fasilitas Kesehatan Kabupaten Kediri Tahun 2024.....	33
Tabel 2.11	Rekapitulasi Tenaga Keteknisian Biomedika (Registrasi Perizinan Praktik) Pada Fasilitas Kesehatan Kabupaten Kediri Tahun 2024.....	34
Tabel 2.12	Rekapitulasi Tenaga Kesehatan Tradisional (Registrasi Perizinan Praktik) Pada Fasilitas Kesehatan Kabupaten Kediri Tahun 2024.....	35
Tabel 2.13	Rekapitulasi Tenaga Pendukung & Asisten Tenaga Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Kabupaten Kediri Tahun 2024.....	36

Tabel 2.14	Sarana dan Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Kediri	37
Tabel 2.15	Aset Tanah Dinas Kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Kediri.....	38
Tabel 2.16	Aset Gedung dan Bangunan Dinas Kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Kediri.....	45
Tabel 2.17	Aset Peralatan dan Mesin Dinas Kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Kediri.....	61
Tabel 2.18	Pencapaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Tahun 2020-2022	67
Tabel 2.19	Pencapaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Tahun 2022-2024.....	68
Tabel 2.20	Status Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Kediri	69
Tabel 2.21	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri Tahun 2020	72
Tabel 2.22	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri Tahun 2021	80
Tabel 2.23	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri Tahun 2022-2024	93
Tabel 2.24	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri Tahun 2020	131
Tabel 2.25	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri Tahun 2021	138
Tabel 2.26	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan DinasKesehatan Kabupaten Kediri Tahun 2022-2024.....	152
Tabel 2.27	Tehnik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah	185
Tabel 3.1	Target Kinerja Sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri Tahun 2025-2029	194
Tabel 3.2	Penahapan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri Tahun 2025-2029.....	195
Tabel 3.3	Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Perangkat Daerah ..	196
Tabel 4.1	Rencana Program/ Kegiatan/ Sub-Kegiatan dan Pendanaan Dinas Kesehatan Tahun 2025-2030	206
Tabel 4.2	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Dinas Kesehatan Tahun 2025-2030.....	210
Tabel 4.3	Rencana Program/ Kegiatan/ Sub-Kegiatan dan Pendanaan Dinas Kesehatan Tahun 2025-2030	223

Tabel 4.4	Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	250
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan	253
Tabel 4.6	Indikator Kinerja Kunci Dinas Kesehatan.....	253

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Struktur Organisasi Dinas Kesehatan	21
Gambar 2.2	Rumpun SDMK	25
Gambar 2.3	Jumlah Tenaga Medis di Fasilitas Kesehatan Kabupaten Kediri Tahun 2024	26
Gambar 2.4	Jumlah Tenaga Keperawatan di Fasilitas Kesehatan Kabupaten Kediri Tahun 2024	28
Gambar 2.5	Jumlah Tenaga Kebidanan di Fasilitas Kesehatan Kabupaten Kediri Tahun 2024	28
Gambar 2.6	Jumlah Tenaga Kefarmasian di Fasilitas Kesehatan Kabupaten Kediri Tahun 2024	29
Gambar 2.7	Jumlah Tenaga Kesehatan Masyarakat di Fasilitas Kesehatan Kabupaten Kediri Tahun 2024	30
Gambar 2.8	Jumlah Tenaga Kesehatan Lingkungan di Fasilias Kesehatan Kabupaten Kediri Tahun 2024	31
Gambar 2.9	Jumlah Tenaga Gizi di Fasilitas Kesehatan Kabupaten Kediri Tahun 2024	31
Gambar 2.10	Jumlah Tenaga Keterapian Fisik di Fasilitas Kesehatan Kabupaten Kediri Tahun 2024	32
Gambar 2.11	Jumlah Tenaga Keteknisian Medis di Fasilitas Kesehatan Kabupaten Kediri Tahun 2024	33
Gambar 2.12	Jumlah Tenaga Keteknisian Teknik Biomedika Di Fasilitas Kesehatan Kabupaten Kediri Tahun 2024	34
Gambar 2.13	Jumlah Tenaga Kesehatan Tradisional di Fasilitas Kesehatan Kabupaten Kediri Tahun 2024	35
Gambar 2.14	Jumlah Tenaga Pendukung dan Asisten Tenaga Kesehatan Di Fasilitas Kesehatan Kabupaten Kediri Tahun 2024	36
Gambar 2.15	Pencapaian UHC	65
Gambar 2.16	Kepesertaan Jaminan Kesehatan Kabupaten Kediri Tahun 2024	66
Gambar 2.17	Capaian UHC (Universal Health Coverage)Kabupaten Kediri Tahun 2024	69

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Salah satu prioritas pembangunan nasional maupun regional adalah pembangunan kesehatan masyarakat. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, pembangunan kesehatan dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan yang diwujudkan dalam bentuk dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri (Dinas Kesehatan). Renstra Dinas Kesehatan merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Dinas Kesehatan, disusun sesuai tugas & fungsi Dinas Kesehatan serta berpedoman kepada RPJMD dan merupakan dokumen publik yang mempunyai peran strategis untuk menjabarkan secara operasional visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Kediri tahun 2025-2026.

Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2024 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) di tingkat nasional serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di tingkat daerah. Undang – Undang ini mengamanatkan penyusunan rencana pembangunan di berbagai tingkatan pemerintahan, termasuk Renstra PD sebagai bagian dari perencanaan pembangunan daerah. Pasal 1 angka 12 mendefinisikan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L), yang konsepnya serupa dengan Renstra PD di tingkat daerah. Hal ini mengimplikasikan pentingnya perencanaan strategis di unit organisasi pemerintah. Undang – Undang ini meletakkan fondasi bahwa setiap instansi pemerintah, termasuk Perangkat Daerah, perlu memiliki rencana strategis yang berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan nasional dan daerah

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 259 ayat (1) : menyatakan bahwa Kepala Daerah menyusun RPJPD dan RPJMD dengan berpedoman pada RPJP daerah

dan memperhatikan RPJM Nasional. Pasal 266 ayat (1) : mengamanatkan bahwa Satuan Perangkat Daerah (SKPD) atau sekarang disebut Perangkat Daerah (PD) menyusun Renstra SKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD dan bersifat indikatif. Penjelasan Pasal 266 (ayat), lebih lanjut menjelaskan bahwa Renstra SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman pada RPJMD. Undang-Undang ini secara eksplisit mewajibkan penyusunan Renstra PD sebagai turunan dari RPJMD, menegaskan kedudukannya dalam hierarki perencanaan pembangunan pembangunan daerah. Undang – Undang ini mengatur kewenangan daerah dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah, yang menjadi landasan bagi penyusunan renstra PD.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah : Pasal 6 ayat (1) menyebutkan bahwa RPJMD memuat antara lain strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas daerah, dan kerangka pendanaan pembangunan daerah; Pasal 7 ayat (1) mengatur bahwa Kepala PD menyusun Renstra PD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, berpedoman pada RPJMD, dan bersifat indikatif; Pasal 8 menjelaskan muatan Renstra PD yang meliputi visi, misi, tujuan sasaran strategis, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan. Peraturan Pemerintah ini memberikan panduan operasional mengenai penyusunan Renstra PD, termasuk jangka waktu dan substansinya, serta keterkaitannya yang erat dengan RPJMD.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Permendagri ini secara khusus mengatur tata cara penyusunan Renstra PD, termasuk tahapan, substansi, dan keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, menyajikan format dan sistematika penyusunan Renstra PD secara terstruktur, termasuk bab – bab yang harus ada dan isinya.

Undang – Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 – 2045, disebutkan bahwa pembangunan kesehatan dihadapkan pada transisi demografi yang diiringi dengan meningkatnya mobilitas penduduk, urbanisasi, transisi epidemiologi dan perilaku tidak sehat. Hal ini meningkatkan beban penyakit menular dan tidak menular, termasuk permasalahan kesehatan penduduk lanjut usia dan kesehatan jiwa. Akses pangan berkualitas yang tidak terjangkau dan pola konsumsi yang tidak sehat menyebabkan kekurangan gizi mikro dan gizi makro, serta kelebihan gizi. Sistem kesehatan harus mampu merespon berbagai perubahan, kemajuan teknologi, guncangan kesehatan dan risiko terjadinya pandemi, dan serta mampu menjawab ketimpangan akses terhadap pangan, lingkungan sehat, fasilitas pelayanan kesehatan, obat dan alat kesehatan, tenaga medis dan tenaga kesehatan, serta meningkatkan kapasitas pembiayaan kesehatan dengan mobilisasi dan inovasi pembiayaan kesehatan. (*hal 58*).

Pembangunan kesehatan pada hakikatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi. Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh kesinambungan antar upaya program dan sektor, serta kesinambungan dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan dalam periode sebelumnya. Oleh karena itu perlu disusun rencana pembangunan kesehatan yang berkesinambungan.

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025 – 2029 menyebutkan bahwa peningkatan gizi masyarakat diarahkan untuk meningkatkan derajat kesehatan dan gizi penduduk berbasis siklus hidup mulai dari 1.000 hari pertama kehidupan, anak, remaja, dewasa, dan lanjut usia dengan penekanan pada penguatan edukasi, peningkatan cakupan, kualitas, dan tata laksana layanan kesehatan dan intervensi perbaikan gizi sesuai standar, serta mencegah kematian dini dan meningkatkan harapan hidup sehat, melalui (a) penurunan kematian ibu dan anak,dengan seluruh persalinan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar serta memperkuat deteksi dini faktor risiko dan kapasitas pelayanan kegawatdaruratan ibu dan anak; (b) pencegahan dan penurunan stunting, dengan meningkatkan cakupan dan kualitas serta integrasi intervensi kunci yang berfokus pada penguatan factor determinan di masing-masing kelompok sasaran; (c) peningkatan pelayanan Kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, dan lansia serta keluarga berencana dan kesehatan reproduksi; serta (d) penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis (*Hal 137*).

Pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat diarahkan untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit dengan memperkuat pencegahan dan deteksi dini faktor risiko, tata laksana kasus, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, serta menerapkan pembangunan berwawasan kesehatan, melalui (a) penuntasan tuberkulosis; (b) eliminasi penyakit kusta dan *schistosomiasis*; (c) pengendalian penyakit menular lainnya terutama *Human Immunodeficiency Virus/ Aquired Immune Deficiency Sydrome* dan eliminasi penyakit tropis terabaikan lainnya seperti mataria; (d) pengendalian penyakit tidak menular dan peningkatan upaya kesehatan jiwa; (e) pembudayaan hidup sehat dan pengendalian faktor risiko penyakit tidak menular terutama pengendalian konsumsi produk berdampak negatif bagi kesehatan seperti produk hasil tembakau dan pangan tinggi garam, gula, dan lemak antara lain dengan penerapan dan peningkatan tarif cukai secara bertahap, inovasi pajak, pengetatan iklan, pencantuman peringatan bergambar bahaya merokok, dan penerapan label gizi, serta pemenuhan dan prasarana yang mendukung pola hidup sehat aktivitas fisik; serta (f) penyehatan lingkungan (*Hal 138*)

Penguatan kapasitas ketahanan kesehatan diarahkan untuk melindungi penduduk dari ancaman kedaruratan kesehatan, termasuk penyakit emerging dan re-emerging, dengan meningkatkan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi, dan merespons secara efektif dan cepat, melalui (a) penguatan surveilans, pengendalian kejadian luar biasa atau wabah dan penanganan bencana, dengan meningkatkan kapasitas laboratorium dan pos pintu masuk negara; (b) pemenuhan sediaan farmasi dan pengendalian resistensi antimikroba; serta (c) penguatan sistem pengawasan pangan dan sediaan farmasi termasuk memperkuat pengawasan siber dan farmakovigilans, serta penegakan hukum terhadap kejahatan obat dan makanan (*Hal 138*)

Penguatan pelayanan kesehatan dan tata kelola diarahkan untuk meningkatkan pemerataan akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang inklusif di seluruh wilayah hingga tingkat desa, afirmasi bagi daerah sulit akses, pemberdayaan masyarakat dan swasta dalam penyediaan layanan kesehatan, termasuk peran kader kesehatan, mendorong inovasi pelayanan kesehatan, serta meningkatkan kualitas pendanaan kesehatan yang berkelanjutan, melalui (a) investasi pelayanan kesehatan primer; (b) pembangunan rumah sakit lengkap berkualitas di kabupaten/ kota dan pengembangan pelayanan kesehatan bergerak dan daerah sulit akses termasuk pengembangan layanan berbasis kompetensi terutama kanker, jantung, strok, uronefrologi, dan kesehatan ibu dan anak; (c) produksi dan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan untuk pemenuhan dan pemerataan sesuai kebutuhan pembangunan kesehatan, antara lain melalui restrukturisasi kewenangan pengelolaan tenaga medis dan tenaga kesehatan; (d) penguatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan pendanaan kesehatan termasuk reaktivasi peserta non-aktif, penguatan kendali mutu dan biaya pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional, serta pengembangan skema pendanaan inovatif untuk kesehatan; serta (e) penguatan tata kelola, data, informasi, dan inovasi teknologi kesehatan, termasuk peningkatan kapasitas daerah dalam perencanaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pembangunan Kesehatan (*Hal 138*)

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional menetapkan Sistem Kesehatan Nasional sebagai

paradigma pemikiran dasar pengelolaan administrasi pembangunan kesehatan, yang harus diperkuat oleh kepemimpinan pada setiap level pemerintahan yang mampu menciptakan berbagai terobosan dan inovasi menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi pada tingkat lokal, nasional, regional dan global. Prinsip dasar pembangunan kesehatan terdiri dari : Perikemanusiaan yang adil dan beradab berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa; Pemberdayaan dan kemandirian bagi setiap orang dan masyarakat; Adil dan merata bagi setiap orang yang mempunyai hak yang sama; serta Pengutamaan upaya dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit dan pengutamaan manfaat yang merupakan bagian dari butir Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia.

Pedoman Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 adalah Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 . Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 , bahwa setiap satuan kerja perangkat daerah diwajibkan menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). Renstra PD dimaksud memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada RPJMD yang disertai dengan target indikator kinerja dan pendanaannya yang bersifat indikatif.

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan di atas, maka Dinas Kesehatan perlu menyusun dan menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Tahun 2025 - 2029 sebagai acuan penyusunan RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2025 - 2029. Renstra Dinas Kesehatan ini merupakan dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun yang akan datang dan dirumuskan secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2025 - 2029 merupakan satu bagian yang utuh dari

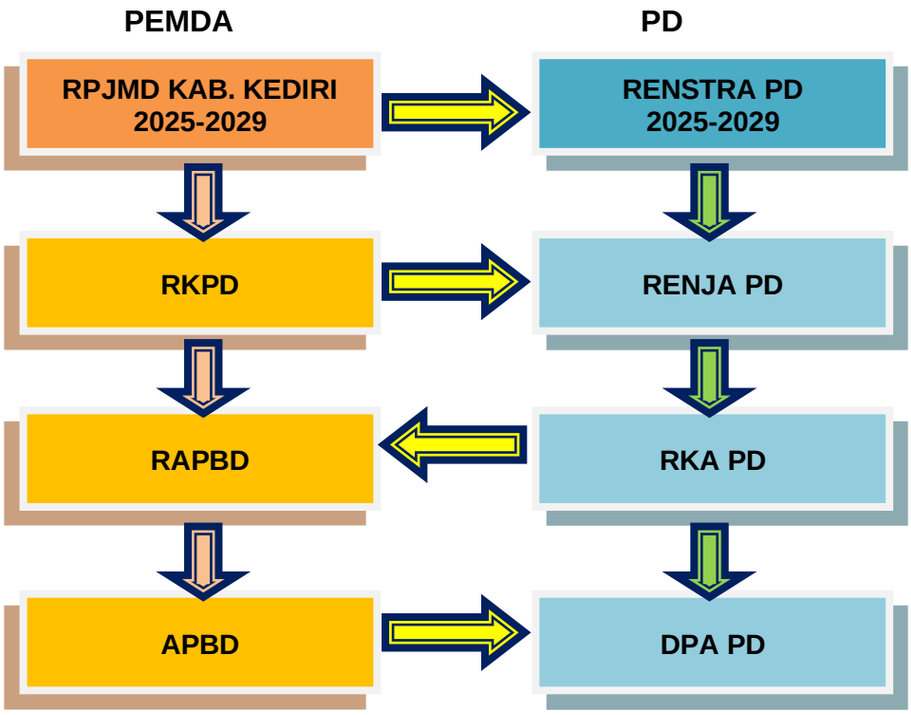
manajemen kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan yang telah tertuang dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Kediri. RPJMD tersebut akan dijadikan pedoman penyusunan Renstra Dinas Kesehatan. Setiap tahunnya, RPJMD akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Kediri, dan RKPD ini akan dijadikan acuan bagi Dinas Kesehatan untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan.

Dalam kaitan dengan UU No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dimana Undang Undang ini merupakan landasan hukum utama dalam pengelolaan keuangan negara, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan daerah yang berdampak pada penyusunan dan pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD).

Prinsip pengelolaan Keuangan Negara yang mendasari Penyusunan Renstra sesuai Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 mengamanatkan pengelolaan keuangan negara berdasarkan prinsip-prinsip tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, transparan, dan bertanggung jawab. Prinsip-prinsip ini harus diinternalisasikan dalam penyusunan Renstra PD. Tujuan, sasaran, program, dan kegiatan yang direncanakan harus mempertimbangkan efisiensi penggunaan sumber daya, efektivitas dalam mencapai hasil yang diinginkan, serta akuntabilitas dalam pelaksanaannya. Dalam Penyusunan Anggaran Daerah (APBD), Renstra Perangkat Daerah (PD) menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan anggaran (RKA) PD, yang kemudian menjadi bagian dari Rancangan APBD. Program dan kegiatan yang tertuang dalam Renstra PD akan diterjemahkan ke dalam anggaran yang dibutuhkan APBD. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan dalam APBD harus mendukung tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra PD. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 juga menekankan pentingnya akuntabilitas dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan negara. Renstra PD dengan indikator kinerja yang jelas menjadi alat untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Laporan kinerja yang dihasilkan akan menjadi bagian dari pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah

sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Gambaran tentang hubungan antara Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2025-2029 dengan dokumen perencanaan lainnya baik dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan maupun sistem keuangan ditunjukkan pada bagan dibawah ini,



1.2 DASAR HUKUM

Penyusunan Renstra Dinas Kesehatan tahun 2025 - 2029 didasarkan pada :

1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
9) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
10) Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
11) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
13) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun

2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
20) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
22) Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kediri Tahun 2023-2043;
23) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 – 2045;
24) Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kediri

Tahun 2025-2045;

25) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029;
26) Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2025-2029;
27) Peraturan Bupati Kediri Nomor 27 Tahun 2022 tentang Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan 2025 – 2029 adalah untuk memberikan arah dan panduan yang jelas bagi Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama periode waktu 5 tahun, serta mengoptimalkan kinerja penyelenggaraan pembangunan bidang kesehatan, untuk mewujudkan visi dan misi daerah dan target kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang telah ditetapkan peraturan daerah tentang RPJMD dengan tujuan utama untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Kediri secara optimal.

Berikut adalah rincian lebih lanjut mengenai maksud dan tujuan penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri :

Maksud :

1. Menyediakan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah : Menghasilkan sebuah dokumen prencanaan strategis yang komprehensif dan terukur untuk periode 5 (lima) ke depan, yang akan menjadi acuan utama dalam pengelolaan dan pelaksanaan program serta kegiatan di Dinas Kesehatan;
2. Menerjemahkan Kebijakan dan Prioritas : Mengartikulasikan dan menerjemahkan kebijakan pembangunan kesehatan nasional dan daerah (terutama RPJMD Kabupaten Kediri) ke dalam tujuan, sasaran, strategi, dan program kerja yang lebih operasional dan relevan dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan;
3. Mengintegrasikan Sumber Daya : Menjadi landasan untuk

mengalokasikan dan mengelola sumber daya (anggaran, tenaga kesehatan, fasilitas dan lain-lain) secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan kesehatan yang telah ditetapkan;

4. Membangun Komitmen dan Koordinasi : Menciptakan pemahaman dan komitmen yang sama di antara seluruh jajaran Dinas Kesehatan serta meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak terkait dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, maka Rencana Strategis Dinas Kesehatan disusun dengan tujuan sebagai berikut :

1. Menjabarkan strategi yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan untuk mewujudkan visi dan misi daerah serta target kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD.
2. Menjadi pedoman resmi bagi Dinas Kesehatan dan pihak terkait dalam upaya pembangunan di bidang kesehatan.
3. Menjadi acuan resmi untuk penilaian kinerja Dinas Kesehatan.

Dengan adanya Renstra yang jelas, Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri diharapkan dapat bekerja secara lebih terarah, terukur, dan akuntabel dalam mewujudkan masyarakat Kabupaten Kediri yang sehat dan produktif. Renstra ini juga menjadi alat monitoring dan evaluasi untuk mengukur keberhasilan pencapaian target – target kesehatan yang telah ditetapkan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri dilakukan oleh Tim Penyusun Renstra Dinas Kesehatan. Dalam proses penyusunan Renstra juga melibatkan seluruh bidang/bagian dalam rapat-rapat internal serta melibatkan Stakeholders dalam rapat koordinasi. Keterlibatan beberapa pihak baik internal maupun eksternal ini terutama untuk memberikan masukan-masukan dalam penyusunan Renstra.

Sistematika penulisan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri Tahun 2025 - 2029 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini paling sedikit menjelaskan :

1. Latar Belakang
2. Dasar hukum penyusunan
3. Maksud dan tujuan
4. Sistematika penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

1. Subbag Gambaran Pelayanan Perangkat daerah paling sedikit memuat :
   a. Tugas, fungsi dan struktur Perangkat Daerah
   b. Sumber daya Perangkat Daerah
   c. Kinerja pelayanan Perangkat Daerah (termasuk capaian SPM)
   d. Kelompok sasaran layanan

   Dapat ditambahkan beberapa sub bab lainnya sesuai kondisi daerah seperti :
   a. Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian layanan (apabila ada)
   b. Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Perangkat Daerah (apabila ada)
   c. Kerjasama daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah (apabila ada)
2. Sub bab Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah paling sedikit memuat :
   a. Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah
   b. Isu strategis

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab III memuat tentang:

1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029
3. Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029
4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab IV paling sedikit memuat :

1. Uraian Program
2. Uraian Kegiatan
3. Uraian SubKegiatan beserta kinerja, indicator, target, dan pagu indikatif
4. Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas Pembangunan daerah
5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 melalui iIndikator Kinerja Uatama (IKU) perangkat daerah
6. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Bidang Kesehatan.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS DINAS KESEHATAN

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di Bidang Kesehatan.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri mempunyai fungsi, sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang kesehatan;
2. Penyusunan perencanaan program dan anggaran dibidang kesehatan;
3. Pelaksanaan pelayanan dibidang kesehatan;
4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan pelayanan dibidang kesehatan;
5. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pelayanan dibidang kesehatan;
6. Pembinaan penyelenggaraan pelayanan dibidang kesehatan;
7. Pembinaan UOBK RSUD dan UPT;
8. Pelaksanaan administrasi dibidang pelayanan kesehatan;
9. Penyusunan dan perumusan laporan kinerja secara periodik kepada Bupati; dan
10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun uraian tugas dan fungsi dari setiap pejabat struktural dan fungsional adalah sebagai berikut:

2.1.1 Sekretaris

Mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam menyusun kebijakan, mengkoordinasikan bidang-bidang, membina,

melaksanakan dan mengendalikan administrasi umum, keuangan, sarana prasarana, ketenagaan, kerumahtanggaan dan kelembagaan.
Menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan rancangan kebijakan dinas;
b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas bidang-bidang, UOBK RSUD dan UPT;
c. Penyusunan program dan pelaporan pengelolaan sistem informasi, pemantauan dan evaluasi kegiatan dinas;
d. Pelaksanaan pembinaan, pengelolaan dan pengendalian administrasi umum, keuangan, sarana prasarana, ketenagaan, kerumahtanggaan, dan kelembagaan;
e. Pengoordinasian penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan bidang kesehatan;
f. Pengelolaan urusan rumah tangga, surat men5rurat, kearsipan, hubungan masyarakat, dokumentasi dan perpustakaan;
g. Pelaksanaan analisis jabatan dan beban kerja;
h. Pengoordinasian penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan dinas;
i. Penyusunan profil dinas; dan
j. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan dinas.

2.1.1.1 Kepala Sub Bagian Keuangan

Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi, penatausahaan, perbendaharaan, dan pembukuan keuangan, urusan akuntansi dan pelaporan keuangan, serta penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan.

2.1.1.2 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, pelaksanaan kearsipan dan ekspedisi, pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, pengelolaan aset, penyelenggaraan urusan perpustakaan, serta pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional, dan evaluasi kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara.

2.1.2 Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang kesehatan masyarakat.

Menyelenggarakan fungsi :

a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional dibidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan linglungan, kesehatan kerja dan olah raga;
b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi dibidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
d. Pemantauan evaluasi, dan pelaporan dibidang kesehatan keluarga, dan masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
e. Pelaksanaan administrasi dan tata usaha Bidang Kesehatan Masyarakat.

2.1.3 Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang Surveilans dan Imunisasi, Pencegahasn dan Pengendalian Penyakit Menular, dan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.

Menyelenggarakan Fungsi :

a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional dibidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, dan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, dan

pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;

c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi dibidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, dan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
d. Pemantauan evaluasi, dan pelaporan dibidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, dan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
e. Pelaksanaan administrasi dan tata usaha Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.

2.1.4 Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan

Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang Kesehatan Primer, Pelayanan Kesehatan Rujukan, termasuk peningkatan mutunya dan pelayanan kesehatan tradisional.

Menyelenggarakan Fungsi :

a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional dibidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan, termasuk peningkatan mutunya dan pelayanan kesehatan tradisional;
b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan, termasuk peningkatan mutunya dan pelayanan kesehatan tradisional;
c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi, dibidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan, termasuk peningkatan mutunya dan pelayanan kesehatan tradisional; dan
d. Pelaksanaan administrasi dan tata usaha Bidang Pelayanan Kesehatan
e. Pengoordinasian pelaksanaan tugas, UOBK RSUD dan UPT.

2.1.5 Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan

Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di Bidang Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Sumber Daya Manusia Kesehatan.

Menyelenggarakan Fungsi :

a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional dibidang kefarmasian, alat kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan;
b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang kefarmasian, alat kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan;
c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi dibidang kefarmasian, alat kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan;
d. Pemantauan evaluasi, dan pelaporan dibidang kefarmasian, alat kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan; dan
e. Pelaksanaan administrasi dan tata usaha Bidang Sumber Daya Kesehatan.

Penjabaran Fungsi eselon IV ditetapkan oleh Kepala Dinas dengan Keputusan Kepala Dinas.

Selain jabatan struktural yang sudah disebutkan diatas Dinas Kesehatan juga mempunyai UOBK RSUD dan UPT yang membantu dalam melaksanakan pembangunan dalam bidang kesehatan yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Kesehatan.

UOBK RSUD merupakan unit organisasi yang bersifat khusus memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian yang bertanggung jawab pada Dinas Kesehatan melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan, dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.

UPT merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas Kesehatan.

UOBK RSUD dipimpin oleh sesorang Direktur dan UPT dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Dalam melaksanakan tugasnya, UOBK RSUD dan UPT menyelenggarakan fungsi :

a. Pelaksanaan tugas Dinas sesuai dengan bidang operasionalnya:
b. Pelaksanaan urusan administrasi teknis operasional.

Jumlah, Nomenklatur, Susunan Organisasi dan Uraian Tugas dan Fungsi UOBK RSUD dan UPT ditetapkan dalam Peraturan Bupati tersendiri.

UOBK RSUD terdiri dari :

1. UOBK RSUD Kabupaten Kediri;
2. UOBK RSUD Simpang Lima Gumul;

UPTD Kesehatan terdiri dari :

1. UPT Laboratorium Kesehatan Daerah;
2. UPTD Puskesmas; dan
3. UPT Balai Pengelolaan Farmasi dan Alat Kesehatan.

2.1.6 Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

Setiap kelompok dipimpin oleh sesorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati. Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dipimpin oleh Sekretaris dan/atau Kepala Bidang dan dibantu oleh sub-koordinator sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama masing-masing.

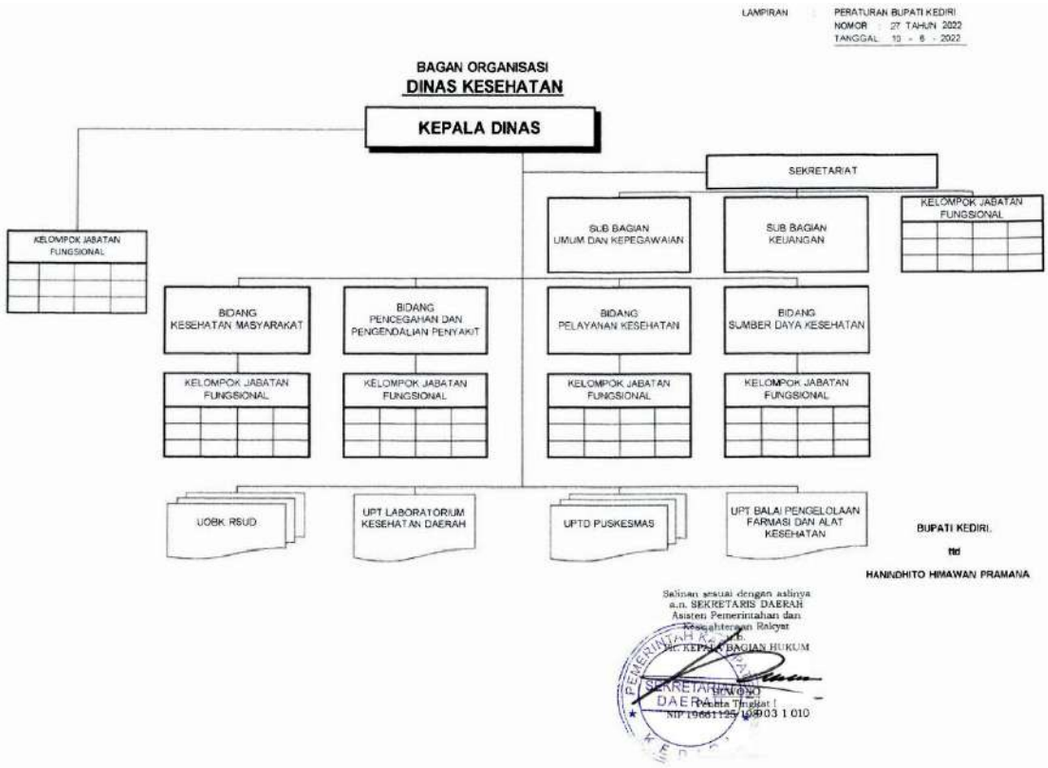
Sub-koordinator melaksanakan tugas membantu Sekretaris dan/atau Kepala Bidang dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok sub-substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi

Sub-koordinator ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.

Ketentuan mengenai pembagian tugas kelompok sub-substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Secara lengkap Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri, disajikan dalam Gambar 2.1. di bawah ini :

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Kesehatan



2.2 SUMBER DAYA PADA DINAS KESEHATAN

Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri dalam menjalankan tugas dan fungsinya didukung oleh berbagai sumber daya seperti sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta obat dan perbekalan kesehatan. Berikut ini akan disampaikan uraian terkait sumber daya-sumber daya sebagai input dalam pelaksanaan tugasnya.

2.2.1 Sumber Daya Manusia Kesehatan

Sumber daya manusia kesehatan merupakan seseorang yang bekerja secara aktif di bidang Kesehatan, baik yang memiliki pendidikan formal kesehatan maupun tidak, yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan dalam melakukan Upaya Kesehatan. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 Tentang Sistem Kesehatan Nasional disebutkan bahwa Sumber Daya Manusia Kesehatan adalah tenaga kesehatan dan

tenaga pendukung/ penunjang kesehatan yang terlibat dan bekerja serta mengabdikan dirinya dalam upaya kesehatan dan manajemen kesehatan. Menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, Sumber Daya Manusia Kesehatan dikelompokkan menjadi 3 jenis tenaga sebagai berikut:

1. Tenaga medis;
2. Tenaga Kesehatan;
3. Tenaga Pendukung atau Penunjang Kesehatan.

Tenaga Medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan dan keterampilan melalui Pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi yang memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan. Jenis tenaga medis terdiri dari dokter, dokter spesialis, dokter subspesialis, dokter gigi, dokter gigi spesialis dan dokter gigi subspesialis.

Sedangkan Tenaga Kesehatan merupakan setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan dan keterampilan melalui Pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan. Tenaga Kesehatan meliputi:

1. Tenaga psikologi klinis: psikolog klinis;
2. Tenaga perawat: perawat vokasi, ners dan ners spesialis;
3. Tenaga kebidanan: bidan vokasi dan bidan profesi;
4. Tenaga kefarmasian: vokasi farmasi, apoteker dan apoteker spesialis;
5. Tenaga kesehatan masyarakat: tenaga Kesehatan Masyarakat, epidemiolog kesehatan, tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku, pembimbing kesehatan kerja, tenaga administratif dan kebijakan Kesehatan;
6. Tenaga kesehatan lingkungan: tenaga sanitasi lingkungan dan entomolog Kesehatan;
7. Tenaga gizi: nutrisionis dan dietisen;
8. Tenaga keterapian fisik: fisioterapis, terapis okupasional, terapis wicara dan akupuntur;

9. Tenaga keteknisan medis: perekam medis dan informasi kesehatan, teknisi kardiovaskuler, teknisi pelayanan darah, optometris, teknisi gigi, penata anestesi, terapis gigi dan mulut serta audiologis;
10. Tenaga teknik biomedika: radiografer, elektromedis, ahli teknologi laboratorium medik, fisikawan medik, radioterapis dan ortotik prostetik;
11. Tenaga kesehatan tradisional: tenaga kesehatan tradisional ramuan dan tenaga kesehatan tradisional pengobat tradisional dan tenaga Kesehatan tradisional interkontinental. Pada Permenkes tersebut bahwa minimal tenaga kesehatan di Puskesmas terdiri dari dokter, dokter gigi, perawat, bidan, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, ahli teknologi laboratorium medik, tenaga gizi dan tenaga kefarmasian. Sedangkan tenaga penunjang kesehatan harus dapat mendukung kegiatan ketatausahaan, administrasi keuangan, sistem informasi, dan kegiatan operasional lainnya.

Pembangunan kesehatan masyarakat memerlukan upaya kesehatan, sumber daya kesehatan, dan pengelolaan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya berdasarkan prinsip kesejahteraan, pemerataan, nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan produktif, mengurangi kesenjangan, memperkuat pelayanan kesehatan bermutu, meningkatkan ketahanan kesehatan, menjamin kehidupan yang sehat, serta memajukan kesejahteraan seluruh warga negara dan daya saing bangsa bagi pencapaian tujuan pembangunan nasional. Upaya Kesehatan dilakukan dalam bentuk kegiatan dan/ atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/ atau paliatif oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/ atau masyarakat. Data dan Informasi dalam suatu organisasi merupakan unsur yang sangat penting selain sumber daya anggaran maupun sumber daya manusia. Dalam mendukung program pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan tentu saja diperlukan data dan informasi SDM Kesehatan yang dilaksanakan

melalui Sistem Informasi SDM Kesehatan sebagai sub sistem dari Sistem Informasi Kesehatan.

Ruang lingkup pendataan meliputi Semua sumber daya manusia pada fasilitas kesehatan yang mengabdikan diri didalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Kediri. Adapun fasilitas kesehatan tersebut meliputi Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik, Sarana Kefarmasian, Optik, Praktek Nakes Mandiri, Laboratorium Kesehatan, PSC 119, Pengobatan Tradisional dan Unit Transfusi Darah.

Profil SDM Kesehatan Kabupaten Kediri merupakan salah satu media yang dapat berperan dalam pemantauan dan evaluasi melalui berbagai data dan informasi sumber daya manusia kesehatan yang telah ditata melalui suatu sistem yang telah dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan RI melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan yaitu Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SI SDMK). Penyediaan data dan informasi dilaksanakan melalui serangkaian proses pengelolaan data yang bersumber dari berbagai unit kerja baik di fasilitas kesehatan Pemerintah maupun Swasta. Dan telah melalui berbagai validasi dan verifikasi baik di Kabupaten maupun tingkat Provinsi.

Kondisi terkini distribusi SDM Kesehatan berdasarkan Data yang telah diregistrasi pada SI SDMK Tahun 2024 jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan di Kabupaten Kediri sebanyak 6840 orang yang bekerja di berbagai fasilitas pelayanan kesehatan baik milik pemerintah maupun swasta dan perseorangan dengan rincian seperti tabel berikut ini:

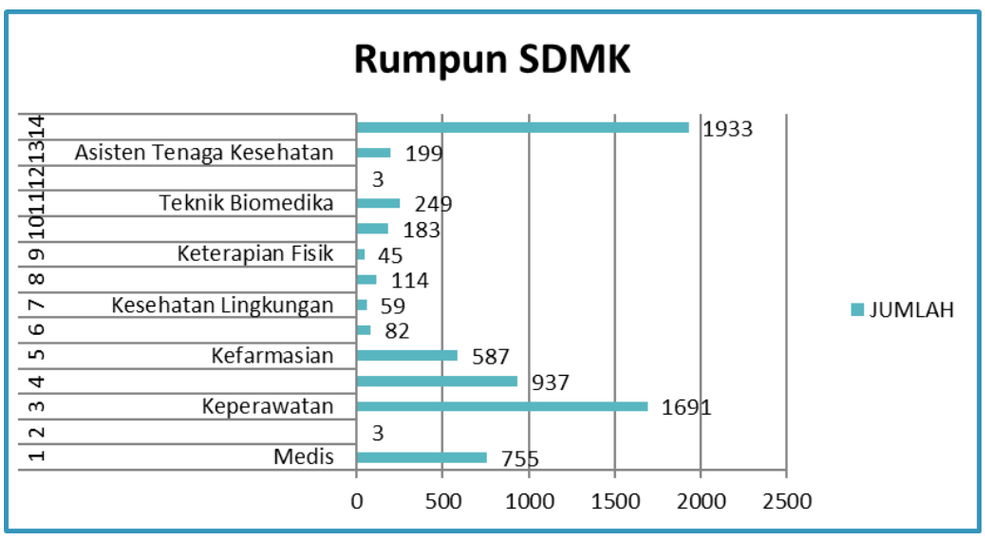
Tabel 2.1 Rekapitulasi SDMK Kabupaten Kediri (Agregat Individu Berdasarkan STR) Tahun 2024

No.	KELOMPOK SDMK	JUMLAH
1	Tenaga Medis	755
2	Tenaga Kesehatan	
	a. Psikologi Klinis	3
	b. Keperawatan	1691
	c. Kebidanan	937
	d. Kefarmasian	587

No.	KELOMPOK SDMK	JUMLAH
	e. Kesehatan Masyarakat	82
	f. Kesehatan Lingkungan	59
	g. Gizi	114
	h. Keterapian Fisik	45
	i. Keteknisian Medis	183
	j. Teknik Biomedika	249
	k. Kesehatan Tradisional	3
3	Tenaga Pendukung	
	a. Asisten Tenaga Kesehatan	199
	b. Tenaga Penunjang	1933
JUMLAH		**6840**

Sumber: SISDMK 31 Desember 2024

Gambar 2.2 Rumpun SDMK



2.2.1.1 Tenaga Medis

Tenaga medis wajib memperoleh jenis pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi terlebih dahulu sebelum ia melakukan praktik. Mereka memiliki wewenang untuk melakukan intervensi medis, baik secara teknis ataupun melakukan bedah tubuh manusia.

Jumlah ketersedian Tenaga Medis di Kabupaten Kediri meliputi jumlah tenaga dokter, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis yang bisa memberikan pelayanan di semua fasilitas kesehatan berdasarkan perijinan praktiknya digambarkan sebagai berikut:

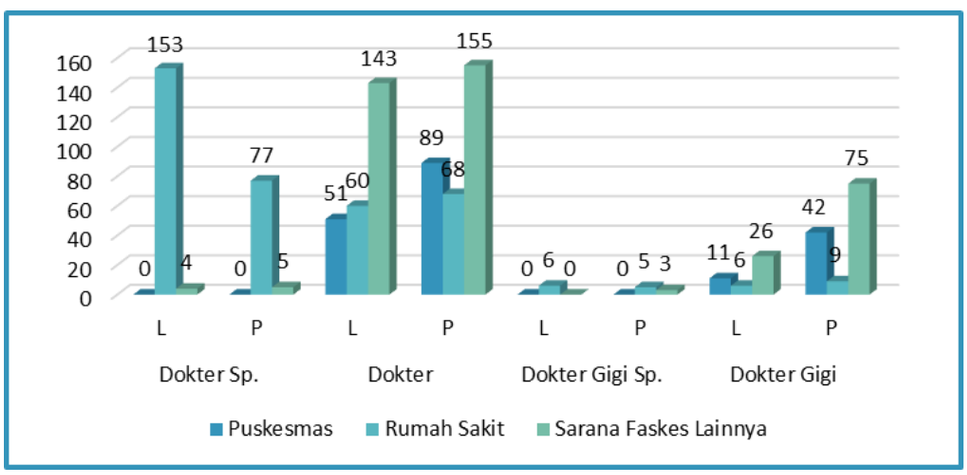
Tabel 2.2 Rekapitulasi Tenaga Medis (Regristrasi Perizinan Praktik) Pada Fasilitas Kesehatan Kabupaten Kediri Tahun 2024

No.	Jenis Fasilitas Kesehatan	Dokter Spesialis		Dokter		Dokter Gigi Spesialis		Dokter Gigi		Jumlah
		L	P	L	P	L	P	L	P	
1	Puskesmas	0	0	51	89	0	0	11	42	193
2	Rumah Sakit	153	77	60	68	6	5	6	9	384
3	Sarana Faskes Lainnya	4	5	143	155	0	3	26	75	411
Jumlah		157	82	254	312	6	8	43	126	988

Sumber: SISDMK 31 Desember 2024

Dari tabel diatas dijelaskan bahwa jumlah tenaga medis di Kabupaten Kediri yang bisa memberikan pelayanan pada berbagai fasilitas kesehatan berjumlah 988, akan tetapi secara agregat individu jumlah tenaga medis di Kabupaten Kediri pada Tahun 2024 berjumlah 755 orang. Perbedaan jumlah ini dimungkinkan karena satu orang tenaga medis bisa memberikan pelayanan lebih dari satu tempat sesuai perijinan praktiknya. Sedangkan untuk rasio jumlah dokter (dokter spesialis dan dokter umum) pada tahun 2024 adalah 35,80 orang per 100.000 penduduk, dan rasio dokter gigi (dokter gigi dan dokter gigi spesialis) adalah 8,76 orang per 100.000 penduduk.

Gambar 2.3 Jumlah Tenaga Medis di Fasilitas Kesehatan Kabupaten Kediri Tahun 2024



2.2.1.2 Tenaga Keperawatan

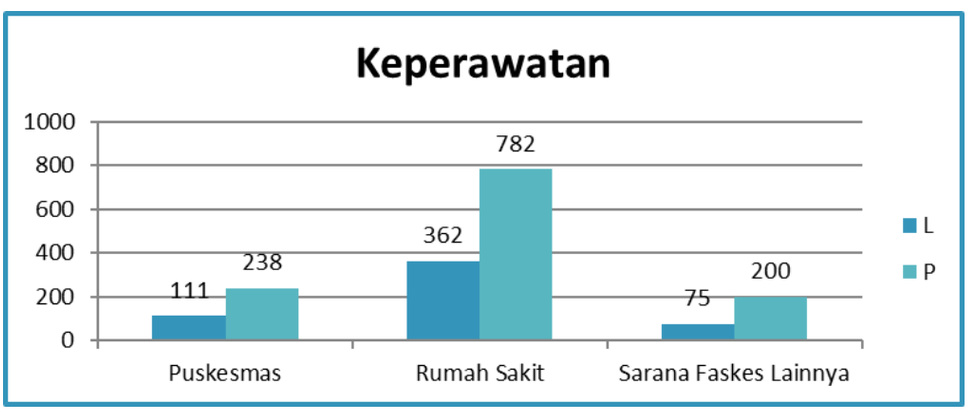
Tahun 2024 berdasarkan agregat individu perawat di Kabupaten Kediri berjumlah 1691 orang, akan tetapi perawat yang terdata pada fasilitas pelayanan kesehatan sejumlah 1768 orang. Hal ini dimungkinkan karena seorang perawat bisa berpraktek pada 2 (dua) fasilitas kesehatan sesuai perijinannya. Mereka terdiri dari 349 orang perawat ada di puskesmas, 1144 orang bekerja di Rumah Sakit dan 275 orang bekerja di fasilitas kesehatan lainnya. Sedangkan untuk rasio jumlah tenaga keperawatan pada tahun 2024 adalah 100,06 orang per 100.000 penduduk.

Tabel 2.3 Rekapitulasi Tenaga Keperawatan (Registrasi Perizinan Praktik) Pada Fasilitas Kesehatan Kabupaten Kediri Tahun 2024

No.	Unit Kerja Pelayanan	L	P	Jumlah
1	Puskesmas	111	238	349
2	Rumah Sakit	362	782	1144
3	Sarana Faskes Lainnya	75	200	275
Jumlah		548	1220	1768

Sumber: SISDMK 31 Desember 2024

Gambar 2.4 Jumlah Tenaga Keperawatan di Fasilitas Kesehatan Kabupaten Kediri Tahun 2024



2.2.1.3 Tenaga Kebidanan

Agregat individu Tenaga kebidanan di Kabupaten Kediri pada Tahun 2024 berjumlah 937 orang, sedangkan berdasarkan data pada fasilitas pelayanan kesehatan jumlah tenaga bidan sebanyak 991 orang. Perbedaan ini dimungkinkan karena seorang bidan bisa mempunyai

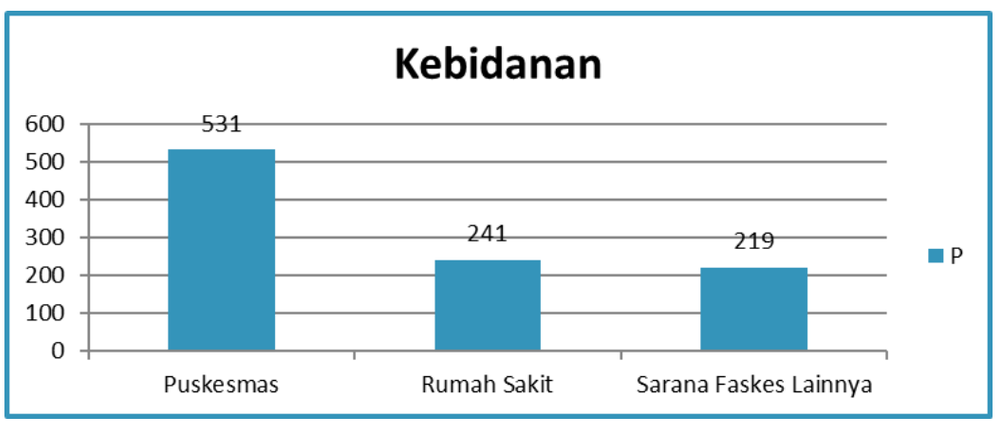
tempat praktik pada 2 (dua) fasilitas kesehatan sesuai perijinannya. Mereka terdiri dari 531 orang tenaga bidan ada di puskesmas, 241 orang bekerja di Rumah Sakit dan 219 orang bekerja di fasilitas kesehatan lainnya. Sedangkan untuk rasio jumlah tenaga kebidanan pada tahun 2024 adalah 55,45 orang per 100.000 penduduk.

Tabel 2.4 Rekapitulasi Tenaga Kebidanan (Registrasi Perizinan Praktik) Pada Fasilitas Kesehatan Kabupaten Kediri Tahun 2024

No.	Unit Kerja Pelayanan	P	Jumlah
1	Puskesmas	531	531
2	Rumah Sakit	241	241
3	Sarana Faskes Lainnya	219	219
Jumlah		991	991

Sumber: SISDMK 31 Desember 2024

Gambar 2.5 Jumlah Tenaga Kebidanan di Fasilitas Kesehatan Kabupaten Kediri Tahun 2024



2.2.1.4 Tenaga Kefarmasian

Tenaga kefarmasian yang bekerja dan memberikan pelayanan farmasi pada fasilitas pelayanan kesehatan di seluruh Kabupaten Kediri pada Tahun 2024 berjumlah 679 tenaga. Terdiri dari tenaga vokasi farmasi di Puskesmas sebanyak 49 orang, 126 di Rumah Sakit, dan 83 orang berada di fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. Disamping itu juga termasuk keberadaan apoteker di Puskesmas sebanyak 36 orang, di Rumah Sakit sebanyak 45 orang dan 340 orang ada di fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. Sedangkan secara agregat individu tenaga kefarmasian di seluruh Kabupaten Kediri berjumlah 587 orang yang terdiri

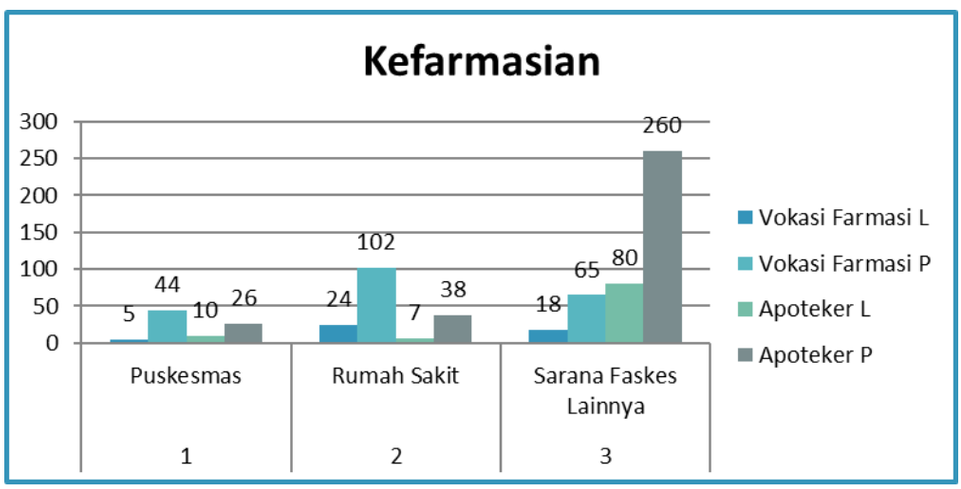
dari 244 tenaga vokasi kefarmasian dan 343 orang apoteker. Rasio jumlah tenaga kefarmasian pada tahun 2024 adalah 34,7 orang per 100.000 penduduk.

Tabel 2.5 Rekapitulasi Tenaga Kefarmasian (Registrasi Perizinan Praktik) Pada Fasilitas Kesehatan Kabupaten Kediri Tahun 2024

No.	Unit Kerja Pelayanan	Vokasi Farmasi		Apoteker		Jumlah
		L	P	L	P	
1	Puskesmas	5	44	10	26	85
2	Rumah Sakit	24	102	7	38	171
3	Sarana Faskes Lainnya	18	65	80	260	423
Jumlah		47	211	97	324	679

Sumber: SISDMK 31 Desember 2024

Gambar 2.6 Jumlah Tenaga Kefarmasian di Fasilitas Kesehatan Kabupaten Kediri Tahun 2024



2.2.1.5 Tenaga Kesehatan Masyarakat

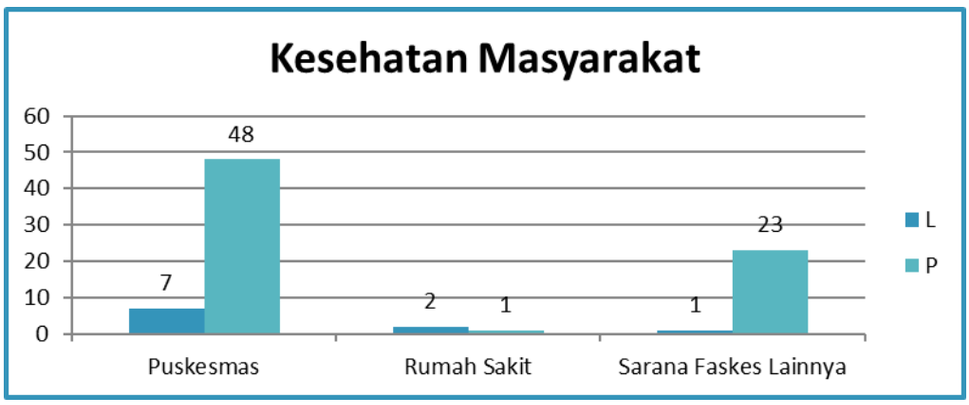
Pada Tahun 2024 jumlah tenaga kesehatan masyarakat berjumlah 82 orang dengan rincian di Puskesmas sebanyak 55 orang, 3 orang di Rumah Sakit dan 24 orang bekerja di fasilitas kesehatan lainnya. Sedangkan untuk rasio jumlah tenaga kesehatan masyarakat pada tahun 2024 adalah 4,85 orang per 100.000 penduduk.

Tabel 2.6 Rekapitulasi Tenaga Kesehatan Masyarakat Pada Fasilitas Kesehatan Kabupaten Kediri Tahun 2024

No.	Unit Kerja Pelayanan	L	P	Jumlah
1	Puskesmas	7	48	55
2	Rumah Sakit	2	1	3
3	Sarana Faskes Lainnya	1	23	24
Jumlah		10	72	82

Sumber: SISDMK 31 Desember 2024

Gambar 2.7 Jumlah Tenaga Kesehatan Masyarakat di Fasilitas Kesehatan Kabupaten Kediri Tahun 2024



2.2.1.6 Tenaga Kesehatan Lingkungan

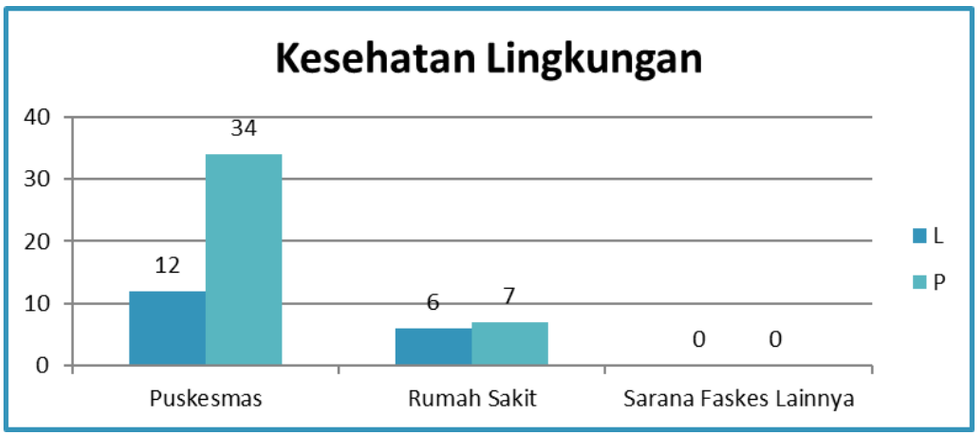
Pada Tahun 2024 jumlah tenaga kesehatan lingkungan berjumlah 59 orang dengan rincian di Puskesmas sebanyak 46 orang, 13 orang di Rumah Sakit dan tidak ada yang bekerja di fasilitas kesehatan lainnya. Sedangkan untuk rasio jumlah tenaga kesehatan lingkungan pada tahun 2024 adalah 3,49 orang per 100.000 penduduk.

Tabel 2.7 Rekapitulasi Tenaga Kesehatan Lingkungan (Registrasi Perizinan Praktik) Pada Fasilitas Kesehatan Kabupaten Kediri Tahun 2024

No.	Unit Kerja Pelayanan	L	P	Jumlah
1	Puskesmas	12	34	46
2	Rumah Sakit	6	7	13
3	Sarana Faskes Lainnya	0	0	0
Jumlah		18	41	59

Sumber: SISDMK 31 Desember 2024

Gambar 2.8 Jumlah Tenaga Kesehatan Lingkungan di Fasilias Kesehatan Kabupaten Kediri Tahun 2024



2.2.1.7 Tenaga Gizi

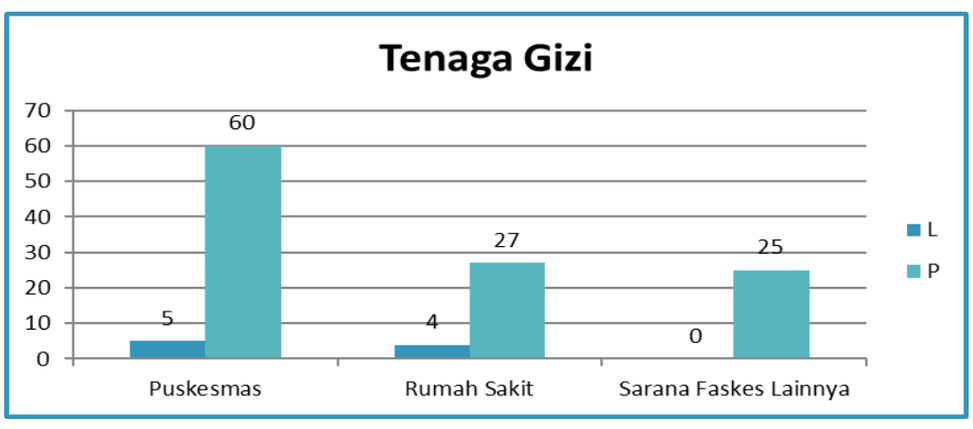
Pada Tahun 2024 jumlah tenaga gizi yang berpraktik pada fasilitas kesehatan di Kabupaten Kediri berjumlah 121 orang dengan rincian di Puskesmas sebanyak 65 orang, 31 orang di Rumah Sakit dan 25 orang yang bekerja di fasilitas kesehatan lainnya. Sedangkan secara agregat individu tenaga gizi di seluruh Kabupaten Kediri berjumlah 114 orang dan rasio jumlah tenaga gizi pada tahun 2024 adalah 6,75 orang per 100.000 penduduk.

Tabel 2.8 Rekapitulasi Tenaga Gizi (Registrasi Perizinan Praktik) Pada Fasilitas Kesehatan Kabupaten Kediri Tahun 2024

No.	Unit Kerja Pelayanan	L	P	Jumlah
1	Puskesmas	5	60	65
2	Rumah Sakit	4	27	31
3	Sarana Faskes Lainnya	0	25	25
Jumlah		9	112	121

Sumber: SISDMK 31 Desember 2024

Gambar 2.9 Jumlah Tenaga Gizi di Fasilitas Kesehatan Kabupaten Kediri Tahun 2024



2.2.1.8 Tenaga Keterapian Fisik

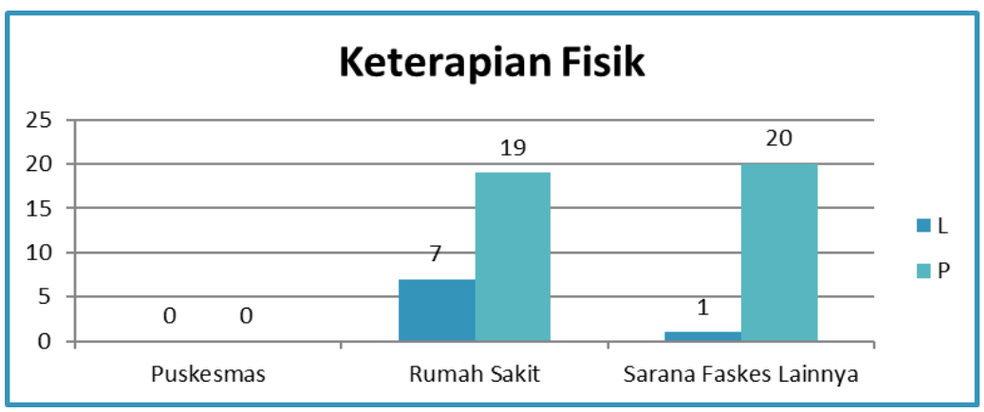
Rumpun tenaga keterapian fisik meliputi tenaga fisioterapis, terapis okupasional, terapis wicara dan akupuntur. Pada Tahun 2024 jumlah tenaga keterapian fisik yang berpraktik pada fasilitas kesehatan di Kabupaten Kediri berjumlah 47 orang dengan rincian di Rumah Sakit sebanyak 26 orang dan 21 orang yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. Untuk rasio jumlah tenaga keterapian fisik pada tahun 2024 adalah 2,66 orang per 100.000 penduduk.

Tabel 2.9 Rekapitulasi Tenaga Keterapian Fisik (Registrasi Perizinan Praktik) Pada Fasilitas Kesehatan Kabupaten Kediri Tahun 2024

No.	Unit Kerja Pelayanan	L	P	Jumlah
1	Puskesmas	0	0	0
2	Rumah Sakit	7	19	26
3	Sarana Faskes Lainnya	1	20	21
Jumlah		8	39	47

Sumber: SISDMK 31 Desember 2024

Gambar 2.10 Jumlah Tenaga Keterapian Fisik di Fasilitas Kesehatan Kabupaten Kediri Tahun 2024



2.2.1.9 Tenaga Keteknisian Medis

Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam rumpun keteknisian medis adalah perekam medis dan informasi kesehatan, teknik kardiovaskuler, teknisi pelayanan darah, optometris, teknisi gigi, penata anestesi, terapis gigi dan mulut serta audiologis. Berdasarkan jumlah pelayanan tenaga keteknisian medis di Kabupaten Kediri pada Tahun

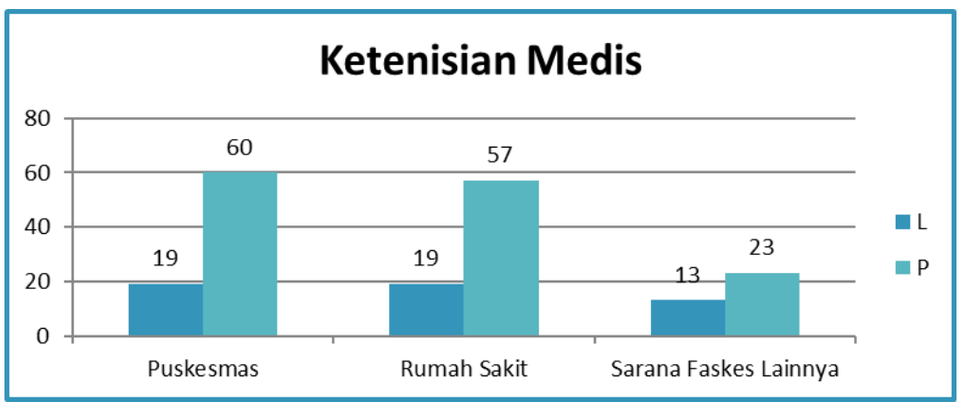
2024 sebanyak 191 yang meliputi 79 orang yang bekerja di Puskesmas, 76 orang yang bekerja di Rumah Sakit dan 36 orang bekerja di sarana fasilitas kesehatan lainnya. Sedangkan agregat individu tenaga keteknisian medis di seluruh Kabupaten Kediri berjumlah 183 orang dan rasio tenaga keteknisian medis pada tahun 2024 adalah 10,83 orang per 100.000 penduduk.

Tabel 2.10 Rekapitulasi Tenaga Keteknisian Medis (Registrasi Perizinan Praktik) Pada Fasilitas Kesehatan Kabupaten Kediri Tahun 2024

No.	Unit Kerja Pelayanan	L	P	Jumlah
1	Puskesmas	19	60	79
2	Rumah Sakit	19	57	76
3	Sarana Faskes Lainnya	13	23	36
Jumlah		51	140	191

Sumber: SISDMK 31 Desember 2024

Gambar 2.11 Jumlah Tenaga Keteknisian Medis di Fasilitas Kesehatan Kabupaten Kediri Tahun 2024



2.2.1.10 Tenaga Teknik Biomedika

Rumpun tenaga teknik biomedika terdiri dari ahli teknologi laboratorium medik, radiografer, elektromedis, fisikawan medik, radioterapis dan ortotik prostetik. Pada Tahun 2024 jumlah tenaga biomedika yang berpraktik di fasilitas kesehatan di Kabupaten Kediri berjumlah 259 orang dengan rincian di Puskesmas sebanyak 69 orang, 137 orang di Rumah Sakit dan 53 orang yang bekerja di fasilitas kesehatan lainnya. Sedangkan secara agregat individu tenaga teknik biomedika di seluruh Kabupaten Kediri berjumlah 249 orang dan rasio

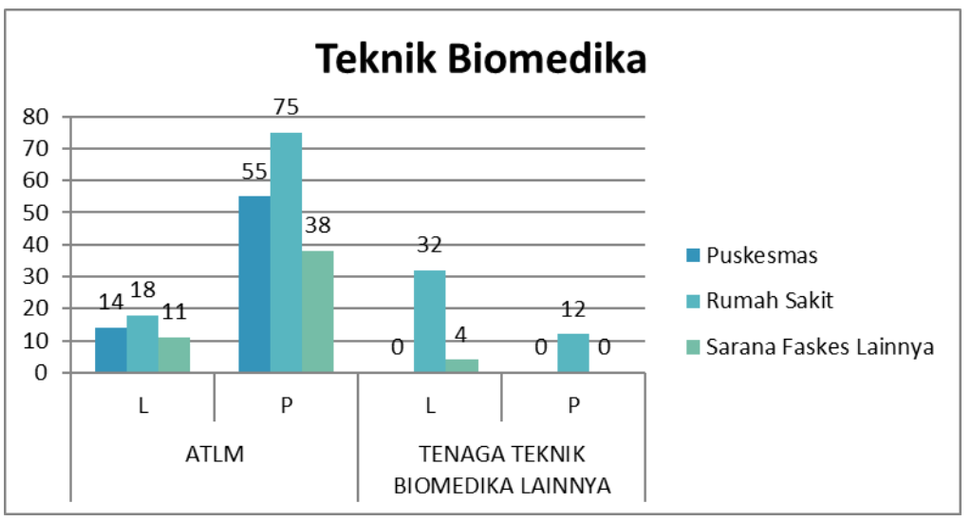
jumlah tenaga teknik biomedika pada tahun 2024 adalah 14,73 orang per 100.000 penduduk.

Tabel 2.11 Rekapitulasi Tenaga Keteknisian Biomedika (Registrasi Perizinan Praktik) Pada Fasilitas Kesehatan Kabupaten Kediri Tahun 2024

No.	Unit Kerja Pelayanan	ATLM		Tenaga Teknik Biomedika Lainnya		Jumlah
		L	P	L	P	
1	Puskesmas	14	55	0	0	69
2	Rumah Sakit	18	75	32	12	137
3	Sarana Faskes Lainnya	11	38	4	0	53
Jumlah		43	168	36	12	259

Sumber: SISDMK 31 Desember 2024

Gambar 2.12 Jumlah Tenaga Keteknisian Teknik Biomedika Di Fasilitas Kesehatan Kabupaten Kediri Tahun 2024



2.2.1.11 Tenaga Kesehatan Tradisional

Tenaga kesehatan tradisional (Nakestrad) adalah orang yang berdedikasi di bidang kesehatan tradisional dan memiliki pengetahuan serta keterampilan yang diperoleh melalui pendidikan atau pengalaman dalam bidang tersebut. Untuk jenis tertentu, Nakestrad memiliki kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan tradisional. Nakestrad bisa meliputi tenaga kesehatan tradisional jamu (yang menggunakan

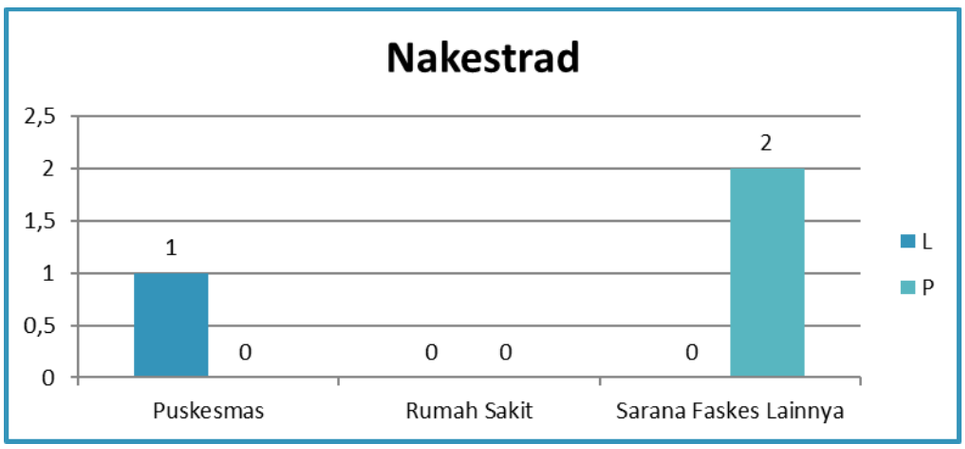
ramuan herbal), atau Nakestrad interkontinental (yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dari berbagai budaya). Berdasarkan Data SISDMK di Kabupaten Kediri pada Tahun 2024 terdapat 3 orang Nakestrad. Mereka berpaktik sejumlah 1 orang di Puskesmas dan 2 orang di fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.

Tabel 2.12 Rekapitulasi Tenaga Kesehatan Tradisional (Registrasi Perizinan Praktik) Pada Fasilitas Kesehatan Kabupaten Kediri Tahun 2024

No.	Unit Kerja Pelayanan	L	P	Jumlah
1	Puskesmas	1	0	1
2	Rumah Sakit	0	0	0
3	Sarana Faskes Lainnya	0	2	2
Jumlah		1	2	3

Sumber: SISDMK 31 Desember 2024

Gambar 2.13 Jumlah Tenaga Kesehatan Tradisional di Fasilitas Kesehatan Kabupaten Kediri Tahun 2024



2.2.1.12 Tenaga Pendukung Atau Penunjang dan Asisten Tenaga Kesehatan

Yang dimaksud disini adalah semua orang yang bekerja pada fasilitas pelayanan kesehatan selain tenaga medis dan tenaga kesehatan. Mereka terdiri dari pejabat struktural, tenaga pendidik, tenaga dukungan manajemen. Selain itu juga terdapat asisten tenaga kesehatan yang bekerja di Puskesmas, Rumah Sakit dan fasilitas kesehatan lainnya. Jumlah tenaga pendukung/ penunjang dan asisten tenaga kesehatan di

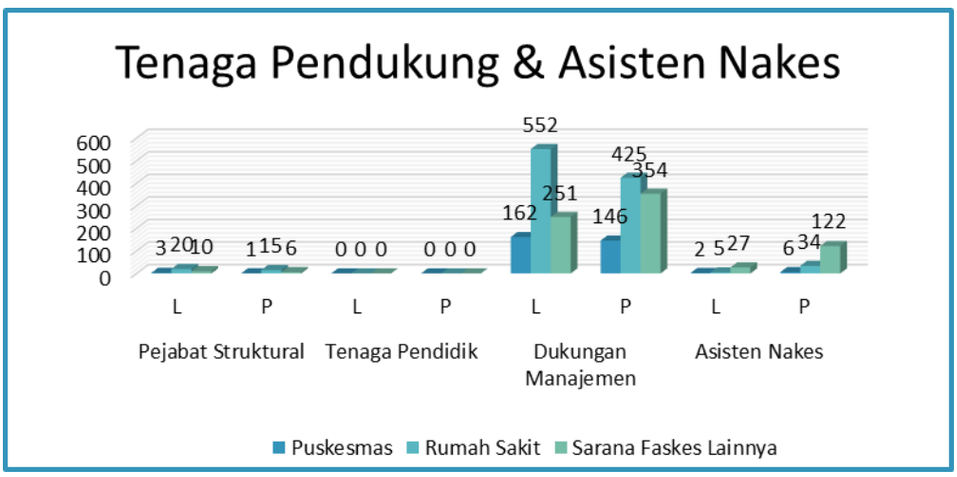
Kabupaten Kediri pada Tahun 2024 berjumlah 2141 orang. Terdiri dari 320 orang bekerja di Puskesmas, 1051 orang bekerja di Rumah Sakit dan 770 bekerja di fasilitas kesehatan lainnya.

Tabel 2.13 Rekapitulasi Tenaga Pendukung & Asisten Tenaga Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Kabupaten Kediri Tahun 2024

No.	Unit Kerja Pelayanan	Pejabat Struktural		Tenaga Pendidik		Dukungan Manajemen		Asisten Nakes		Jumlah
		L	P	L	P	L	P	L	P	
1	Puskesmas	3	1	0	0	162	146	2	6	320
2	Rumah Sakit	20	15	0	0	552	425	5	34	1051
3	Sarana Faskes Lainnya	10	6	0	0	251	354	27	122	770
Jumlah		33	22	0	0	965	925	34	162	2141

Sumber: SISDMK 31 Desember 2024

Gambar 2.14 Jumlah Tenaga Pendukung dan Asisten Tenaga Kesehatan Di Fasilitas Kesehatan Kabupaten Kediri Tahun 2024



2.2.2 Sarana Prasarana

Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri terletak di Jl. Pamenang No 1 C Katang Kabupaten Kediri, merupakan aset Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri. Sarana kesehatan lainnya di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri yaitu gedung 37 Puskesmas, 1 Laboratorium Kesehatan Daerah, dan 1 IFK (Instalasi Farmasi Kabupaten). Secara rinci bisa dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.14 Sarana dan Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Kediri

No.	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah	Keterangan Kepenilikan
Puskesmas dan Jaringannya			
1	Puskesmas, dengan rincian: a. Puskesmas Rawat Inap b. Puskesmas Non Perawatan	37 8 29	PemKab
2	Puskesmas Pembantu	81	Pemkab
3	Puskesmas Keliling	48	Pemkab
Sarana Pelayanan Lain			
4.	Klinik Pratama	56	TNI/Polri (2), Swasta (54)
5	Klinik Utama	5	Swasta
6	Tempat Praktik Mandiri Dokter	187	Swasta
7	Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi	102	Swasta
8	Tempat Praktik Mandiri Dokter Spesialis	34	Swasta
9	Tempat Praktik Mandiri Bidan	416	Swasta
10	Tempat Praktik Mandiri Perawat	70	Swasta
11	Panti Sehat	20	Swasta
12	Unit Transfusi Darah	2	Pemkab
13	Laboratorium Kesehatan	2	Pemkab (1), Swasta (1)
Rumah Sakit			
14	Rumah Sakit Umum	11	Pemkab (2), Swasta (2)
15	Rumah Sakit Khusus	2	Swasta (2)
Sarana Produksi dan Distrubusi Kefarmasian			
16	Usaha Kecil/Mikro Obat Tradisional (UKOT/UMOT)	1	Swasta
17	Produksi Alat Kesehatan	2	Swasta
18	Produksi Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)	2	Swasta
19	Industri Kosmetika	1	Swasta
20	Pedagang Besar Farmasi (PBF)	5	Swasta
21	Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	2	Swasta
22	Apotek	275	Pemkab (1), Swasta 4
23	Toko Obat	5	Swasta
24	Toko Alkes	1	Swasta

Sumber: Profil Kesehatan Tahun 2024

Tabel 2.15 Aset Tanah Dinas Kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Kediri

NO	NAMA BARANG	LOKASI	LUAS (m^2)	HARGA SATUAN PEROLEHAN
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Dinas Kesehatan	450,00	450.000.000,00
2	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Dinas Kesehatan	1.000,00	3.000.000,00
3	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Dinas Kesehatan	840,00	40.000.000,00
4	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Dinas Kesehatan	1.070,00	25.000.000,00
5	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	Dinas Kesehatan	3.880,00	340.000.000,00
6	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	UPTD Puskesmas Adan-adan	710,00	14.200.000,00
7	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	UPTD Puskesmas Adan-adan	1.875,00	35.000.000,00
8	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	UPTD Puskesmas Adan-adan	740,00	14.480.000,00
9	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	UPTD Puskesmas Adan-adan	499,00	15.000.000,00
10	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	UPTD Puskesmas Badas	1.380,00	95.000.000,00
11	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	UPTD Puskesmas Badas	624,00	33.900.000,00
12	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	UPTD Puskesmas Badas	420,00	17.500.000,00
13	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	UPTD Puskesmas Bangsongan	333,00	13.823.000,00
14	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	UPTD Puskesmas Bangsongan	248,00	8.463.000,00
15	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	UPTD Puskesmas Bangsongan	2.090,00	125.500.000,00
16	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	UPTD Puskesmas Bendo	1.067,00	67.000.000,00
17	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	UPTD Puskesmas Bendo	295,00	4.000.000,00
18	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	UPTD Puskesmas Blabak	1.210,00	2.980.000,00
19	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	UPTD Puskesmas Blabak	1.670,00	7.000.000,00
20	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	UPTD Puskesmas Blabak	430,00	1.680.000,00
21	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	UPTD Puskesmas Blabak	488,00	1.000.000,00
22	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	UPTD Puskesmas Blabak	470,00	15.000.000,00

NO	NAMA BARANG	LOKASI	LUAS (m^2)	HARGA SATUAN PEROLEHAN
23	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	UPTD Puskesmas Gampeng	245,00	3.075.000,00
24	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	UPTD Puskesmas Gampeng	450,00	5.785.500,00
25	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	UPTD Puskesmas Gampeng	373,00	4.669.000,00
26	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	UPTD Puskesmas Gampeng	214,00	4.392.500,00
27	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	UPTD Puskesmas Grogol	865,00	77.700.000,00
28	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	UPTD Puskesmas Grogol	210,00	25.200.000,00
29	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	UPTD Puskesmas Grogol	1.825,00	116.500.000,00
30	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	UPTD Puskesmas Grogol	2.960,00	183.500.000,00
31	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	UPTD Puskesmas Grogol	160,00	18.600.000,00
32	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	UPTD Puskesmas Grogol	113,00	16.900.000,00
33	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	UPTD Puskesmas Gurah	735,00	117.600.000,00
34	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	UPTD Puskesmas Gurah	285,00	7.025.000,00
35	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	UPTD Puskesmas Gurah	1.620,00	216.000.000,00
36	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	UPTD Puskesmas Gurah	885,00	6.600.000,00
37	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	UPTD Puskesmas Kandangan	308,00	68.141.000,00
38	Tanah Bangunan Peristirahatan/Bungalaow/Cottage	UPTD Puskesmas Kandangan	800,00	94.300.000,00
39	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	UPTD Puskesmas Kandangan	1.695,00	200.000.000,00
40	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	UPTD Puskesmas Kandangan	378,00	125.000.000,00
41	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	UPTD Puskesmas Kandangan	288,00	125.000.000,00
42	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	UPTD Puskesmas Kandangan	678,00	150.000.000,00
43	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	UPTD Puskesmas Kandangan	492,00	150.000.000,00
44	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	UPTD Puskesmas Kandangan	522,00	160.000.000,00
45	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	UPTD Puskesmas Kayen Kidul	385,00	30.000.000,00

NO	NAMA BARANG	LOKASI	LUAS (m^2)	HARGA SATUAN PEROLEHAN
46	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	UPTD Puskesmas Kayen Kidul	360,00	15.000.000,00
47	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	UPTD Puskesmas Kayen Kidul	2.800,00	458.072.000,00
48	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	UPTD Puskesmas Kayen Kidul	3.509,00	375.000.000,00
49	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	UPTD Puskesmas Keling	206,00	12.500.000,00
50	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	UPTD Puskesmas Keling	1.540,00	100.000.000,00
51	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	UPTD Puskesmas Keling	185,00	18.000.000,00
52	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	UPTD Puskesmas Kepung	331,00	18.000.000,00
53	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	UPTD Puskesmas Kepung	865,00	74.200.000,00
54	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	UPTD Puskesmas Kepung	435,00	50.000.000,00
55	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	UPTD Puskesmas Kepung	338,00	32.800.000,00
56	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	UPTD Puskesmas Kras	1.340,00	134.000.000,00
57	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	UPTD Puskesmas Kras	830,00	41.500.000,00
58	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	UPTD Puskesmas Kunjang	1.595,00	113.650.000,00
59	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	UPTD Puskesmas Kunjang	350,00	16.514.000,00
60	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	UPTD Puskesmas Kunjang	422,00	21.371.000,00
61	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	UPTD Puskesmas Kunjang	429,00	17.142.000,00
62	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	UPTD Puskesmas Mojo	1.940,00	65.000.000,00
63	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	UPTD Puskesmas Mojo	150,00	45.000.000,00
64	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	UPTD Puskesmas Mojo	135,00	35.000.000,00
65	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	UPTD Puskesmas Mojo	420,00	45.000.000,00
66	Tanah Bangunan Poliklinik	UPTD Puskesmas Mojo	150,00	45.000.000,00
67	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	UPTD Puskesmas Ngadi	239,00	3.780.000,00
68	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	UPTD Puskesmas Ngadi	240,00	500.000,00

NO	NAMA BARANG	LOKASI	LUAS (m^2)	HARGA SATUAN PEROLEHAN
69	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	UPTD Puskesmas Ngadi	266,00	900.000,00
70	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	UPTD Puskesmas Ngadi	742,00	4.160.000,00
71	lapangan lain lainnya	UPTD Puskesmas Ngadi	3.195,00	1.091.823.000,00
72	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	UPTD Puskesmas Ngadiluwih	400,00	66.000.000,00
73	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	UPTD Puskesmas Ngadiluwih	870,00	186.000.000,00
74	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	UPTD Puskesmas Ngadiluwih	1.245,00	267.000.000,00
75	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	UPTD Puskesmas Ngadiluwih	728,00	17.800.000,00
76	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	UPTD Puskesmas Ngadiluwih	7.625,00	2.671.000.000,00
77	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	UPTD Puskesmas Ngadiluwih	1.085,00	36.000.000,00
78	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	UPTD Puskesmas Ngancar	545,00	25.000.000,00
79	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	UPTD Puskesmas Ngancar	2.560,00	35.000.000,00
80	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	UPTD Puskesmas Ngancar	278,00	14.000.000,00
81	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	UPTD Puskesmas Ngancar	775,00	25.000.000,00
82	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	UPTD Puskesmas Ngancar	600,00	20.150.000,00
83	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	UPTD Puskesmas Ngasem	900,00	56.000.000,00
84	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	UPTD Puskesmas Ngasem	234,00	5.370.000,00
85	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	UPTD Puskesmas Ngasem	370,00	10.800.000,00
86	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	UPTD Puskesmas Ngasem	392,00	11.860.000,00
87	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	UPTD Puskesmas Ngasem	146,00	6.570.000,00
88	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	UPTD Puskesmas Pagu	769,00	46.685.000,00
89	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	UPTD Puskesmas Pagu	939,00	42.315.000,00
90	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	UPTD Puskesmas Pagu	243,00	12.751.000,00
91	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	UPTD Puskesmas Pagu	276,00	149.040.000,00

NO	NAMA BARANG	LOKASI	LUAS (m^2)	HARGA SATUAN PEROLEHAN
92	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	UPTD Puskesmas Papar	740,00	70.200.000,00
93	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	UPTD Puskesmas Papar	413,00	36.000.000,00
94	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	UPTD Puskesmas Papar	72,00	7.200.000,00
95	Tanah Bangunan Peristirahatan/Bungalaow/Cottage	UPTD Puskesmas Papar	564,00	15.228.000,00
96	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	UPTD Puskesmas Papar	1.040,00	98.500.000,00
97	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	UPTD Puskesmas Papar	1.008,00	100.800.000,00
98	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	UPTD Puskesmas Papar	801,00	15.300.000,00
99	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	UPTD Puskesmas Papar	3.041,00	147.800.000,00
100	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	UPTD Puskesmas Pare	536,00	50.000.000,00
101	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	UPTD Puskesmas Pare	975,00	681.003.000,00
102	Tanah Persil Lainnya Lain-lain	UPTD Puskesmas Pare	949,00	1.768.529.000,00
103	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	UPTD Puskesmas Pelas	674,00	73.800.000,00
104	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	UPTD Puskesmas Pelas	522,00	128.800.000,00
105	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	UPTD Puskesmas Pelas	610,00	40.500.000,00
106	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	UPTD Puskesmas Pelas	238,00	58.700.000,00
107	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	UPTD Puskesmas Pelas	334,00	54.400.000,00
108	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	UPTD Puskesmas Plosoklaten	470,00	6.200.000,00
109	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	UPTD Puskesmas Plosoklaten	357,00	7.500.000,00
110	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	UPTD Puskesmas Plosoklaten	390,00	5.000.000,00
111	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	UPTD Puskesmas Plosoklaten	1.435,00	16.700.000,00
112	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	UPTD Puskesmas Plosoklaten	180,00	4.000.000,00
113	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	UPTD Puskesmas Plosoklaten	326,00	6.000.000,00
114	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	UPTD Puskesmas Plosoklaten	787,00	8.000.000,00

NO	NAMA BARANG	LOKASI	LUAS (m^2)	HARGA SATUAN PEROLEHAN
115	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	UPTD Puskesmas Pranggang	915,00	15.000.000,00
116	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	UPTD Puskesmas Pranggang	490,00	10.000.000,00
117	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	UPTD Puskesmas Pranggang	887,00	15.000.000,00
118	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	UPTD Puskesmas Pranggang	892,00	15.000.000,00
119	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	UPTD Puskesmas Puhjarak	1.550,00	11.442.000,00
120	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	UPTD Puskesmas Puhjarak	1.100,00	10.042.000,00
121	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	UPTD Puskesmas Puhjarak	230,00	1.500.000,00
122	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	UPTD Puskesmas Puhjarak	180,00	401.000,00
123	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	UPTD Puskesmas Puhjarak	1.250,00	3.214.000,00
124	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	UPTD Puskesmas Puhjarak	1.243,00	7.012.000,00
125	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	UPTD Puskesmas Puhjarak	830,00	14.195.000,00
126	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	UPTD Puskesmas Puncu	1.520,00	98.580.000,00
127	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	UPTD Puskesmas Puncu	439,00	2.110.500,00
128	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	UPTD Puskesmas Puncu	300,00	900.000,00
129	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	UPTD Puskesmas Puncu	931,00	4.500.000,00
130	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	UPTD Puskesmas Purwoasri	513,00	25.875.000,00
131	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	UPTD Puskesmas Purwoasri	225,00	16.875.000,00
132	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	UPTD Puskesmas Purwoasri	225,00	11.250.000,00
133	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	UPTD Puskesmas Purwoasri	1.702,00	93.750.000,00
134	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	UPTD Puskesmas Purwoasri	259,00	11.250.000,00
135	Tanah Bangunan Peristirahatan/Bungalaow/Cottage	UPTD Puskesmas Sambi	494,00	36.062.000,00
136	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	UPTD Puskesmas Sambi	360,00	7.560.000,00
137	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	UPTD Puskesmas Sambi	475,00	5.445.000,00

NO	NAMA BARANG	LOKASI	LUAS (m^2)	HARGA SATUAN PEROLEHAN
138	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	UPTD Puskesmas Sambi	480,00	35.100.000,00
139	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	UPTD Puskesmas Semen	6.050,00	3.025.000.000,00
140	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	UPTD Puskesmas Semen	200,00	14.000.000,00
141	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	UPTD Puskesmas Semen	300,00	13.950.000,00
142	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	UPTD Puskesmas Sidomulyo	350,00	6.500.000,00
143	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	UPTD Puskesmas Sidomulyo	350,00	13.500.000,00
144	Tanah Bangunan Poliklinik	UPTD Puskesmas Sidomulyo	24,00	3.000.000,00
145	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	UPTD Puskesmas Sidorejo	1.999,00	150.000.000,00
146	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	UPTD Puskesmas Sidorejo	175,00	15.000.000,00
147	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	UPTD Puskesmas Sumberjo	400,00	26.000.000,00
148	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	UPTD Puskesmas Sumberjo	1.757,00	10.000.000,00
149	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	UPTD Puskesmas Sumberjo	400,00	10.000.000,00
150	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	UPTD Puskesmas Tarokan	542,00	20.000.000,00
151	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	UPTD Puskesmas Tarokan	600,00	42.000.000,00
152	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	UPTD Puskesmas Tarokan	100,00	20.000.000,00
153	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	UPTD Puskesmas Tarokan	200,00	76.339.000,00
154	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	UPTD Puskesmas Tarokan	690,00	480.000.000,00
155	Tanah Persil Lainnya Lain-lain	UPTD Puskesmas Tarokan	2.186,00	1.282.984.306,00
156	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	UPTD Puskesmas Tiron	807,00	60.000.000,00
157	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	UPTD Puskesmas Tiron	190,00	15.300.000,00
158	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	UPTD Puskesmas Tiron	755,00	75.500.000,00
159	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	UPTD Puskesmas Wates	1.397,00	300.000.000,00
160	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	UPTD Puskesmas Wates	682,00	55.000.000,00

NO	NAMA BARANG	LOKASI	LUAS (m^2)	HARGA SATUAN PEROLEHAN
161	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	UPTD Puskesmas Wates	614,00	55.000.000,00
162	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	UPTD Puskesmas Wates	1.670,00	50.368.000,00
163	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	UPTD Puskesmas Wonorejo	800,00	8.000.000,00
164	Tanah Bangunan Peristirahatan/Bungalaow/Cottage	UPTD Puskesmas Wonorejo	295,00	52.192.000,00
165	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	UPTD Puskesmas Wonorejo	1.040,00	184.000.000,00
166	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	UPTD Puskesmas Wonorejo	970,00	9.700.000,00
167	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	UPTD Puskesmas Wonorejo	300,00	2.950.000,00
168	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	UPTD Puskesmas Wonorejo	950,00	5.900.000,00
Total				19.708.173.806

Sumber : Aplikasi e-BMD Kemendagri

Tabel 2.16 Aset Gedung dan Bangunan Dinas Kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Kediri

No	Nama Barang (Jenis Gedung dan Bangunan	Lokasi	Nilai Aset
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Dinas Kesehatan	4.840.479.647,00
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Dinas Kesehatan	5.375.000,00
3	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Dinas Kesehatan	6.578.500,00
4	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Dinas Kesehatan	110.504.500,00
5	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Dinas Kesehatan	49.900.000,00
6	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Dinas Kesehatan	234.538.412,00
7	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Dinas Kesehatan	29.240.000,00
8	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Dinas Kesehatan	125.000.000,00
9	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Dinas Kesehatan	7.708.993,19
10	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Dinas Kesehatan	7.620.194,84
11	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Dinas Kesehatan	28.758.600,97
12	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Dinas Kesehatan	20.000.000,00
13	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Dinas Kesehatan	68.220.000,00
14	Bangunan Klinik/Puskesmas	Dinas Kesehatan	1.664.633.102,00
15	Bangunan Klinik/Puskesmas	Dinas Kesehatan	16.886.408,00
16	Gedung Garasi/Pool Permanen	Dinas Kesehatan	87.496.568,67
17	Lain-lain Bangunan Gedung empat Kerja	Dinas Kesehatan	152.708.756,00
18	Lain-lain Bangunan Gedung Tempat Kerja	Dinas Kesehatan	9.084.448,00

No	Nama Barang (Jenis Gedung dan Bangunan	Lokasi	Nilai Aset
19	Lain-lain Bangunan Gedung Tempat Kerja	Dinas Kesehatan	12.178.888,00
20	Lain-lain Bangunan Gedung Tempat Kerja	Dinas Kesehatan	12.025.279,00
21	Lain-lain Bangunan Gedung Tempat Kerja	Dinas Kesehatan	10.740.678,00
22	Lain-lain Bangunan Gedung Tempat Kerja	Dinas Kesehatan	9.685.395,00
23	Lain-lain Bangunan Gedung Tempat Kerja	Dinas Kesehatan	12.429.843,00
24	Lain-lain Bangunan Gedung Tempat Kerja	Dinas Kesehatan	15.986.279,00
25	Lain-lain Bangunan Gedung Tempat Kerja	Dinas Kesehatan	12.195.686,00
26	Lain-lain Bangunan Gedung Tempat Kerja	Dinas Kesehatan	30.125.681,00
27	Lain-lain Bangunan Gedung Tempat Kerja	Dinas Kesehatan	33.577.603,00
28	Lain-lain Bangunan Gedung Tempat Kerja	Dinas Kesehatan	11.898.412,00
29	Lain-lain Bangunan Gedung Tempat Kerja	Dinas Kesehatan	21.669.696,00
30	Lain-lain Bangunan Gedung Tempat Kerja	Dinas Kesehatan	11.742.710,00
31	Lain-lain Bangunan Gedung Tempat Kerja	Dinas Kesehatan	33.577.603,00
32	Lain-lain Bangunan Gedung Tempat Kerja	Dinas Kesehatan	11.965.049,00
33	Lain-lain Bangunan Gedung Tempat Kerja	Dinas Kesehatan	10.395.138,00
34	Lain-lain Bangunan Gedung Tempat Kerja	Dinas Kesehatan	15.500.000,00
35	Lain-lain Bangunan Gedung Tempat Kerja	Dinas Kesehatan	30.600.000,00
36	Lain-lain Bangunan Gedung Tempat Kerja	Dinas Kesehatan	1.128.335.828,07
37	Bangunan Gedung Kantor Permanen	UPTD Gudang Farmasi dan Alat Kesehatan	1.489.583.199,00
38	Bangunan Gedung Kantor Permanen	UPTD Gudang Farmasi dan Alat Kesehatan	2.400.000,00
39	Bangunan Gedung Kantor Permanen	UPTD Gudang Farmasi dan Alat Kesehatan	448.882.500,00
40	Bangunan Gedung Kantor Permanen	UPTD Gudang Farmasi dan Alat Kesehatan	214.956.000,00
41	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	UPTD Gudang Farmasi dan Alat Kesehatan	193.660.823,00
42	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	UPTD Laboratorium Kesehatan	43.642.428,00
43	Bangunan Klinik/Puskesmas	UPTD Puskesmas Adan-adan	2.040.509.971,00

No	Nama Barang (Jenis Gedung dan Bangunan	Lokasi	Nilai Aset
44	Bangunan Klinik/Puskesmas	UPTD Puskesmas Adan-adan	673.710.706,00
45	Bangunan Klinik/Puskesmas	UPTD Puskesmas Adan-adan	688.463.720,00
46	Bangunan Klinik/Puskesmas	UPTD Puskesmas Adan-adan	580.894.566,00
47	Bangunan Klinik/Puskesmas	UPTD Puskesmas Adan-adan	64.406.000,00
48	Bangunan Klinik/Puskesmas	UPTD Puskesmas Adan-adan	3.313.500,00
49	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	UPTD Puskesmas Adan-adan	31.500.000,00
50	Lain-lain Bangunan Gedung Tempat Kerja	UPTD Puskesmas Adan-adan	6.600.000,00
51	Bangunan Klinik/Puskesmas	UPTD Puskesmas Badas	625.678.669,00
52	Bangunan Klinik/Puskesmas	UPTD Puskesmas Badas	1.505.013.300,00
53	Bangunan Klinik/Puskesmas	UPTD Puskesmas Badas	206.887.549,00
54	Bangunan Klinik/Puskesmas	UPTD Puskesmas Badas	202.695.540,00
55	Bangunan Klinik/Puskesmas	UPTD Puskesmas Badas	636.345.238,00
56	Bangunan Klinik/Puskesmas	UPTD Puskesmas Badas	124.237.587,00
57	Bangunan Klinik/Puskesmas	UPTD Puskesmas Badas	2.081.685.317,00
58	Bangunan Klinik/Puskesmas	UPTD Puskesmas Badas	214.184.173,00
59	Lain-lain Bangunan Gedung Tempat Kerja	UPTD Puskesmas Badas	25.583.000,00
60	Bangunan Klinik/Puskesmas	UPTD Puskesmas Bangsongan	615.186.002,00
61	Bangunan Klinik/Puskesmas	UPTD Puskesmas Bangsongan	238.002.683,00
62	Bangunan Klinik/Puskesmas	UPTD Puskesmas Bangsongan	1.450.002.210,00
63	Bangunan Klinik/Puskesmas	UPTD Puskesmas Bangsongan	2.586.061.014,00
64	BANGUNAN PUSKESMAS	UPTD Puskesmas Bangsongan	137.206.693,00
65	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	UPTD Puskesmas Bangsongan	9.787.500,00
66	Lain-lain Bangunan Gedung Tempat Kerja	UPTD Puskesmas Bangsongan	24.405.202,00
67	Lain-lain Bangunan Gedung Tempat Kerja	UPTD Puskesmas Bangsongan	216.000.549,00
68	Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen	UPTD Puskesmas Bangsongan	27.500.000,00
69	Bangunan Klinik/Puskesmas	UPTD Puskesmas Bendo	4.509.075.236,00
70	Bangunan Klinik/Puskesmas	UPTD Puskesmas Bendo	439.405.848,00
71	Bangunan Klinik/Puskesmas	UPTD Puskesmas Bendo	175.420.230,00
72	Bangunan Puskesmas	UPTD Puskesmas Bendo	141.351.478,00
73	Paving	UPTD Puskesmas Bendo	73.211.185,00
74	Lain-lain Bangunan Gedung Tempat Kerja	UPTD Puskesmas Bendo	8.919.000,00

No	Nama Barang (Jenis Gedung dan Bangunan	Lokasi	Nilai Aset
75	Lain-lain Bangunan Gedung Tempat Kerja	UPTD Puskesmas Bendo	16.825.733,00
76	Lain-lain Bangunan Gedung Tempat Kerja	UPTD Puskesmas Bendo	6.688.585,00
77	Bangunan Gedung Kantor Permanen	UPTD Puskesmas Blabak	1.472.691.294,00
78	Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen	UPTD Puskesmas Blabak	6.750.000,00
79	Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen	UPTD Puskesmas Blabak	17.920.000,00
80	Bangunan Klinik/Puskesmas	UPTD Puskesmas Blabak	2.000.000,00
81	Bangunan Klinik/Puskesmas	UPTD Puskesmas Blabak	6.000.000,00
82	Bangunan Klinik/Puskesmas	UPTD Puskesmas Blabak	574.944.899,00
83	Bangunan Klinik/Puskesmas	UPTD Puskesmas Blabak	217.208.870,00
84	Bangunan Klinik/Puskesmas	UPTD Puskesmas Blabak	344.010.561,00
85	Bangunan Klinik/Puskesmas	UPTD Puskesmas Blabak	736.531.821,00
86	Bangunan Klinik/Puskesmas	UPTD Puskesmas Blabak	109.404.407,00
87	Bangunan Klinik/Puskesmas	UPTD Puskesmas Blabak	162.516.221,00
88	Bangunan Klinik/Puskesmas	UPTD Puskesmas Blabak	375.893.777,00
89	Bangunan Klinik/Puskesmas	UPTD Puskesmas Blabak	57.309.576,00
90	Bangunan Klinik/Puskesmas	UPTD Puskesmas Blabak	2.021.190.557,32
91	Bangunan Klinik/Puskesmas	UPTD Puskesmas Blabak	216.750.904,00
92	Bangunan Pagar Puskesmas Pembantu	UPTD Puskesmas Blabak	104.996.408,00
93	Lain-lain Bangunan Gedung Tempat Kerja	UPTD Puskesmas Blabak	19.281.500,00
94	Lain-lain Bangunan Gedung Tempat Kerja	UPTD Puskesmas Blabak	6.600.000,00
95	Lain-lain Bangunan Gedung Tempat Kerja	UPTD Puskesmas Blabak	60.059.030,00
96	Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen	UPTD Puskesmas Blabak	6.000.000,00
97	Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen	UPTD Puskesmas Blabak	6.000.000,00
98	Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen	UPTD Puskesmas Blabak	18.700.000,00
99	Bangunan Klinik/Puskesmas	UPTD Puskesmas Gampeng	2.353.667.114,00
100	Bangunan Klinik/Puskesmas	UPTD Puskesmas Gampeng	618.886.650,00
101	Bangunan Klinik/Puskesmas	UPTD Puskesmas Gampeng	245.292.502,00
102	Bangunan Klinik/Puskesmas	UPTD Puskesmas Gampeng	25.000.000,00
103	Bangunan Puskesmas Pembantu	UPTD Puskesmas Gampeng	219.064.894,00
104	Lain-lain Bangunan Gedung Tempat Kerja	UPTD Puskesmas Gampeng	150.000,00
105	Lain-lain Bangunan Gedung Tempat Kerja	UPTD Puskesmas Gampeng	150.000,00

No	Nama Barang (Jenis Gedung dan Bangunan	Lokasi	Nilai Aset
106	Lain-lain Bangunan Gedung Tempat Kerja	UPTD Puskesmas Gampeng	150.000,00
107	Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen	UPTD Puskesmas Gampeng	25.000.000,00
108	Bangunan Gedung Kantor Permanen	UPTD Puskesmas Grogol	16.200.000,00
109	Bangunan Gedung Kantor Permanen	UPTD Puskesmas Grogol	3.582.080.143,00
110	Bangunan Klinik/Puskesmas	UPTD Puskesmas Grogol	9.400.000,00
111	Bangunan Klinik/Puskesmas	UPTD Puskesmas Grogol	337.567.747,00
112	Bangunan Klinik/Puskesmas	UPTD Puskesmas Grogol	276.829.667,00
113	Bangunan Klinik/Puskesmas	UPTD Puskesmas Grogol	211.836.013,00
114	Bangunan Klinik/Puskesmas	UPTD Puskesmas Grogol	794.255.719,00
115	Bangunan Puskesmas Pembantu	UPTD Puskesmas Grogol	225.816.810,00
116	Gedung Garasi/Pool Permanen	UPTD Puskesmas Grogol	1.500.000,00
117	Lain-lain Bangunan Gedung Tempat Kerja	UPTD Puskesmas Grogol	1.800.000,00
118	Lain-lain Bangunan Gedung Tempat Kerja	UPTD Puskesmas Grogol	17.735.000,00
119	Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen	UPTD Puskesmas Grogol	31.800.000,00
120	Bangunan Tempat Tinggal Lain-lain	UPTD Puskesmas Grogol	41.950.000,00
121	Bangunan Klinik/Puskesmas	UPTD Puskesmas Gurah	904.818.653,00
122	Bangunan Klinik/Puskesmas	UPTD Puskesmas Gurah	215.808.814,00
123	Bangunan Klinik/Puskesmas	UPTD Puskesmas Gurah	3.401.548.507,21
124	Bangunan Klinik/Puskesmas	UPTD Puskesmas Gurah	38.004.029,89
125	Bangunan Klinik/Puskesmas	UPTD Puskesmas Gurah	33.629.395,87
126	Bangunan Klinik/Puskesmas	UPTD Puskesmas Gurah	7.756.609,02
127	Bangunan Klinik/Puskesmas	UPTD Puskesmas Gurah	19.814.975,32
128	Bangunan Klinik/Puskesmas	UPTD Puskesmas Gurah	5.531.934,92
129	Bangunan Puskesmas	UPTD Puskesmas Gurah	103.680.135,00
130	Paving	UPTD Puskesmas Gurah	64.845.065,00
131	Lain-lain Bangunan Gedung Tempat Kerja	UPTD Puskesmas Gurah	4.000.000,00
132	Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen	UPTD Puskesmas Gurah	15.000.000,00
133	Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen	UPTD Puskesmas Gurah	15.000.000,00
134	Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen	UPTD Puskesmas Gurah	5.000.000,00
135	Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen	UPTD Puskesmas Gurah	5.000.000,00
136	Bangunan Gedung Kantor Permanen	UPTD Puskesmas Kandangan	35.461.000,00
137	Bangunan Klinik/Puskesmas	UPTD Puskesmas Kandangan	1.078.912.196,00
138	Bangunan Klinik/Puskesmas	UPTD Puskesmas Kandangan	309.909.195,00
139	Bangunan Klinik/Puskesmas	UPTD Puskesmas Kandangan	298.796.536,00

No	Nama Barang (Jenis Gedung dan Bangunan	Lokasi	Nilai Aset
140	Bangunan Klinik/Puskesmas	UPTD Puskesmas Kandangan	364.129.704,00
141	Bangunan Klinik/Puskesmas	UPTD Puskesmas Kandangan	299.598.200,00
142	Bangunan Klinik/Puskesmas	UPTD Puskesmas Kandangan	152.962.930,00
143	Bangunan Klinik/Puskesmas	UPTD Puskesmas Kandangan	9.900.000,00
144	Bangunan Klinik/Puskesmas	UPTD Puskesmas Kandangan	30.837.500,00
145	Bangunan Klinik/Puskesmas	UPTD Puskesmas Kandangan	2.070.296.392,00
146	Bangunan Puskesmas Pembantu	UPTD Puskesmas Kandangan	206.637.723,00
147	Bangunan Puskesmas	UPTD Puskesmas Kandangan	199.165.854,00
148	Lain-lain Bangunan Gedung Tempat Kerja	UPTD Puskesmas Kandangan	70.000.000,00
149	Lain-lain Bangunan Gedung Tempat Kerja	UPTD Puskesmas Kandangan	60.000.000,00
150	Lain-lain Bangunan Gedung Tempat Kerja	UPTD Puskesmas Kandangan	60.000.000,00
151	Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen	UPTD Puskesmas Kandangan	101.800.000,00
152	Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen	UPTD Puskesmas Kandangan	80.000.000,00
153	Bangunan Klinik/Puskesmas	UPTD Puskesmas Kayen Kidul	769.926.338,00
154	Bangunan Klinik/Puskesmas	UPTD Puskesmas Kayen Kidul	449.766.168,00
155	Bangunan Klinik/Puskesmas	UPTD Puskesmas Kayen Kidul	1.419.248.606,00
156	Bangunan Klinik/Puskesmas	UPTD Puskesmas Kayen Kidul	850.113.967,00
157	Bangunan Klinik/Puskesmas	UPTD Puskesmas Kayen Kidul	44.804.323,00
158	Gedung Garasi/Pool Permanen	UPTD Puskesmas Kayen Kidul	18.406.437,00
159	Bangunan Parkir Terbuka Permanen	UPTD Puskesmas Kayen Kidul	44.576.642,00
160	Lain-lain Bangunan Gedung Tempat Kerja	UPTD Puskesmas Kayen Kidul	100.000.000,00
161	Lain-lain Bangunan Gedung Tempat Kerja	UPTD Puskesmas Kayen Kidul	80.000.000,00
162	Lain-lain Bangunan Gedung Tempat Kerja	UPTD Puskesmas Kayen Kidul	96.879.000,00
163	Lain-lain Bangunan Gedung Tempat Kerja	UPTD Puskesmas Kayen Kidul	25.000.000,00
164	Lain-lain Bangunan Gedung Tempat Kerja	UPTD Puskesmas Kayen Kidul	14.000.000,00
165	Bangunan Gedung Kantor Permanen	UPTD Puskesmas Keling	50.634.070,00

No	Nama Barang (Jenis Gedung dan Bangunan	Lokasi	Nilai Aset
166	Bangunan Klinik/Puskesmas	UPTD Puskesmas Keling	2.236.983.194,00
167	Bangunan Klinik/Puskesmas	UPTD Puskesmas Keling	179.520.386,00
168	Bangunan Klinik/Puskesmas	UPTD Puskesmas Keling	431.065.491,00
169	Bangunan Klinik/Puskesmas	UPTD Puskesmas Keling	22.341.000,00
170	Bangunan Klinik/Puskesmas	UPTD Puskesmas Keling	215.310.480,00
171	Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen	UPTD Puskesmas Keling	990.084.728,00
172	Bangunan Gudang Tertutup Semi Permanen	UPTD Puskesmas Kepung	35.300.000,00
173	Bangunan Gudang Terbuka Semi Permanen	UPTD Puskesmas Kepung	43.050.000,00
174	Bangunan Klinik/Puskesmas	UPTD Puskesmas Kepung	1.352.265.174,00
175	Bangunan Klinik/Puskesmas	UPTD Puskesmas Kepung	614.819.198,00
176	Bangunan Klinik/Puskesmas	UPTD Puskesmas Kepung	345.202.619,00
177	Bangunan Klinik/Puskesmas	UPTD Puskesmas Kepung	234.169.045,00
178	Bangunan Klinik/Puskesmas	UPTD Puskesmas Kepung	1.383.219.375,00
179	Bangunan Klinik/Puskesmas	UPTD Puskesmas Kepung	216.107.260,00
180	Bangunan Parkir Terbuka Semi Permanen	UPTD Puskesmas Kepung	15.227.258,00
181	Lain-lain Bangunan Gedung Tempat Kerja	UPTD Puskesmas Kepung	215.117.661,00
182	Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen	UPTD Puskesmas Kepung	20.000.000,00
183	Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen	UPTD Puskesmas Kepung	150.000.000,00
184	Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen	UPTD Puskesmas Kepung	20.000.000,00
185	Bangunan Klinik/Puskesmas	UPTD Puskesmas Kras	644.049.554,00
186	Bangunan Klinik/Puskesmas	UPTD Puskesmas Kras	1.417.267.954,00
187	Bangunan Klinik/Puskesmas	UPTD Puskesmas Kras	1.602.627.219,00
188	Bangunan Klinik/Puskesmas	UPTD Puskesmas Kras	84.634.755,00
189	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	UPTD Puskesmas Kras	26.449.500,00
190	Lain-lain Bangunan Gedung Tempat Kerja	UPTD Puskesmas Kras	20.983.000,00
191	Bangunan Gedung Kantor Permanen	UPTD Puskesmas Kunjang	170.880.056,00
192	Bangunan Gedung Kantor Permanen	UPTD Puskesmas Kunjang	1.076.136.706,00
193	Bangunan Klinik/Puskesmas	UPTD Puskesmas Kunjang	55.000.000,00
194	Bangunan Klinik/Puskesmas	UPTD Puskesmas Kunjang	390.006.577,00
195	Bangunan Klinik/Puskesmas	UPTD Puskesmas Kunjang	390.019.630,00
196	Bangunan Klinik/Puskesmas	UPTD Puskesmas Kunjang	50.000.000,00
197	Bangunan Klinik/Puskesmas	UPTD Puskesmas Kunjang	326.817.549,00

No	Nama Barang (Jenis Gedung dan Bangunan	Lokasi	Nilai Aset
198	Bangunan Klinik/Puskesmas	UPTD Puskesmas Kunjang	841.536.000,00
199	Bangunan Klinik/Puskesmas	UPTD Puskesmas Kunjang	214.603.440,00
200	Bangunan Klinik/Puskesmas	UPTD Puskesmas Kunjang	149.338.138,00
201	Bangunan Klinik/Puskesmas	UPTD Puskesmas Kunjang	44.585.343,00
202	Bangunan Klinik/Puskesmas	UPTD Puskesmas Kunjang	94.959.238,00
203	Bangunan Klinik/Puskesmas	UPTD Puskesmas Kunjang	2.110.191.596,00
204	Lain-lain Bangunan Gedung Tempat Kerja	UPTD Puskesmas Kunjang	350.000,00
205	Lain-lain Bangunan Gedung Tempat Kerja	UPTD Puskesmas Kunjang	350.000,00
206	Lain-lain Bangunan Gedung Tempat Kerja	UPTD Puskesmas Kunjang	590.000,00
207	Lain-lain Bangunan Gedung Tempat Kerja	UPTD Puskesmas Kunjang	590.000,00
208	Lain-lain Bangunan Gedung Tempat Kerja	UPTD Puskesmas Kunjang	590.000,00
209	Lain-lain Bangunan Gedung Tempat Kerja	UPTD Puskesmas Kunjang	590.000,00
210	Lain-lain Bangunan Gedung Tempat Kerja	UPTD Puskesmas Kunjang	525.000,00
211	Lain-lain Bangunan Gedung Tempat Kerja	UPTD Puskesmas Kunjang	525.000,00
212	Lain-lain Bangunan Gedung Tempat Kerja	UPTD Puskesmas Kunjang	525.000,00
213	Bangunan Klinik/Puskesmas	UPTD Puskesmas Mojo	10.000.000,00
214	Bangunan Klinik/Puskesmas	UPTD Puskesmas Mojo	227.859.889,00
215	Bangunan Klinik/Puskesmas	UPTD Puskesmas Mojo	10.000.000,00
216	Bangunan Klinik/Puskesmas	UPTD Puskesmas Mojo	88.685.256,00
217	Bangunan Klinik/Puskesmas	UPTD Puskesmas Mojo	2.651.482.276,00
218	Bangunan Klinik/Puskesmas	UPTD Puskesmas Mojo	219.657.000,00
219	Lain-lain Bangunan Gedung Tempat Kerja	UPTD Puskesmas Mojo	17.400.000,00
220	Lain-lain Bangunan Gedung Tempat Kerja	UPTD Puskesmas Mojo	82.382.501,00
221	Lain-lain Bangunan Gedung Tempat Kerja	UPTD Puskesmas Mojo	8.137.416,00
222	Lain-lain Bangunan Gedung Tempat Kerja	UPTD Puskesmas Mojo	7.815.196,00
223	Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen	UPTD Puskesmas Mojo	115.000.000,00
224	Bangunan Klinik/Puskesmas	UPTD Puskesmas Ngadi	341.663.500,00
225	Bangunan Klinik/Puskesmas	UPTD Puskesmas Ngadi	1.471.923.671,00
226	Bangunan Klinik/Puskesmas	UPTD Puskesmas Ngadi	106.458.000,00

No	Nama Barang (Jenis Gedung dan Bangunan	Lokasi	Nilai Aset
227	Bangunan Puskesmas	UPTD Puskesmas Ngadi	1.950.059.503,00
228	Lain-lain Bangunan Gedung Tempat Kerja	UPTD Puskesmas Ngadi	20.048.182,00
229	Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen	UPTD Puskesmas Ngadi	41.700.000,00
230	Pagar Permanen	UPTD Puskesmas Ngadi	106.930.301,00
231	Bangunan Rumah Sakit Bersalin Dan Lain-Lain	UPTD Puskesmas Ngadiluwih	159.142.513,00
232	Bangunan Klinik/Puskesmas	UPTD Puskesmas Ngadiluwih	2.568.160.824,16
233	Bangunan Klinik/Puskesmas	UPTD Puskesmas Ngadiluwih	358.943.612,00
234	Bangunan Klinik/Puskesmas	UPTD Puskesmas Ngadiluwih	16.000.000,00
235	Bangunan Klinik/Puskesmas	UPTD Puskesmas Ngadiluwih	66.892.830,00
236	Bangunan Klinik/Puskesmas	UPTD Puskesmas Ngadiluwih	712.351.000,00
237	Bangunan Klinik/Puskesmas	UPTD Puskesmas Ngadiluwih	216.224.584,00
238	Bangunan Klinik/Puskesmas	UPTD Puskesmas Ngadiluwih	1.309.925.682,00
239	Bangunan Klinik/Puskesmas	UPTD Puskesmas Ngadiluwih	228.463.810,00
240	Bangunan Klinik/Puskesmas	UPTD Puskesmas Ngadiluwih	217.755.699,00
241	Bangunan Puskesmas	UPTD Puskesmas Ngadiluwih	879.166.200,00
242	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	UPTD Puskesmas Ngadiluwih	35.000.000,00
243	Lain-lain Bangunan Gedung Tempat Kerja	UPTD Puskesmas Ngadiluwih	7.500.000,00
244	Lain-lain Bangunan Gedung Tempat Kerja	UPTD Puskesmas Ngadiluwih	56.950.000,00
245	Lain-lain Bangunan Gedung Tempat Kerja	UPTD Puskesmas Ngadiluwih	1.069.754.552,00
246	Lain-lain Bangunan Gedung Tempat Kerja	UPTD Puskesmas Ngadiluwih	24.050.000,00
247	Lain-lain Bangunan Gedung Tempat Kerja	UPTD Puskesmas Ngadiluwih	28.249.170,00
248	Bangunan Tempat Tinggal Lain-lain	UPTD Puskesmas Ngadiluwih	17.500.000,00
249	Bangunan Tempat Tinggal Lain-lain	UPTD Puskesmas Ngadiluwih	17.500.000,00
250	Bangunan Tempat Tinggal Lain-lain	UPTD Puskesmas Ngadiluwih	17.500.000,00
251	Bangunan Klinik/Puskesmas	UPTD Puskesmas Ngancar	3.433.960.847,00
252	Bangunan Klinik/Puskesmas	UPTD Puskesmas Ngancar	407.468.487,00

No	Nama Barang (Jenis Gedung dan Bangunan	Lokasi	Nilai Aset
253	Bangunan Klinik/Puskesmas	UPTD Puskesmas Ngancar	580.543.309,00
254	Bangunan Klinik/Puskesmas	UPTD Puskesmas Ngancar	539.053.923,00
255	Bangunan Klinik/Puskesmas	UPTD Puskesmas Ngancar	23.881.428,00
256	Bangunan Klinik/Puskesmas	UPTD Puskesmas Ngancar	181.166.207,00
257	Paving	UPTD Puskesmas Ngancar	138.895.042,00
258	Lain-lain Bangunan Gedung Tempat Kerja	UPTD Puskesmas Ngancar	95.000.000,00
259	Lain-lain Bangunan Gedung Tempat Kerja	UPTD Puskesmas Ngancar	10.000.000,00
260	Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen	UPTD Puskesmas Ngancar	12.000.000,00
261	Bangunan Klinik/Puskesmas	UPTD Puskesmas Ngasem	2.417.759.312,00
262	Bangunan Klinik/Puskesmas	UPTD Puskesmas Ngasem	265.877.714,00
263	Bangunan Klinik/Puskesmas	UPTD Puskesmas Ngasem	384.974.895,00
264	Bangunan Klinik/Puskesmas	UPTD Puskesmas Ngasem	351.346.352,00
265	Bangunan Klinik/Puskesmas	UPTD Puskesmas Ngasem	214.663.687,00
266	Bangunan Puskesmas Pembantu	UPTD Puskesmas Ngasem	8.500.000,00
267	Bangunan Puskesmas Pembantu	UPTD Puskesmas Ngasem	49.500.000,00
268	Bangunan Tempat Bermain Anak	UPTD Puskesmas Ngasem	10.716.872,00
269	Lain-lain Bangunan Gedung Tempat Kerja	UPTD Puskesmas Ngasem	18.562.000,00
270	Lain-lain Bangunan Gedung Tempat Kerja	UPTD Puskesmas Ngasem	11.135.000,00
271	Lain-lain Bangunan Gedung Tempat Kerja	UPTD Puskesmas Ngasem	3.535.000,00
272	Lain-lain Bangunan Gedung Tempat Kerja	UPTD Puskesmas Ngasem	2.650.500,00
273	Lain-lain Bangunan Gedung Tempat Kerja	UPTD Puskesmas Ngasem	6.781.215,00
274	Lain-lain Bangunan Gedung Tempat Kerja	UPTD Puskesmas Ngasem	4.225.800,00
275	Bangunan Klinik/Puskesmas	UPTD Puskesmas Pagu	2.454.297.077,00
276	Bangunan Klinik/Puskesmas	UPTD Puskesmas Pagu	685.513.053,00
277	Lain-lain Bangunan Gedung Tempat Kerja	UPTD Puskesmas Pagu	18.765.000,00
278	Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen	UPTD Puskesmas Pagu	170.676.451,00
279	Bangunan Klinik/Puskesmas	UPTD Puskesmas Papar	1.415.349.653,00

No	Nama Barang (Jenis Gedung dan Bangunan	Lokasi	Nilai Aset
280	Bangunan Klinik/Puskesmas	UPTD Puskesmas Papar	426.435.530,00
281	Bangunan Klinik/Puskesmas	UPTD Puskesmas Papar	321.489.766,00
282	Bangunan Klinik/Puskesmas	UPTD Puskesmas Papar	3.734.758.767,00
283	Bangunan Klinik/Puskesmas	UPTD Puskesmas Papar	51.684.000,00
284	Bangunan Puskesmas Pembantu	UPTD Puskesmas Papar	103.686.095,00
285	Selasar	UPTD Puskesmas Papar	44.124.000,00
286	Paving	UPTD Puskesmas Papar	9.518.250,00
287	Lain-lain Bangunan Gedung Tempat Kerja	UPTD Puskesmas Papar	26.137.500,00
288	Lain-lain Bangunan Gedung Tempat Kerja	UPTD Puskesmas Papar	204.269.500,00
289	Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen	UPTD Puskesmas Papar	162.000.000,00
290	Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen	UPTD Puskesmas Papar	108.000.000,00
291	Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen	UPTD Puskesmas Papar	108.000.000,00
292	Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen	UPTD Puskesmas Papar	56.250.000,00
293	Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen	UPTD Puskesmas Papar	56.250.000,00
294	Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen	UPTD Puskesmas Papar	108.000.000,00
295	Bangunan Klinik/Puskesmas	UPTD Puskesmas Pare	82.275.051,00
296	Bangunan Klinik/Puskesmas	UPTD Puskesmas Pare	1.203.510.527,00
297	Bangunan Klinik/Puskesmas	UPTD Puskesmas Pare	227.177.376,00
298	Bangunan Puskesmas	UPTD Puskesmas Pare	1.704.259.316,00
299	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	UPTD Puskesmas Pare	27.619.020,00
300	Bangunan Klinik/Puskesmas	UPTD Puskesmas Pelas	437.274.732,00
301	Bangunan Klinik/Puskesmas	UPTD Puskesmas Pelas	262.007.991,00
302	Bangunan Klinik/Puskesmas	UPTD Puskesmas Pelas	1.164.726.701,00
303	Bangunan Klinik/Puskesmas	UPTD Puskesmas Pelas	14.972.500,00
304	Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen	UPTD Puskesmas Pelas	255.125.611,00
305	Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen	UPTD Puskesmas Pelas	20.000.000,00
306	Bangunan Klinik/Puskesmas	UPTD Puskesmas Plosoklaten	927.970.015,00
307	Bangunan Klinik/Puskesmas	UPTD Puskesmas Plosoklaten	225.241.824,00
308	Bangunan Klinik/Puskesmas	UPTD Puskesmas Plosoklaten	698.914.428,00
309	Bangunan Klinik/Puskesmas	UPTD Puskesmas Plosoklaten	23.986.651,00
310	Bangunan Klinik/Puskesmas	UPTD Puskesmas Plosoklaten	205.657.000,00
311	Bangunan Klinik/Puskesmas	UPTD Puskesmas Plosoklaten	2.106.817.771,00

No	Nama Barang (Jenis Gedung dan Bangunan	Lokasi	Nilai Aset
312	Lain-lain Bangunan Gedung Tempat Kerja	UPTD Puskesmas Plosoklaten	2.500.000,00
313	Lain-lain Bangunan Gedung Tempat Kerja	UPTD Puskesmas Plosoklaten	21.000.000,00
314	Lain-lain Bangunan Gedung Tempat Kerja	UPTD Puskesmas Plosoklaten	5.652.000,00
315	Lain-lain Bangunan Gedung Tempat Kerja	UPTD Puskesmas Plosoklaten	16.440.000,00
316	Lain-lain Bangunan Gedung Tempat Kerja	UPTD Puskesmas Plosoklaten	7.708.000,00
317	Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen	UPTD Puskesmas Plosoklaten	7.500.000,00
318	Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen	UPTD Puskesmas Plosoklaten	6.200.000,00
319	Bangunan Tempat Tinggal Lain-lain	UPTD Puskesmas Plosoklaten	5.000.000,00
320	Bangunan Klinik/Puskesmas	UPTD Puskesmas Pranggang	352.446.731,00
321	Bangunan Klinik/Puskesmas	UPTD Puskesmas Pranggang	331.476.281,00
322	Bangunan Klinik/Puskesmas	UPTD Puskesmas Pranggang	115.404.407,00
323	Bangunan Klinik/Puskesmas	UPTD Puskesmas Pranggang	26.134.780,00
324	Bangunan Puskesmas	UPTD Puskesmas Pranggang	1.849.311.070,00
325	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	UPTD Puskesmas Pranggang	221.857.500,00
326	Lain-lain Bangunan Gedung Tempat Kerja	UPTD Puskesmas Pranggang	224.832.501,00
327	Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen	UPTD Puskesmas Pranggang	7.500.000,00
328	Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen	UPTD Puskesmas Pranggang	196.661.422,00
329	Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen	UPTD Puskesmas Pranggang	10.000.000,00
330	Bangunan Gedung Kantor Permanen	UPTD Puskesmas Puhjarak	1.962.935.900,00
331	Bangunan Klinik/Puskesmas	UPTD Puskesmas Puhjarak	394.455.610,00
332	Bangunan Klinik/Puskesmas	UPTD Puskesmas Puhjarak	8.000.000,00
333	Bangunan Klinik/Puskesmas	UPTD Puskesmas Puhjarak	12.653.000,00
334	Bangunan Klinik/Puskesmas	UPTD Puskesmas Puhjarak	228.406.543,00
335	Bangunan Klinik/Puskesmas	UPTD Puskesmas Puhjarak	411.188.707,00
336	Bangunan Klinik/Puskesmas	UPTD Puskesmas Puhjarak	221.972.363,00

No	Nama Barang (Jenis Gedung dan Bangunan	Lokasi	Nilai Aset
337	Bangunan Klinik/Puskesmas	UPTD Puskesmas Puhjarak	2.519.135.367,00
338	Bangunan Klinik/Puskesmas	UPTD Puskesmas Puhjarak	55.250.000,00
339	Bangunan Puskesmas Pembantu	UPTD Puskesmas Puhjarak	20.000.000,00
340	Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen	UPTD Puskesmas Puhjarak	23.400.000,00
341	Bangunan Klinik/Puskesmas	UPTD Puskesmas Puncu	236.844.645,00
342	Bangunan Klinik/Puskesmas	UPTD Puskesmas Puncu	280.194.216,00
343	Bangunan Klinik/Puskesmas	UPTD Puskesmas Puncu	731.667.775,00
344	Bangunan Klinik/Puskesmas	UPTD Puskesmas Puncu	26.711.000,00
345	Bangunan Klinik/Puskesmas	UPTD Puskesmas Puncu	126.690.000,00
346	Bangunan Klinik/Puskesmas	UPTD Puskesmas Puncu	211.093.433,00
347	Bangunan Klinik/Puskesmas	UPTD Puskesmas Puncu	589.224.717,00
348	Bangunan Klinik/Puskesmas	UPTD Puskesmas Puncu	214.465.750,00
349	Bangunan Klinik/Puskesmas	UPTD Puskesmas Puncu	29.877.200,00
350	Bangunan Klinik/Puskesmas	UPTD Puskesmas Puncu	6.000.000,00
351	Lain-lain Bangunan Gedung Tempat Kerja	UPTD Puskesmas Puncu	21.609.000,00
352	Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen	UPTD Puskesmas Puncu	40.000.000,00
353	Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen	UPTD Puskesmas Puncu	15.000.000,00
354	Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen	UPTD Puskesmas Puncu	25.000.000,00
355	Bangunan Klinik/Puskesmas	UPTD Puskesmas Purwoasri	691.054.416,00
356	Bangunan Klinik/Puskesmas	UPTD Puskesmas Purwoasri	238.577.601,00
357	Bangunan Klinik/Puskesmas	UPTD Puskesmas Purwoasri	49.387.849,00
358	Bangunan Klinik/Puskesmas	UPTD Puskesmas Purwoasri	1.264.110.000,00
359	Bangunan Klinik/Puskesmas	UPTD Puskesmas Purwoasri	1.067.762.759,00
360	Bangunan Puskesmas Pembantu	UPTD Puskesmas Purwoasri	153.523.655,00
361	Bangunan Puskesmas	UPTD Puskesmas Purwoasri	136.195.528,00
362	Paving	UPTD Puskesmas Purwoasri	92.740.850,00
363	Lain-lain Bangunan Gedung Tempat Kerja	UPTD Puskesmas Purwoasri	17.650.000,00
364	Lain-lain Bangunan Gedung Tempat Kerja	UPTD Puskesmas Purwoasri	199.314.173,00
365	Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen	UPTD Puskesmas Purwoasri	21.000.000,00

No	Nama Barang (Jenis Gedung dan Bangunan	Lokasi	Nilai Aset
366	Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen	UPTD Puskesmas Purwoasri	21.000.000,00
367	Bangunan Tempat Tinggal Lain-lain	UPTD Puskesmas Purwoasri	13.500.000,00
368	Bangunan Klinik/Puskesmas	UPTD Puskesmas Sambi	641.149.361,00
369	Bangunan Klinik/Puskesmas	UPTD Puskesmas Sambi	807.910.801,00
370	Bangunan Klinik/Puskesmas	UPTD Puskesmas Sambi	2.687.404.144,00
371	Bangunan Klinik/Puskesmas	UPTD Puskesmas Sambi	37.409.000,00
372	Bangunan Klinik/Puskesmas	UPTD Puskesmas Sambi	83.831.000,00
373	Bangunan Klinik/Puskesmas	UPTD Puskesmas Sambi	123.865.739,00
374	Lain-lain Bangunan Gedung Tempat Kerja	UPTD Puskesmas Sambi	37.100.000,00
375	Lain-lain Bangunan Gedung Tempat Kerja	UPTD Puskesmas Sambi	26.700.000,00
376	Lain-lain Bangunan Gedung Tempat Kerja	UPTD Puskesmas Sambi	30.300.000,00
377	Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen	UPTD Puskesmas Sambi	4.702.500,00
378	Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen	UPTD Puskesmas Sambi	3.712.500,00
379	Bangunan Klinik/Puskesmas	UPTD Puskesmas Semen	499.911.434,00
380	Bangunan Klinik/Puskesmas	UPTD Puskesmas Semen	1.631.534.780,00
381	Bangunan Klinik/Puskesmas	UPTD Puskesmas Semen	11.000.000,00
382	Bangunan Klinik/Puskesmas	UPTD Puskesmas Semen	48.300.000,00
383	Bangunan Klinik/Puskesmas	UPTD Puskesmas Semen	433.357.265,00
384	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	UPTD Puskesmas Semen	40.000.000,00
385	Lain-lain Bangunan Gedung Tempat Kerja	UPTD Puskesmas Semen	61.270.000,00
386	Lain-lain Bangunan Gedung Tempat Kerja	UPTD Puskesmas Semen	37.000.000,00
387	Lain-lain Bangunan Gedung Tempat Kerja	UPTD Puskesmas Semen	5.000.000,00
388	Lain-lain Bangunan Gedung Tempat Kerja	UPTD Puskesmas Semen	23.200.000,00
389	Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen	UPTD Puskesmas Semen	192.183.578,00
390	Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen	UPTD Puskesmas Semen	25.000.000,00
391	Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen	UPTD Puskesmas Semen	35.000.000,00
392	Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen	UPTD Puskesmas Semen	25.000.000,00
393	Bangunan Klinik/Puskesmas	UPTD Puskesmas Sidomulyo	291.076.761,00
394	Bangunan Klinik/Puskesmas	UPTD Puskesmas Sidomulyo	15.000.000,00
395	Bangunan Klinik/Puskesmas	UPTD Puskesmas Sidomulyo	25.855.000,00

No	Nama Barang (Jenis Gedung dan Bangunan	Lokasi	Nilai Aset
396	Bangunan Klinik/Puskesmas	UPTD Puskesmas Sidomulyo	3.571.407.045,00
397	Bangunan Klinik/Puskesmas	UPTD Puskesmas Sidomulyo	225.389.810,00
398	Bangunan Klinik/Puskesmas	UPTD Puskesmas Sidomulyo	161.496.920,00
399	Bangunan Klinik/Puskesmas	UPTD Puskesmas Sidomulyo	50.000.000,00
400	Lain-lain Bangunan Gedung Tempat Kerja	UPTD Puskesmas Sidomulyo	10.756.625,00
401	Bangunan Gedung Kantor Permanen	UPTD Puskesmas Sidorejo	1.087.649.410,00
402	Bangunan Klinik/Puskesmas	UPTD Puskesmas Sidorejo	1.572.416.218,59
403	Bangunan Klinik/Puskesmas	UPTD Puskesmas Sidorejo	232.248.585,00
404	Bangunan Klinik/Puskesmas	UPTD Puskesmas Sidorejo	208.889.234,00
405	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	UPTD Puskesmas Sidorejo	3.111.000,00
406	Lain-lain Bangunan Gedung Tempat Kerja	UPTD Puskesmas Sidorejo	18.900.000,00
407	Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen	UPTD Puskesmas Sidorejo	40.000.000,00
408	Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen	UPTD Puskesmas Sidorejo	15.000.000,00
409	Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen	UPTD Puskesmas Sidorejo	30.000.000,00
410	Bangunan Klinik/Puskesmas	UPTD Puskesmas Sumberjo	594.723.146,66
411	Bangunan Klinik/Puskesmas	UPTD Puskesmas Sumberjo	1.688.027.332,00
412	Bangunan Klinik/Puskesmas	UPTD Puskesmas Sumberjo	771.010.380,00
413	Bangunan Klinik/Puskesmas	UPTD Puskesmas Sumberjo	204.500.413,00
414	Bangunan Puskesmas Pembantu	UPTD Puskesmas Sumberjo	226.565.810,00
415	Bangunan Puskesmas	UPTD Puskesmas Sumberjo	1.487.858.238,00
416	Lain-lain Bangunan Gedung Tempat Kerja	UPTD Puskesmas Sumberjo	9.440.796,05
417	Lain-lain Bangunan Gedung Tempat Kerja	UPTD Puskesmas Sumberjo	6.052.186,29
418	Lain-lain Bangunan Gedung Tempat Kerja	UPTD Puskesmas Sumberjo	17.550.000,00
419	Lain-lain Bangunan Gedung Tempat Kerja	UPTD Puskesmas Sumberjo	29.110.000,00
420	Lain-lain Bangunan Gedung Tempat Kerja	UPTD Puskesmas Sumberjo	8.511.000,00

No	Nama Barang (Jenis Gedung dan Bangunan	Lokasi	Nilai Aset
421	Pagar Permanen	UPTD Puskesmas Sumberjo	13.675.510,00
422	Bangunan Klinik/Puskesmas	UPTD Puskesmas Tarokan	477.498.874,00
423	Bangunan Klinik/Puskesmas	UPTD Puskesmas Tarokan	30.000.000,00
424	Bangunan Klinik/Puskesmas	UPTD Puskesmas Tarokan	1.935.177.865,00
425	Bangunan Klinik/Puskesmas	UPTD Puskesmas Tarokan	108.622.303,00
426	Bangunan Klinik/Puskesmas	UPTD Puskesmas Tarokan	56.591.333,00
427	Bangunan Klinik/Puskesmas	UPTD Puskesmas Tarokan	21.665.848,00
428	Bangunan Puskesmas Pembantu	UPTD Puskesmas Tarokan	1.488.800.000,00
429	Bangunan Puskesmas Pembantu	UPTD Puskesmas Tarokan	828.464.170,00
430	Bangunan Puskesmas Pembantu	UPTD Puskesmas Tarokan	624.450.900,00
431	Bangunan Puskesmas Pembantu	UPTD Puskesmas Tarokan	478.490.831,00
432	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	UPTD Puskesmas Tarokan	8.362.500,00
433	Lain-lain Bangunan Gedung Tempat Kerja	UPTD Puskesmas Tarokan	3.900.230,00
434	Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen	UPTD Puskesmas Tarokan	20.000.000,00
435	Bangunan Klinik/Puskesmas	UPTD Puskesmas Tiron	231.088.795,00
436	Bangunan Klinik/Puskesmas	UPTD Puskesmas Tiron	1.391.856.087,00
437	Bangunan Klinik/Puskesmas	UPTD Puskesmas Tiron	200.645.496,00
438	Bangunan Klinik/Puskesmas	UPTD Puskesmas Tiron	120.404.407,00
439	Lain-lain Bangunan Gedung Tempat Kerja	UPTD Puskesmas Tiron	15.390.000,00
440	Bangunan Tempat Tinggal Lain-lain	UPTD Puskesmas Tiron	10.000.000,00
441	Bangunan Tempat Tinggal Lain-lain	UPTD Puskesmas Tiron	10.000.000,00
442	Bangunan Tempat Tinggal Lain-lain	UPTD Puskesmas Tiron	15.000.000,00
443	Bangunan Gedung Kantor Permanen	UPTD Puskesmas Wates	26.835.000,00
444	Bangunan Gedung Kantor Permanen	UPTD Puskesmas Wates	3.125.000,00
445	Bangunan Gedung Kantor Permanen	UPTD Puskesmas Wates	6.563.700,00
446	Bangunan Gedung Kantor Permanen	UPTD Puskesmas Wates	4.075.000,00
447	Bangunan Klinik/Puskesmas	UPTD Puskesmas Wates	3.749.974.580,00
448	Bangunan Klinik/Puskesmas	UPTD Puskesmas Wates	537.923.863,00
449	Bangunan Klinik/Puskesmas	UPTD Puskesmas Wates	239.081.690,00
450	Bangunan Klinik/Puskesmas	UPTD Puskesmas Wates	203.120.171,00
451	Bangunan Puskesmas	UPTD Puskesmas Wates	192.885.302,00
452	Lain-lain Bangunan Gedung Tempat Kerja	UPTD Puskesmas Wates	25.931.420,00

No	Nama Barang (Jenis Gedung dan Bangunan	Lokasi	Nilai Aset
453	Lain-lain Bangunan Gedung Tempat Kerja	UPTD Puskesmas Wates	71.069.087,00
454	Rumah Negara Golongan III Tipe E Permanen	UPTD Puskesmas Wates	30.000.000,00
455	Bangunan Klinik/Puskesmas	UPTD Puskesmas Wonorejo	340.139.575,00
456	Bangunan Klinik/Puskesmas	UPTD Puskesmas Wonorejo	11.000.000,00
457	Bangunan Klinik/Puskesmas	UPTD Puskesmas Wonorejo	754.763.299,00
458	Bangunan Klinik/Puskesmas	UPTD Puskesmas Wonorejo	38.395.973,00
459	Bangunan Klinik/Puskesmas	UPTD Puskesmas Wonorejo	2.223.463.399,00
460	Bangunan Klinik/Puskesmas	UPTD Puskesmas Wonorejo	592.066.550,00
461	Bangunan Klinik/Puskesmas	UPTD Puskesmas Wonorejo	208.304.061,00
462	Bangunan Klinik/Puskesmas	UPTD Puskesmas Wonorejo	35.728.453,00
463	Bangunan Puskesmas Pembantu	UPTD Puskesmas Wonorejo	67.896.010,00
464	Lain-lain Bangunan Gedung Tempat Kerja	UPTD Puskesmas Wonorejo	6.000.000,00
465	Bangunan Tempat Tinggal Lain-lain	UPTD Puskesmas Wonorejo	15.000.000,00
466	Bangunan Tempat Tinggal Lain-lain	UPTD Puskesmas Wonorejo	8.000.000,00
467	Pagar Permanen	UPTD Puskesmas Wonorejo	213.831.575,00

Sumber : Aplikasi e-BMD Kemendagri

Tabel 2.17 Aset Peralatan dan Mesin Dinas Kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Kediri

NO	LOKASI	JUMLAH BARANG (unit)	NILAI ASET
1	Dinas Kesehatan	2.351	21.216.434.274,12
2	Puskesmas Semen	727	5.286.444.651,45
3	Puskesmas Mojo	617	4.671.297.702,57
4	Puskesmas Ngadi	5474	3.163.092.097,09
5	Puskesmas Kras	673	3.357.873.698,12
6	Puskesmas Pelas	381	2.715.081.846,89
7	Puskesmas Ngadiluwih	773	7.077.594.180,00
8	Puskesmas Wonorejo	560	3.376.882.782,47
9	Puskesmas Blabak	607	3.525.305.702,95
10	Puskesmas Wates	773	5.470.400.614,78
11	Puskesmas Sidomulyo	739	4.144.415.543,26
12	Puskesmas Ngancar	598	4.356.663.391,79

NO	LOKASI	JUMLAH BARANG (unit)	NILAI ASET
13	Puskesmas Puncu	1.003	4.859.532.099,02
14	Puskesmas Plosoklaten	596	3.602.211.683,52
15	Puskesmas Pranggang	476	2.795.111.510,03
16	Puskesmas Gurah	692	3.823.822.066,56
17	Puskesmas Adan-Adan	518	3.069.249.525,90
18	Puskesmas Pagu	513	3.740.930.291,11
19	Puskesmas Gampeng	386	2.955.672.524,05
20	Puskesmas Grogol	646	4.177.677.741,45
21	Puskesmas Papar	840	6.269.599.532,86
22	Puskesmas Purwoasri	480	3.051.835.906,63
23	Puskesmas Sumberjo	521	2.753.944.264,46
24	Puskesmas Puhjarak	981	4.348.581.778,36
25	Puskesmas Pare	534	3.552.455.118,75
26	Puskesmas Bendo	581	3.228.449.434,41
27	Puskesmas Sidorejo	518	3.636.420.776,69
28	Puskesmas Kepung	664	3.653.452.398,47
29	Puskesmas Keling	554	4.055.149.244,56
30	Puskesmas Kandangan	660	4.944.833.601,01
31	Puskesmas Tarokan	926	5.891.562.536,24
32	Puskesmas Kunjang	612	3.747.165.891,60
33	Puskesmas Tiron	649	4.083.988.690,62
34	Puskesmas Sambi	635	3.847.489.518,30
35	Puskesmas Bangsongan	520	3.105.692.935,57
36	Puskesmas Kayen Kidul	528	3.768.601.178,58
37	Puskesmas Ngasem	624	3.611.139.730,83
38	Puskesmas Badas	847	4.687.775.260,13
39	Upt Labkesda	110	1.833.494.951,33
40	Uptd Bpfak	494	2.480.422.769,97
	Total Peralatan dan Mesin		173.937.749.446,50

Sumber : Aplikasi e-BMD Kemendagri

2.2.3 Pendanaan Kesehatan

Transformasi Sistem Pembiayaan Kesehatan merupakan pilar keempat dari transformasi Kesehatan Indonesia yang memiliki fokus untuk memberikan adanya kemudahan dan kesetaraan akses layanan kesehatan, terutama masyarakat yang masuk dalam golongan kurang mampu. Terdapat 3 tujuan yang ingin dicapai, diantaranya adalah dengan memastikan ketersediaan, memastikan kecukupan dan keberlanjutan serta teralokasi dengan adil dan termanfaatkan dengan efektif dan efisien.

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Bab IX, istilah yang sebelumnya menggunakan pembiayaan kesehatan

diubah menjadi pendanaan kesehatan. Dalam Undang-Undang tersebut diarahkan bahwa penganggaran kesehatan harus berbasis kinerja yang terencana melalui Rencana Induk Bidang Kesehatan. Pendanaan Kesehatan yang sebelumnya mengatur pendanaan pelayanan kesehatan, saat ini mengatur lebih luas lagi meliputi pendanaan Upaya Kesehatan, bencana KLB/wabah, Sumber Daya Kesehatan, pengelolaan kesehatan dan penelitian, bahkan termasuk pendanaan pemeriksaan dan pelayanan Kesehatan terhadap korban tindak pidana dan/atau pemeriksaan mayat untuk kepentingan hukum, serta beban penyakit atau epidemiolog

Pendanaan Kesehatan bertujuan untuk mendanai pembangunan kesehatan secara berkesinambungan dengan jumlah yang mencukupi, teralokasi secara adil, dan termanfaatkan secara berhasil guna dan berdaya guna untuk meningkatkan derajat Kesehatan Masyarakat setinggi-tingginya. Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran Kesehatan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan kebutuhan Kesehatan daerah yang mengacu pada program Kesehatan nasional yang dituangkan dalam Rencana Induk Bidang Kesehatan dengan memperhatikan penganggaran berbasis kinerja.

2.2.3.1 PROGRAM JAMINAN KESEHATAN (JKN)

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan salah satunya memuat substansi tentang dukungan terhadap penyelenggaraan transformasi sistem Kesehatan melalui penguatan pendanaan Kesehatan serta menjamin manfaat dalam program jaminan Kesehatan berbasis kebutuhan dasar kesehatan.

Pemerintah pusat dan daerah berkewajiban menjamin penyediaan pembiayaan kesehatan yang berkesinambungan dengan jumlah yang mencukupi, teralokasi secara adil, dan termanfaatkan. Pembiayaan kesehatan merupakan besarnya dana yang harus disediakan untuk menyelenggarakan dan atau memanfaatkan berbagai upaya kesehatan yang diperlukan oleh perorangan, keluarga, kelompok, dan masyarakat.

Salah satu isu strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2021 – 2026 adalah pemerataan kepesertaan jaminan kesehatan masyarakat. UHC

(Universal Health Coverage) merupakan sistem penjaminan kesehatan yang memastikan setiap warga dalam populasi memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, bermutu dengan biaya terjangkau.

UHC merupakan suatu jawaban ketika masyarakat sulit berobat karena tidak memiliki kartu BPJS, sekarang cukup menggunakan KTP atau KK maka masyarakat sudah bisa berobat dengan gratis di puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah yang ada di Kabupaten Kediri. Sampai dengan 01 November 2023 cakupan UHC Kabupaten Kediri adalah sebesar 96,48% atau sebanyak 1.615.886 jiwa telah terdaftar dalam kepesertaan JKN.

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang secara resmi sudah diimplementasikan sejak tanggal 01 Januari 2014 untuk memberikan jaminan kesehatan kepada peserta agar dapat memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Program JKN memang dapat dikatakan telah mampu meningkatkan akses layanan kesehatan bagi masyarakat di Indonesia. Pelayanan kesehatan adalah salah satu hak mendasar masyarakat yang penyediaannya wajib diselenggarakan oleh pemerintah sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 28 H ayat (1) bahwa Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) pada dasarnya merupakan program Negara yang bertujuan memberi kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui program ini setiap penduduk diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak apabila terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan karena menderita sakit, mengalami kecelakaan, kehilangan pekerjaan, memasuki usia lanjut atau pensiun.

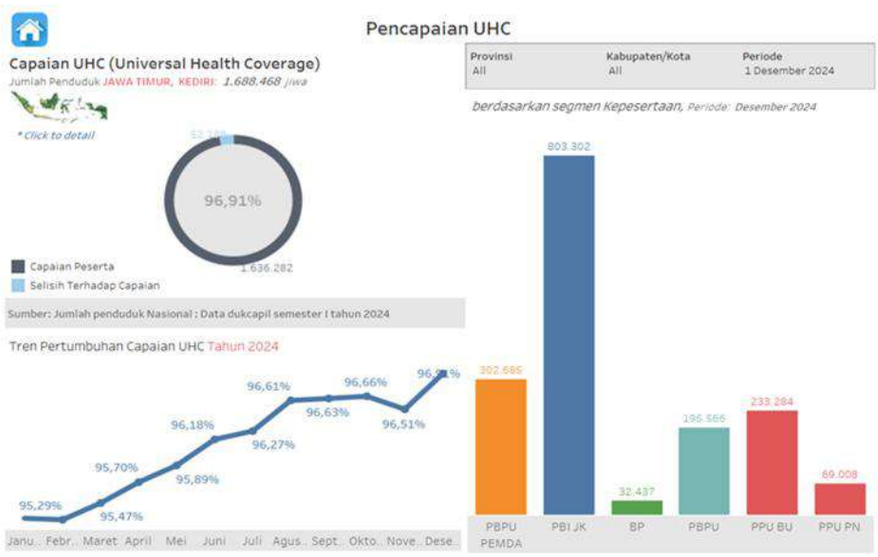
2.2.3.2 CAKUPAN JAMINAN KESEHATAN PENDUDUK MENURUT JENIS KEPESERTAAN

Jaminan kesehatan merupakan mekanisme gotong royong/ iuran pembiayaan kesehatan, untuk menjamin pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi peserta. Dengan ikut serta bergotong royong, masyarakat bisa mendapatkan pelayanan kesehatan kapan saja mereka memerlukannya, tanpa terkendala biaya. Pelayanan yang didapatkan juga tidak akan dibatasi hanya pada pelayanan dasar namun juga pelayanan Tingkat lanjutan.

Universal Health Coverage (UHC) merupakan sistem kesehatan yang memastikan setiap warga di dalam populasi memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang bermutu dengan biaya terjangkau. Cakupan pelayanan kesehatan dalam UHC mengandung 2 elemen penting yaitu (1) Akses pelayanan kesehatan yang adil dan bermutu bagi setiap warga dan (2) perlindungan resiko finansial ketika masyarakat mengakses pelayanan kesehatan. Dengan tercapainya Universal Health Coverage memastikan masyarakat memiliki akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu tanpa harus menghadapi kesulitan finansial.

Cakupan UHC (Universal Health Coverage) masyarakat Kabupaten Kediri Tahun 2024 sebagaimana tergambar dalam grafik di bawah ini:

Gambar 2.15 Pencapaian UHC



Sumber: Dashboard JKN, Desember 2024

Kepesertaan jaminan kesehatan Tahun 2024 diketahui bahwa segmen peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) sejumlah 67,7% (1.108.303 jiwa) dengan rincian: Penerima Bantuan Iuran APBN sebanyak 72,9% (808.002 jiwa) dan Penerima Bantuan Iuran APBD sebanyak 27,1% (300.301 jiwa).

Sedangkan segmen peserta non Penerima Bantuan Iuran (non PBI) sejumlah 32,3% (528.885 jiwa) dengan rincian: segmen peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) sebanyak 302.173 jiwa atau 57,1%, segmen peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) / mandiri sebesar 36,8% atau 194.372 jiwa serta segmen peserta Bukan Pekerja (BP) sebesar 6,1% atau 32.340 jiwa.

Gambar 2.16 Kepesertaan Jaminan Kesehatan Kabupaten Kediri Tahun 2024



2.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan terbagi dalam 2 periode Renstra yaitu Renstra Tahun 2016-2021 untuk menampilkan Kinerja Tahun 2020 dan Tahun 2021, Renstra Tahun 2021 – 2026 untuk menampilkan Kinerja Tahun 2022 – 2024.

Berikut Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Tahun 2020 – 2021:

Tabel 2.18 Pencapaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Tahun 2020-2021

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target Renstra PD Tahun		Realisasi Capaian Tahun		Rasio Capaian Tahun	
		2020	2021	2020	2021	2020	2021
1	*2*	*3*	*4*	*6*	*7*	*9*	*10*
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,79%	83,86%	80,19%	76,75%	95,70%	91.52%
2	Persentase Keluarga Sehat	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Hasil capaian 2 indikator di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Indeks Kepuasan Masyarakat atau IKM adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kualitatif dan kuantitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggaraan pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Dalam pelayanan kesehatan IKM dilakukan setiap tahun sekali untuk mengetahui sejauh mana persepsi masyarakat tentang pelayanan kesehatan di Dinas Kesehatan dan jaringannya. Selain itu survey kepuasan masyarakat dilakukan dilakukan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya.

Nilai IKM atau mutu pelayanan publik tahun 2021 sebesar 76,75 dengan mutu pelayanan B, berarti kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri adalah BAIK. Namun nilai ini mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020 yang mencapai 80,19

Persentase Keluarga Sehat

Keluarga sehat adalah program Indonesia sehat yang menjadi program prioritas kementerian kesehatan tahun 2016-2019, adalah kegiatan melakukan pendataan kesehatan keluarga per individu. Pada akhir tahun 2021, semua masyarakat yang ada di Kabupaten Kediri sudah terdata dalam keluarga sehat (100%). Dan kemudian di ukur indeks keluarga sehat yang di dapat pada keluarga tersebut.

Selanjutnya untuk mendukung program nasional Indonesia sehat dengan pendekatan keluarga, maka Dinas Kesehatan mengintervensi

agar tercapai keluarga sehat sesuai dengan perhitungan indikator keluarga sehat.

Dalam mendukung pencapaian Misi ke 2 RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026 yaitu Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Berkarakter Nasionalis dan Religius ditetapkan tujuan Dinas Kesehatan yaitu Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan masyarakat dengan Sasaran :

1) Meningkatnya akses pelayanan kesehatan masyarakat ;
2) Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan masyarakat dengan 2 Indikator Kinerja Utama yaitu :
   a. Persentase Masyarakat yang Memiliki Jaminan Kesehatan
   b. Persentase Faslitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah yang terakreditasi Miniml Utama

Berikut Capaian Indikator Kinerja Utama selama tahun 2022- 2024 :

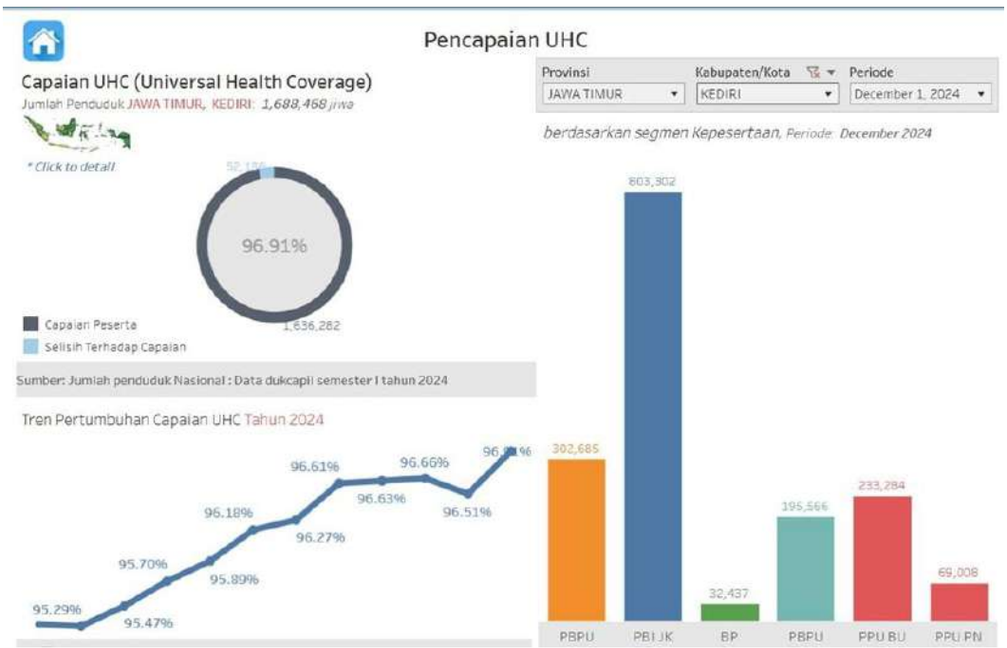
Tabel 2.18 Pencapaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Tahun 2022-2024

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target Renstra PD Tahun			Realisasi Capaian Tahun			Rasio Capaian Tahun		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1	Persentase Masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan	72%	74%	95%	78,74%	96%	96,91%	109,36%	129,72%	102,01%
2	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah Terakreditasi Minimal Utama	62%	64%	100%	58,97%	92,31%	100%	95,11%	144,23%	100%

Dari 2 indikator kinerja utama Dinas Kesehatan sampai dengan tahun 2024 sudah memenuhi target yang telah ditetapkan.

Persentase Masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan sampai akhir Desember 2024 sudah mencapai 96,91% dari target akhir 95%.

Gambar 2.17 Capaian UHC (Universal Health Coverage)Kabupaten Kediri Tahun 2024



Sumber data : Dashboard JKN BPJS Cabang Kediri

Persentase Fasilitas Kesehatan Pemerintah Yang Terakreditas Minimal Utama sampai dengan akhir 2024 sudah mencapai 100%. 37 Puskesmas suah terakreditasi Paripurna, begitupula RSUD Kabupaten Kediri dan RSUD Simpang Lima Gumul. Kedua rumah sakit pemerintah tersebut telah berstatus Paripurna.

Tabel 2.19 Status Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Kediri

No	Kode	Nama Faskes Pemerintah	Jenis	Lembaga Akreditasi	Nomer Sertifikat Akreditasi	Capaian akreditasi	Tanggal kadaluarsa Akreditasi	Tahap Akreditasi
1	3506014	RS Umum Daerah Kabupaten Kediri	RSU	Lembaga Akredltasl Rumah Saldt Damar Husada Paripurna ILARS DHP)	00086/U/X11/2022	Paripurna	01 Desember 2026	Sertifikasi Manual
2	3506066	RS Umum Daerah Simpang lima Gumul Kediri C	RSU	Lembaga Komisl Akreditasl Rumah Sakit (KARS)	KARS-SERT/402/XI/2022	Paripurna	14 November 2026	Sertifikasi Manual
3	35060200007	Puskesmas Pelas	Pusat Kesehatan Masyarakat	Lembaga Independent Penyelenggara Akreditasi Lipa Mitra Nusa	YM.02.01/D/11258/2023	Paripurna	05 September 2028	Sertifikat Manual
4	35060200016	Puskesmas Adan-Adan	Pusat Kesehatan Masyarakat	Lembaga Independent Penyelenggara Akreditasi Lipa Mitra Nusa	YM.02.01/D/2649/2024	Paripurna	25 November 2028	Sertifikat Manual

No	Kode	Nama Faskes Pemerintah	Jenis	Lembaga Akreditasi	Nomer Sertifikat Akreditasi	Capaian akreditasi	Tanggal kadaluarsa Akreditasi	Tahap Akreditasi
5	35060200024	Puskesmas Badas	Pusat Kesehatan Masyarakat	Lembaga Akreditasi Fasilitas Kesehatan Primer	YM.02.01/D/1036/2024	Paripurna	24 November 2028	Sertifikat Manual
6	35060200031	Puskesmas Bangsongan	Pusat Kesehatan Masyarakat	Lembaga Independent Penyelenggara Akreditasi Lipa Mitra Nusa	YM.02.01/D/18304/2023	Paripurna	31 Oktober 2028	Sertifikat Manual
7	35060200021	Puskesmas Bendo	Pusat Kesehatan Masyarakat	Lembaga Akreditasi Fasilitas Kesehatan Indonesia	YM.02.01/D/19723/2024	Paripurna	31 Januari 2029	Sertifikat Manual
8	35060200009	Puskesmas Blabak	Pusat Kesehatan Masyarakat	Lembaga Penyelenggara Akreditasi Pelayanan Kesehatan Paripurna	YM.02.01/D/13181/2023	Paripurna	31 Oktober 2028	Sertifikat Manual
9	35060200033	Puskesmas Gampeng	Pusat Kesehatan Masyarakat	Lembaga Akreditasi Fasilitas Kesehatan Primer	YM.02.01/D/1162/2024	Paripurna	25 November 2028	Sertifikat Manual
10	35060200036	Puskesmas Grogol	Pusat Kesehatan Masyarakat	Lembaga Akreditasi Fasilitas Kesehatan Primer	YM.02.01/D/4144/2024	Paripurna	17 November 2028	Sertifikat Manual
11	35060200015	Puskesmas Gurah	Pusat Kesehatan Masyarakat	Lembaga Independent Penyelenggara Akreditasi Lipa Mitra Nusa	YM.02.01/D/14690/2023	Paripurna	12 Oktober 2028	Sertifikat Manual
12	35060200020	Puskesmas Kandangan	Pusat Kesehatan Masyarakat	Lembaga Akreditasi Fasilitas Kesehatan Indonesia	YM.02.01/D/19730/2024	Paripurna	13 Februari 2029	Sertifikat Manual
13	35060200032	Puskesmas KayenKidul	Pusat Kesehatan Masyarakat	Lembaga Independent Penyelenggara Akreditasi Lipa Mitra Nusa	YM.02.01/D/14795/2023	Paripurna	21 Oktober 2028	Sertifikat Manual
14	"	Puskesmas Keling	Pusat Kesehatan Masyarakat	Lembaga Akreditasi Fasilitas Kesehatan Primer	YM.02.01/D/3476/2024	Paripurna	16 Desember 2028	Sertifikat Manual
15	35060200018	Puskesmas Kepung	Pusat Kesehatan Masyarakat	Lembaga Akreditasi Fasilitas Kesehatan Primer	YM.02.01/D/4281/2024	Paripurna	28 Oktober 2028	Sertifikat Manual
16	"	Puskesmas Kras	Pusat Kesehatan Masyarakat	Lembaga Akreditasi Fasilitas Kesehatan Primer	YM.02.01/D/9533/2023	Paripurna	08 Agustus 2028	Sertifikat Manual
17	35060200025	Puskesmas Kunjang	Pusat Kesehatan Masyarakat	Lembaga Akreditasi Fasilitas Kesehatan Primer	YM.02.01/D/3409/2024	Paripurna	09 Desember 2028	Sertifikat Manual
18	35060200001	Puskesmas Mojo	Pusat Kesehatan Masyarakat	Lembaga Independent Penyelenggara Akreditasi Lipa Mitra Nusa	YM.02.01/D/14895/2023	Paripurna	14 Oktober 2028	Sertifikat Manual
19	35060200002	Puskesmas Ngadi	Pusat Kesehatan Masyarakat	Lembaga Akreditasi Fasilitas Kesehatan Primer	YM.02.01/D/8807/2023	Paripurna	27 Juli 2028	Sertifikat Manual
20	"	Puskesmas Ngadiluwih	Pusat Kesehatan Masyarakat	Lembaga Akreditasi Fasilitas Kesehatan Primer	YM.02.01/D/16893/2023	Paripurna	26 Oktober 2028	Sertifikat Manual
21	35060200012	Puskesmas Ngancar	Pusat Kesehatan Masyarakat	Lembaga Akreditasi Fasilitas Kesehatan Primer	YM.02.01/D/15326/2023	Paripurna	31 Oktober 2028	Sertifikat Manual
22	35060200034	Puskesmas Ngasem	Pusat Kesehatan Masyarakat	Lembaga Akreditasi Fasilitas Kesehatan Primer	YM.02.01/D/12519/2023	Paripurna	21 September 2028	Sertifikat Manual

No	Kode	Nama Faskes Pemerintah	Jenis	Lembaga Akreditasi	Nomer Sertifikat Akreditasi	Capaian akreditasi	Tanggal kadaluarsa Akreditasi	Tahap Akreditasi
23	35060200030	Puskesmas Pagu	Pusat Kesehatan Masyarakat	Lembaga Independent Penyelenggara Akreditasi Lipa Mitra Nusa	YM.02.01/D/12813/2023	Paripurna	05 Oktober 2028	Sertifikat Manual
24	35060200023	Puskesmas Pare	Pusat Kesehatan Masyarakat	Lembaga Independent Penyelenggara Akreditasi Lipa Mitra Nusa	YM.02.01/D/512/2024	Paripurna	25 November 2028	Sertifikat Manual
25	35060200013	Puskesmas Plosoklaten	Pusat Kesehatan Masyarakat	Lembaga Independent Penyelenggara Akreditasi Lipa Mitra Nusa	YM.02.01/D/2427/2024	Paripurna	09 Desember 2028	Sertifikat Manual
26	35060200014	Puskesmas Pranggang	Pusat Kesehatan Masyarakat	Lembaga Independent Penyelenggara Akreditasi Lipa Mitra Nusa	YM.02.01/D/9330/2023	Paripurna	05 Agustus 2028	Sertifikat Manual
27	35060200026	Puskesmas Puhjarak	Pusat Kesehatan Masyarakat	Lembaga Independent Penyelenggara Akreditasi Lipa Mitra Nusa	YM.02.01/D/9589/2023	Paripurna	05 Agustus 2028	Sertifikat Manual
28	35060200017	Puskesmas Puncu	Pusat Kesehatan Masyarakat	Lembaga Independent Penyelenggara Akreditasi Lipa Mitra Nusa	YM.02.01/D/11935/2023	Paripurna	23 September 2028	Sertifikat Manual
29	"	Puskesmas Purwoasri	Pusat Kesehatan Masyarakat	Lembaga Independent Penyelenggara Akreditasi Lipa Mitra Nusa	YM.02.01/D/2435/2024	Paripurna	09 Desember 2028	Sertifikat Manual
30	"	Puskesmas Sambi	Pusat Kesehatan Masyarakat	Lembaga Independent Penyelenggara Akreditasi Lipa Mitra Nusa	YM.02.01/D/2607/2024	Paripurna	28 November 2028	Sertifikat Manual
31	35060200003	Puskesmas Semen	Pusat Kesehatan Masyarakat	Lembaga Akreditasi Fasilitas Kesehatan Primer	YM.02.01/D/19721/2024	Paripurna	27 Oktober 2028	Sertifikat Manual
32	35060200022	Puskesmas Sidorejo	Pusat Kesehatan Masyarakat	Lembaga Akreditasi Fasilitas Kesehatan Primer	YM.02.01/D/19519/2024	Paripurna	30 November 2028	Sertifikat Manual
33	5060200011	Puskesmas Silir	Pusat Kesehatan Masyarakat	Lembaga Independent Penyelenggara Akreditasi Lipa Mitra Nusa	YM.02.01/D/2434/2024	Paripurna	09 Desember 2028	Sertifikat Manual
34	35060200028	Puskesmas Sumberjo	Pusat Kesehatan Masyarakat	Lembaga Independent Penyelenggara Akreditasi Lipa Mitra Nusa	YM.02.01/D/19444/2023	Paripurna	18 November 2028	Sertifikat Manual
35	35060200029	Puskesmas Tanon	Pusat Kesehatan Masyarakat	Lembaga Akreditasi Fasilitas Kesehatan Primer	YM.02.01/D/35514/2024	Paripurna	02 Februari 2029	Sertifikat Manual
36	"	Puskesmas Tarokan	Pusat Kesehatan Masyarakat	Lembaga Independent Penyelenggara Akreditasi Lipa Mitra Nusa	YM.02.01/D/19180/2023	Paripurna	18 November 2028	Sertifikat Manual
37	35060200035	Puskesmas Tiron	Pusat Kesehatan Masyarakat	Lembaga Akreditasi Fasilitas Kesehatan Primer	YM.02.01/D/1967/2024	Paripurna	02 Desember 2028	Sertifikat Manual
38	35060200010	Puskesmas Wates	Pusat Kesehatan Masyarakat	Lembaga Independent Penyelenggara Akreditasi Lipa Mitra Nusa	YM.02.01/D/17085/2023	Paripurna	26 Oktober 2028	Sertifikat Manual
39	35060200005	Puskesmas Wonorejo	Pusat Kesehatan Masyarakat	Lembaga Independent Penyelenggara Akreditasi Lipa Mitra Nusa	YM.02.01/D/12554/2023	Paripurna	30 September 2028	Sertifikat Manual

Sumber data : Laporan Bidang Pelayanan Kesehatan

Tabel 2.20 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri Tahun 2020

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran (*Impact*), Program (*Outcome*), Kegiatan dan Sub Kegiatan (*Output*) Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target Renstra Dinas Kesehatan Tahun	Realisasi Renstra Dinas Kesehatan Tahun	Rasio CapaianTahun
		2020	2020	2020
1	*2*	*4*	*5*	*6*
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	**Cakupan pelayanan administrasi perkantoran**	**100%**	**100%**	**100%**
Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya administrasi Perkantoran			
Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi kelembagaan	100%	100%	100%
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	**Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi**	**100%**	**100%**	**100%**
Penyediaan/ Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan sarana dan prasarana kantor/ aparatur	Sarana/ peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	1 Paket	1 Paket	100%
	Jumlah puskesmas yang dibangun/direhab	2 Puskesmas	3 Puskesmas	150 %
	Terlaksananya penilaian aet barang milik daerah	1 Paket	1 Paket	100%
	Penambahan ruang gedung arsip	2 Ruang	2 Ruang	100%
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	**Persentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya**	**90%**	**90%**	**90%**
Pendidikan & pelatihan sumber daya aparatur	Persentase tenaga kesehatan yang sesuai dengan kompetensinya	50%	90%	180%
	Persentase tenaga kesehatan yang dibina sesuai dengan kompetensi	50%	50%	100%
	Jumlah calon tenaga kesehatan teladan terpilih tingkat kabupaten	2 nakes	2 nakes	100%
	Jumlah pelatihan yang dilaksanakan	4 pelatihan	4 pelatihan	100%
	Jumlah in house training yang dilaksanakan (RSUD SLG)	44 kegiatan	25 kegiatan	56%
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	**Cakupan program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan**	100%	100%	100%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran (*Impact*), Program (*Outcome*), Kegiatan dan Sub Kegiatan (*Output*) Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target Renstra Dinas Kesehatan Tahun	Realisasi Renstra Dinas Kesehatan Tahun	Rasio CapaianTahun
		2020	2020	2020
Penyusunan dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja dan ikhtisar kinerja keuangan yang disusun	2 dokumen	2 dokumen	100%
	Jumlah dokumen laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	100%
	Jumlah dokumen RENJA yang disusun	3 dokumen	3 dokumen	100%
	Jumlah laporan keuangan yang disusun dalam 1 tahun oleh subbag keuangan	15 laporan	15 laporan	100%
	Jumlah dokumen profil yang disusun	38 dokumen	38 dokumen	100%
	Frekuensi pemeliharaan LAN	12 bulan	12 bulan	100%
	Jumlah LAN yang terpelihara	2 jaringan	2 jaringan	100%
	Frekuensi Belanja publikasi	12 kali	12 kali	100%
PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	**Persentase keluarga yang mencapai indeks keluarga sehat (IKS) sehat**	17%	14%	82%
	Persentase Desa Siaga Aktif Purnama Mandiri	17%	11,6%	68%
	Persentase Rumah Sehat	90%	79%	87%
Kesehatan Keluarga dan Gizi	Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai standar	100%	88%	88%
	Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin sesuai standar	100%	90,45%	90%
	Persentase Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100%	93%	93%
	Persentase Pelayanan Kesehatan Balita	100%	75,2%	75,2%
	Persentase Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	100%	96,4%	96,4%
	Prosentasi Usia Lanjut Yang Mendapat Skrining	44%	77,3%	175%
Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat	Prosentase rumah tangga sehat	63%	38,57%	61,2%
	Prosentase Jumlah Posyandu Purnama Mandiri	95%	58,41%	61,4%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran (*Impact*), Program (*Outcome*), Kegiatan dan Sub Kegiatan (*Output*) Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target Renstra Dinas Kesehatan Tahun	Realisasi Renstra Dinas Kesehatan Tahun	Rasio CapaianTahun
		2020	2020	2020
	Prosentase taman posyandu optimal	88%	84,86%	96%
	Prosentase poskesdes aktif	80%	61,62%	77%
	Prosentase poskestren aktif	32%	8,33%	26%
	Prosentase SBH aktif	95%	77,25%	81%
	Jumlah kegiatan promosi kesehatan dan pola hidup sehat yang dilaksanakan di RSUD SLG	31 kegiatan	23 kegiatan	74 %
Peningkatan Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Keluarga dan Olah raga	Persentase rumah sehat	85%	78,74%	92%
	Persentase TPM yang memenuhi syarat	50%	68,73%	137%
	Persentase TTU yang memenuhi syarat	80%	82,5%	103%
	Jumlah Kecamatan Sehat	26 Kec	26 Kec	100%
	Presentase desa ODF	80%	60%	75%
	Jumlah Pos UKK terbentuk	25 pos	30 pos	120%
	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Upaya Kesehatan olah raga	35 pusk	37 pusk	105%
Bantuan Operasional Puskesmas	Jumlah puskesmas yang didanai kegiatan dengan dana BOK	37 puskesmas	37 puskesmas	100%
	Frekuensi kegiatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif bersumber dana BOK yang terlaksana	12 bulan	12 bulan	100%
Jaminan Persalinan	Frekuensi tersedianya dana untuk pelayanan persalinan di puskesmas	12 bulan, 37 puskesmas	12 bulan, 37 puskesmas	100%
PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN	**Persentase pemenuhan kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan di sarana kesehatan pemerintah**	90%	81%	90%
Peningkatan Pelayanan, pemenuhan, pembinaan, pengawasan, di bidang Kefarmasian, Pangan NAPZA, PKRT	Jumlah tenaga kefarmasian yang mendapatkan surat izin praktek	30 orang	43 orang	143 %
	Presentase sarana kefarmasian pemerintah dan swasta yang dilakukan pengawasan dan pembinaan	58%	0%	0%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran (*Impact*), Program (*Outcome*), Kegiatan dan Sub Kegiatan (*Output*) Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target Renstra Dinas Kesehatan Tahun	Realisasi Renstra Dinas Kesehatan Tahun	Rasio CapaianTahun
		2020	2020	2020
	Jumlah masyarakat/kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan di bidang obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, PKRT dan P-IRT	205 orang	0%	0%
	Jumlah IRTP, UMOT, PKRT yang mendapatkan sertifikat/registrasi/izin	183 sarana	120 sarana	65%
	Presentase jumlah item obat yang terpenuhi sesuai dengan Kebutuhan obat	83%	87,7%	105,6%
Pengelolaan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai	Persentase Obat dan Perbekalan kesehatan dengan tingkat aman	80%	57,64%	72,05%
	Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan	75%	58,35%	77,8%
	Persentase kegiatan monitoring obat dan perbekalan kesehatan	90%	90%	100%
	Persentase pelaporan obat dan perbekalan kesehatan puskesmas (LPLPO) yang benar	65%	54,60%	84%
PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR	Insiden Rate DBD	≤49	21,39	43,65%
	Presentase kasus HIV mendapat ARV	90%	89%	98%
	Prosentase keberhasilan pengobatan kusta kering (PB)	100%	100%	100%
	Prosentase keberhasilan pengobatan kusta basah (MB)	94,9%	100%	105,3%
	Prosentase Keberhasilan Pengobatan TB	89%	95%	106%
	Angka Kesakitan Diare untuk Semua Umur	≤ 270	8,4	3,1%
	Angka Kesakitan Diare untuk Balita	≤ 843	51,39	6,09%
	Persentase desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	99,4%	67,4%	67,80%
	Persentase Kejadian Luar Biasa (KLB) ditangulangi < 24 jam	100%	100%	100%
Pencegahan dan pengendalian penyakit menular	Porsentase penemuan kasus diare pada semua umur	80%	37,3%	46,6%
	Prosentase penemuan kasus diare pada balita	70%	41,8%	59,7%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran (*Impact*), Program (*Outcome*), Kegiatan dan Sub Kegiatan (*Output*) Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target Renstra Dinas Kesehatan Tahun	Realisasi Renstra Dinas Kesehatan Tahun	Rasio CapaianTahun
		2020	2020	2020
	Prosentase bumil dilakukan screening HBsAg/Hepatitis	80%	84%	105%
	Prosesntase kasus ISPA tertangani sesuai standar	80%	97,6%	122%
	Prosentase penemuan dan penanganan kasus TB	70%	39,3%	56,1%
	Prosentase cacat 2 kasus kusta baru	< 5 %	1,6%	32%
	Prosentase penemuan kasus kusta pada anak	< 5 %	5%	100%
	Prosesntase penderita kusta RFT MB	95%	100%	105%
	Prosesntase penderita kusta RFT PB	100%	100%	100%
	Persentase orang beresiko terinveksi HIV mendapatkan pemeriksaan sesuai standart	90%	72,6%	80,6%
	Persentase jumlah pengidap HIV yang mengakses layanan CST	90%	89%	98%
	Persentase Kasus DBD ditangani sesuai standard	100%	100%	100%
Peningkatan imunisasi dan surveilans	Jumlah desa/kelurahan Universal Child Immunization	341	232	68%
	Jumlah KLB yg ditanggulangi < 24 jam	7	20	285%
	Persentase ketepatan dan kelengkapan laporan penyakit potensial KLB	98,5%	97,7%	99,1%
Peningkatan Pelayanan Penyakit Tidak Menular dan Keswa	Presentase penderita DM yg dilayani sesuai standart	100%	48,04%	48,04%
	Presentase penderita Hipertensi mendapatkan pelayanan sesuai standart	100%	10,7%	10,7%
	Presentase WNI usia 15 sd 59 th mendapatkan screening kesehatan sesuai standart	100%	14,32%	14,32%
	Presentase desa yang melaksanakan Posbindu	50%	88,60%	177,2%
	Presentase sekolah yang melaksanakan KTR.	50%	44,62%	89,24%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran (*Impact*), Program (*Outcome*), Kegiatan dan Sub Kegiatan (*Output*) Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target Renstra Dinas Kesehatan Tahun	Realisasi Renstra Dinas Kesehatan Tahun	Rasio CapaianTahun
		2020	2020	2020
	Presentase Perempuan usia 30 sd 50 th terdeteksi kanker leher rahim dan kanker payudara .	16%	3,27%	20,43%
	Presentase ODGJ berat ditangani sesuai standart	100%	100%	100%
PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN	**Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut (FKTL) terakreditasi**	**82%**	**90,9%**	110,8%
	Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) terakreditasi	**12%**	**11,1%**	92,5%
	Persentase pengobat/penyehat tradisional yang memiliki ijin	**40%**	**32,6%**	81,5%
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Persentase RS, klinik utama, laboratorium, dan optic yang dibina	100%	100%	100%
	Rasio tempat tidur RS per satuan penduduk	1:1533	1:1339	1:87%
	Jumlah sarana kesehatan tingkat lanjutan (FKTL) yang terakreditasi	10	11	110%
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Primer	Persentase Klinik Pratama yang dibina	97%	96%	98%
	Persentase Praktik Perorangan dokter/dokter Gigi yang dibina	75%	60%	80%
	Persentase laboratorium klinik pratama yang dibina.	100%	0%	0%
	Persentase puskesmas yang melaksanakan penilaian kinerja puskesmas	100%	100%	100%
	Jumlah Puskesmas yang terakreditasi/reakreditasi	37 puskesmas	10 puskesmas	27%
	Persentase puskesmas yang dibina	100%	100%	100%
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional	Persentase Penyehat Tradisional yang dibina	40%	25,0%	62,5%
	Persentase Tenaga Kesehatan Tradisional yang dibina	80%	100%	125%
	Persentase Puskesmas yang melakukan pembinaan pelayanan kesehatan tradisional	85%	100%	117%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran (*Impact*), Program (*Outcome*), Kegiatan dan Sub Kegiatan (*Output*) Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target Renstra Dinas Kesehatan Tahun	Realisasi Renstra Dinas Kesehatan Tahun	Rasio CapaianTahun
		2020	2020	2020
PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PENDUDUK MISKIN	**Persentase masyarakat miskin yang mendapatkan jaminan kesehatan**	40%	-	0%
	Persentase nakes yang memiliki kompetensi sesuai standart	50%	-	0%
Manajemen dan koordinasi pelayanan masyarakat miskin	Jumlah masyarakat miskin penerima bantuan iuran	23.879	23.467	98%
	Persentase masyarakat miskin yang dilayani FKTP	90%	100,00%	110%
	Persentase penyerapan dana operasional puskesmas	100%	87%	87%
PROGRAM : PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA PRASARANA PUSKESMAS/ PUSTU DAN JARINGANNYA	**Cakupan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Pustu dan jaringannya yang diadakan dan terpelihara**	**90%**	**90%**	100%
Peningkatan, pemeliharaan dan perbaikan sarana prasarana puskesmas dan puskesmas pembantu,	Tersedianya sarana /peralatan dan perlengkapan kantor	1 Paket Dinas	1 Paket Dinas	100%
	Jumlah puskesmas yang direhab dan dibangun	8 puskesmas	11 puskesmas	137,5%
	Terlaksananya Penilaian Asset barang nlik Daerah	1 Paket	1 Paket	100%
	Penambahan Ruang Gedung (Arsip)	4 ruang	4 ruang	100%
Peningkatan, pelayanan penyediaan peralatan kesehatan dan sarana prasarana	Jumlah asset bangunan yang dikelola	20 unit	20 unit	100%
PROGRAM : PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RS/RSJ/RS PARU-PARU/ RS MATA	**Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL) yang memenuhi standar minimal alat kesehatan dan sarana prasarana**	**100%**		0%
Pembangunan instalasi pengolahan limbah RS	Terpenuhinya pembangunan instalasi pengolahan limbah	5 kegiatan	4 kegiatan	80%
Pengadaan obat-obatan RS	Tersedianya obat-obatan rumah sakit	106 kegiatan	106 kegiatan	100%
Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit	Terpenuhinya pengadaan bahan-bahan logistik di rumah sakit	107 kegiatan	107 kegiatan	100%
Pengadaan Alat-alat Kedokteran Rumah Sakit	Terpenuhinya pengadaan alat-alat kedokteran rumah sakit	12 kegiatan	6 kegiatan	50%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran (*Impact*), Program (*Outcome*), Kegiatan dan Sub Kegiatan (*Output*) Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target Renstra Dinas Kesehatan Tahun	Realisasi Renstra Dinas Kesehatan Tahun	Rasio CapaianTahun
		2020	2020	2020
Penyediaan/ Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan sarana dan prasarana kantor/ aparatur	Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan perlengkapan sarana dan prasarana rumah sakit	196 kegiatan	196 kegiatan	100%
PROGRAM : PENGADAAN PENINGKATAN, DAN PENGEMBANGAN UJI LABORATORIUM KESEHATAN	**Persentase cakupan peningkatan dan pengembangan iji laboratorium kesehatan**	**100%**	**100%**	100%
Pengadaan dan Peningkatan pelayanan uji laboratorium (UPTD Labkes)	Jumlah reagen untuk pengadaan media uji labkes donor darah	4 reagen	4 reagen	100%
	Jumlah pertemuan tenaga laboratorium puskesmas dan RS/ klinik swasta yang diadakan	3 kegiatan	3 kegiatan	100%
	Jumlah pengadaan reagen kimia dan biologi untuk pemeriksaan sampel air dan makanan	5 kegiatan	5 kegiatan	100%
	Jumlah pengadaan suku cadang lab	1 kegiatan	1 kegiatan	100%
	Jumlah puskesmas yang mendapatkan bimbingan teknis	37 puskesmas	37 puskesmas	100%
	Jumlah sampel air yang diperiksa secara bakteriologi	6 sampel	6 sampel	100%
	Jumlah sampel air yang diperiksa secara kimia	6 sampel	6 sampel	100%
	Jumlah puskesmas yang sarana dan prasarananya dimonitoring	37 puskesmas	37 puskesmas	100%
PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN BLUD				
Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD	Jumlah laporan belanja fungsional BLUD setiap bulan dan laporan tahunan dalam 1 tahun anggaran	13 laporan	13 laporan	100%

Tabel 2.21 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri Tahun 2021

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran (*Impact*), Program (*Outcome*), Kegiatan dan Sub Kegiatan (*Output*) Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target Renstra Dinas Kesehatan Tahun	Realisasi Renstra Dinas Kesehatan Tahun	Rasio CapaianTahun
		2021	2021	2021
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan**	**78%**	**78%**	100%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase pelaksanaan kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100%**	**100%**	100%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun (Rentra, Renja)	2 dokumen	2 dokumen	100%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan keuangan yang dihasilkan dalam 1 tahun (Lap bulanan, semesteran, tahunan)	15 laporan	15 laporan	100%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Cakupan pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	100%	100%	100%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tercukupinya gaji dan tunjangan ASN	100%	100%	100%
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan administrasi (penerima honor)	93	93	100%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan dalam 1 tahun	93	93	100%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Cakupan pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah**	100%	100%	100%
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah baju kerja yang diadakan	20	8	40%
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase peserta pendidikan dan pelatihan yang mengalami peningkatan pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan	80%	75%	93%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Cakupan pelaksanaan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	100%	100%	100%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran (*Impact*), Program (*Outcome*), Kegiatan dan Sub Kegiatan (*Output*) Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target Renstra Dinas Kesehatan Tahun	Realisasi Renstra Dinas Kesehatan Tahun	Rasio CapaianTahun
		2021	2021	2021
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Frekuensi pemeliharaan jaringan listrik dalam 1 tahun (kali)	2	2	100%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis barang yang tersedia /di adakan dalam 1 tahun	17	5	35%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Frekuensi pembelian peralatan rumah tangga dalam 1 tahun (kali)	4	4	100%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis barang / bahan yang tersedia /di adakan dalam 1 tahun	80	80	100%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jenis barang cetakan	7	7	100%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jenis bahan bacaan	2	2	100%
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu dalam 1 tahun	500	325	65%
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi dengan lintas program, lintas sektor dalam 1 tahun	150	71	47,3%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan pelaksanaan kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	100%	100%	100%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Frekuensi kegiatan pelayanan surat menyurat dalam 1 tahun (kali)	12	12	100%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Frekruensi penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dalam 1 tahun (kali)	12	12	100%
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Frekuensi pemeliharaan alat kantor dalam 1 tahun (kali)	12	12	100%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Frekuensi kegiatan pelayanan umum kantor dalam 1 tahun (kali)	12	12	100%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	100%	100%	100%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan	Jumlah kendaraan operasional yang terbayarkan pajaknya dalam 1 tahun	10	10	100%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran (*Impact*), Program (*Outcome*), Kegiatan dan Sub Kegiatan (*Output*) Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target Renstra Dinas Kesehatan Tahun	Realisasi Renstra Dinas Kesehatan Tahun	Rasio CapaianTahun
		2021	2021	2021
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan operasional yang mendapatkan pemeliharaan dalam 1 tahun	10	10	100%
Pemeliharaan Mebel	Frekuensi pemeliharaan mebelair dalam 1 tahun (kali)	2	2	100%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Frekuensi pemeliharaan alat kantor dalam 1 tahun (kali)	12	12	100%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Frekuensi pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dalam 1 tahun (kali)	3	3	100%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Frekuensi pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dalam 1 tahun (kali)	3	3	100%
Peningkatan Pelayanan BLUD	**Persentase Puskesmas melaksanakan kegiatan penunjang pelayanan BLUD**	100%	100%	100%
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah puskesmas yang melaksanakan kegiatan penunjang pelayanan BLUD	37 puskesmas	37 npuskesmas	100%
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	**Persentase Kecamatan STBM**	1%	0%	0%
	Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) terakreditasi	12%	41,6%	346,6%
	Indeks Keluarga Sehat	0,14	0,15	107,14%
	Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL) terakreditasi	78,5%	73,3%	93,3%
	Persentase Nakestrad dan Hattra yang memiliki izin	15%	29%	193%
	AKI	41,64	138,46	332,51%
	AKB	6,87	7,16	

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran (*Impact*), Program (*Outcome*), Kegiatan dan Sub Kegiatan (*Output*) Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target Renstra Dinas Kesehatan Tahun	Realisasi Renstra Dinas Kesehatan Tahun	Rasio CapaianTahun
		2021	2021	2021
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Cakupan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota sesuai kebutuhan**	100%	100%	100%
Pembangunan puskesmas	Presentase Pemenuhan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Gedung Puskesmas dan Jaringannya	100%	100%	100%
Pengembangan Puskesmas	Presentase Pemenuhan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Gedung Puskesmas dan Jaringannya	16,7% (7/42)	24%	143,71%
Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Meubelair Puskesmas	100% (100/100)	0%	0%
	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Alat Kedokteran Umum Puskesmas	8 paket	8 paket	100%
	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Alat Kedokteran Gigi Puskesmas	7 paket	7 paket	100%
	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Alat Kesehatan Umum Lainnya Puskesmas	41 paket	41 paket	100%
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kecukupan alat kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	77%	100%	129%
Pengadaan dan pemeliharaan alat kalibrasi	Jumlah alat kesehatan yang dikalibrasi	100 alat	49 alat	49%
Pengadaan Obat, Vaksin	Persentase Pengadaan obat dengan tingkat aman	76%	72,05%	94,80%
	Jumlah item pengadaan obat , vaksin	50	57	114%
Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah item pengadaan bahan habis pakai	7	12	171%
Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Puskesmas yang dilakukan kegiatan pemeliharaan rutin dan berkala alkes/alat penunjang medik	37 puskesmas	37 puskesmas	100%
Distribusi alat kesehatan, obat, vaksin, BMHP, makmin ke puskesmas serta faskes lainnya	Obat dan alkes yang di distribusikan dalam satu tahun	100%	100%	100%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran (*Impact*), Program (*Outcome*), Kegiatan dan Sub Kegiatan (*Output*) Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target Renstra Dinas Kesehatan Tahun	Realisasi Renstra Dinas Kesehatan Tahun	Rasio CapaianTahun
		2021	2021	2021
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Cakupan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan tingkat daerah (Cakupan kunjungan rawat jalan dan rawat inap)**	78%	78%	100%
	Persentase Puskesmas Dengan Kelulusan Akreditasi Minimal Utama	57%	57%	100%
	Persentase tenaga kesehatan tradisional yang dibina	100%	100%	100%
	Persentase penyehat tradisional yang dibina	25,0%	29,0%	116,0%
	Persentase desa yang terbentuk Asman TOGA	22,00%	21,0%	95,0%
	Persentase puskesmas yang melaksanakan pembinaan yankestrad	100%	100%	100%
	Persentase akses sanitasi layak	23%	95,5%	415,2%
	Jumlah tingkatan tatanan dalam kabupaten sehat	6	6	100%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Cakupan ibu hamil dilayani sesuai standar (K4)	89%	88%	98%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Cakupan ibu bersalin dilayani sesuai standar	92%	90,45%	98,31%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Cakupan Bayi Baru Lahir dilayani sesuai standar (KN2)	94%	93%	98%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Cakupan Balita dilayani sesuai standar	77%	72,50%	94,15%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai standar	55%	96,4%	175,27%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	100%	40%	40%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Sesuai standar	50%	77,30%	154,6%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran (*Impact*), Program (*Outcome*), Kegiatan dan Sub Kegiatan (*Output*) Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target Renstra Dinas Kesehatan Tahun	Realisasi Renstra Dinas Kesehatan Tahun	Rasio CapaianTahun
		2021	2021	2021
Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Persentase penderita hipertensi dilayani sesuai standar	10,70%	26,00%	242,99%
Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita diabetes militus	Persentase penderita DM dilayani sesuai standar	48,00%	93,00%	193,75%
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	100%	119%	119%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	32%	25,38%	79,31%
	Persentase penemuan dan penanganan kasus TB	43%	39,30%	91,39%
	Persentase keberhasilan pengobatan TB	96%	33,33%	34,71%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	92%	84,86%	92,23%
	Persentase Orang dengan HIV yang mendapatkan ARV	89%	79%	88,7%
Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi KLB	Cakupan Pelayanan Kesehatan bagi penduduk pada Kondisi KLB	100%	100%	100%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Cakupan Pemberian Vit A	88%	83,33%	94,69%
	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	15,50%	14,10%	90,96%
	Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita	9%	7,19%	79,88%
	Prevalensi anemia pada ibu hamil	26%	14%	53,8%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	a. Jumlah Pos UKK yang terbentuk	40 Pos	49 Pos	122,5%
	b. Persentase jumlah jamaah haji yang diukur kebugaran jasmaninya	80%	48%	60%
	c. Jumlah Puskesmas yang melaksanakan upaya kesehatan olahraga	37 puskesmas	37 puskesmas	100%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran (*Impact*), Program (*Outcome*), Kegiatan dan Sub Kegiatan (*Output*) Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target Renstra Dinas Kesehatan Tahun	Realisasi Renstra Dinas Kesehatan Tahun	Rasio CapaianTahun
		2021	2021	2021
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase Tempat Pengelolaan pangan yang memenuhi syarat sesuai standar	68,73%	70%	101,84%
	Persentase desa ODF	62,30%	77,90%	125,04%
	Persentase sarana air minum yang diawasi / diperiksa kualitas airnya	78,20%	73,00%	93,35%
	Jumlah Fasyankes yang memiliki pengelolaan limbah medis	70,00%	100,00%	142%
	Persentase Tempat-tempat umum yang dilakukan pengawasan sesuai standar	82,50%	85,00	103,03%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah tenaga kesehatan tradisional yang dibina	6	9	150%
	Jumlah penyehat tradisional yang dibina	360	410	113%
	Jumlah desa yang terbentuk Asman TOGA	74	73	98,6%
	Jumlah puskesmas yang melaksanakan pembinaan yankestrad	37 puskesmas	37 puskesmas	100%
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Presentase KLB yang ditanggulangi ≤ 24 jam	100%	100%	100%
	Penemuan kasus AFP	0	1	100%
	Penemuan kasus suspect campak	0	2	200%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Persentase ODGJ ditangani sesuai standar	100%	100%	100%
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase penderita HT ditangani sesuai standar	10,7%	26,0%	242,9%
	Persentase Penderita DM ditangani Sesuai standar	48,0%	93,0%	193,7%
	Persentase WNI usia 15 - 59 tahun mendapatkan screening sesuai standar	100,0%	40,0%	40,0%
	Persentase desa yang melaksanakan Posbindu	88,6%	89,8%	101,3%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran (*Impact*), Program (*Outcome*), Kegiatan dan Sub Kegiatan (*Output*) Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target Renstra Dinas Kesehatan Tahun	Realisasi Renstra Dinas Kesehatan Tahun	Rasio CapaianTahun
		2021	2021	2021
	Persentase sekolah yang melaksanakan KTR	44,6%	80,0%	179,3%
	Persentase Wanita Usia Subur yang melakukan deteksi dini penyakit Kanker payudara dan kanker leher rahim pada usia 30 sd 50 tahun	3,2%	2,4%	75%
	Persentase penemuan kusta pada anak	<5%	6,0%	120%
	Persentase cacat pada kasus kusta baru	<5%	1,6%	32
	Persentase penderita kusta RFT-MB	95,0%	100,0%	105%
	Persentase penderita kusta RFT-PB	100,0%	100,0%	100%
	Persentase cakupan tatalaksana pneumonia balita	40,0%	40,0%	100%
	Persentase Puskesmas yang melaksanakan tatalaksana Diare sesuai standar	80,0%	100,0%	125%
	Persentase Puskesmas yang melaksanakan advokasi dan / sosialisasi Pengendalian PISP	60,0%	60,0%	100%
	Persentase Puskesmas yang mempunyai Layanan Rehidrasi Oral Aktif (LROA)	65,0%	60%	92,3%
	Persentase Kasus Diare pada semua umur ditangani sesuai standar	50,0%	41,2%	82,4
	Persentase Kasus Diare pada Balita ditangani sesuai standar	40,0%	35,2%	88%
	Persentase Bumil dilakukan (DDHB) Deteksi Dini Hepatitis B	70,0%	80,0%	114%
	Persentase bayi lahir dari Ibu reaktif HBsAg mendapat HBIg < 24 jam	100,0%	100,0%	100%
	Persentase bayi usia 9-12 bulan yang mendapat HBIg di test HBsAg hasilnya Non Reaktif	100,0%	80,0%	80%
	Persentase kasus DBD ditangani sesuai standar	100,0%	100,0%	100%
	Persentase Angka Bebas Jentik (ABJ)	>=80%	81,0%	101%
	Persentase anak usia 1-12 Tahun mendapatkan obat Cacing	100,0%	98,6%	98,6%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran (*Impact*), Program (*Outcome*), Kegiatan dan Sub Kegiatan (*Output*) Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target Renstra Dinas Kesehatan Tahun	Realisasi Renstra Dinas Kesehatan Tahun	Rasio CapaianTahun
		2021	2021	2021
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Persentase penduduk dalam data base yang memiliki jaminan kesehatan	70%	72%	102,8%
Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah masyarakat /tokoh masyarakat yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan NAPZA	0	0	0%
	Jumlah pengadaan urine test	300	500	166%
Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Presentase pengambilan dan pengiriman spesimen ≤ 24 jam ke laboratorium pemeriksa	100%	100%	
Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Kecamatan sehat	18 kec.	26 kec.	144%
Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah puskesmas yang melaksanakan pelayanan preventif promotif, layanan persalinan	37 puskesmas	37 puskesmas	100%
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah puskesmas yang melaksanakan kegiatan operasional fasyankes	37 puskesmas	37 puskesmas	100%
Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas Dengan Kelulusan Akreditasi Minimal Utama	21 puskesmas	21 puskesmas	100%
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah desa yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap anak usia 0-11 bulan	341	151	44,2%
	Presentase Bayi usia 0-11 bulan yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap	92,9%	80,6%	86,7%
	Persentase anak usia 18-24 bulan yang mendapat imunisasi lanjutan Campak dan Rubella	76,4%	80,7%	105,6%
Pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon wabah	Presentase pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon wabah	100,0%	100,0%	100%
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	**Tingkat ketersediaan sistem informasi kesehatan**	**37 puskesmas**	**37 puskesmas**	**100%**
Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah dokumen informasi yang disusun	38 dokumen	38 dokumen	100%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran (*Impact*), Program (*Outcome*), Kegiatan dan Sub Kegiatan (*Output*) Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target Renstra Dinas Kesehatan Tahun	Realisasi Renstra Dinas Kesehatan Tahun	Rasio CapaianTahun
		2021	2021	2021
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah LAN yang terpelihara dan puskesmas yang menggunakan simpus dan e-SPM	2 jaringan 37 pkm	2 jaringan 37 pkm	100%
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diterbitkan**	**100%**	**100%**	100%
	Persentase Puskesmas dengan Tingkat Kinerja Baik (≥ 89%)	5,4%	2,7%	50%
	Persentase keluarga yang mendapat intervensi	**5,5%**	**5,9%**	107,2%
	Persentase Klinik Pratama yg terakreditasi	**0%**	**0%**	0%
	Persentase RS yang terakreditasi paripurna	**21,43%**	**27,27%**	127,25%
	Persentase Klinik Utama yang terakreditasi	**0%**	**0%**	0%
	Persentase lab Madya yang terakreditasi	**0%**	**0%**	0%
Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Puskesmas dengan Tingkat Kinerja Baik (≥ 89%)	2 puskesmas	1 puskesmas	50%
	Jumlah keluarga yang mendapat intervensi sesuai hasil survey KS	22.402 keluarga	23.209 keluarga	103,6%
	Jumlah Klinik Pratama yg terakreditasi	0 klinik	0	0%
Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah RS yang terakreditasi paripurna	3	3	100%
	Jumlah Klinik Utama yang terakreditasi	0	0	0%
	Jumlah lab Madya yang terakreditasi	0	0	0%
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	**Persentase kecukupan rasio dan kompetensi tenaga kesehatan**	70%	70%	100%
Pemberian izin praktek tenaga kesehatan di kabupaten / kota	**Jumlah ijin praktik yang diterbitkan setelah memenuhi persyaratan**	100%	100%	100%
Pengendalian perizinan praktik tenaga kesehatan	Perizinan praktek tenaga kesehatan terkendali	100%	100%	100%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran (*Impact*), Program (*Outcome*), Kegiatan dan Sub Kegiatan (*Output*) Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target Renstra Dinas Kesehatan Tahun	Realisasi Renstra Dinas Kesehatan Tahun	Rasio CapaianTahun
		2021	2021	2021
Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Perizinan praktek tenaga kesehatan terkendali	100%	100%	100%
Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Terlaksananya kegiatan pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan melalui faskes dan organisasi profesi	100%	100%	100%
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	**Tersedianya perencanaan SDM Kesehatan di Fasiliatas Kesehatan Pemerintah**	100%	100%	100%
Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Tersedianya dokumen penyusunan perencanaan kebutuhan SDMK di Faskes Pemerintahan	100%	100%	100%
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Terpenuhinya 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar di Puskesmas	100%	100%	100%
Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Terlaksananya kegiatan pembinaan dan pengawasan SDMK di Faskes Pemerintahan	100%	100%	100%
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia Keseahtan terlaksana**	**100%**	**100%**	100%
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta yang mengikuti pengembangan kompetensi setiap tahun	60	60	100%
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan	**PROSENTASE PEMBERIAN REKOMENDASI APOTEK, TO, TK. AKLES DAN OPTIKAL, UMOT**	**75%**	**100%**	**133%**
	PROSENTASE PRODUK MAKANAN MINUMAN TERTENTU YANG BERSERTIFIKAT P-IRT	**75%**	**100%**	133%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran (*Impact*), Program (*Outcome*), Kegiatan dan Sub Kegiatan (*Output*) Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target Renstra Dinas Kesehatan Tahun	Realisasi Renstra Dinas Kesehatan Tahun	Rasio CapaianTahun
		2021	2021	2021
Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optical, UMOT	**JUMLAH REKOMENDASI APOTEK, TO, TK. AKLES DAN OPTIKAL, UMOT YANG DITERBITKAN**	20	20	100%
	Presentase Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang dibina dan diawasi	25%	61,90%	247,6%
Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	JUMLAH REKOMENDASI APOTEK, TO, TK. AKLES DAN OPTIKAL, UMOT YANG MEMENUHI PERSYARATAN	20	20	100%
	JUMLAH APOTEK, TO, TK. AKLES DAN OPTIKAL, UMOT YANG DI BINA DAN DI AWASI	40	130	325%
Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	JUMLAH SERTIFIKAT P-IRT YANG DITERBITKAN	120	120	100%
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	**Jumlah produsen industri rumah tangga yang mengikuti penyuluhan keamanan pangan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap sarana produksinya**	**120**	**120**	100%
Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	**PROSENTASE PEMERIKSAAN PRODUKSI MAKANAN MINUMAN INDUSTRI RUMAH TANGGA**	**3%**	**3%**	100%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran (*Impact*), Program (*Outcome*), Kegiatan dan Sub Kegiatan (*Output*) Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target Renstra Dinas Kesehatan Tahun	Realisasi Renstra Dinas Kesehatan Tahun	Rasio CapaianTahun
		2021	2021	2021
Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Persentase produsen industri rumah tangga yang dibina dan diawas	100%	100%	100%
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang	**Persentase UKBM Purnama Mandiri (Posyandu balita, poskestren, poskesdes, SBH, desa siaga)**	65,03%	83,00%	127,63%
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**frekuensi kegiatan tim pokjanal tk. Kabupaten, kecamatan dan desa dalam satu tahun**	**2 kali dalam 1 tahun**	**1 kali dalam 1tahun**	**50%**
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	jumlah lintas sektor/ organisasi masyarakat/ organisasi profesi/ dunia usaha yang bermitra dengan UKBM	2 MOU/PKS	0	0%
Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**jumlah media KIE yang digunakan dalam satu tahun**	5 Media	5 Media	100%
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah tema KIE program prioritas yang dipromosikan melalui media	5 Tema	5 Tema	100%
	Persentase rumah tangga sehat (10 indikator)	60%	52,57%	87,61%
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Tingkat partisipasi kesehatan masyarakat skala desa**	100%	100%	100%
	Cakupan promosi kesehatan tingkat desa	100%	100%	100%
	Cakupan kelompok kesehatan masyarakat yang dibina	100%	100%	100%
	Persentase Posyandu Purnama Mandiri (PURI)	87,36%	88,35%	101,13%
	Persentase poskesdes purnama mandiri (PURI)	15,22%	26,22%	172,27%
	persentase poskestren purnama mandiri (PURI)	30,43%	46,87%	154,02%
	persentase saka Bhakti Husada (SBH) purnama Mandiri (PURI)	14,71%	10,00%	67,98%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran (*Impact*), Program (*Outcome*), Kegiatan dan Sub Kegiatan (*Output*) Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target Renstra Dinas Kesehatan Tahun	Realisasi Renstra Dinas Kesehatan Tahun	Rasio CapaianTahun
		2021	2021	2021
	persentase desa-kelurahan siaga aktif	15,22%	15,11%	99,27%
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya	frekuensi bimbingan teknis dan supervisi UKBM yang dilakukan selama satu tahun	2 kali dalam 1 tahun	2 kali dalam 1 tahun	100%

Tabel 2.22 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri Tahun 2022-2024

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran (*Impact*), Program (*Outcome*), Kegiatan dan Sub Kegiatan (*Output*) Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Formula/Rumus/Dasar Penghitungan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024	Target Renstra Dinas Kesehatan Tahun			Realisasi Renstra Dinas Kesehatan Tahun			Rasio CapaianTahun		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan**	**Jumlah penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang bisa dipenuhi dibagi jumlah total urusan penunjang pemerintahan kali 100%**	**80%**	**90%**	**100%**	**80%**	**90%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase pelaksanaan kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan , penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berhasil disusun dibagi jumlah semua dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran (*Impact*), Program (*Outcome*), Kegiatan dan Sub Kegiatan (*Output*) Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Formula/Rumus/Dasar Penghitungan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024	Target Renstra Dinas Kesehatan Tahun			Realisasi Renstra Dinas Kesehatan Tahun			Rasio CapaianTahun		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
		Kinerja Perangkat Daerah dalam 1 tahun dikali 100%									
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun (Rentra, Renja)	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun (Rentra, Renja)	2	2	2	2	2	2	100%	100%	100%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja yang disusun dalam 1 tahun	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja yang disusun dalam 1 tahun	15	15	4	15	15	4	100%	100%	100%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Cakupan pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah kegiatan administrasi umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan dibagi Total kegiatan adminitrasi umum dikali 100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tercukupinya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya dalam 1 tahun/Jumlah total ASN dikali 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan administrasi (penerima honor)	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan administrasi (penerima honor)	95	95	34	95	95	20	100%	100%	58,82%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan dalam 1 tahun	Laporan keuangan terdiri 1 Dinkes dan 37 Puskesmas	95	95	38	95	95	38	100%	100%	100%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran (*Impact*), Program (*Outcome*), Kegiatan dan Sub Kegiatan (*Output*) Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Formula/Rumus/Dasar Penghitungan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024	Target Renstra Dinas Kesehatan Tahun			Realisasi Renstra Dinas Kesehatan Tahun			Rasio CapaianTahun		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan keuangan yang disusun dalam 1 tahun	Jumlah Laporan keuangan yang disusun dalam 1 tahun	-	-	1	-	-	1	-	-	100%
Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang disusun dalam 1 tahun	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang disusun dalam 1 tahun	-	-	4	-	-	4	-	-	100%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase sarana penunjang pegawai yang tersedia**	**Jumlah sarana pegawai yang dilaksankan dalam 1 tahun dibagi jumlah sarana pegawai yang dibutuhkan**	**100%**	100%	**100%**	**100%**	-	**100%**	**100%**	**-**	**100%**
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang diadakan/ dibeli	Jumlah pakaian dinas yang diadakan/ dibeli	180	-	175	180	-	168	100%	-	96%
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Presentase Peserta Pendidikan dan Pelatihan yang Mengalami Peningkatan Pengetahuan, Kemampuan dan Keterampilan		80%	-	-	80%	-	-	100%	-	-
	Jumlah Nakes yang Terbayarkan Insentifnya	Jumlah kegiatan administrasi umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan dibagi Total kegiatan adminitrasi umum dikali 100%	2258	-	-	2258	-	-	100%	-	-
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Cakupan pelaksanaan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah kegiatan administrasi umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan dibagi Total**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran (*Impact*), Program (*Outcome*), Kegiatan dan Sub Kegiatan (*Output*) Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Formula/Rumus/Dasar Penghitungan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024	Target Renstra Dinas Kesehatan Tahun			Realisasi Renstra Dinas Kesehatan Tahun			Rasio CapaianTahun		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
		kegiatan adminitrasi umum dikali 100%									
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Frekuensi pemeliharaan jaringan listrik dalam 1 tahun (kali)	Jumlah pelaksanaan pemeliharaan jaringan listrik dalam 1 tahun dibagi seluruh pemeliharaan jaringan listrik dalam 1 tahun kali 100%	2	2	2	2	2	2	100%	100%	100%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	10	10		8	9		80%	90%	-
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Frekuensi pembelian peralatan rumah tangga dalam 1 tahun (kali)	Jumlah pelaksanaan pembelian alat rumah tangga dalam 1 tahun dibagi seluruh pembelian peralatan rumah tangga dalam 1 tahun di kali 100%	4	4	4	4	4	4	100%	100%	100%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis barang / bahan yang tersedia /di adakan dalam 1 tahun	Jumlah item barang/bahan yang dibeli dibagi jumlah item barang kali 100%	90	90	67	81	60	54	90%	67%	80,60%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jenis barang cetakan	Jumlah item barang yang tercetak dalam 1 tahun	8	8	6	8	6	6	100%	75%	100%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	3	4	-	3	4	-	100%	100%	-
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu dalam 1 tahun	Frekuensi kegiatan kunjungan tamu	600	600	3	456	580	2	76%	97%	66,67%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dengan Lintas Program, Lintas Sektor dalam 1 Tahun	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dengan Lintas Program, Lintas Sektor dalam 1 Tahun	200	-	-	98	-	-	49%	-	-

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran (*Impact*), Program (*Outcome*), Kegiatan dan Sub Kegiatan (*Output*) Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Formula/Rumus/Dasar Penghitungan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024	Target Renstra Dinas Kesehatan Tahun			Realisasi Renstra Dinas Kesehatan Tahun			Rasio CapaianTahun		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan pelaksanaan kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah urusan penunjang pemerintah daerah yang dilaksanakan dalam 1 tahun dibagi jumlah total urusan penunjang pemerintah daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Frekuensi kegiatan pelayanan surat menyurat dalam 1 tahun (kali)	jumlah bulan yang seluruh kegiatan pengiriman surat menyuratnya terpenuhi	-	12	12	-	12	12	-	100%	100%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Frekruensi penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dalam 1 tahun (kali)	jumlah bulan terpenuhi dan terbayar atas ketersediaan komunikasi, sumber daya air dan listrik kantor Dinas Kesehatan	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Frekuensi pemeliharaan alat kantor dalam 1 tahun (kali)	jumlah bulan tersedia seluruh alat kantor yang memadai/ terpelihara	12	12	12	12	12	6	100%	100%	50%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Frekuensi kegiatan pelayanan umum kantor dalam 1 tahun (kali)	Jumlah bulan terpenuhi seluruh kegiatan pelayanan umum kantor	12	12	12	12	12	11	100%	100%	92%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan	Seluruh kendaraan operasional terbayarkan pajaknya dalam 1 tahun	Jumlah seluruh kendaraan Operasional yg terbayar pajaknya dalam 1 tahun	10	10	10	10	10	8	100%	100%	80%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran (*Impact*), Program (*Outcome*), Kegiatan dan Sub Kegiatan (*Output*) Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Formula/Rumus/Dasar Penghitungan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024	Target Renstra Dinas Kesehatan Tahun			Realisasi Renstra Dinas Kesehatan Tahun			Rasio CapaianTahun		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Seluruh kendaraan operasional mendapatkan pemeliharaan dan siap dipakai dalam 1 tahun	Jumlah kendaraan operasional yang mendapatkan pemeliharaan dalam 1 tahun	10	10	10	10	10	9	100%	100%	90%
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang di Pelihara		4	4		4	4		**100%**	**100%**	**-**
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Seluruh alat kantor yang tidak dalam kondisi rusak berat berada dalam kondisi baik dan siap dipakai dalam 1 tahun (kali)	Jumlah bulan terpeliharanya seluruh alat kantor dalam 1 tahun	12	12	12	12	12	10	100%	100%	83,33%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dilakukan pemeliharaan/ rehabilitasi	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dilakukan pemeliharaan/ rehabilitasi	3	3	1	3	2	1	100%	67%	100%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Frekuensi Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya dalam 1 Tahun (Kali)		3	-		3	-		100%	-	-
Peningkatan Pelayanan BLUD	**Persentase Puskesmas melaksanakan kegiatan penunjang pelayanan BLUD**	**Jumlah puskesmas yang melaksanakan BLUD dibagi total puskesmas yang ada dikali 100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD dan BOK Puskesmas	Jumlah puskesmas yang melaksanakan kegiatan penunjang pelayanan BLUD dan BOK	Jumlah puskesmas yang melaksanakan kegiatan penunjang pelayanan BLUD dan BOK	37	37	37	37	37	37	100%	100%	100%
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan	***Persentase Kecamatan STBM***	***Jumlah kecamatan yang ber STBM dibagi Total kecamatan***	***2%***	***2%***	**5%**	***0%***	***0%***	**4%**	**0%**	**0%**	**80%**

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran (*Impact*), Program (*Outcome*), Kegiatan dan Sub Kegiatan (*Output*) Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Formula/Rumus/Dasar Penghitungan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024	Target Renstra Dinas Kesehatan Tahun			Realisasi Renstra Dinas Kesehatan Tahun			Rasio CapaianTahun		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat		*yang ada di Kabupaten dikali 100%*									
	Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) terakreditasi	*Jumlah FKTP (puskesmas+klinik) terakreditasi dibagi jumlah seluruh puskesmas+klinik dikali 100%*	*49%*	*55%*	*61%*	*41,60%*	*73,3%*	*80,0%*	84,90%	133%	131,15%
	Indeks Keluarga Sehat	*Jumlah keluarga dengan IKS >0,800 dibagi jumlah seluruh keluarga*	*0,17*	*0,2*	*0,4*	*0,2*	*0,25*	*0,33*	117,65%	125%	82,50%
	Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL) terakreditasi	*Jumlah FKTL terakreditasi dibagi jumlah seluruh RS dikali 100%*	*78,5%*	*78,5%*	*78,5%*	*78,5%*	*100%*	*100%*	100%	127%	127,39%
	Persentase Nakestrad dan Hattra yang memiliki izin	*Jumlah Nakestrad dan Hatra yang memiliki ijin dibagi jumlah Nakestrad dan Hatra yang ada dikalikan 100 %*	*17%*	*19%*	*21%*	*13,5%*	*27,1%*	*42%*	79,41%	143%	200%
	AKI	*Jumlah Kematian Ibu pada kurun waktu tertentu dibagi lahir hidup pada tahun yang sama x 100.000 KH*	*79,23*	*79,23*	*79,23*	*57*	*54,11*	*68,42*	71,94%	68%	86,36%
	AKB	*Jumlah Kematian Bayi pada kurun waktu tertentu dibagi lahir hidup pada tahun yang sama x 1000KH*	*6,9*	*6,8*	*6,70*	*6,4*	*4,49*	*3,86*	92,75%	66%	57,61%
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Cakupan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah	Cakupan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran (*Impact*), Program (*Outcome*), Kegiatan dan Sub Kegiatan (*Output*) Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Formula/Rumus/Dasar Penghitungan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024	Target Renstra Dinas Kesehatan Tahun			Realisasi Renstra Dinas Kesehatan Tahun			Rasio CapaianTahun		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Kabupaten/Kota sesuai kebutuhan**	**Kabupaten/Kota sesuai kebutuhan**									
Pembangunan puskesmas	Jumlah Puskesmas Yang Dibangun	Jumlah pembangunan Puskesmas yang dilaksanakan	100%	5	6	100%	5	7	100%	100%	116,67%
Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar	Jumlah kegiatan pengembangan puskesmas yang dillaksanakan	100%	10	8	100%	10	7	100%	100%	87,50%
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah sarana, prasarana, dan alat kesehatan yang telah dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan oleh puskesmas	Jumlah kegiatan rehab dan pemeliharaan puskesmas yang dilaksanakan	100%	10	4	100%	9	1	100%	90%	25%
Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Meubelair Puskesmas		0%	6	-	0%	6	-	-	100%	-
	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Alat Kedokteran Umum Puskesmas		100%	-	-	100%	-	-	100%	-	-
	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Alat Kedokteran Gigi Puskesmas		100%	-	-	100%	-	-	100%	-	-
	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Alat Keshetan Umum Lainnya Puskesmas		100%	-	-	100%	-	-	100%	-	-
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang disediakan	Jumlah paket pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik yang dilaksanakan	82%	10	4	121,95%	10	5	148,72%	100%	125%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran (*Impact*), Program (*Outcome*), Kegiatan dan Sub Kegiatan (*Output*) Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Formula/Rumus/Dasar Penghitungan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024	Target Renstra Dinas Kesehatan Tahun			Realisasi Renstra Dinas Kesehatan Tahun			Rasio CapaianTahun		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Pengadaan obat, bahan habis pakai, BMHP, vaksin, makanan dan minuman di fasilitas kesehatan	Persentase Pengadaan obat dengan tingkat aman	Jumlah item obat yang terpenuhi dibanding jumlah item obat yang direncanakan pemenuhannya dikali 100%	85%	88%	92%	80%	90%	178%	94,12%	102%	193,48%
	Jumlah Item Pengadaan Obat dan Vaksin		50	50	-	57	165	-	114%	330%	-
	Jumlah obat, bahan habis pakai, bahan medis habis pakai, vaksin, makanan dan minuman di fasilitas kesehatan yang disediakan	Jumlah obat, bahan habis pakai, bahan medis habis pakai, vaksin, makanan dan minuman di fasilitas kesehatan yang disediakan	7	50	60	12	150	107	171,43%	300%	178,33%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah di Kunjungi dan di Intervensi Masalah Kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas kesehatan yang terpelihara sesuai standar	Jumlah alat kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas kesehatan yang terpelihara sesuai standar	37	37	37	37	37	339	100%	100%	916,22%
Distribusi alat kesehatan, obat, vaksin, BMHP, makmin ke puskesmas serta faskes lainnya	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke fasilitas kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke fasilitas kesehatan	100%	100%	12	100%	100%	37	100%	100%	308,33%
	Presentase Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Sediaan Farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP)		88%	-	-	92,05%	-	-	104,60%	-	-

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran (*Impact*), Program (*Outcome*), Kegiatan dan Sub Kegiatan (*Output*) Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Formula/Rumus/Dasar Penghitungan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024	Target Renstra Dinas Kesehatan Tahun			Realisasi Renstra Dinas Kesehatan Tahun			Rasio CapaianTahun		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
	Presentase Pengadminstrasian, Pemeliharaan Mutu dan Deteksi Dini Kerusakan Sediaan Farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP)		90%	-	-	92%	-	-	102,22%	-	-
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Cakupan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan tingkat daerah (Cakupan kunjungan rawat jalan dan rawat inap)**	***Presentase layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan tingkat daerah (Cakupan kunjungan rawat jalan dan rawat inap)***	***85%***	***93%***	**100%**	***85%***	***93%***	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
	Persentase Puskesmas Dengan Kelulusan Akreditasi Minimal Utama	***Jumlah Puskesmas terakreditasi minimal Utama (Utama, Paripurna) dibagi jumlah seluruh puskesmas terakreditasi dikali 100%***	***60%***	***62%***	**100%**	***57%***	***94,59%***	**100%**	**95%**	**153%**	**100%**
	Persentase tenaga kesehatan tradisional yang dibina	**Jumlah tenaga kesehatan tradisional/nakestrad yang dibina di bagi jumlah nakestrad yang ada di kali 100 %**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
	Persentase penyehat tradisional yang dibina	**Jumlah penyehat tradisional / hatra yang dibina di bagi jumlah hatra yang ada dikali 100 %**	**15%**	**29%**	**31%**	**13,2%**	**29%**	**44%**	**88%**	**100%**	**141,94%**
	Persentase desa yang terbentuk Asman TOGA	**Jumlah desa/kelurahan yang memiliki kelompok Asman Toga dibagi jumlah desa /keluarahan yang ada dikali 100 %**	**20%**	**24%**	**26%**	**24,4%**	**27,30%**	**27%**	**122%**	**114%**	**103,85%**
	Persentase puskesmas yang melaksanakan pembinaan yankestrad	**Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran (*Impact*), Program (*Outcome*), Kegiatan dan Sub Kegiatan (*Output*) Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Formula/Rumus/Dasar Penghitungan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024	Target Renstra Dinas Kesehatan Tahun			Realisasi Renstra Dinas Kesehatan Tahun			Rasio CapaianTahun		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
		yankestrad dibagi jumlah Puskesmas yang ada dikali 100 %									
	Persentase akses sanitasi layak	**Jumlah KK dengan akses sanitasi aman, sanitasi layak sendiri, dan sanitasi layak bersama dibagi jumlah KK diwilayah dan kurun waktu yang sama dikali 100%**	**40%**	**50%**	**80%**	**95,5%**	**79,90%**	**100%**	**238,75%**	**160%**	**125%**
	Jumlah tingkatan tatanan dalam kabupaten sehat	**Jumlah tingkatan tatanan dalam kabupaten sehat**	**7**	**8**	**10**	**6**	**26**	**9**	**85,71%**	**325%**	**90%**
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Cakupan ibu hamil dilayani sesuai standart (K4)	Jumlah ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal (K4) sesuai dengan standar di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dibagi jumlah sasaran seluruh ibu hamil yang ada di wilayah tersebut pada kurun waktu yang sama dikali 100%.	94%	92%	100%	78%	100%	91%	82,98%	109%	90,61%
	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	-	18482	-	-	16746	-	-	90,61%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Cakupan ibu bersalin dilayani sesuai standart	Jumlah ibu bersalin yang telah memperoleh pelayanan persalinan sesuai standart dibagi total sasaran ibu bersalin kali 100%	96%	95%	100%	80,54%	100%	91%	83,90%	105%	91,37%
	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	-	17558	-	-	16043	-	-	91,37%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran (*Impact*), Program (*Outcome*), Kegiatan dan Sub Kegiatan (*Output*) Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Formula/Rumus/Dasar Penghitungan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024	Target Renstra Dinas Kesehatan Tahun			Realisasi Renstra Dinas Kesehatan Tahun			Rasio CapaianTahun		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Cakupan Bayi Baru Lahir dilayani sesuai standart (KN2)	Jumlah Bayi Baru Lahiryang telah memperoleh pelayanan KN2 dibagi sasaran bayi kali 100%	98%	96%	100%	83%	100%	98%	84,69%	104%	98,31%
	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	-	16077	-	-	15806	-	-	98,31%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Cakupan Balita dilayani sesuai standart	Jumlah balita yang telah memperoleh pelayanan sesuai standart dibagi jumlah sasaran balita kali 100%	84%	84%	100%	82,07%	97,92%	97%	97,70%	117%	97,40%
	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	-	96514	-	-	94002	-	-	97,40%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai standart	Jumlah Anak Usia Pendidikan dasar yang telah memperoleh pelayanan sesuai standart dibagi sasaran anak kelas 1 sampai 9 dibagi sasaran kali 100%	83%	70%	100%	68,5%	97,90%	94,82%	82,53%	140%	94,82%
	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			210941			200022	-	-	94,82%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah orang usia 15--59 tahun di puskesmas yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu 1 tahun dibagi dengan junlah orang usia 15-59 tahun di wilayah kerja	100%	100%	100%	44%	90,23%	92%	44,00%	90%	92,10%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran (*Impact*), Program (*Outcome*), Kegiatan dan Sub Kegiatan (*Output*) Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Formula/Rumus/Dasar Penghitungan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024	Target Renstra Dinas Kesehatan Tahun			Realisasi Renstra Dinas Kesehatan Tahun			Rasio CapaianTahun		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
		pkm dalam kurun waktu 1 tahun yg sama dikali 100%									
	Persentase Desa Yang Melaksanakan Posbindu	Jumlah posbindu yang ada di desa wilayah puskesmas yang melaksanakan posbindu dibagi dengan jumlah seluruh posbindu di wilayah puskesmas dikali 100%	-	70%	100%	-	100%	100%	-	143%	100,00%
	Persentase Sekolah yang Melaksanakan KTR	Jumlah sekolah yang ada di wilayah puskesmas yang melaksanakan KTR dibagi jumlah sekolah di wilayah puskesmas dikali 100%	-	100%	100%	-	86,40%	93%	-	86%	92,60%
	Persentase Wanita Usia Subur yang melakukan deteksi dini penyakit Kanker payudara dan kanker leher rahim pada usia 30 sd 50 tahun	Jumlah Wanita usia 30 – 50 tahun yang dideteksi dini Kanker Payudara dan kanker leher rahim dalam 3 tahun terakhir dibagi Jumlah sasaran dari penduduk Wanita usia 30 – 50 tahun di wilayah kerja puskesmas dalam kurun waktu satu tahun yang sama dikali 100%.	-	16%	100%	-	7,60%	22%	-	48%	21,80%
	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah orang usia 15--59 tahun di puskesmas yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu 1 tahun dibagi dengan junlah orang usia 15-59 tahun di wilayah kerja pkm dalam kurun waktu 1 tahun	-	-	1080171	-	-	993450	-	-	91,97%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran (*Impact*), Program (*Outcome*), Kegiatan dan Sub Kegiatan (*Output*) Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Formula/Rumus/Dasar Penghitungan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024	Target Renstra Dinas Kesehatan Tahun			Realisasi Renstra Dinas Kesehatan Tahun			Rasio CapaianTahun		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Sesuai standart	Jumlah Usia Lanjut yang telah memperoleh pelayanan sesuai standart dibagi sasaran kali 100%	77%	60%	70%	68,65%	74%	88%	89,16%	123%	125,56%
	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	-	256.285	-	-	223.156	-	-	87,07%
Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Persentase penderita hipertensi dilayani sesuai standar	Jumlah penderita hipertensi usia ≥ 15 tahun di wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dibagi jumlah estimasi penderita hipertensi berdasarkan diagnosa dokter usia ≥ 15 tahun yang berada didalam wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi Kab/Kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama dikali 100%.	100%	100%	100%	40%	90,53%	93,00%	40,00%	91%	93,00%
	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah penderita hipertensi usia ≥ 15 tahun x prevalensi penderita Hipertensi usia ≥ tahun berdasarkan diagnosa dokter di wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	-	94509	-	-	88078	-	-	93,20%
Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita diabetes militus	Persentase penderita DM dilayani sesuai standar	Jumlah penderita Diabetes Melitus usia ≥ 15 tahun di wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dibagi jumlah estimasi berdasarkan	100%	100%	100%	137%	92,03%	94%	137,00%	92%	93,60%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran (*Impact*), Program (*Outcome*), Kegiatan dan Sub Kegiatan (*Output*) Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Formula/Rumus/Dasar Penghitungan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024	Target Renstra Dinas Kesehatan Tahun			Realisasi Renstra Dinas Kesehatan Tahun			Rasio CapaianTahun		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
		diagnosa dokter penderita Diabetes Mellitus usia ≥ 15 tahun yang berada didalam wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi Kab/Kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama dikali 100%.									
	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah penderita Diabetes Mellitus usia ≥ 15 tahun x prevalensi penderita Diabetes Mellitus usia ≥ tahun berdasarkan diagnosa dokter di wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	-	34286	-	-	32096	-	-	93,61%
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	(Jumlah ODGJ berat di wilayah kerja Kab./Kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun) (Jumlah ODGJ berat berdasarkan proyeksi di wilayah kerja Kab./Kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama) kali 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	-	3513	-	-	3.513	-	-	100%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran (*Impact*), Program (*Outcome*), Kegiatan dan Sub Kegiatan (*Output*) Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Formula/Rumus/Dasar Penghitungan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024	Target Renstra Dinas Kesehatan Tahun			Realisasi Renstra Dinas Kesehatan Tahun			Rasio CapaianTahun		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Jumlah orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar di fasyankes dalam kurun waktu satu tahun dibagi Jumlah target orang terduga TBC yang ada di wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun yang sama dikali 100% (Jumlah orang terduga TBC yang ada di wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun ditentukan oleh Dinas Kesehatan Kab/Kota masing-masing)	100%	100%	100%	79%	100%	100,30%	79%	100%	100,30%
	Persentase penemuan dan penanganan kasus TB	Jumlah kasus TBC yang ditemukan, diobati secara baku dan dilaporkan dibagi jumlah kasus TBC yang ditemukan dan diobati dikali 100%.	70%	55%	60%	56%	80%	57%	80%	145%	95%
	Persentase keberhasilan pengobatan TB	Jumlah pasien TBC yang sembuh dan pengobatan lengkap dibagi jumlah semua kasus TBC yang diobati, dicatat dan dilaporkan dikali 100%	90%	90%	90%	87%	88%	91%	96,67%	98%	101,11%
	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	-	18485	-	-	18544	-	-	100,32%
	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan HIV sesuai standar di	100%	100%	100%	85%	83%	101%	85,00%	83%	101,00%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran (*Impact*), Program (*Outcome*), Kegiatan dan Sub Kegiatan (*Output*) Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Formula/Rumus/Dasar Penghitungan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024	Target Renstra Dinas Kesehatan Tahun			Realisasi Renstra Dinas Kesehatan Tahun			Rasio CapaianTahun		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun									
	Persentase Orang dengan HIV yang mendapatkan ARV	Presentase orang dengan HIV positif dalam kurun waktu satu tahun yang mendapatkan ARV	90%	90%	90%	76%	76%	68%	84,44%	84%	75,23%
	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	-	31910	-	-	34740	-	-	108,87%
Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi KLB	Cakupan Pelayanan Kesehatan bagi penduduk pada Kondisi KLB	Jumlah pelayanan yang dilakukan pada kondisi KLB	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	-	-	12	-	-	12	-	-	100%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana Dan Atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana	Jumlah dokumen Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis kesehatan akibat bencana yang disusun (SK klaster kesehatan dan SK EMT)	-	1	2	-	1	2	-	100%	100%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Cakupan Pemberian Vit A	Jumlah usia 6-59 bulan yang mendapatkan vit A dibagi sasaran kali 100%	90%	92%	94%	83,33%	92,20%	96%	92,59%	100%	102,13%
	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	Jumlah balita sangat pendek ditambah pendek dibagi jumlah balita diukur kali 100%	15%	14,50%	14,0%	14,10%	9,53%	7,50%	94,00%	66%	53,57%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran (*Impact*), Program (*Outcome*), Kegiatan dan Sub Kegiatan (*Output*) Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Formula/Rumus/Dasar Penghitungan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024	Target Renstra Dinas Kesehatan Tahun			Realisasi Renstra Dinas Kesehatan Tahun			Rasio CapaianTahun		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
	Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita	Jumlah Balita Gizi buruk ditambah gizi kurang dibagi jumlah balita diukur kali 100%	8,7%	8%	7%	7,19%	6,12%	6,85%	82,64%	77%	97,86%
	Prevalensi anemia pada ibu hamil	Jumlah ibu hamil anemia dibagi sasaran bumil kali 100%	26%	22%	20%	14%	18%	10%	53,85%	82%	50,35%
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	-	25	-	-	25	-	-	100%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Pos UKK yang terbentuk	Jumlah tempat kerja informal yang telah dibentuk Pos UKK	42	45	60	65	67	64	154,76%	149%	106,67%
	Persentase jumlah jamaah haji yang diukur kebugaran jasmaninya	Jumlah jamaah haji yang diukur kebugarannya dibagi dengan jumlah jaamah haji yang terdaftar	90%	100%	100%	80,07%	100%	97%	88,97%	100%	97,00%
	Persentase Tempat Kerja Yang Melaksanakan Kesehatan Kerja	Jumlah perkantoran yang melaksanakan kesehatan kerja dibagi dengan jumlah perkantoran yang ada	-	100%	100%	-	100%	60,00%	-	100%	60,00%
	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan upaya kesehatan olahraga	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan upaya kesehatan olahraga baik internal maupun eksternal	37	37	37	37	37	37	100%	100%	100%
	Jumlah Puskesmas Yang Melaksanakan Kesehatan Kerja	Jumlah puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja baik secara internal maupun eksternal	-	37	37	-	37	37	-	100%	100%
	Persentase Kelompok Masyarakat Yang Melaksanakan Aktifitas Fisik	JUmlah kelompok olahraga masyarakat yang melaksanakan	-	100%	100%	-	100%	65,00%	-	100%	65,00%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran (*Impact*), Program (*Outcome*), Kegiatan dan Sub Kegiatan (*Output*) Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Formula/Rumus/Dasar Penghitungan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024	Target Renstra Dinas Kesehatan Tahun			Realisasi Renstra Dinas Kesehatan Tahun			Rasio CapaianTahun		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
		aktifitas fisik dibagi dengan jumlah kelompok olahraga masyarakat yang ada									
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah dokumen yang tersususn dalam satu tahun	-	-	12	-	-	12	-	-	100%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase Tempat Pengelolaan pangan yang memenuhi syarat sesuai standar	Jumlah tempat pengelolaan pangan /TPP memenuhi syarat kesehatan dibagi jumlah TPP diwilayah dan kurun waktu yang sama kali 100%	70%	72%	84%	87,55%	87,55%	72,00%	125,07%	122%	85,71%
	Persentase desa ODF	Jumlah desa/kelurahan stop BABS dibagi Jumlah desa/kelurahan diwilayah dan kurun waktu yang sama dikali 100%	75%	100%	100%	78%	100%	100%	104%	100%	100%
	Persentase sarana air minum yang diawasi / diperiksa kualitas airnya	jumlah sarana air minum yang diawasi/diperiksa kualitas air minumnya yang memenuhi standart dibagi jumlah sarana air minum yang ada diwilayah dan waktu yang sama dikali 100%	80%	83%	82%	85%	85%	93,40%	**106,25%**	**102%**	**113,90%**
	Jumlah Fasyankes yang memiliki pengelolaan limbah medis	Jumlah fasyankes yang memiliki pengelolaan limbah medis yang memenuhi standart	85%	100	100%	91,89%	100	100%	108,11%	100%	100%
	Persentase Tempat-tempat umum yang dilakukan pengawasan sesuai standar	Jumlah total TFU yang dilakukan pengawasan sesuai standart (IKL) dibagi jumlah TFU diwialayah dan kurun waktu yang sama dikali 100%	84%	86%	85,00%	94,30%	89,43%	83,40%	112,26%	104%	98,12%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran (*Impact*), Program (*Outcome*), Kegiatan dan Sub Kegiatan (*Output*) Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Formula/Rumus/Dasar Penghitungan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024	Target Renstra Dinas Kesehatan Tahun			Realisasi Renstra Dinas Kesehatan Tahun			Rasio CapaianTahun		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	jumlah dokumen yang tersususn dalam satu tahun	-	-	12	-	-	12,00%	-	-	1,00%
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah puskesmas yang melakukan pengelolaan pelayanan promosi kesehatan	Jumlah puskesmas yang melakukan pengelolaan pelayanan promosi kesehatan	-	37	37	-	37	37	-	100%	100,00%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah tenaga kesehatan tradisional yang dibina	Jumlah tenaga kesehatan tradisional/nakestrad yang dibina di wilayah Puskesmas pada tahun 2024	6	6	6	9	6	7	150,00%	100%	116,67%
	Jumlah penyehat tradisional yang dibina	Jumlah penyehat tradisional / hatra yang dibina di wilayah Puskesmas pada tahun 2024	388	416	445	1361	416	508	350,77%	100%	114,16%
	Jumlah desa yang terbentuk Asman TOGA	Jumlah desa/kelurahan yang memiliki kelompok Asman Toga pada tahun 2024	76	78	80	84	94	94	110,53%	121%	117,50%
	Jumlah puskesmas yang melaksanakan pembinaan yankestrad	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan yankestrad pada tahun 2024	37	37	37	37	37	37	100%	100%	100%
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	-	-	1	-	-	1	-	-	100,00%
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Presentase KLB yang ditanggulangi ≤ 24 jam	Jumlah KLB dibagi jumlah KLB yang ditanggulangi ≤ 24 jam dikali 100% pada tahun 2023	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran (*Impact*), Program (*Outcome*), Kegiatan dan Sub Kegiatan (*Output*) Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Formula/Rumus/Dasar Penghitungan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024	Target Renstra Dinas Kesehatan Tahun			Realisasi Renstra Dinas Kesehatan Tahun			Rasio CapaianTahun		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
	Penemuan kasus Non AFP	Jumlah kasus NOn AFP yang ditemukan dalam 1 tahun yang sama	-	16	14	-	16	34	-	100%	242,86%
	Penemuan kasus suspect campak	Jumlah kasus suspect campak yang ditemukan dalam 1 tahun yang sama	-	64	64	-	64	165	-	100%	257,81%
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	-	3	-	-	3	-	-	100%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang Dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Jumlah Orang Dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	60	-	-	100	-	-	167%	-
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Persentase ODGJ ditangani sesuai standar	(Jumlah ODGJ berat di wilayah kerja Kab./Kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun) dibagi (Jumlah ODGJ berat berdasarkan proyeksi di wilayah kerja Kab./Kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama) kali 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	-	2	-	-	2	-	-	100%	-
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	-	14	-	-	7	-	-	50,00%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran (*Impact*), Program (*Outcome*), Kegiatan dan Sub Kegiatan (*Output*) Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Formula/Rumus/Dasar Penghitungan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024	Target Renstra Dinas Kesehatan Tahun			Realisasi Renstra Dinas Kesehatan Tahun			Rasio CapaianTahun		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
	Persentase penderita HT ditangani sesuai standar	Jumlah penderita hipertensi usia ≥ 15 tahun di wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dibagi jumlah estimasi penderita hipertensi usia ≥ 15 tahun yang berada didalam wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi Kab/Kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama dikali 100%.	100%	100%	100%	40%	90,53%	93%	40%	91%	93%
	Persentase Penderita DM ditangani Sesuai standar	Jumlah penderita Diabetes Melitus usia ≥ 15 tahun di wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dibagi jumlah estimasi penderita Diabetes Mellitus usia ≥ 15 tahun yang berada didalam wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi Kab/Kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama dikali 100%.	100%	100%	100%	137%	92,03%	75,80%	137,00%	92%	75,80%
	Persentase WNI usia 15 - 59 tahun mendapatkan screening sesuai standar	Jumlah orang usia 15--59 tahun di puskesmas yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu 1 tahun dibagi dengan jumlah orang usia 15-59 tahun di wilayah kerja pkm dalam kurun waktu 1 tahun yg sama dikali 100%	100%	100%	100%	44%	90,23%	92%	44,00%	90%	92,10%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran (*Impact*), Program (*Outcome*), Kegiatan dan Sub Kegiatan (*Output*) Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Formula/Rumus/Dasar Penghitungan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024	Target Renstra Dinas Kesehatan Tahun			Realisasi Renstra Dinas Kesehatan Tahun			Rasio CapaianTahun		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
		Persentase Desa yang Melaksanakan Posbindu	60%	-	-	129%	-	-	215,00%	-	-
		Presentase Sekolah yang Melaksanakan KTR	60%	-	-	167%	-	-	278,33%	-	-
	Persentase Penemuan Kusta Pada Anak	Jumlah kasus anak yang ditemukan dibagi jumlah seluruh kasus kusta dikalikan 100%	<2%	<5%	5	<2%	4%	30,00%	-	-	6,00%
	Persentase Cacat Pada Kasus Kusta Baru	Jumlah kasus kusta dengan cacat II yang ditemukan dibagi jumlah seluruh kasus kusta dikalikan 100%	<5%	<5%	5	<5%	5%	30,00%	-	-	6,00%
	Persentase Penderita Kusta RFT-MB	Jumlah kasus MB padas 2 tahun sebelumnya yang menyelesaikan pengobatan dibagi jumlah kasus MB pada kohort tahun yang sama dikalikan 100%	95%	95%	95%	95%	92%	89%	100%	97%	93,68%
	Persentase Penderita Kusta RDT-PB	jumlah kasus PB pada 1 tahun sebelumnya yang menyelesaikan pengobatan dibagi jumlah kasus MB pada kohort tahun yang sama dikalikan 100%	100%	100%	100%	100%	100%	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
	Persentase Cakupan Tatalaksana Pneumonia Balita	Jumlah penderita Pnemonia balita yang ditangani dibagi target perkiraan balita dikali 100%. Target balita = 4,45 % x jml balita	60%	50%	50	89%	22,80%	37,18	148,33%	46%	74,36%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran (*Impact*), Program (*Outcome*), Kegiatan dan Sub Kegiatan (*Output*) Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Formula/Rumus/Dasar Penghitungan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024	Target Renstra Dinas Kesehatan Tahun			Realisasi Renstra Dinas Kesehatan Tahun			Rasio CapaianTahun		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
	Persentase Puskesmas yang melaksanakan tatalaksana Diare sesuai standar	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan tatalaksana diare sesui standart dibagi jumlah puskesmas dikalikan 100%	80%	80%	80%	100%	70,30%	80%	125%	88%	100%
	Persentase Puskesmas yang melaksanakan advokasi dan / sosialisasi Pengendalian PISP	Jumlah puskesmas yang melaksanakan advokasi / sosialisasi pengendalian PISP dibagi julah puskesmas dikalikan 100%	65%	70%	70%	65%	100%	70%	100%	143%	100%
	Persentase Puskesmas yang mempunyai Layanan Rehidrasi Oral Aktif (LROA)	Layanan kegiatan LROA secara terus menerus dalam 3 bulan dengan periode pelaporan per tribulan. Dalam 1 tribulan, laporan bulanan harus ada dan lengkap` Kalau dalam 1 tribulan hanya ada laporan 1 bulan, maka dianggap tidak ada LROA. Kalau dalam 1 tahun hanya lapor tribulan 4 saja, dianggap kinerja mencapai 25%. (Yang dihitung adalah jumlah layanan)	70%	80%	100%	100%	100%	100%	142,86%	125%	100%
	Persentase Kasus Diare pada semua umur ditangani sesuai standar	Jumlah penderita semua umur diare yang datang dan dilayani di sarana kesehatan dibagi target dikali 100%. Target = (10% x 270/1000) x jumlah penduduk di wilayah kerja puskesmas pada kurun waktu tertentu	60%	70%	70%	52%	21,30%	95,68%	86,67%	30%	136,69%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran (*Impact*), Program (*Outcome*), Kegiatan dan Sub Kegiatan (*Output*) Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Formula/Rumus/Dasar Penghitungan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024	Target Renstra Dinas Kesehatan Tahun			Realisasi Renstra Dinas Kesehatan Tahun			Rasio CapaianTahun		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
	Persentase Kasus Diare pada Balita ditangani sesuai standar	Jumlah penderita balita diare yang datang dan dilayani di sarana kesehatan dibagi target dikali 100%. Target = (20% x 843/1000) x jumlah balita (sesuai data pusdatin) di wilayah kerja puskesmas pada kurun waktu tertentu Balita adalah anak usia 0-59 bulan.	50%	60%	60%	35,2%	21,90%	146,06%	70,40%	37%	243,43%
	Persentase Bumil dilakukan (DDHB) Deteksi Dini Hepatitis B	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pemeriksaan HBsAg dibagi jumlah proyeksi jumlah ibu hamil dikali 100%	75%	80%	90%	80%	74%	85,00%	106,67%	93%	94,44%
	Persentase bayi lahir dari Ibu reaktif HBsAg mendapat HBIg < 24 jam	Jumlah bayi lahir dari ibu reaktif HBsAg mendapat HBIg < 24 jam dibagi jumlah bayi lahir dari ibu reaktif HBsAg dikali 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase bayi usia 9-12 bulan yang mendapat HBIg di test HBsAg hasilnya Non Reaktif	Jumlah bayi usia 9-12 bulan yang mendapat HBIg di test HBsAg hasilnya Non Reaktif dibagi jumlah bayi usia 9-12 bulan yang mendapat HBIg di test HBsAg dikali 100%	100%	100%	100%	80%	70%	100%	80%	70%	100%
	Persentase kasus DBD ditangani sesuai standar	Jumlah kasus DBD yang ditangani sesuai standar Tatalaksana Pengobatan DBD dibagi dengan jumlah seluruh DBD yang terlaporkan di wilayah Puskesmas dikali 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran (*Impact*), Program (*Outcome*), Kegiatan dan Sub Kegiatan (*Output*) Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Formula/Rumus/Dasar Penghitungan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024	Target Renstra Dinas Kesehatan Tahun			Realisasi Renstra Dinas Kesehatan Tahun			Rasio CapaianTahun		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
	Persentase Angka Bebas Jentik (ABJ)	Jumlah rumah bebas jentik dibagi jumlah rumah yang diperiksa jentiknya dikali 100 %	95%	90%	90%	84%	85%	81%	88,42%	94,44%	90%
	Persentase anak usia 1-12 Tahun mendapatkan obat Cacing	Jumlah capaian anak usia 1-12 tahun mendapat obat cacing dibagi jumlah sasran anak usia 1-12 tahun mendapat obat cacing dikali 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Persentase penduduk dalam data base yang memiliki jaminan kesehatan	Jumlah penduduk terdaftar JKN dibagi jumlah seluruh penduduk dibagi 100%	85%	95%	95%	79%	96%	96,91%	92,94%	101,05%	102,01%
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	-	-	1	-	-	1	-	-	100%
Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah Masyarakat/Tokoh Masyarakat yang Mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan NAPZA	Jumlah Masyarakat/Tokoh Masyarakat yang Mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan NAPZA	30	60	-	30	0	-	100%	0%	-
	Jumlah Pengadaan Urine Test	Jumlah Pengadaan Urine Test	-	400	-	-	0	-	-	0%	-
Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Presentase pengambilan dan pengiriman spesimen ≤ 24 jam ke laboratorium pemeriksa	Jumlah spesimen yang diambil dibagi jumlah spesimen yang dikirim ke laboratorium pemeriksa pada tahun 2023 dikali 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	-	-	80	-	-	199	-	-	248,75%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran (*Impact*), Program (*Outcome*), Kegiatan dan Sub Kegiatan (*Output*) Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Formula/Rumus/Dasar Penghitungan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024	Target Renstra Dinas Kesehatan Tahun			Realisasi Renstra Dinas Kesehatan Tahun			Rasio CapaianTahun		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Kecamatan sehat	Jumlah kecamatan yang melaksanakan Kecamatan sehat dibagi jumlah kecamatan pada kurun waktu yang sama	20	24	26	26	26	26	130%	108,33%	100%
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	jumlah dokumen 9 tatanan yang tersusun dalam satu tahun	-	-	9	-	-	9	-	-	100%
Pengelolaan Penelitian Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Penelitian Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Penelitian Kesehatan	-	200	-	-	150	-	-	75%	-
Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Preventif, promotif, Layanan Persalinan	Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Preventif, promotif, Layanan Persalinan	37	37	-	37	37	-	100%	100%	-
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	37	-	1	37	-	1	100%	-	100%
Pelaksanan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas dengan Kelulusan Akreditasi Minimal Utama	Jumlah Puskesmas dengan Kelulusan Akreditasi Minimal Utama	22	5	-	22	34	-	100%	680%	-
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah desa yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap anak usia 0-11 bulan	Jumlah Desa UCI dibagi jumlah Desa di wilayah Puskesmas dikali 100 %	341	341	341	324	312	2,1	95,01%	91,50%	0,62%
	Persentase Bayi usia 0-11 bulan yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap	Jumlah bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap yang terdiri dari: satu dosis Imunisasi Hepatitis B, satu dosis imunisasi BCG, empat dosis	92,90%	94,10%	100%	94,20%	94,50%	83,22%	101,40%	100,43%	83,22%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran (*Impact*), Program (*Outcome*), Kegiatan dan Sub Kegiatan (*Output*) Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Formula/Rumus/Dasar Penghitungan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024	Target Renstra Dinas Kesehatan Tahun			Realisasi Renstra Dinas Kesehatan Tahun			Rasio CapaianTahun		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
		imunisasi Polio oral, satu dosis imunisasi IPV, tiga dosis imunisasi DPT-HB-Hib, dan satu dosis imunisasi Campak Rubella dalam kurun waktu satu tahun dibagi 95% jumlah bayi yang diperkirakan hidup usia 0-11 bulan (Surviving Infant) selama kurun waktu yang sama, dikali 100.									
	Persentase anak usia 18-24 bulan yang mendapat imunisasi lanjutan Campak dan Rubella	Jumlah anak usia 12-24 bulan yang mendapat imunisasi lanjutan baduta (bayi usia di bawah 2 tahun) meliputi 1 dosis imunisasi DPT HB-HiB serta 1 dosis imunisasi Campak Rubela di satu wilayah dalam kurun waktu 1 tahun, dibagi 90% jumlah anak usia 18-24 bulan (Surviving Infant tahun lalu) dalam kurun waktu yang sama, dikali 100	81,00%	85,65%	100%	93,10%	87,30%	86,01%	114,94%	101,93%	86,01%
	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-	-	0,8	-	-	0,02	-	-	2,50%
Pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon wabah	Persentase pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon wabah	Jumlah kelengkapan dan ketepatan laporan, serta verifikasi alert yang muncul setiap minggu selama tahun 2024 berupa Buletin SKDR setiap minggu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran (*Impact*), Program (*Outcome*), Kegiatan dan Sub Kegiatan (*Output*) Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Formula/Rumus/Dasar Penghitungan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024	Target Renstra Dinas Kesehatan Tahun			Realisasi Renstra Dinas Kesehatan Tahun			Rasio CapaianTahun		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	-	-	12	-	-	12	-	-	100%
Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah PSC yang ada dan beroperasional	-	1	1	-	1	1	-	100%	100%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Capaian Indeks Keluarga Sehat (IKS)	Capaian Indeks Keluarga Sehat (IKS)	-	0,2	-	-	0,25	-	-	125,00%	-
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tubeculosis	Jumlah dokumen Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tubeculosis	Jumlah dokumen Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tubeculosis	-	-	1	-	-	1	-	-	100%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV (ODHIV)	Presentase Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pelayanan Deteksi Dini HIV Sesuai Standar		-	100%	-	-	100%	-	-	100,00%	-
	Presentase Orang Dengan HIV yang Mendapatkan ARV		-	90%		-	75,60%	-	-	84,00%	-
Pengelolaan Pelayanan Malaria	Jumlah dokumen pengelolaan pelayanan malaria	Jumlah dokumen pengelolaan pelayanan malaria	-	-	100%	-	-	100%	-	-	100%
Pengelolaan upayakesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Jumlah dokumen pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	-	100%	-	-	100%	-	-	100%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran (*Impact*), Program (*Outcome*), Kegiatan dan Sub Kegiatan (*Output*) Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Formula/Rumus/Dasar Penghitungan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024	Target Renstra Dinas Kesehatan Tahun			Realisasi Renstra Dinas Kesehatan Tahun			Rasio CapaianTahun		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	**Tingkat ketersediaan sistem informasi kesehatan**	**Jumlah Puskesmas yang melaksanakan sistem informasi kesehatan**	**37**	**37**	**37**	**37**	**37**	**37**	**100%**	**100%**	**100%**
Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Informasi yang disusun	Jumlah Dokumen Informasi yang disusun	2	2	2	2	2	2	100%	100%	100%
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah LAN yang terpelihara dan puskesmas yang menggunakan simpus dan e-SPM	Jumlah LAN yang terpelihara dan puskesmas yang menggunakan simpus dan e-SPM	37	38	38	37	38	38	100%	100%	100%
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-	-	100%	-	-	100%	-	-	100%
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diterbitkan**	**Jumlah Rumah Sakit dan Faskes Lainnya yang mempunyai izin Operasional**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
	Persentase Puskesmas dengan Tingkat Kinerja Baik (≥ 89%)	**Jumlah Puskesmas dengan Tingkat Kinerja Baik (≥ 89%) dibagi jumlah seluruh puskesmas dikali 100%**	**10,80%**	**16,20%**	**100,00%**	**62,20%**	**91,89%**	**100%**	**575,93%**	**567,22%**	**100%**
	Jumlah keluarga yang mendapat intervensi sesuai hasil survey KS	**Jumlah keluarga hasil survei KS yang diintervensi dibagi jumlah seluruh keluarga hasil KS dikali 100%**	**-**	**-**	**318170**	**-**	**-**	**63602**	**-**	**-**	**19,99%**
	Persentase Klinik Pratama yg terakreditasi	**Jumlah klinik pratama yang sudah terakreditasi dibagi jumlah seluruh klinik pratama dikali 100%**	**10%**	**20%**	**90%**	**0%**	**58,82%**	**87,8%**	**0%**	**294,10%**	**97,56%**

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran (*Impact*), Program (*Outcome*), Kegiatan dan Sub Kegiatan (*Output*) Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Formula/Rumus/Dasar Penghitungan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024	Target Renstra Dinas Kesehatan Tahun			Realisasi Renstra Dinas Kesehatan Tahun			Rasio CapaianTahun		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
	Persentase RS yang terakreditasi paripurna	**Jumlah RS yang terakreditasi paripurna dibagi dengan jumlah seluruh RS dikali 100%**	**22,27%**	**36,36%**	**90,9%**	**45,45%**	**90,9%**	**90%**	**204,09%**	**250%**	**99,01%**
	Persentase Klinik Utama yang terakreditasi	**Jumlah Klinik Utama yang terakreditasi dibagi dengan jumlah seluruh Klinik Utama yang ada dikali 100%**	**-**	**-**	**40%**	**-**	**40%**	**80%**	**-**	**-**	**200%**
	Persentase lab Madya yang terakreditasi	**Jumlah Laboratorium medis yang terakreditasi dibagi dengan jumlah seluruh Laboratorium Medis dikali 100%**	**-**	**-**	**-**	**0%**	**0%**	**1%**	**-**	**-**	**-**
Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Persentase Puskesmas dengan Tingkat Kinerja Baik (≥ 89%)	Jumlah Puskesmas dengan Tingkat Kinerja Baik (≥ 89%) dibagi jumlah seluruh puskesmas dikali 100%	40%	16,20%	100%	23%	91,89%	91,89%	57,50%	567,22%	91,89%
	Jumlah keluarga yang mendapat intervensi sesuai hasil survey KS	Jumlah keluarga hasil survei KS yang diintervensi dibagi jumlah seluruh keluarga hasil KS dikali 100%	40365	40365	318170	45826	45826	63602	113,53%	113,53%	19,99%
	Persentase Klinik Pratama yg terakreditasi	Jumlah klinik pratama yang sudah terakreditasi dibagi jumlah seluruh klinik pratama dikali 100%	50%	20%	90%	0%	58,82%	87,80%	0,00%	294,10%	97,56%
Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah RS yang terakreditasi paripurna	Jumlah rumah sakit yang sudah terakreditasi paripurna dibanding dengan jumlah seluruh rumah sakit yang ada	30,00%	40,00%	78,50%	50%	91%	90,90%	166,67%	227,25%	115,80%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran (*Impact*), Program (*Outcome*), Kegiatan dan Sub Kegiatan (*Output*) Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Formula/Rumus/Dasar Penghitungan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024	Target Renstra Dinas Kesehatan Tahun			Realisasi Renstra Dinas Kesehatan Tahun			Rasio CapaianTahun		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
	Jumlah Klinik Utama yang Terakreditasi	Jumlah Klinik Utama yang Terakreditasi	-	-	-	-	-	-	-!	-	-
	Jumlah Lab Madya yang Teradkreditasi	Jumlah Lab Madya yang Teradkreditasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	***Persentase kecukupan rasio dan kompetensi tenaga kesehatan***	***Jumlah tenaga kesehatan eksisting dan pemenuhan kompetensi nakes dibagi jumlah kebutuhan tenaga kesehatan dan kebutuhan pemenuhan kompetensi nakes***	***85%***	***100%***	***100%***	***70%***	***100%***	***35,16%***	**82,35%**	**100%**	**35,16%**
Pemberian izin praktek tenaga kesehatan di kabupaten / kota	**Jumlah ijin praktik yang diterbitkan setelah memenuhi persyaratan**	**Jumlah SIP/SIK tenaga kesehatan yang diterbitkan dibagi jumlah SIP/SIK yang diajukan**	**100**	**1250**	**1250**	**100**	**2241**	**1686**	**100%**	**179,28%**	**134,88%**
Pengendalian perizinan praktik tenaga kesehatan	Jumlah Nakes yang memiliki SIP/SIK yang berlaku pada faskes dibandingkan jumlah nakes yang terdaftar di sistem SISDMK di Faskes pemerintahan	Jumlah nakes di Kab. Kediri yang mengurus SIP/SIK (SIP/SIK nya sudah terbit) dibanding jumlah nakes yang terdaftar di sistem SISDMK Kab. Kediri	100	100	2422	100	100	2390	100%	100%	98,68%
Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Terlaksananya kegiatan pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan melalui faskes dan organisasi profesi	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan melalui faskes dan organisasi profesi dibagi jumlah faskes dan organisasi profesi di kab. kediri	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP	**Tersedianya perencanaan SDM Kesehatan di Fasiliatas Kesehatan Pemerintah**	**Jumlah laporan perencanaan SDM Kesehatan di Faskes Pemerintah yang dilaporkan dibagi jumlah laporan**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran (*Impact*), Program (*Outcome*), Kegiatan dan Sub Kegiatan (*Output*) Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Formula/Rumus/Dasar Penghitungan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024	Target Renstra Dinas Kesehatan Tahun			Realisasi Renstra Dinas Kesehatan Tahun			Rasio CapaianTahun		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota		**perencanaan SDM Kesehatan yang seharusnya dilaporkan dikali 100 persen**									
Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Tersedianya dokumen penyusunan perencanaan kebutuhan SDMK di Faskes Pemerintahan	Jumlah dokumen penyusunan perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan di Faskes Pemerintah lingkup Kab. Kediri dibagi jumlah faskes pemerintahan yang ada di lingkup Kab. Kediri	100%	100%	100%	100%	100%	4200%	100%	100%	4200%
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Terpenuhinya 9 Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai Standar di Puskesmas	Terpenuhinya 9 Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai Standar di Puskesmas	100%	-	-	100%	-	-	100%	-	-
Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Terlaksananya kegiatan pembinaan dan pengawasan SDMK di Faskes Pemerintahan	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan SDM kesehatan di faskes pemerintah dibagi jumlah faskes pemerintah di kab. kediri dikali 100 persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase ASN Yang Dikembangkan Kompetensinya**	**Jumlah ASN yang mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi dibagi jumlah ASN di lingkup Dinas Kesehatan dikali 100 persen**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**96,21%**	**100%**	**100%**	**96,21%**
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya	Jumlah peserta yang mengikuti pengembangan kompetensi setiap tahun	Jumlah peserta pelatihan yang mengikuti pengembangan kompetensi dibagi jumlah peserta	60	60	60	60	197	547	100%	328,33%	911,67%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran (*Impact*), Program (*Outcome*), Kegiatan dan Sub Kegiatan (*Output*) Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Formula/Rumus/Dasar Penghitungan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024	Target Renstra Dinas Kesehatan Tahun			Realisasi Renstra Dinas Kesehatan Tahun			Rasio CapaianTahun		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		yang membutuhkan pengembangan kompetensi									
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan DanMakanan Minuman	**Persentase Pemberian Rekomendasi Apotek, Toko Obat, Toko Alkes dan UMOT**	**Jumlah surat rekomendasi yang dikeluarkan dibanding jumlah permohonan rekomendasi yang masuk dikali 100%**	**75%**	**75%**	***75%***	**100%**	**75%**	***100%***	**133,33%**	**100,00%**	**133,33%**
	Per sentase Produk Makanan Minuman Tertentu Yang Bersertifikat	**Jumlah produk makanan minuman tertentu yang bersertifikat P-IRT dibanding jumlah yang mengajukan izin P-IRT dikali 100%**	**75%**	**75%**	***75%***	**100%**	**100%**	***100%***	**133,33%**	**133,33%**	**133,33%**
Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optical, UMOT	**Jumlah rekomendasi Apotek, TO, Tk Alkes dan Optikal UMOT yang diterbitkan**	**Jumlah rekomendasi apotek, TO, TK. Alkes dan optikal, UMOT yang diterbitkan**	**20**	**20**	**50**	**20**	**80**	**86**	**100%**	**400%**	**172%**
	Persentase Apotek,Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optik, UMOT yang dibina dan diawasi	**Jumlah apotek, TO, Tk. Alkes dan optikal, UMOT yang dibina dan diawasi dibanding jumlah apotek, TO, Tk. Alkes dan optikal, UMOT yang memiliki surat izin**	**27%**	**30%**	**32%**	**61,9%**	**48%**	**24%**	**229,26%**	**160,00%**	**75,00%**
Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah rekomendasi Apotek, TO, toko alkes, dan optikal , UMOT yang memenuhi persyaratan	Jumlah rekomendasi Apotek, TO, toko alkes, dan optikal , UMOT yang memenuhi persyaratan	20	20	50	20	80	86	100%	400%	172%
	Jumlah apotek, TO, toko alkes, dan optikal , UMOT yang dibina dan diawasi	Jumlah apotek, TO, toko alkes, dan optikal , UMOT yang dibina dan diawasi	45	48	50	130	48	60	288,89%	100%	120%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran (*Impact*), Program (*Outcome*), Kegiatan dan Sub Kegiatan (*Output*) Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Formula/Rumus/Dasar Penghitungan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024	Target Renstra Dinas Kesehatan Tahun			Realisasi Renstra Dinas Kesehatan Tahun			Rasio CapaianTahun		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	**Jumlah sertifikat P-IRT yang diterbitkan**	**Jumlah P-IRT yang telah memenuhi syarat sertifikasi P-IRT**	**123**	**126**	**150**	**120**	**16**	**1606**	**97,56%**	**12,70%**	**1070,67%**
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah produsen industri rumah tangga yang mengikuti penyuluhan keamanan pangan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap sarana produksinya	Jumlah produsen industri rumah tangga yang mengikuti penyuluhan keamanan pangan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap sarana produksinya	123	126	150	120	16	111	97,56%	12,70%	74,00%
Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi tempat pengelolaan makanan (TPM) antara lain : Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran, dan Depot Air Minum	**Persentase TPM yang ber SLHS**	**Jumlah TPM yang brSLHS dibagi jumlah total TPM diklai 100%**	**-**	**80,00%**	**80,00%**	**-**	**3,00%**	**0,15%**	**-**	**3,75%**	**0,19%**

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran (*Impact*), Program (*Outcome*), Kegiatan dan Sub Kegiatan (*Output*) Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Formula/Rumus/Dasar Penghitungan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024	Target Renstra Dinas Kesehatan Tahun			Realisasi Renstra Dinas Kesehatan Tahun			Rasio CapaianTahun		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan penerbitan sertifikat laik higiene sanitasi tempat pengelolaan makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Sertifikat Laik Higiene Sanitasi tempat pengelolaan makanan (TPM) antara lain : Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran, dan Depot Air Minum yang diterbitkan	Jumlah Sertifikat Laik Higiene Sanitasi tempat pengelolaan makanan (TPM) antara lain : Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran, dan Depot Air Minum yang diterbitkan	123	100	25	120	100	8	97,56%	100%	32%
Penerbitan Stiker Pembinaan Pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	**Persentase Stikerisasi Pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan**		**-**	**80%**	**-**	**-**	**80%**	**-**	**-**	**100%**	**-**
Pengendalian dan Pengawasan serta TindakLanjut penerbitan Stiker pembinaan pada makanan Jajanan dan Sentra makanan jajanan	Jumlah stikerisasi pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan	Jumlah stikerisasi pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan	-	200	100	-	200	120	-	100%	120%
Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	**Prosentase pemeriksaan produksi makanan minuman industri rumah tangga**	**Jumlah pemeriksaan produksi makanan minuman industri rumah tangga yang dibina dan diawasi dibanding jumlah pemeriksaan produksi makanan minuman indistri rumah tangga yang bersertifikasi**	**3%**	**3,77%**	**15%**	**3%**	**40%**	**58,80%**	**100%**	**1061,01%**	**392%**

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran (*Impact*), Program (*Outcome*), Kegiatan dan Sub Kegiatan (*Output*) Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Formula/Rumus/Dasar Penghitungan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024	Target Renstra Dinas Kesehatan Tahun			Realisasi Renstra Dinas Kesehatan Tahun			Rasio CapaianTahun		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Persentase produsen industri rumah tangga yang dibina dan diawasi	Persentase produsen industri rumah tangga yang dibina dan diawasi dibanding produsen industri rumah tangga yang ditargetkan di tahun N	100%	100%	75%	100%	100%	12,50%	100,00%	100,00%	16,67%
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	***Persentase UKBM Purnama Mandiri (Posyandu balita, poskestren, poskesdes, SBH, desa siaga)***	***Jumlah UKBM Purnama+Mandiri /jumlah UKBM x100***	***66%***	***67%***	***68%***	***44%***	***59%***	***41%***	**66,67%**	**88,06%**	**60,29%**
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Frekuensi kegiatan tim pokjanal tk. Kabupaten, kecamatan dan desa dalam satu tahun**	**Jumlah frekuensi Pertemuan tim pokjanal posyandu TK kabupaten dalam 1 tahun**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**100%**	**100%**	**100%**
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah lintas sektor/ organisasi masyarakat/ organisasi profesi/ dunia usaha yang bermitra dengan UKBM	Jumlah organisasi yang melakukan mitra tentang UKBM dibagi jumlah organisasi	2	2	2	0	2	1	0%	100%	50%
Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah media KIE yang digunakan dalam satu tahun**	**Jumlah tema KIE yang ditayangkan dalam media**	**5**	**5**	**5**	**6**	**5**	**6**	**120%**	**100%**	**120%**
Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat	Jumlah tema KIE program prioritas yang dipromosikan melalui media	Jumlah Tema KIE yang di promosikan oleh media dalam satu tahun	5	5	5	7	5	6	140,00%	100,00%	120,00%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran (*Impact*), Program (*Outcome*), Kegiatan dan Sub Kegiatan (*Output*) Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Formula/Rumus/Dasar Penghitungan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024	Target Renstra Dinas Kesehatan Tahun			Realisasi Renstra Dinas Kesehatan Tahun			Rasio CapaianTahun		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
	Persentase Rumah Tangga Sehat (10 Indikator)		63%	-	-	48,57%	-	-	77,10%	-	-
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Tingkat partisipasi kesehatan masyarakat skala desa**	**Jumlah kader yang ikut dalam partisipasi kesehatan masyarakat**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
	Cakupan promosi kesehatan tingkat desa	**Jumlah penyuluhan yang dilakukan oleh kader desa dalam satu tahun**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
	Cakupan kelompok kesehatan masyarakat yang dibina	Jumlah kelompok kesehatan masyarakat yang dibina selama 1 tahun	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Posyandu Purnama Mandiri (PURI)	Jumlah posyandu PURI dibagi jumlah seluruh posyandu yang ada dikalikan 100	88%	88%	89%	95,65%	96,18%	99%	108,69%	109,30%	111,24%
	Persentase poskesdes purnama mandiri (PURI)	Jumlah poskesdes PURI dibagi jumlah seluruh poskesdes yang ada dikalikan 100	16%	18%	19%	25,00%	21,51%	24%	156,25%	119,50%	126,32%
	Persentase poskestren purnama mandiri (PURI)	Jumlah poskestren PURI dibagi jumlah seluruh poskestren yang ada dikalikan 100	39%	47%	56%	44,83%	35,48%	35%	114,95%	75,49%	62,50%
	Persentase saka Bhakti Husada (SBH) purnama Mandiri (PURI)	Jumlah posyandu SBH dibagi jumlah seluruh SBHyang ada dikalikan 100	15%	20%	26%	12,90%	23,08%	23%	86,00%	115,40%	88,46%
	Persentase desa-kelurahan siaga aktif	Jumlah desa yang melaksanakan desa siaga aktif dibagi jumlah seluruh desa yang ada dikalikan 100	16%	18%	19%	24,84%	37,20%	19%	155,25%	206,67%	100%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran (*Impact*), Program (*Outcome*), Kegiatan dan Sub Kegiatan (*Output*) Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Formula/Rumus/Dasar Penghitungan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024	Target Renstra Dinas Kesehatan Tahun			Realisasi Renstra Dinas Kesehatan Tahun			Rasio CapaianTahun		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat	Frekuensi bimbingan teknis dan supervisi UKBM yang dilakukan selama satu tahun	Jumlah frekuensi bimbingan teknis UKBM di wilayah Kabupaten yang dilaksanakan	6	6	6	6	6	6	100%	100%	100%

Untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan pada aspek pendanaan pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten kediri, dilakukan analisis pengelolaan pendanaan pelayanan pada pelaksanaan Periode tahun 2020-2021 yang disajikan dalam table berikut :

Tabel 2.23 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri Tahun 2020

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran (*Impact*), Program (*Outcome*), Kegiatan dan Sub Kegiatan (*Output*) Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Anggaran Pada Tahun	Realisasi Anggaran Pada Tahun	Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun
		2020	2020	2020
1	*2*	*3*	*4*	*5*
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN (01)	**Cakupan pelayanan administrasi perkantoran**	***18.283.308.632,00***	**17.178.504.346,00**	**93,95%**
Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya administrasi Perkantoran	17.783.865.242,00	16.869.231.365,00	**94,85%**
Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi kelembagaan	499.443.390,00	309.272.981,00	61,92%
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	**Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi**	**2.700.995.200,00**	**2.700.995.200,00**	100%
	Sarana/ peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	**2.700.995.200,00**	**2.700.995.200,00**	**100%**
	Jumlah puskesmas yang dibangun/direhab			

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran (*Impact*), Program (*Outcome*), Kegiatan dan Sub Kegiatan (*Output*) Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Anggaran Pada Tahun	Realisasi Anggaran Pada Tahun	Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun
		2020	2020	2020
Penyediaan/ Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan sarana dan prasarana kantor/ aparatur	Terlaksananya penilaian aset barang milik daerah			
	Penambahan ruang gedung arsip			
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	**525.528.000,00**	**204.306.600,00**	38,87%
Pendidikan & pelatihan sumber daya aparatur	Persentase tenaga kesehatan yang sesuai dengan kompetensinya	375.528.000,00	125.884.500,00	33,52%
	Persentase tenaga kesehatan yang dibina sesuai dengan kompetensi			
	Jumlah calon tenaga kesehatan teladan terpilih tingkat kabupaten			
	Jumlah pelatihan yang dilaksanakan			
	Jumlah in house training yang dilaksanakan (RSUD SLG)	150.000.000,00	78.422.100,00	52,28%
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	**Cakupan program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan**	**133.551.000,00**	**110.805.000,00**	82,96%
Penyusunan dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja dan ikhtisar kinerja keuangan yang disusun	133.551.000,00	110.805.000,00	82,96%
	Jumlah dokumen laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang disusun			
	Jumlah dokumen RENJA yang disusun			
	Jumlah laporan keuangan yang disusun dalam 1 tahun oleh subbagian keuangan			
	Jumlah dokumen profil yang disusun			
	Frekuensi pemeliharaan LAN			
	Jumlah LAN yang terpelihara			
	Frekuensi Belanja publikasi			

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran (*Impact*), Program (*Outcome*), Kegiatan dan Sub Kegiatan (*Output*) Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Anggaran Pada Tahun	Realisasi Anggaran Pada Tahun	Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun
		2020	2020	2020
PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	**Persentase keluarga yang mencapai indeks keluarga sehat (IKS) sehat**	45.792.476.000,00	32.035.052.246,71	69,95%
	Persentase Desa Siaga Aktif Purnama Mandiri			
	Persentase Rumah Sehat			
Kesehatan Keluarga dan Gizi	Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai standar	1.227.170.000,00	618.964.118,00	50,43%
	Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin sesuai standar			
	Persentase Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir			
	Persentase Pelayanan Kesehatan Balita			
	Persentase Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar			
	Persentase Usia Lanjut Yang Mendapat Skrining			
Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase rumah tangga sehat	852.667.500,00	242.733.400,00	28,46%
	Persentase Jumlah Posyandu Purnama Mandiri			
	Persentase taman posyandu optimal			
	Persentase poskesdes aktif			
	Persentase poskestren aktif			
	Persentase SBH aktif			
	Jumlah kegiatan promosi kesehatan dan pola hidup sehat yang dilaksanakan di RSUD SLG	271.101.500,00	260.049.600,00	95,92%
Peningkatan Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Keluarga dan Olah raga	Persentase rumah sehat	194.346.000,00	153.802.500,00	79,13%
	Persentase TPM yang memenuhi syarat			
	Persentase TTU yang memenuhi syarat			
	Jumlah Kecamatan Sehat			

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran (*Impact*), Program (*Outcome*), Kegiatan dan Sub Kegiatan (*Output*) Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Anggaran Pada Tahun	Realisasi Anggaran Pada Tahun	Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun
		2020	2020	2020
	Persentase desa ODF			
	Jumlah Pos UKK terbentuk			
	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Upaya Kesehatan olah raga			
Bantuan Operasional Puskesmas	Jumlah puskesmas yang didanai kegiatan dengan dana BOK	38.220.178.000,00	26.652.634.133,59	69,73%
	Frekuensi kegiatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif bersumber dana BOK yang terlaksana			
Jaminan Persalinan	Frekuensi tersedianya dana untuk pelayanan persalinan di puskesmas	5.027.013.000,00	4.106.868.495,12	81,69%
PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN	**Persentase pemenuhan kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan di sarana kesehatan pemerintah**	**3.853.997.850,00**	**2.911.594.414,00**	75,54%
Peningkatan Pelayanan, pemenuhan, pembinaan, pengawasan, di bidang Kefarmasian, Pangan NAPZA, PKRT	Jumlah tenaga kefarmasian yang mendapatkan surat izin praktek	3.823.127.850,00	2.895.196.414,00	75,72%
	Presentase sarana kefarmasian pemerintah dan swasta yang dilakukan pengawasan dan pembinaan			
	Jumlah masyarakat/kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan di bidang obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, PKRT dan P-IRT			
	Jumlah IRTP, UMOT, PKRT yang mendapatkan sertifikat/registrasi/izin			
	Persentase jumlah item obat yang terpenuhi sesuai dengan Kebutuhan obat			
Pengelolaan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai	Persentase Obat dan Perbekalan kesehatan dengan tingkat aman	30.870.000,00	16.398.000,00	53,11%
	Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan			
	Persentase kegiatan monitoring obat dan perbekalan kesehatan			
	Persentase pelaporan obat dan perbekalan kesehatan puskesmas (LPLPO) yang benar			

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran (*Impact*), Program (*Outcome*), Kegiatan dan Sub Kegiatan (*Output*) Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Anggaran Pada Tahun	Realisasi Anggaran Pada Tahun	Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun
		2020	2020	2020
PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR	Insiden Rate DBD	677.929.412,00	504.222.483,00	74,37%
	Persentase kasus HIV mendapat ARV			
	Persentase keberhasilan pengobatan kusta kering (PB)			
	Persentase keberhasilan pengobatan kusta basah (MB)			
	Persentase Keberhasilan Pengobatan TB			
	Angka Kesakitan Diare untuk Semua Umur			
	Angka Kesakitan Diare untuk Balita			
	Persentase desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)			
	Persentase Kejadian Luar Biasa (KLB) ditangulangi < 24 jam			
Pencegahan dan pengendalian penyakit menular	Persentase penemuan kasus diare pada semua umur	435.361.400,00	331.045.471,00	76,03%
	Persentase penemuan kasus diare pada balita			
	Persentase bumil dilakukan screening HBsAg/Hepatitis			
	Persesntase kasus ISPA tertangani sesuai standar			
	Persentase penemuan dan penanganan kasus TB			
	Persentase cacat 2 kasus kusta baru			
	Persentase penemuan kasus kusta pada anak			
	Persesntase penderita kusta RFT MB			
	Persesntase penderita kusta RFT PB			
	Persentase orang beresiko terinveksi HIV mendapatkan pemeriksaan sesuai standar			
	Persentase jumlah pengidap HIV yang mengakses layanan CST			
	Persentase Kasus DBD ditangani sesuai standar			

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran (*Impact*), Program (*Outcome*), Kegiatan dan Sub Kegiatan (*Output*) Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Anggaran Pada Tahun	Realisasi Anggaran Pada Tahun	Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun
		2020	2020	2020
Peningkatan imunisasi dan surveilans	Jumlah desa/kelurahan Universal Child Immunization	96.338.012,00	83.452.012,00	86,62%
	Jumlah KLB yg ditanggulangi < 24 jam			
	Persentase ketepatan dan kelengkapan laporan penyakit potensial KLB			
Peningkatan Pelayanan Penyakit Tidak Menular dan Keswa	Persentase penderita DM yg dilayani sesuai standar	146.230.000,00	89.725.000,00	61,35%
	Persentase penderita Hipertensi mendapatkan pelayanan sesuai standar			
	Presentase WNI usia 15 sd 59 th mendapatkan screening kesehatan sesuai standar			
	Persentase desa yang melaksanakan Posbindu			
	Persentase sekolah yang melaksanakan KTR.			
	Persentase Perempuan usia 30 sd 50 th terdeteksi kanker leher rahim dan kanker payudara .			
	Persentase ODGJ berat ditangani sesuai standar			
PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN	**Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut (FKTL) terakreditasi**	2.237.804.000,00	1.190.646.340,00	53,20%
	Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) terakreditasi			
	Persentase pengobat/penyehat tradisional yang memiliki ijin			
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Persentase RS, klinik utama, laboratorium, dan optic yang dibina	80.882.000,00	43.566.000,00	53,86%
	Rasio tempat tidur RS per satuan penduduk			
	Jumlah sarana kesehatan tingkat lanjutan (FKTL) yang terakreditasi			
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Primer	Persentase Klinik Pratama yang dibina	2.134.217.000,00	1.126.298.340,00	52,77%
	Persentase Praktik Perorangan dokter/dokter Gigi yang dibina			

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran (*Impact*), Program (*Outcome*), Kegiatan dan Sub Kegiatan (*Output*) Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Anggaran Pada Tahun	Realisasi Anggaran Pada Tahun	Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun
		2020	2020	2020
	Persentase laboratorium klinik pratama yang dibina.			
	Persentase puskesmas yang melaksanakan penilaian kinerja puskesmas			
	Jumlah Puskesmas yang terakreditasi/reakreditasi			
	Persentase puskesmas yang dibina			
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional	Persentase Penyehat Tradisional yang dibina	22.705.000,00	20.782.000,00	91,53%
	Persentase Tenaga Kesehatan Tradisional yang dibina			
	Persentase Puskesmas yang melakukan pembinaan pelayanan kesehatan tradisional			
PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PENDUDUK MISKIN	**Persentase masyarakat miskin yang mendapatkan jaminan kesehatan**	86.058.000,00	41.719.000,00	48,47%
	Persentase nakes yang memiliki kompetensi sesuai standart			
Manajemen dan koordinasi pelayanan masyarakat miskin	Jumlah masyarakat miskin penerima bantuan iuran	86.058.000,00	41.719.000,00	48,47%
	Persentase masyarakat miskin yang dilayani FKTP			
	Persentase penyerapan dana operasional puskesmas			
PROGRAM : PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA PRASARANA PUSKESMAS/ PUSTU DAN JARINGANNYA	**Cakupan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Pustu dan jaringannya yang diadakan dan terpelihara**	10.682.092.813,44	9.359.234.577,00	87,61%
Peningkatan, pemeliharaan dan perbaikan sarana prasarana puskesmas dan puskesmas pembantu,	Tersedianya sarana /peralatan dan perlengkapan kantor	2.051.903.229,63	1.876.202.080,00	91,43%
	Jumlah puskesmas yang direhab dan dibangun			
	Terlaksananya Penilaian Asset barang nlik Daerah			
	Penambahan Ruang Gedung (Arsip)			

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran (*Impact*), Program (*Outcome*), Kegiatan dan Sub Kegiatan (*Output*) Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Anggaran Pada Tahun	Realisasi Anggaran Pada Tahun	Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun
		2020	2020	2020
Peningkatan, pelayanan penyediaan peralatan kesehatan dan sarana prasarana	Jumlah aset bangunan yang dikelola	8.630.189.583,81	7.483.032.497,00	86,70%
PROGRAM : PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RS/RSJ/RS PARU-PARU/ RS MATA	**Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL) yang memenuhi standar minimal alat kesehatan dan sarana prasarana**	**22.828.168.760,00**	**18.294.586.960,87**	80,14%
Pembangunan instalasi pengolahan limbah RS	Terpenuhinya pembangunan instalasi pengolahan limbah	1.800.000.000,00	1.030.731.243,58	57,26%
Pengadaan obat-obatan RS	Tersedianya obat-obatan rumah sakit	5.137.119.933,00	5.050.797.952,76	98,31%
Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit	Terpenuhinya pengadaan bahan-bahan logistik di rumah sakit	3.965.308.500,00	2.040.606.975,63	51,46%
Pengadaan Alat-alat Kedokteran Rumah Sakit	Terpenuhinya pengadaan alat-alat kedokteran rumah sakit	4.071.427.500,00	3.857.397.790,00	94,74%
Penyediaan/ Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan sarana dan prasarana kantor/ aparatur	Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan perlengkapan sarana dan prasarana rumah sakit	7.854.312.827,00	6.315.052.998,90	80,40%
PROGRAM : PENGADAAN PENINGKATAN, DAN PENGEMBANGAN UJI LABORATORIUM KESEHATAN	**Persentase cakupan peningkatan dan pengembangan iji laboratorium kesehatan**	**1.174.949.000,00**	**1.107.697.280,00**	94,27%
Pengadaan dan Peningkatan pelayanan uji laboratorium (UPTD Labkes)	Jumlah reagen untuk pengadaan media uji labkes donor darah	1.174.949.000,00	1.107.697.280,00	94,27%
	Jumlah pertemuan tenaga laboratorium puskesmas dan RS/ klinik swasta yang diadakan			
	Jumlah pengadaan reagen kimia dan biologi untuk pemeriksaan sampel air dan makanan			
	Jumlah pengadaan suku cadang lab			
	Jumlah puskesmas yang mendapatkan bimbingan teknis			
	Jumlah sampel air yang diperiksa secara bakteriologi			
	Jumlah sampel air yang diperiksa secara kimia			

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran (*Impact*), Program (*Outcome*), Kegiatan dan Sub Kegiatan (*Output*) Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Anggaran Pada Tahun	Realisasi Anggaran Pada Tahun	Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun
		2020	2020	2020
	Jumlah puskesmas yang sarana dan prasarananya dimonitoring			
PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN BLUD		**153.017.340.000,00**	**59.669.127.586,04**	38,99%
Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD	Jumlah laporan belanja fungsional BLUD setiap bulan dan laporan tahunan dalam 1 tahun anggaran	73.551.668.381,00	59.669.127.586,04	81,25%
Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD		20.879.882.412,67	13.462.383.108,87	64,47%
PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL		**21.849.210.940,00**	**3.772.200.575,00**	17,26%
Penyediaan/pemeliharaan sarana yankes bagi masyarakat yang terkena penyakit akibat dampak konsumsi rokok dan penyakit lainya		3.739.208.823,00	3.706.110.575,00	99,11%
Penyediaan/pemeliharaan sarana yankes bagi masyarakat yang terkena penyakit akibat dampak konsumsi rokok dan penyakit lainya (RSUD SLG)		18.010.002.117,00	14.712.315.758,40	81,68%
Kesehatan yang bekerjasama dengan badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan		100.000.000,00	66.090.000,00	66,09%

Tabel 2.24 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri Tahun 2021

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran (*Impact*), Program (*Outcome*), Kegiatan dan Sub Kegiatan (*Output*) Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Anggaran Pada Tahun	Realisasi Anggaran Pada Tahun	Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun
		2021	2021	2021
1	*2*	*3*	*4*	*5*

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran (*Impact*), Program (*Outcome*), Kegiatan dan Sub Kegiatan (*Output*) Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Anggaran Pada Tahun	Realisasi Anggaran Pada Tahun	Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun
		2021	2021	2021
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan**	**207.508.877.899,5**	***178.924.260.670,1***	86,22%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase pelaksanaan kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**39.509.000,00**	**18.615.000,00**	47,11%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun (Rentra, Renja)	10.207.500,00	10.175.000,00	99,68%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan keuangan yang dihasilkan dalam 1 tahun (Lap bulanan, semesteran, tahunan)	29.301.500,00	8.440.000,00	28,80%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Cakupan pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**83.298.507.051,00**	**79.859.915.729,00**	95,87%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tercukupinya gaji dan tunjangan ASN	81.045.617.051,00	78.283.381.396,00	96,59%
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan administrasi (penerima honor)	1.911.250.000,00	1.421.474.333,00	74,37%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan dalam 1 tahun	341.640.000,00	155.060.000,00	45,38%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Cakupan pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**52.428.520.400,00**	**41.788.402.847,00**	79,70%
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah baju kerja yang diadakan	6.480.000,00	6.480.000,00	100%
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase peserta pendidikan dan pelatihan yang mengalami peningkatan pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan	52.422.040.400,00	41.781.922.847,00	79,70%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Cakupan pelaksanaan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1.600.135.313,00**	**913.426.266,00**	57,08%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Frekuensi pemeliharaan jaringan listrik dalam 1 tahun (kali)	21.045.750,00	13.184.650,00	62,64%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis barang yang tersedia /di adakan dalam 1 tahun	1.058.250.063,00	624.363.765,00	58,99%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran (*Impact*), Program (*Outcome*), Kegiatan dan Sub Kegiatan (*Output*) Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Anggaran Pada Tahun	Realisasi Anggaran Pada Tahun	Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun
		2021	2021	2021
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Frekuensi pembelian peralatan rumah tangga dalam 1 tahun (kali)	82.996.800,00	43.087.860,00	51,91%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis barang / bahan yang tersedia /di adakan dalam 1 tahun	169.271.300,00	114.135.991,00	67,42%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jenis barang cetakan	104.211.000,00	43.304.270,00	41,55%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jenis bahan bacaan	3.900.000,00	2.400.000,00	61,53%
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu dalam 1 tahun	14.941.000,00	8.194.580,00	54,84%
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi dengan lintas program, lintas sektor dalam 1 tahun	145.519.400,00	64.755.150,00	44,49%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan pelaksanaan kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.393.389.851,00**	**718.898.399,00**	51,59%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Frekuensi kegiatan pelayanan surat menyurat dalam 1 tahun (kali)	1.440.000,00	16.000,00	1,11%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Frekruensi penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dalam 1 tahun (kali)	951.659.851,00	396.987.015,00	41,71%
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Frekuensi pemeliharaan alat kantor dalam 1 tahun (kali)	118.000.000,00	83.222.200,00	70,52%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Frekuensi kegiatan pelayanan umum kantor dalam 1 tahun (kali)	322.290.000,00	238.673.184,00	74,05%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**529.641.600,00**	**374.390.037,00**	70,68%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan	Jumlah kendaraan operasional yang terbayarkan pajaknya dalam 1 tahun	27.500.000,00	16.675.300,00	60,63%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan operasional yang mendapatkan pemeliharaan dalam 1 tahun	223.591.600,00	197.730.187,00	88,43%
Pemeliharaan Mebel	Frekuensi pemeliharaan mebelair dalam 1 tahun (kali)	10.000.000,00	5.625.100,00	56,25%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran (*Impact*), Program (*Outcome*), Kegiatan dan Sub Kegiatan (*Output*) Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Anggaran Pada Tahun	Realisasi Anggaran Pada Tahun	Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun
		2021	2021	2021
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Frekuensi pemeliharaan alat kantor dalam 1 tahun (kali)	148.400.000,00	50.189.450,00	33,82%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Frekuensi pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dalam 1 tahun (kali)	98.000.000,00	95.625.000,00	97,57%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Frekuensi pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dalam 1 tahun (kali)	22.150.000,00	8.545.000,00	38,57%
Peningkatan Pelayanan BLUD	**Persentase Puskesmas melaksanakan kegiatan penunjang pelayanan BLUD**	**68.219.174.684,52**	**55.250.612.392,08**	80,98%
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah puskesmas yang melaksanakan kegiatan penunjang pelayanan BLUD	68.219.174.684,52	55.250.612.392,08	80,98%
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	**Persentase Kecamatan STBM**	***134.306.493.785,00***	***84.385.067.418,94***	62,83%
	Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) terakreditasi			
	Indeks Keluarga Sehat			
	Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL) terakreditasi			
	Persentase Nakestrad dan Hattra yang memiliki izin			
	AKI			
	AKB			
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Cakupan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota sesuai kebutuhan**	**39.012.146.805,00**	**30.211.529.579,91**	77,44%
Pembangunan puskesmas	Persentase Pemenuhan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Gedung Puskesmas dan Jaringannya	3.205.000.000,00	3.177.414.492,00	99,13%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran (*Impact*), Program (*Outcome*), Kegiatan dan Sub Kegiatan (*Output*) Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Anggaran Pada Tahun	Realisasi Anggaran Pada Tahun	Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun
		2021	2021	2021
Pengembangan Puskesmas	Persentase Pemenuhan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Gedung Puskesmas dan Jaringannya	9.939.934.329,63	8.889.815.759,91	89,43%
Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Meubelair Puskesmas	880.165.599,37	680.385.725,00	77,30%
	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Alat Kedokteran Umum Puskesmas			
	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Alat Kedokteran Gigi Puskesmas			
	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Alat Kesehatan Umum Lainnya Puskesmas			
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kecukupan alat kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	10.979.425.796,00	7.518.355.569,00	68,47%
Pengadaan dan pemeliharaan alat kalibrasi	Jumlah alat kesehatan yang dikalibrasi	99.100.000,00	98.901.000,00	99,79%
Pengadaan Obat, Vaksin	Persentase Pengadaan obat dengan tingkat aman	5.276.931.340,00	2.204.583.646,00	41,77%
	Jumlah item pengadaan obat , vaksin			
Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah item pengadaan bahan habis pakai	8.275.719.740,00	7.359.025.579,00	88,92%
Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Puskesmas yang dilakukan kegiatan pemeliharaan rutin dan berkala alkes/alat penunjang medik	286.096.000,00	283.047.809,00	98,93%
Distribusi alat kesehatan, obat, vaksin, BMHP, makmin ke puskesmas serta faskes lainnya	Obat dan alkes yang di distribusikan dalam satu tahun	69.774.000,00	-	-
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Cakupan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan tingkat daerah (Cakupan kunjungan rawat jalan dan rawat inap)**	**93.666.656.808,00**	**53.182.099.769,03**	56,77%
	Persentase Puskesmas Dengan Kelulusan Akreditasi Minimal Utama			
	Persentase tenaga kesehatan tradisional yang dibina			
	Persentase penyehat tradisional yang dibina			

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran (*Impact*), Program (*Outcome*), Kegiatan dan Sub Kegiatan (*Output*) Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Anggaran Pada Tahun	Realisasi Anggaran Pada Tahun	Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun
		2021	2021	2021
	Persentase desa yang terbentuk Asman TOGA			
	Persentase puskesmas yang melaksanakan pembinaan yankestrad			
	Persentase akses sanitasi layak			
	Jumlah tingkatan tatanan dalam kabupaten sehat			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Cakupan ibu hamil dilayani sesuai standar (K4)	1.491.315.846,00	838.207.436,00	56,20%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Cakupan ibu bersalin dilayani sesuai standar	4.697.491.169,00	3.993.156.060,00	85,00%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Cakupan Bayi Baru Lahir dilayani sesuai standar (KN2)	117.818.200,00	23.107.800,00	19,61%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Cakupan Balita dilayani sesuai standar	682.258.100,00	279.383.600,00	40,94%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar sesuai standar	447.609.173,00	202.067.254,00	45,14%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	32.920.000,00	15.008.000,00	45,58%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut sesuai standar	171.291.511,00	59.804.000,00	34,91%
Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Persentase penderita hipertensi dilayani sesuai standar	40.522.000,00	10.000.000,00	24,67%
Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita diabetes militus	Persentase penderita DM dilayani sesuai standar	19.308.000,00	8.624.000,00	44,66%
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	43.848.000,00	9.920.000,00	22,62%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	194.050.200,00	96.952.200,00	49,96%
	Persentase penemuan dan penanganan kasus TB			
	Persentase keberhasilan pengobatan TB			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	135.429.750,00	35.257.750,00	26,03%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran (*Impact*), Program (*Outcome*), Kegiatan dan Sub Kegiatan (*Output*) Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Anggaran Pada Tahun	Realisasi Anggaran Pada Tahun	Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun
		2021	2021	2021
	Persentase Orang dengan HIV yang mendapatkan ARV			
Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi KLB	Cakupan Pelayanan Kesehatan bagi penduduk pada Kondisi KLB	10.712.934.639,00	2.973.429.946,00	27,75%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Cakupan Pemberian Vit A	4.397.130.527,00	2.216.875.630,00	50,41%
	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita			
	Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita			
	Prevalensi anemia pada ibu hamil			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	a. Jumlah Pos UKK yang terbentuk	299.506.200,00	196.287.000,00	65,53%
	b. Persentase jumlah jamaah haji yang diukur kebugaran jasmaninya			
	c. Jumlah Puskesmas yang melaksanakan upaya kesehatan olahraga			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase Tempat Pengelolaan pangan yang memenuhi syarat sesuai standar			
	Persentase desa ODF			
	Persentase sarana air minum yang diawasi / diperiksa kualitas airnya			
	Jumlah Fasyankes yang memiliki pengelolaan limbah medis			
	Persentase Tempat-tempat umum yang dilakukan pengawasan sesuai standar			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah tenaga kesehatan tradisional yang dibina	61.600.000,00	59.765.822,00	97,02%
	Jumlah penyehat tradisional yang dibina			
	Jumlah desa yang terbentuk Asman TOGA			
	Jumlah puskesmas yang melaksanakan pembinaan yankestrad			

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran (*Impact*), Program (*Outcome*), Kegiatan dan Sub Kegiatan (*Output*) Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Anggaran Pada Tahun	Realisasi Anggaran Pada Tahun	Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun
		2021	2021	2021
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Presentase KLB yang ditanggulangi ≤ 24 jam	2.521.775.978,00	905.464.775,00	35,90%
	Penemuan kasus AFP			
	Penemuan kasus suspect campak			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Persentase ODGJ ditangani sesuai standar	189.394.000,00	132.582.500,00	70,00%
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase penderita HT ditangani sesuai standar	4.386.847.319,00	3.325.872.910,00	75,81%
	Persentase Penderita DM ditangani Sesuai standart			
	Persentase WNI usia 15 - 59 tahun mendapatkan screening sesuai standar			
	Persentase desa yang melaksanakan Posbindu			
	Persentase sekolah yang melaksanakan KTR			
	Persentase Wanita Usia Subur yang melakukan deteksi dini penyakit Kanker payudara dan kanker leher rahim pada usia 30 sd 50 tahun			
	Persentase penemuan kusta pada anak			
	Persentase cacat pada kasus kusta baru			
	Persentase penderita kusta RFT-MB			
	Persentase penderita kusta RFT-PB			
	Persentase cakupan tatalaksana pneumonia balita			
	Persentase Puskesmas yang melaksanakan tatalaksana Diare sesuai standar			
	Persentase Puskesmas yang melaksanakan advokasi dan / sosialisasi Pengendalian PISP			

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran (*Impact*), Program (*Outcome*), Kegiatan dan Sub Kegiatan (*Output*) Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Anggaran Pada Tahun	Realisasi Anggaran Pada Tahun	Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun
		2021	2021	2021
	Persentase Puskesmas yang mempunyai Layanan Rehidrasi Oral Aktif (LROA)			
	Persentase Kasus Diare pada semua umur ditangani sesuai standar			
	Persentase Kasus Diare pada Balita ditangani sesuai standar			
	Persentase Bumil dilakukan (DDHB) Deteksi Dini Hepatitis B			
	Persentase bayi lahir dari Ibu reaktif HBsAg mendapat HBIg < 24 jam			
	Persentase bayi usia 9-12 bulan yang mendapat HBIg di test HBsAg hasilnya Non Reaktif			
	Persentase kasus DBD ditangani sesuai standar			
	Persentase Angka Bebas Jentik (ABJ)			
	Persentase anak usia 1-12 Tahun mendapatkan obat Cacing			
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Persentase penduduk dalam data base yang memiliki jaminan kesehatan	33.373.790.370,00	18.668.826.038,03	55,93%
Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah masyarakat /tokoh masyarakat yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan NAPZA	50.394.750,00	48.494.500,00	96,22%
	Jumlah pengadaan urine test			
Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Persentase pengambilan dan pengiriman spesimen ≤ 24 jam ke laboratorium pemeriksa	15.727.800,00	11.902.000,00	75,67%
Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Kecamatan sehat	243.630.000,00	99.336.000,00	40,77%
Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah puskesmas yang melaksanakan pelayanan preventif promotif, layanan persalinan	2.054.760.497,00	1.503.246.195,00	73,15%
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah puskesmas yang melaksanakan kegiatan operasional fasyankes	15.730.329.370,00	8.470.161.324,00	53,84%
Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas Dengan Kelulusan Akreditasi Minimal Utama	1.421.160.000,00	-	-

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran (*Impact*), Program (*Outcome*), Kegiatan dan Sub Kegiatan (*Output*) Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Anggaran Pada Tahun	Realisasi Anggaran Pada Tahun	Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun
		2021	2021	2021
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah desa yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap anak usia 0-11 bulan	295.483.780,00	252.245.290,00	85,36%
	Presentase Bayi usia 0-11 bulan yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap			
	Persentase anak usia 18-24 bulan yang mendapat imunisasi lanjutan Campak dan Rubella			
Pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon wabah	Presentase pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon wabah	1.139.010.000,00	561.067.450,00	49,25%
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	**Tingkat ketersediaan sistem informasi kesehatan**	**59.520.000,00**	**59.520.000,00**	100%
Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah dokumen informasi yang disusun	59.520.000,00	59.520.000,00	100%
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah LAN yang terpelihara dan puskesmas yang menggunakan simpus dan e-SPM			
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diterbitkan**	**1.568.170.172,00**	**931.918.070,00**	59,42%
	Persentase Puskesmas dengan Tingkat Kinerja Baik (≥ 89%)			
	Persentase keluarga yang mendapat intervensi			
	Persentase Klinik Pratama yang terakreditasi			
	Persentase RS yang terakreditasi paripurna			
	Persentase Klinik Utama yang terakreditasi			
	Persentase lab Madya yang terakreditasi			
Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Puskesmas dengan Tingkat Kinerja Baik (≥ 89%)	1.377.666.372,00	776.525.789,00	56,36%
	Jumlah keluarga yang mendapat intervensi sesuai hasil survey KS			
	Jumlah Klinik Pratama yg terakreditasi			

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran (*Impact*), Program (*Outcome*), Kegiatan dan Sub Kegiatan (*Output*) Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Anggaran Pada Tahun	Realisasi Anggaran Pada Tahun	Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun
		2021	2021	2021
Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah RS yang terakreditasi paripurna	190.503.800,00	155.392.281,00	81,56%
	Jumlah Klinik Utama yang terakreditasi			
	Jumlah lab Madya yang terakreditasi			
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	**Persentase kecukupan rasio dan kompetensi tenaga kesehatan**	***6.435.308.533,00***	***5.577.257.256,00***	86,66%
Pemberian izin praktek tenaga kesehatan di kabupaten / kota	**Jumlah ijin praktik yang diterbitkan setelah memenuhi persyaratan**			
Pengendalian perizinan praktik tenaga kesehatan	Perizinan praktek tenaga kesehatan terkendali			
Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Perizinan praktek tenaga kesehatan terkendali			
Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Terlaksananya kegiatan pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan melalui faskes dan organisasi profesi			
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	**Tersedianya perencanaan SDM Kesehatan di Fasiliatas Kesehatan Pemerintah**	**6.426.308.533,00**	**5.570.749.236,00**	86,68%
Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Tersedianya dokumen penyusunan perencanaan kebutuhan SDMK di Faskes Pemerintahan			
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Terpenuhinya 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar di Puskesmas	6.426.308.533,00	5.570.749.236,00	86,68%
Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Terlaksananya kegiatan pembinaan dan pengawasan SDMK di Faskes Pemerintahan			
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia Keseahtan terlaksana**	**9.000.000,00**	**6.508.020,00**	72,31%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran (*Impact*), Program (*Outcome*), Kegiatan dan Sub Kegiatan (*Output*) Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Anggaran Pada Tahun	Realisasi Anggaran Pada Tahun	Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun
		2021	2021	2021
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta yang mengikuti pengembangan kompetensi setiap tahun	9.000.000,00	6.508.020,00	72,31%
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan	**PERSENTASE PEMBERIAN REKOMENDASI APOTEK, TO, TK. AKLES DAN OPTIKAL, UMOT**	***652.987.000,00***	***208.497.000,00***	31,92%
	PERSENTASE PRODUK MAKANAN MINUMAN TERTENTU YANG BERSERTIFIKAT P-IRT			
Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optical, UMOT	**JUMLAH REKOMENDASI APOTEK, TO, TK. AKLES DAN OPTIKAL, UMOT YANG DITERBITKAN**	**75.489.000,00**	**43.810.000,00**	58,03%
	Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang dibina dan diawasi			
Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	JUMLAH REKOMENDASI APOTEK, TO, TK. AKLES DAN OPTIKAL, UMOT YANG MEMENUHI PERSYARATAN	75.489.000,00	43.810.000,00	58,03%
	JUMLAH APOTEK, TO, TK. AKLES DAN OPTIKAL, UMOT YANG DI BINA DAN DI AWASI			
Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	JUMLAH SERTIFIKAT P-IRT YANG DITERBITKAN	**261.325.000,00**	**124.577.000,00**	47,67%
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	**Jumlah produsen industri rumah tangga yang mengikuti penyuluhan keamanan pangan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap sarana produksinya**	261.325.000,00	124.577.000,00	47,67%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran (*Impact*), Program (*Outcome*), Kegiatan dan Sub Kegiatan (*Output*) Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Anggaran Pada Tahun	Realisasi Anggaran Pada Tahun	Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun
		2021	2021	2021
Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	**PERSENTASE PEMERIKSAAN PRODUKSI MAKANAN MINUMAN INDUSTRI RUMAH TANGGA**	**316.173.000,00**	**40.110.000,00**	12,68%
Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Persentase produsen industri rumah tangga yang dibina dan diawas	316.173.000,00	40.110.000,00	12,68%
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang	**Persentase UKBM Purnama Mandiri (Posyandu balita, poskestren, poskesdes, SBH, desa siaga)**	***3.548.870.219,00***	***2.076.428.799,00***	58,50
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**frekuensi kegiatan tim pokjanal tk. Kabupaten, kecamatan dan desa dalam satu tahun**	**619.840.700,00**	**240.816.200,00**	38,85%
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	jumlah lintas sektor/ organisasi masyarakat/ organisasi profesi/ dunia usaha yang bermitra dengan UKBM	619.840.700,00	240.816.200,00	38,85%
Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**jumlah media KIE yang digunakan dalam satu tahun**	**2.228.068.180,00**	**1.458.383.531,00**	65,45%
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah tema KIE program prioritas yang dipromosikan melalui media	2.228.068.180,00	1.458.383.531,00	65,45%
	Persentase rumah tangga sehat (10 indikator)			
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Tingkat partisipasi kesehatan masyarakat skala desa**	**700.961.339,00**	**377.229.068,00**	51,81%
	Cakupan promosi kesehatan tingkat desa			
	Cakupan kelompok kesehatan masyarakat yang dibina			
	Persentase Posyandu Purnama Mandiri (PURI)			
	Persentase poskesdes purnama mandiri (PURI)			

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran (*Impact*), Program (*Outcome*), Kegiatan dan Sub Kegiatan (*Output*) Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Anggaran Pada Tahun	Realisasi Anggaran Pada Tahun	Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun
		2021	2021	2021
	persentase poskestren purnama mandiri (PURI)			
	persentase saka Bhakti Husada (SBH) purnama Mandiri (PURI)			
	persentase desa-kelurahan siaga aktif			
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya	frekuensi bimbingan teknis dan supervisi UKBM yang dilakukan selama satu tahun	700.961.339,00	377.229.068,00	53,81%

Untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan pada aspek pendanaan pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri, dilakukan analisis pengelolaan pendanaan pelayanan pada pelaksanaan Periode tahun 2022-2024 yang disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.25 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan DinasKesehatan Kabupaten Kediri Tahun 2022-2024

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran (*Impact*), Program (*Outcome*), Kegiatan dan Sub Kegiatan (*Output*) Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Formula/Rumus/Dasar Penghitungan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024	Anggaran Pada Tahun			Realisasi Anggaran Pada Tahun			Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan**	**Jumlah penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang bisa dipenuhi dibagi jumlah total urusan penunjang pemerintahan kali 100%**	***154.432.890.439***	***160.731.348.191***	***144.017.434.193***	***144.053.598.245***	**149.215.980.765**	***140.752.891.716***	**93,3%**	**92,8%**	**97,7%**
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase pelaksanaan kegiatan perencanaan,**	**Jumlah dokumen perencanaan , penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berhasil disusun**	**234.980.385**	**158.721.000**	**130.324.700**	**138.043.900**	**135.255.550**	**115.734.000**	**58,7%**	**85,2%**	**88,8%**

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran (*Impact*), Program (*Outcome*), Kegiatan dan Sub Kegiatan (*Output*) Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Formula/Rumus/Dasar Penghitungan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024	Anggaran Pada Tahun			Realisasi Anggaran Pada Tahun			Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
	penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**dibagi jumlah semua dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dalam 1 tahun dikali 100%**									
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun (Rentra, Renja)	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun (Rentra, Renja)	23.200.035	40.711.000	39.900.000	17.417.000	24.816.000	33.190.000	75,1%	61,0%	83,2%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja yang disusun dalam 1 tahun	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja yang disusun dalam 1 tahun	211.780.350	118.010.000	90.424.700	120.626.900	110.439.550	82.544.000	57,0%	93,6%	91,3%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Cakupan pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah kegiatan administrasi umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan dibagi Total kegiatan adminitrasi umum dikali 100%**	**81.222.330.076**	**84.151.270.027**	**141.658.048.413**	**80.017.675.077**	**80.621.279.724**	**138.668.665.930**	**98,5%**	**95,8%**	**97,9%**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tercukupinya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya dalam 1 tahun/Jumlah total ASN dikali 100%	77.990.480.076	81.819.051.827	139.242.572.649	76.936.817.384	78.482.300.098	136.493.847.806	98,6%	95,9%	98,0%
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan administrasi (penerima honor)	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan administrasi (penerima honor)	2.167.450.000	1.368.656.000	1.164.857.764	2.088.033.443	1.291.076.180	1.118.323.599	96,3%	94,3%	96,0%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan dalam 1 tahun	Laporan keuangan terdiri 1 Dinkes dan 37 Puskesmas	1.064.400.000	963.562.200	1.011.530.000	992.824.250	847.903.446	923.262.858	93,3%	88,0%	91,3%
Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan keuangan yang disusun dalam 1 tahun	Jumlah Laporan keuangan yang disusun dalam 1 tahun			230.648.000			124.811.667			54,1%
Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang disusun dalam 1 tahun	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang disusun dalam 1 tahun			8.440.000			8.420.000			99,8%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase sarana penunjang pegawai yang tersedia**	**Jumlah sarana pegawai yang dilaksankan dalam 1 tahun dibagi jumlah sarana pegawai yang dibutuhkan**	**7.134.071.650**	-	**55.954.000**	**6.999.288.862**	-	**51.074.000**	98,1%		91,3%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran (*Impact*), Program (*Outcome*), Kegiatan dan Sub Kegiatan (*Output*) Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Formula/Rumus/Dasar Penghitungan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024	Anggaran Pada Tahun			Realisasi Anggaran Pada Tahun			Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang diadakan/ dibeli	Jumlah pakaian dinas yang diadakan/ dibeli	99.203.500	-	55.954.000	95.690.000	-	51.074.000	96,5%		91,3%
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Peserta Pendidikan dan Pelatihan yang Mengalami Peningkatan Pengetahuan, Kemampuan dan Keterampilan		7.034.868.150	-		6.903.598.862	-		98,1%		
	Jumlah Nakes yang Terbayarkan Insentifnya			-			-				
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Cakupan pelaksanaan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah kegiatan administrasi umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan dibagi Total kegiatan adminitrasi umum dikali 100%**	**1.275.676.990**	**716.542.800**	**367.316.800**	**1.017.628.538**	**631.123.817**	**281.302.520**	**79,8%**	**88,1%**	**76,6%**
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Frekuensi pemeliharaan jaringan listrik dalam 1 tahun (kali)	Jumlah pelaksanaan pemeliharaan jaringan listrik dalam 1 tahun dibagi seluruh pemeliharaan jaringan listrik dalam 1 tahun kali 100%	21.295.460	124.239.700	92.496.600	20.715.550	117.266.764	79.374.194	97,3%	94,4%	85,8%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan		146.724.300	263.964.400		124.294.300	248.732.200		84,7%	94,2%	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Frekuensi pembelian peralatan rumah tangga dalam 1 tahun (kali)	Jumlah pelaksanaan pembelian alat rumah tangga dalam 1 tahun dibagi seluruh pembelian peralatan rumah tangga dalam 1 tahun di kali 100%	121.036.330	34.569.300	43.467.200	93.715.100	12.390.500	27.557.792	77,4%	35,8%	63,4%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis barang / bahan yang tersedia /di adakan dalam 1 tahun	Jumlah item barang/bahan yang dibeli dibagi jumlah item barang kali 100%	190.721.400	191.300.600	162.827.800	170.620.513	164.631.953	133.847.234	89,5%	86,1%	82,2%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jenis barang cetakan	Jumlah item barang yang tercetak dalam 1 tahun	57.930.000	75.984.100	59.990.200	38.639.237	63.995.400	38.007.800	66,7%	84,2%	63,4%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan		4.080.000	3.836.200		2.936.000	2.250.000		72,0%	58,7%	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu dalam 1 tahun	Frekuensi kegiatan kunjungan tamu	15.678.000	22.648.500	8.535.000	4.935.300	21.857.000	2.515.500	31,5%	96,5%	29,5%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran (*Impact*), Program (*Outcome*), Kegiatan dan Sub Kegiatan (*Output*) Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Formula/Rumus/Dasar Penghitungan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024	Anggaran Pada Tahun			Realisasi Anggaran Pada Tahun			Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dengan Lintas Program, Lintas Sektor dalam 1 Tahun		718.211.500			561.772.538			78,2%		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan pelaksanaan kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah urusan penunjang pemerintah daerah yang dilaksanakan dalam 1 tahun dibagi jumlah total urusan penunjang pemerintah daerah**	**771.913.980**	**915.153.400**	**1.193.646.380**	**679.477.789**	**859.350.859**	**1.080.122.603**	**88,0%**	**93,9%**	**90,5%**
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Frekuensi kegiatan pelayanan surat menyurat dalam 1 tahun (kali)	jumlah bulan yang seluruh kegiatan pengiriman surat menyuratnya terpenuhi		1.560.000	1.500.000		251.000	153.000		16,1%	10,2%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Frekruensi penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dalam 1 tahun (kali)	jumlah bulan terpenuhi dan terbayar atas ketersediaan komunikasi, sumber daya air dan listrik kantor Dinas Kesehatan	343.744.600	426.767.400	521.624.380	320.140.909	398.848.360	436.993.626	93,1%	93,5%	83,8%
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Frekuensi pemeliharaan alat kantor dalam 1 tahun (kali)	jumlah bulan tersedia seluruh alat kantor yang memadai/ terpelihara	80.000.000	109.395.000	80.000.000	49.130.450	86.222.250	66.728.500	61,4%	78,8%	83,4%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Frekuensi kegiatan pelayanan umum kantor dalam 1 tahun (kali)	Jumlah bulan terpenuhi seluruh kegiatan pelayanan umum kantor	348.169.380	377.431.000	590.522.000	310.206.430	374.029.249	576.247.477	89,1%	99,1%	97,6%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**846.793.664**	**582.489.968**	**612.143.900**	**519.208.608**	**455.894.796**	**555.992.663**	**61,3%**	**78,3%**	**90,8%**
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan	Seluruh kendaraan operasional terbayarkan pajaknya dalam 1 tahun	Jumlah seluruh kendaraan Operasional yg terbayar pajaknya dalam 1 tahun	25.000.000	20.000.000	20.000.000	11.679.900	11.030.300	12.722.400	46,7%	55,2%	63,6%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Seluruh kendaraan operasional mendapatkan pemeliharaan dan siap dipakai dalam 1 tahun	Jumlah kendaraan operasional yang mendapatkan pemeliharaan dalam 1 tahun	279.000.000	222.714.800	214.433.700	184.611.250	160.457.150	174.460.180	66,2%	72,0%	81,4%
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang di Pelihara		11.560.000	10.000.000		4.632.500	10.000.000		40,1%	100,0%	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Seluruh alat kantor yang tidak dalam kondisi rusak berat berada	Jumlah bulan terpeliharanya seluruh alat kantor dalam 1 tahun	254.912.000	111.000.000	177.710.200	164.527.508	88.539.546	175.149.260	64,5%	79,8%	98,6%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran (*Impact*), Program (*Outcome*), Kegiatan dan Sub Kegiatan (*Output*) Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Formula/Rumus/Dasar Penghitungan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024	Anggaran Pada Tahun			Realisasi Anggaran Pada Tahun			Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
	dalam kondisi baik dan siap dipakai dalam 1 tahun (kali)										
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dilakukan pemeliharaan/ rehabilitasi	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dilakukan pemeliharaan/ rehabilitasi	263.418.664	218.775.168	200.000.000	141.138.450	185.867.800	193.660.823	53,6%	85,0%	96,8%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Frekuensi Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya dalam 1 Tahun (Kali)		12.903.000	-		12.619.000	-		97,8%		
Peningkatan Pelayanan BLUD	**Persentase Puskesmas melaksanakan kegiatan penunjang pelayanan BLUD**	**Jumlah puskesmas yang melaksanakan BLUD dibagi total puskesmas yang ada dikali 100%**	***62.947.123.694***	**74.207.170.996**	**121.417.706.764**	***54.682.275.471***	**66.513.076.019**	**99.800.464.336**	**86,9%**	**89,6%**	**82,2%**
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD dan BOK Puskesmas	Jumlah puskesmas yang melaksanakan kegiatan penunjang pelayanan BLUD dan BOK	Jumlah puskesmas yang melaksanakan kegiatan penunjang pelayanan BLUD dan BOK	*62.947.123.694*	74.207.170.996	121.417.706.764	*54.682.275.471*	66.513.076.019	99.800.464.336	86,9%	89,6%	82,2%
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	***Persentase Kecamatan STBM***	***Jumlah kecamatan yang ber STBM dibagi Total kecamatan yang ada di Kabupaten dikali 100%***	***135.287.073.446***	***161.648.720.065***	***182.592.116.380***	***97.878.425.081***	***133.800.537.569***	***171.577.321.349***	**72,3%**	**82,8%**	**94,0%**
	Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) terakreditasi	***Jumlah FKTP (puskesmas+klinik) terakreditasi dibagi jumlah seluruh puskesmas+klinik dikali 100%***									
	Indeks Keluarga Sehat	***Jumlah keluarga dengan IKS >0,800 dibagi jumlah seluruh keluarga***									
	Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL) terakreditasi	***Jumlah FKTL terakreditasi dibagi jumlah seluruh RS dikali 100%***									
	Persentase Nakestrad dan Hattra yang memiliki izin	***Jumlah Nakestrad dan Hatra yang memiliki ijin dibagi jumlah Nakestrad dan Hatra yang ada dikalikan 100 %***									

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran (*Impact*), Program (*Outcome*), Kegiatan dan Sub Kegiatan (*Output*) Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Formula/Rumus/Dasar Penghitungan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024	Anggaran Pada Tahun			Realisasi Anggaran Pada Tahun			Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
	AKI	***Jumlah Kematian Ibu pada kurun waktu tertentu dibagi lahir hidup pada tahun yang sama x 100.000 KH***									
	AKB	***Jumlah Kematian Bayi pada kurun waktu tertentu dibagi lahir hidup pada tahun yang sama x 1000KH***									
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Cakupan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota sesuai kebutuhan**	**Cakupan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota sesuai kebutuhan**	**43.449.503.875**	**50.062.082.840**	**31.751.215.595**	**31.883.507.195**	**42.695.450.352**	**25.303.236.871**	**73,4%**	**85,3%**	**79,7%**
Pembangunan puskesmas	Jumlah Puskesmas Yang Dibangun	Jumlah pembangunan Puskesmas yang dilaksanakan	5.597.782.728	8.590.000.000	17.475.651.206	4.466.468.200	6.862.793.022	11.854.387.026	79,8%	79,9%	67,8%
Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar	Jumlah kegiatan pengembangan puskesmas yang dillaksanakan	9.644.431.123	4.094.197.600	4.796.591.773	3.747.559.200	3.843.303.084	4.511.076.838	38,9%	93,9%	94,0%
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah sarana, prasarana, dan alat kesehatan yang telah dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan oleh puskesmas	Jumlah kegiatan rehab dan pemeliharaan puskesmas yang dilaksanakan	2.000.000.000	1.570.932.450	206.985.762	1.933.542.000	1.551.117.000	186.432.302	96,7%	98,7%	90,1%
Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Meubelair Puskesmas		3.829.177.325	5.321.809.402		3.462.344.150	5.087.220.846		90,4%	95,6%	
	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Alat Kedokteran Umum Puskesmas										
	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Alat Kedokteran Gigi Puskesmas										

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran (*Impact*), Program (*Outcome*), Kegiatan dan Sub Kegiatan (*Output*) Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Formula/Rumus/Dasar Penghitungan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024	Anggaran Pada Tahun			Realisasi Anggaran Pada Tahun			Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Alat Keshetan Umum Lainnya Puskesmas										
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang disediakan	Jumlah paket pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik yang dilaksanakan	8.835.869.949	13.606.532.400	2.184.450.000	7.248.957.705	11.129.237.691	2.064.306.280	82,0%	81,8%	94,5%
Pengadaan obat, bahan habis pakai, BMHP, vaksin, makanan dan minuman di fasilitas kesehatan	Persentase Pengadaan obat dengan tingkat aman	Jumlah item obat yang terpenuhi dibanding jumlah item obat yang direncanakan pemenuhannya dikali 100%	8.778.267.846	6.338.393.354	6.411.417.854	7.664.251.280	5.979.955.052	6.169.697.577	87,3%	94,3%	96,2%
	Jumlah Item Pengadaan Obat dan Vaksin										
	Jumlah obat, bahan habis pakai, bahan medis habis pakai, vaksin, makanan dan minuman di fasilitas kesehatan yang disediakan	Jumlah obat, bahan habis pakai, bahan medis habis pakai, vaksin, makanan dan minuman di fasilitas kesehatan yang disediakan	3.497.752.554	9.143.946.834		2.745.955.395	7.060.433.203		78,5%	77,2%	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah di Kunjungi dan di Intervensi Masalah Kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas										
Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas kesehatan yang terpelihara sesuai standar	Jumlah alat kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas kesehatan yang terpelihara sesuai standar	695.428.850	1.042.975.800	336.519.000	266.351.740	909.492.978	330.788.829	38,3%	87,2%	98,3%
Distribusi alat kesehatan, obat, vaksin, BMHP, makmin ke puskesmas serta faskes lainnya	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke fasilitas kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke fasilitas kesehatan	570.793.500	353.295.000	339.600.000	348.077.525	271.897.476	186.548.019	61,0%	77,0%	54,9%
	Presentase Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Sediaan Farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP)										

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran (*Impact*), Program (*Outcome*), Kegiatan dan Sub Kegiatan (*Output*) Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Formula/Rumus/Dasar Penghitungan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024	Anggaran Pada Tahun			Realisasi Anggaran Pada Tahun			Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
	Presentase Pengadminstrasian, Pemeliharaan Mutu dan Deteksi Dini Kerusakan Sediaan Farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP)										
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Cakupan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan tingkat daerah (Cakupan kunjungan rawat jalan dan rawat inap)**	***Presentase layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan tingkat daerah (Cakupan kunjungan rawat jalan dan rawat inap)***	**86.070.791.272**	***109.352.762.925***	**149.803.005.370**	**60.719.748.949**	***89.207.333.932***	**145.459.433.613**	**70,5%**	**81,6%**	**97,1%**
	Persentase Puskesmas Dengan Kelulusan Akreditasi Minimal Utama	***Jumlah Puskesmas terakreditasi minimal Utama (Utama, Paripurna) dibagi jumlah seluruh puskesmas terakreditasi dikali 100%***									
	Persentase tenaga kesehatan tradisional yang dibina	**Jumlah tenaga kesehatan tradisional/nakestrad yang dibina di bagi jumlah nakestrad yang ada di kali 100 %**									
	Persentase penyehat tradisional yang dibina	**Jumlah penyehat tradisional / hatra yang dibina di bagi jumlah hatra yang ada dikali 100 %**									
	Persentase desa yang terbentuk Asman TOGA	**Jumlah desa/kelurahan yang memiliki kelompok Asman Toga dibagi jumlah desa /keluarahan yang ada dikali 100 %**									
	Persentase puskesmas yang melaksanakan pembinaan yankestrad	**Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan yankestrad dibagi jumlah Puskesmas yang ada dikali 100 %**									
	Persentase akses sanitasi layak	**Jumlah KK dengan akses sanitasi aman, sanitasi layak sendiri, dan sanitasi layak bersama dibagi jumlah KK diwilayah dan kurun waktu yang sama dikali 100%**									

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran (*Impact*), Program (*Outcome*), Kegiatan dan Sub Kegiatan (*Output*) Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Formula/Rumus/Dasar Penghitungan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024	Anggaran Pada Tahun			Realisasi Anggaran Pada Tahun			Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
	Jumlah tingkatan tatanan dalam kabupaten sehat	**Jumlah tingkatan tatanan dalam kabupaten sehat**									
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Cakupan ibu hamil dilayani sesuai standart (K4)	Jumlah ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal (K4) sesuai dengan standar di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dibagi jumlah sasaran seluruh ibu hamil yang ada di wilayah tersebut pada kurun waktu yang sama dikali 100%.	3.770.490.958	2.475.605.890	165.620.000	1.967.494.578	1.734.395.460	161.946.900	52,2%	70,1%	97,8%
	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar									
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Cakupan ibu bersalin dilayani sesuai standart	Jumlah ibu bersalin yang telah memperoleh pelayanan persalinan sesuai standart dibagi total sasaran ibu bersalin kali 100%	2.027.943.950	157.985.000	126.739.900	724.588.850	131.431.000	68.780.800	35,7%	83,2%	54,3%
	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar									
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Cakupan Bayi Baru Lahir dilayani sesuai standart (KN2)	Jumlah Bayi Baru Lahiryang telah memperoleh pelayanan KN2 dibagi sasaran bayi kali 100%	101.432.500	56.280.000	469.983.540	29.191.800	21.250.000	291.463.000	28,8%	37,8%	62,0%
	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar									
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Cakupan Balita dilayani sesuai standart	Jumlah balita yang telah memperoleh pelayanan sesuai standart dibagi jumlah sasaran balita kali 100%	748.000.250	628.674.314	149.961.000	511.066.770	344.990.688	139.723.800	68,3%	54,9%	93,2%
	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar									

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran (*Impact*), Program (*Outcome*), Kegiatan dan Sub Kegiatan (*Output*) Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Formula/Rumus/Dasar Penghitungan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024	Anggaran Pada Tahun			Realisasi Anggaran Pada Tahun			Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai standart	Jumlah Anak Usia Pendidikan dasar yang telah memperoleh pelayanan sesuai standart dibagi sasaran anak kelas 1 sampai 9 dibagi sasaran kali 100%	548.496.920	552.527.585	162.189.000	284.958.414	351.644.278	157.543.800	52,0%	63,6%	97,1%
	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar									
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah orang usia 15--59 tahun di puskesmas yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu 1 tahun dibagi dengan junlah orang usia 15-59 tahun di wilayah kerja pkm dalam kurun waktu 1 tahun yg sama dikali 100%	61.498.000	447.030.555	162.873.400	42.292.750	229.190.750	161.472.280	68,8%	51,3%	99,1%
	Persentase Desa Yang Melaksanakan Posbindu	Jumlah posbindu yang ada di desa wilayah puskesmas yang melaksanakan posbindu dibagi dengan jumlah seluruh posbindu di wilayah puskesmas dikali 100%									
	Persentase Sekolah yang Melaksanakan KTR	Jumlah sekolah yang ada di wilayah puskesmas yang melaksanakan KTR dibagi jumlah sekolah di wilayah puskesmas dikali 100%									
	Persentase Wanita Usia Subur yang melakukan deteksi dini penyakit Kanker payudara dan kanker leher rahim pada usia 30 sd 50 tahun	Jumlah Wanita usia 30 – 50 tahun yang dideteksi dini Kanker Payudara dan kanker leher rahim dalam 3 tahun terakhir dibagi Jumlah sasaran dari penduduk Wanita usia 30 – 50 tahun di wilayah kerja puskesmas dalam kurun waktu satu tahun yang sama dikali 100%.									
	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah orang usia 15--59 tahun di puskesmas yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu 1 tahun dibagi dengan junlah									

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran (*Impact*), Program (*Outcome*), Kegiatan dan Sub Kegiatan (*Output*) Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Formula/Rumus/Dasar Penghitungan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024	Anggaran Pada Tahun			Realisasi Anggaran Pada Tahun			Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
		orang usia 15-59 tahun di wilayah kerja pkm dalam kurun waktu 1 tahun									
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Sesuai standar	Jumlah Usia Lanjut yang telah memperoleh pelayanan sesuai standar dibagi sasaran kali 100%	144.034.100	348.114.275	92.273.800	119.796.350	232.881.150	87.969.800	83,2%	66,9%	95,3%
	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar									
Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Persentase penderita hipertensi dilayani sesuai standar	Jumlah penderita hipertensi usia ≥ 15 tahun di wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dibagi jumlah estimasi penderita hipertensi berdasarkan diagnosa dokter usia ≥ 15 tahun yang berada didalam wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi Kab/Kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama dikali 100%.	29.001.000	146.683.000	138.795.000	12.352.500	127.472.623	136.600.429	42,6%	86,9%	98,4%
	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah penderita hipertensi usia ≥ 15 tahun x prevalensi penderita Hipertensi usia ≥ tahun berdasarkan diagnosa dokter di wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar									
Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita diabetes militus	Persentase penderita DM dilayani sesuai standar	Jumlah penderita Diabetes Melitus usia ≥ 15 tahun di wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dibagi jumlah estimasi berdasarkan diagnosa dokter penderita Diabetes Mellitus usia ≥ 15 tahun yang berada didalam wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi Kab/Kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama dikali 100%.	5.618.000	1.606.422.000	2.103.058.500	1.980.000	1.576.311.010	2.042.935.200	35,2%	98,1%	97,1%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran (*Impact*), Program (*Outcome*), Kegiatan dan Sub Kegiatan (*Output*) Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Formula/Rumus/Dasar Penghitungan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024	Anggaran Pada Tahun			Realisasi Anggaran Pada Tahun			Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah penderita Diabetes Mellitus usia ≥ 15 tahun x prevalensi penderita Diabetes Mellitus usia ≥ tahun berdasarkan diagnosa dokter di wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar									
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	(Jumlah ODGJ berat di wilayah kerja Kab./Kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun)(Jumlah ODGJ berat berdasarkan proyeksidi wilayah kerja Kab./Kota dalam kurun waktusatu tahun yang sama) kali 100%	192.981.000	316.096.165	291.089.700	96.089.800	205.100.105	280.521.750	49,8%	64,9%	96,4%
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar									
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Jumlah orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar di fasyankes dalam kurun waktu satu tahun dibagi Jumlah target orang terduga TBC yang ada di wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun yang sama dikali 100% (Jumlah orang terduga TBC yang ada di wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun ditentukan oleh Dinas Kesehatan Kab/Kota masing-masing)	147.115.800	404.425.174	1.429.952.000	56.830.000	305.002.473	1.407.448.500	38,6%	75,4%	98,4%
	Persentase penemuan dan penanganan kasus TB	Jumlah kasus TBC yang ditemukan, diobati secara baku dan dilaporkan dibagi jumlah kasus TBC yang ditemukan dan diobati dikali 100%.									
	Persentase keberhasilan pengobatan TB	Jumlah pasien TBC yang sembuh dan pengobatan lengkap dibagi jumlah semua									

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran (*Impact*), Program (*Outcome*), Kegiatan dan Sub Kegiatan (*Output*) Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Formula/Rumus/Dasar Penghitungan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024	Anggaran Pada Tahun			Realisasi Anggaran Pada Tahun			Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
		kasus TBC yang diobati, dicatat dan dilaporkan dikali 100%									
	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar									
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan HIV sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun	152.775.000	200.961.265	544.701.500	82.553.000	141.182.800	530.735.355	54,0%	70,3%	97,4%
	Persentase Orang dengan HIV yang mendapatkan ARV	Presentase orang dengan HIV positif dalam kurun waktu satu tahun yang mendapatkan ARV									
	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar									
Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi KLB	Cakupan Pelayanan Kesehatan bagi penduduk pada Kondisi KLB	Jumlah pelayanan yang dilakukan pada kondisi KLB	10.712.934.639	51.675.500	11.940.000	2.973.429.946	46.936.400	7.709.000	27,8%	90,8%	64,6%
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar									
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana Dan Atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana	Jumlah dokumen Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis kesehatan akibat bencana yang disusun (SK klaster kesehatan dan SK EMT)		14.213.000	13.044.000		13.058.000	11.864.000		91,9%	91,0%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Cakupan Pemberian Vit A	Jumlah usia 6-59 bulan yang mendapatkan vit A dibagi sasaran kali 100%	4.397.130.527	17.524.215.357	2.502.031.800	2.216.875.630	9.935.630.622	2.399.309.129	50,4%	56,7%	95,9%
	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	Jumlah balita sangat pendek ditambah pendek dibagi jumlah balita diukur kali 100%									

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran (*Impact*), Program (*Outcome*), Kegiatan dan Sub Kegiatan (*Output*) Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Formula/Rumus/Dasar Penghitungan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024	Anggaran Pada Tahun			Realisasi Anggaran Pada Tahun			Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
	Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita	Jumlah Balita Gizi buruk ditambah gizi kurang dibagi jumlah balita diukur kali 100%									
	Prevalensi anemia pada ibu hamil	Jumlah ibu hamil anemia dibagi sasaran bumil kali 100%									
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat									
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Pos UKK yang terbentuk	Jumlah tempat kerja informal yang telah dibentuk Pos UKK	164.315.900	568.070.058	64.999.800	150.494.000	430.363.498	64.624.800	91,6%	75,8%	99,4%
	Persentase jumlah jamaah haji yang diukur kebugaran jasmaninya	Jumlah jamaah haji yang diukur kebugarannya dibagi dengan jumlah jaamah haji yang terdaftar									
	Persentase Tempat Kerja Yang Melaksanakan Kesehatan Kerja	Jumlah perkantoran yang melaksanakan kesehatan kerja dibagi dengan jumlah perkantoran yang ada									
	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan upaya kesehatan olahraga	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan upaya kesehatan olahraga baik internal maupun eksternal									
	Jumlah Puskesmas Yang Melaksanakan Kesehatan Kerja	Jumlah puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja baik secara internal maupun eksternal									
	Persentase Kelompok Masyarakat Yang Melaksanakan Aktifitas Fisik	JUmlah kelompok olahraga masyarakat yang melaksanakan aktifitas fisik dibagi dengan jumlah kelompok olahraga masyarakat yang ada									
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	jumlah dokumen yang tersususn dalam satu tahun									
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase Tempat Pengelolaan pangan yang memenuhi syarat sesuai standar	Jumlah tempat pengelolaan pangan /TPP memenuhi syarat kesehatan dibagi jumlah	4.367.007.825	891.989.900	1.369.505.000	3.328.459.177	687.677.508	1.361.682.179	76,2%	77,1%	99,4%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran (*Impact*), Program (*Outcome*), Kegiatan dan Sub Kegiatan (*Output*) Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Formula/Rumus/Dasar Penghitungan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024	Anggaran Pada Tahun			Realisasi Anggaran Pada Tahun			Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
		TPP diwilayah dan kurun waktu yang sama kali 100%									
	Persentase desa ODF	Jumlah desa/kelurahan stop BABS dibagi Jumlah desa/kelurahan diwilayah dan kurun waktu yang sama dikali 100%									
	Persentase sarana air minum yang diawasi / diperiksa kualitas airnya	jumlah sarana air minum yang diawasi/diperiksa kualitas air minumnya yang memenuhi standart dibagi jumlah sarana air minum yang ada diwilayah dan waktu yang sama dikali 100%									
	Jumlah Fasyankes yang memiliki pengelolaan limbah medis	Jumlah fasyankes yang memiliki pengelolaan limbah medis yang memenuhi standart									
	Persentase Tempat-tempat umum yang dilakukan pengawasan sesuai standar	Jumlah total TFU yang dilakukan pengawasan sesuai standart (IKL) dibagi jumlah TFU diwialayah dan kurun waktu yang sama dikali 100%									
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	jumlah dokumen yang tersususn dalam satu tahun									
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah puskesmas yang melakukan pengelolaan pelayanan promosi kesehatan	Jumlah puskesmas yang melakukan pengelolaan pelayanan promosi kesehatan		1.852.247.700	300.879.560		1.168.877.064	241.749.950		63,1%	80,3%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah tenaga kesehatan tradisional yang dibina	Jumlah tenaga kesehatan tradisional/nakestrad yang dibina di wilayah Puskesmas pada tahun 2024	70.397.000	101.852.000	103.282.700	70.397.000	101.014.523	102.729.979	100,0%	99,2%	99,5%
	Jumlah penyehat tradisional yang dibina	Jumlah penyehat tradisional / hatra yang dibina di wilayah Puskesmas pada tahun 2024									
	Jumlah desa yang terbentuk Asman TOGA	Jumlah desa/kelurahan yang memiliki kelompok Asman Toga pada tahun 2024									

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran (*Impact*), Program (*Outcome*), Kegiatan dan Sub Kegiatan (*Output*) Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Formula/Rumus/Dasar Penghitungan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024	Anggaran Pada Tahun			Realisasi Anggaran Pada Tahun			Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
	Jumlah puskesmas yang melaksanakan pembinaan yankestrad	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan yankestrad pada tahun 2024									
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya									
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Presentase KLB yang ditanggulangi ≤ 24 jam	Jumlah KLB dibagi jumlah KLB yang ditanggulangi ≤ 24 jam dikali 100% pada tahun 2023	3.215.240.350	580.928.140	180.504.250	2.051.329.356	170.014.686	172.373.999	63,8%	29,3%	95,5%
	Penemuan kasus Non AFP	Jumlah kasus NOn AFP yang ditemukan dalam 1 tahun yang sama									
	Penemuan kasus suspect campak	Jumlah kasus suspect campak yang ditemukan dalam 1 tahun yang sama									
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan									
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang Dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan			83.625.000			54.154.900			64,8%	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Persentase ODGJ ditangani sesuai standar	(Jumlah ODGJ berat di wilayah kerja Kab./Kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun)dibagi(Jumlah ODGJ berat berdasarkan proyeksidi wilayah kerja Kab./Kota dalam kurun waktusatu tahun yang sama) kali 100%	195.205.500	73.242.245	42.408.000	193.943.300	25.205.100	27.358.000	99,4%	34,4%	64,5%
Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus			3.780.000			3.780.000			100,0%	

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran (*Impact*), Program (*Outcome*), Kegiatan dan Sub Kegiatan (*Output*) Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Formula/Rumus/Dasar Penghitungan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024	Anggaran Pada Tahun			Realisasi Anggaran Pada Tahun			Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	6.053.075.048	2.848.806.928	4.055.028.200	3.791.879.845	1.613.575.220	3.709.616.426	62,6%	56,6%	91,5%
	Persentase penderita HT ditangani sesuai standar	Jumlah penderita hipertensi usia ≥ 15 tahun di wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dibagi jumlah estimasi penderita hipertensi usia ≥ 15 tahun yang berada didalam wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi Kab/Kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama dikali 100%.									
	Persentase Penderita DM ditangani Sesuai standar	Jumlah penderita Diabetes Melitus usia ≥ 15 tahun di wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dibagi jumlah estimasi penderita Diabetes Mellitus usia ≥ 15 tahun yang berada didalam wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi Kab/Kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama dikali 100%.									
	Persentase WNI usia 15 - 59 tahun mendapatkan screening sesuai standar	Jumlah orang usia 15--59 tahun di puskesmas yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu 1 tahun dibagi dengan junlah orang usia 15-59 tahun di wilayah kerja pkm dalam kurun waktu 1 tahun yg sama dikali 100%									
		Presentase Desa yang Melaksanakan Posbindu									
		Presentase Sekolah yang Melaksanakan KTR									
	Persentase Penemuan Kusta Pada Anak	jumlah kasus anak yang ditemukan dibagi jumlah seluruh kasus kusta dikalikan 100%									

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran (*Impact*), Program (*Outcome*), Kegiatan dan Sub Kegiatan (*Output*) Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Formula/Rumus/Dasar Penghitungan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024	Anggaran Pada Tahun			Realisasi Anggaran Pada Tahun			Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
	Persentase Cacat Pada Kasus Kusta Baru	jumlah kasus kusta dengan cacat II yang ditemukan dibagi jumlah seluruh kasus kusta dikalikan 100%									
	Persentase Penderita Kusta RFT-MB	jumlah kasus MB padas 2 tahun sbelumnya yang menyelesaikan pengobatan dibagi jumlah kasus MB pada kohort tahun yang sama dikalikan 100%									
	Persentase Penderita Kusta RDT-PB	jumlah kasus PB pada 1 tahun sbelumnya yang menyelesaikan pengobatan dibagi jumlah kasus MB pada kohort tahun yang sama dikalikan 100%									
	Persentase Cakupan Tatalaksana Pneumonia Balita	Jumlah penderita Pnemonia balita yang ditangani dibagi target perkiraan balita dikali 100%. Target balita = 4,45 % x jml balita									
	Persentase Puskesmas yang melaksanakan tatalaksana Diare sesuai standar	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan tatalaksana diare sesui standart dibagi jumlah puskesmas dikalikan 100%									
	Persentase Puskesmas yang melaksanakan advokasi dan / sosialisasi Pengendalian PISP	Jumlah puskesmas yang melaksanakan advokasi / sosialisasi pengendalian PISP dibagi julah puskesmas dikalikan 100%									
	Persentase Puskesmas yang mempunyai Layanan Rehidrasi Oral Aktif (LROA)	Layanan kegiatan LROA secara terus menerus dalam 3 bulan dengan periode pelaporan per tribulan. Dalam 1 tribulan, laporan bulanan harus ada dan lengkap` Kalau dalam 1 tribulan hanya ada laporan 1 bulan, maka dianggap tidak ada LROA. Kalau dalam 1 tahun hanya lapor tribulan 4 saja, dianggap kinerja mencapai 25%. (Yang dihitung adalah jumlah layanan)									
	Persentase Kasus Diare pada semua umur ditangani sesuai standar	Jumlah penderita semua umur diare yang datang dan dilayani di sarana kesehatan dibagi target dikali 100%. Target = (10% x									

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran (*Impact*), Program (*Outcome*), Kegiatan dan Sub Kegiatan (*Output*) Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Formula/Rumus/Dasar Penghitungan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024	Anggaran Pada Tahun			Realisasi Anggaran Pada Tahun			Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
		270/1000) x jumlah penduduk di wilayah kerja puskesmas pada kurun waktu tertentu									
	Persentase Kasus Diare pada Balita ditangani sesuai standar	Jumlah penderita balita diare yang datang dan dilayani di sarana kesehatan dibagi target dikali 100%. Target = (20% x 843/1000) x jumlah balita (sesuai data pusdatin) di wilayah kerja puskesmas pada kurun waktu tertentu Balita adalah anak usia 0-59 bulan.									
	Persentase Bumil dilakukan (DDHB) Deteksi Dini Hepatitis B	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pemeriksaan HBsAg dibagi jumlah proyeksi jumlah ibu hamil dikali 100%									
	Persentase bayi lahir dari Ibu reaktif HBsAg mendapat HBIg < 24 jam	Jumlah bayi lahir dari ibu reaktif HBsAg mendapat HBIg < 24 jam dibagi jumlah bayi lahir dari ibu reaktif HBsAg dikali 100%									
	Persentase bayi usia 9-12 bulan yang mendapat HBIg di test HBsAg hasilnya Non Reaktif	Jumlah bayi usia 9-12 bulan yang mendapat HBIg di test HBsAg hasilnya Non Reaktif dibagi jumlah bayi usia 9-12 bulan yang mendapat HBIg di test HBsAg dikali 100%									
	Persentase kasus DBD ditangani sesuai standar	Jumlah kasus DBD yang ditangani sesuai standar Tatalaksana Pengobatan DBD dibagi dengan jumlah seluruh DBD yang terlaporkan di wilayah Puskesmas dikali 100%									
	Persentase Angka Bebas Jentik (ABJ)	Jumlah rumah bebas jentik dibagi jumlah rumah yang diperiksa jentiknya dikali 100 %									
	Persentase anak usia 1-12 Tahun mendapatkan obat Cacing	Jumlah capaian anak usia 1-12 tahun mendapat obat cacing dibagi jumlah									

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran (*Impact*), Program (*Outcome*), Kegiatan dan Sub Kegiatan (*Output*) Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Formula/Rumus/Dasar Penghitungan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024	Anggaran Pada Tahun			Realisasi Anggaran Pada Tahun			Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
		sasran anak usia 1-12 tahun mendapat obat cacing dikali 100%									
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Persentase penduduk dalam data base yang memiliki jaminan kesehatan	Jumlah penduduk terdaftar JKN dibagi jumlah seluruh penduduk dibagi 100%	31.445.307.625	68.728.953.079	134.327.391.800	30.084.257.676	64.553.122.359	131.028.459.377	95,7%	93,9%	97,5%
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat									
Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah Masyarakat/Tokoh Masyarakat yang Mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan NAPZA		33.584.825	-	-	24.370.000	-		72,6%		
	Jumlah Pengadaan Urine Test										
Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Persentase pengambilan dan pengiriman spesimen ≤ 24 jam ke laboratorium pemeriksa	Jumlah spesimen yang diambil dibagi jumlah spesimen yang dikirim ke laboratorium pemeriksa pada tahun 2023 dikali 100%	13.487.760	41.153.565	104.274.500	12.355.000	19.894.140	75.694.436	91,6%	48,3%	72,6%
	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan									
Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Kecamatan sehat	Jumlah kecamatan yang melaksanakan Kecamatan sehat dibagi jumlah kecamatan pada kurun waktu yang sama	263.959.875	77.951.000	50.000.000	228.862.000	70.841.900	49.635.000	86,7%	90,9%	99,3%
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	jumlah dokumen 9 tatanan yang tersusun dalam satu tahun									
Pengelolaan Penelitian Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Penelitian Kesehatan			8.955.000			110.446.560			######	
Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan		6.850.040.625	6.122.525.414		3.119.420.440	2.808.170.171		45,5%	45,9%	

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran (*Impact*), Program (*Outcome*), Kegiatan dan Sub Kegiatan (*Output*) Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Formula/Rumus/Dasar Penghitungan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024	Anggaran Pada Tahun			Realisasi Anggaran Pada Tahun			Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
	Preventif, promotif, Layanan Persalinan										
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	8.877.485.770	3.294.999	16.524.000	7.536.326.267	-	9.373.000	84,9%		56,7%
Pelaksanan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas dengan Kelulusan Akreditasi Minimal Utama		1.009.688.025	990.798.443		858.755.115	828.968.579		85,1%	83,7%	
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah desa yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap anak usia 0-11 bulan	Jumlah Desa UCI dibagi jumlah Desa di wilayah Puskesmas dikali 100 %	402.333.050	192.432.010	106.170.000	127.484.385	136.647.650	99.519.800	31,7%	71,0%	93,7%
	Persentase Bayi usia 0-11 bulan yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap	Jumlah bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap yang terdiri dari: satu dosis Imunisasi Hepatitis B, satu dosis imunisasi BCG, empat dosis imunisasi Polio oral, satu dosis imunisasi IPV, tiga dosis imunisasi DPT-HB-Hib, dan satu dosis imunisasi Campak Rubella dalam kurun waktu satu tahun dibagi 95% jumlah bayi yang diperkirakan hidup usia 0-11 bulan (Surviving Infant) selama kurun waktu yang sama, dikali 100.									
	Persentase anak usia 18-24 bulan yang mendapat imunisasi lanjutan Campak dan Rubella	Jumlah anak usia 12-24 bulan yang mendapat imunisasi lanjutan baduta (bayi usia di bawah 2 tahun) meliputi 1 dosis imunisasi DPT HB-HiB serta 1 dosis imunisasi Campak Rubela di satu wilayah dalam kurun waktu 1 tahun, dibagi 90% jumlah anak usia 18-24 bulan (Surviving Infant tahun lalu) dalam kurun waktu yang sama, dikali 100									
	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian									

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran (*Impact*), Program (*Outcome*), Kegiatan dan Sub Kegiatan (*Output*) Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Formula/Rumus/Dasar Penghitungan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024	Anggaran Pada Tahun			Realisasi Anggaran Pada Tahun			Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
	(Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)									
Pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon wabah	Presentase pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon wabah	Jumlah kelengkapan dan ketepatan laporan, serta verifikasi alert yang muncul setiap minggu selama tahun 2024 berupa Buletin SKDR setiap minggu	70.209.450	107.486.999	74.202.000	21.915.000	104.706.500	68.052.000	31,2%	97,4%	91,7%
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah									
Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah PSC yang ada dan beroperasional		260.160.000	381.260.000		254.447.615	351.160.728		97,8%	92,1%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Capaian Indeks Keluarga Sehat (IKS)			168.476.000			153.741.000			91,3%	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tubeculosis				32.369.893			7.099.400			21,9%	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV (ODHIV)	Persentase Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pelayanan Deteksi Dini HIV Sesuai Standar			407.197.872			377.195.000			92,6%	
	Persentase Orang Dengan HIV yang Mendapatkan ARV										
Pengelolaan Pelayanan Malaria	Jumlah dokumen pengelolaan pelayanan malaria	Jumlah dokumen pengelolaan pelayanan malaria		275.557.600	2.412.800		130.913.200	2.269.996		47,5%	94,1%
Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Jumlah dokumen pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			259.909.620		-	209.110.200			80,5%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran (*Impact*), Program (*Outcome*), Kegiatan dan Sub Kegiatan (*Output*) Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Formula/Rumus/Dasar Penghitungan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024	Anggaran Pada Tahun			Realisasi Anggaran Pada Tahun			Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	**Tingkat ketersediaan sistem informasi kesehatan**	**Jumlah Puskesmas yang melaksanakan sistem informasi kesehatan**	**121.777.500**	**240.834.000**	**370.626.615**	**113.817.300**	**231.726.062**	**329.078.544**	**93,5%**	**96,2%**	**88,8%**
Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Informasi yang disusun		50.787.500	218.834.000		50.637.300	209.726.062		99,7%	95,8%	
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah LAN yang terpelihara dan puskesmas yang menggunakan simpus dan e-SPM	Jumlah LAN yang terpelihara dan puskesmas yang menggunakan simpus dan e-SPM	70.990.000	22.000.000	370.626.615	63.180.000	22.000.000	329.078.544	89,0%	100,0%	88,8%
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan									
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diterbitkan**	**Jumlah Rumah Sakit dan Faskes Lainnya yang mempunyai izin Operasional**	**5.645.000.799**	**1.993.040.300**	**667.268.800**	**5.161.351.637**	**1.666.027.223**	**485.572.321**	**91,4%**	**83,6%**	**72,8%**
	Persentase Puskesmas dengan Tingkat Kinerja Baik (≥ 89%)	**Jumlah Puskesmas dengan Tingkat Kinerja Baik (≥ 89%) dibagi jumlah seluruh puskesmas dikali 100%**									
	Jumlah keluarga yang mendapat intervensi sesuai hasil survey KS	**Jumlah keluarga hasil survei KS yang diintervensi dibagi jumlah seluruh keluarga hasil KS dikali 100%**									
	Persentase Klinik Pratama yg terakreditasi	**Jumlah klinik pratama yang sudah terakreditasi dibagi jumlah seluruh klinik pratama dikali 100%**									
	Persentase RS yang terakreditasi paripurna	**Jumlah RS yang terakreditasi paripurna dibagi dengan jumlah seluruh RS dikali 100%**									
	Persentase Klinik Utama yang terakreditasi	**Jumlah Klinik Utama yang terakreditasi dibagi dengan jumlah seluruh Klinik Utama yang ada dikali 100%**									

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran (*Impact*), Program (*Outcome*), Kegiatan dan Sub Kegiatan (*Output*) Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Formula/Rumus/Dasar Penghitungan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024	Anggaran Pada Tahun			Realisasi Anggaran Pada Tahun			Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
	Persentase lab Madya yang terakreditasi	**Jumlah Laboratorium medis yang terakreditasi dibagi dengan jumlah seluruh Laboratorium Medis dikali 100%**									
Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Persentase Puskesmas dengan Tingkat Kinerja Baik (≥ 89%)	Jumlah Puskesmas dengan Tingkat Kinerja Baik (≥ 89%) dibagi jumlah seluruh puskesmas dikali 100%	661.244.089	1.926.677.300	607.399.800	573.014.025	1.613.846.843	433.474.631	86,7%	83,8%	71,4%
	Jumlah keluarga yang mendapat intervensi sesuai hasil survey KS	Jumlah keluarga hasil survei KS yang diintervensi dibagi jumlah seluruh keluarga hasil KS dikali 100%									
	Persentase Klinik Pratama yg terakreditasi	Jumlah klinik pratama yang sudah terakreditasi dibagi jumlah seluruh klinik pratama dikali 100%									
Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah RS yang terakreditasi paripurna	Jumlah rumah sakit yang sudah terakreditasi paripurna dibanding dengan jumlah seluruh rumah sakit yang ada	4.983.756.710	66.363.000	59.869.000	4.588.337.612	52.180.380	52.097.690	92,1%	78,6%	87,0%
	Jumlah Klinik Utama yang Terakreditasi		-			-					
	Jumlah Lab Madya yang Teradkreditasi		-			-					
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	***Persentase kecukupan rasio dan kompetensi tenaga kesehatan***	***Jumlah tenaga kesehatan eksisting dan pemenuhan kompetensi nakes dibagi jumlah kebutuhan tenaga kesehatan dan kebutuhan pemenuhan kompetensi nakes***	***4.600.318.975***	***1.613.413.600***	***2.194.316.400***	***3.747.088.899***	***1.503.176.446***	***2.000.874.864***	**81,5%**	**93,2%**	**91,2%**
Pemberian izin praktek tenaga kesehatan di kabupaten / kota	**Jumlah ijin praktik yang diterbitkan setelah memenuhi persyaratan**	**Jumlah SIP/SIK tenaga kesehatan yang diterbitkan dibagi jumlah SIP/SIK yang diajukan**	**19.962.900**	**9.500.000**	**7.274.800**	**8.296.000**	**9.368.000**	**5.320.000**	**41,6%**	**98,6%**	**73,1%**
Pengendalian perizinan praktik tenaga kesehatan	Jumlah Nakes yang memiliki SIP/SIK yang berlaku pada faskes dibandingkan jumlah nakes yang terdaftar di sistem SISDMK di Faskes pemerintahan	Jumlah nakes di Kab. Kediri yang mengurus SIP/SIK (SIP/SIK nya sudah terbit) dibanding jumlah nakes yang terdaftar di sistem SISDMK Kab. Kediri	10.000.000	7.500.000		5.000.000	7.500.000		50,0%	100,0%	

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran (*Impact*), Program (*Outcome*), Kegiatan dan Sub Kegiatan (*Output*) Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Formula/Rumus/Dasar Penghitungan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024	Anggaran Pada Tahun			Realisasi Anggaran Pada Tahun			Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Terlaksananya kegiatan pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan melalui faskes dan organisasi profesi	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan melalui faskes dan organisasi profesi dibagi jumlah faskes dan organisasi profesi di kab. kediri	9.962.900	2.000.000	7.274.800	3.296.000	1.868.000	5.320.000	33,1%	93,4%	73,1%
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	**Tersedianya perencanaan SDM Kesehatan di Fasiliatas Kesehatan Pemerintah**	**Jumlah laporan perencanaan SDM Kesehatan di Faskes Pemerintah yang dilaporkan dibagi jumlah laporan perencanaan SDM Kesehatan yang seharusnya dilaporkan dikali 100 persen**	**4.571.356.075**	**124.806.000**	**201.740.100**	**3.738.792.899**	**89.006.000**	**159.758.180**	**81,8%**	**71,3%**	79,2%
Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Tersedianya dokumen penyusunan perencanaan kebutuhan SDMK di Faskes Pemerintahan	Jumlah dokumen penyusunan perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan di Faskes Pemerintah lingkup Kab. Kediri dibagi jumlah faskes pemerintahan yang ada di lingkup Kab. Kediri	9.976.050	5.260.000	9.799.600	6.248.000	5.260.000	5.004.000	**62,6%**	**######**	51,1%
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Terpenuhinya 9 Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai Standar di Puskesmas		4.551.476.125			3.728.096.899			**81,9%**		
Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Terlaksananya kegiatan pembinaan dan pengawasan SDMK di Faskes Pemerintahan	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan SDM kesehatan di faskes pemerintah dibagi jumlah faskes pemerintah di kab. kediri dikali 100 persen	9.903.900	119.546.000	191.940.500	4.448.000	83.746.000	154.754.180	**44,9%**	**70,1%**	80,6%
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase ASN Yang Dikembangkan Kompetensinya**	**Jumlah ASN yang mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi dibagi jumlah ASN di lingkup Dinas Kesehatan dikali 100 persen**	**9.000.000**	**1.479.107.600**	**1.985.301.500**	**-**	**1.404.802.446**	**1.835.796.684**	**0,0%**	**95,0%**	**92,5%**
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta yang mengikuti pengembangan kompetensi setiap tahun	Jumlah peserta pelatihan yang mengikuti pengembangan kompetensi dibagi jumlah peserta yang membutuhkan pengembangan kompetensi	9.000.000	1.479.107.600	1.985.100.500	-	1.404.802.446	2.166.196.950	**0,0%**	**95,0%**	109,1%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran (*Impact*), Program (*Outcome*), Kegiatan dan Sub Kegiatan (*Output*) Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Formula/Rumus/Dasar Penghitungan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024	Anggaran Pada Tahun			Realisasi Anggaran Pada Tahun			Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	**Persentase Pemberian Rekomendasi Apotek, Toko Obat, Toko Alkes dan UMOT**	**Jumlah surat rekomendasi yang dikeluarkan dibanding jumlah permohonan rekomendasi yang masuk dikali 100%**	**485.884.500**	**815.256.940**	***656.119.000***	**247.451.322**	**566.293.054**	***523.897.821***	**50,9%**	**69,5%**	**79,8%**
	Persentase Produk Makanan Minuman Tertentu Yang Bersertifikat	**Jumlah produk makanan minuman tertentu yang bersertifikat P-IRT dibanding jumlah yang mengajukan izin P-IRT dikali 100%**									
Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optical, UMOT	**Jumlah rekomendasi Apotek, TO, Tk Alkes dan Optikal UMOT yang diterbitkan**	**Jumlah rekomendasi apotek, TO, TK. Alkes dan optikal, UMOT yang diterbitkan**	**36.422.500**	**142.233.660**	**65.930.000**	**1.840.000**	**56.201.600**	**55.755.000**	**5,1%**	**39,5%**	**84,6%**
	Persentase Apotek,Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optik, UMOT yang dibina dan diawasi	**Jumlah apotek, TO, Tk. Alkes dan optikal, UMOT yang dibina dan diawasi dibanding jumlah apotek, TO, Tk. Alkes dan optikal, UMOT yang memiliki surat izin**									
Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah rekomendasi Apotek, TO, toko alkes, dan optikal , UMOT yang memenuhi persyaratan	Jumlah rekomendasi Apotek, TO, toko alkes, dan optikal , UMOT yang memenuhi persyaratan	36.422.500	142.233.660	65.930.000	1.840.000	56.201.600	55.755.000	**5,1%**	**39,5%**	84,6%
	Jumlah apotek, TO, toko alkes, dan optikal , UMOT yang dibina dan diawasi	Jumlah apotek, TO, toko alkes, dan optikal , UMOT yang dibina dan diawasi									
Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	**Jumlah sertifikat P-IRT yang diterbitkan**	**Jumlah P-IRT yang telah memenuhi syarat sertifikasi P-IRT**	**164.590.000**	**337.360.200**	**241.600.000**	**101.719.450**	**263.306.998**	**191.463.304**	**61,8%**	**78,0%**	**79,2%**
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan	Jumlah produsen industri rumah tangga yang mengikuti penyuluhan keamanan pangan dan telah	Jumlah produsen industri rumah tangga yang mengikuti penyuluhan keamanan	164.590.000	337.360.200	241.600.000	101.719.450	263.306.998	191.463.304	**61,8%**	**78,0%**	79,2%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran (*Impact*), Program (*Outcome*), Kegiatan dan Sub Kegiatan (*Output*) Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Formula/Rumus/Dasar Penghitungan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024	Anggaran Pada Tahun			Realisasi Anggaran Pada Tahun			Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	dilakukan pemeriksaan terhadap sarana produksinya	pangan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap sarana produksinya									
Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi tempat pengelolaan makanan (TPM) antara lain : Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran, dan Depot Air Minum	**Persentase TPM yang ber SLHS**	**Jumlah TPM yang brSLHS dibagi jumlah total TPM diklai 100%**	**-**	**56.106.000**	**85.000.000**	**-**	**50.256.000**	**69.884.000**		**89,6%**	**82,2%**
Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan penerbitan sertifikat laik higiene sanitasi tempat pengelolaan makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Sertifikat Laik Higiene Sanitasi tempat pengelolaan makanan (TPM) antara lain : Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran, dan Depot Air Minum yang diterbitkan	Jumlah Sertifikat Laik Higiene Sanitasi tempat pengelolaan makanan (TPM) antara lain : Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran, dan Depot Air Minum yang diterbitkan		56.106.000	85.000.000		50.256.000	77.724.000		**89,6%**	91,4%
Penerbitan Stiker Pembinaan Pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	**Persentase Stikerisasi Pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan**			**5.244.000**			**4.944.000**			**94,3%**	
Pengendalian dan Pengawasan serta TindakLanjut penerbitan Stiker pembinaan pada makanan Jajanan dan Sentra makanan jajanan	Jumlah stikerisasi pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan	Jumlah stikerisasi pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan	-	5.244.000	55.000.000	-	4.944.000	37.178.750		**94,3%**	67,6%
Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	**Persentase pemeriksaan produksi makanan minuman industri rumah tangga**	**Jumlah pemeriksaan produksi makanan minuman industri rumah tangga yang dibina dan diawasi dibanding jumlah pemeriksaan produksi makanan minuman indistri rumah tangga yang bersertifikasi**	**284.872.000**	**274.313.080**	**208.589.000**	**143.891.872**	**191.584.456**	**169.616.767**	**50,5%**	**69,8%**	**81,3%**

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran (*Impact*), Program (*Outcome*), Kegiatan dan Sub Kegiatan (*Output*) Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Formula/Rumus/Dasar Penghitungan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024	Anggaran Pada Tahun			Realisasi Anggaran Pada Tahun			Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar danPengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Persentase produsen industri rumah tangga yang dibina dan diawasi	Persentase produsen industri rumah tangga yang dibina dan diawasi dibanding produsen industri rumah tangga yang ditargetkan di tahun N	284.872.000	274.313.080	208.589.000	143.891.872	191.584.456	169.616.767	50,5%	69,8%	81,3%
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	***Persentase UKBM Purnama Mandiri (Posyandu balita, poskestren, poskesdes, SBH, desa siaga)***	***jumlah UKBM Purnama+Mandiri /jumlah UKBM x100***	***4.485.195.236***	***3.138.641.593***	***1.245.123.100***	***3.762.784.189***	***2.176.171.756***	***1.045.584.029***	**83,9%**	**69,3%**	84,0%
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Frekuensi kegiatan tim pokjanal tk. Kabupaten, kecamatan dan desa dalam satu tahun**	**Jumlah frekuensi Pertemuan tim pokjanal posyandu TK kabupaten dalam 1 tahun**	**1.465.331.400**	**423.830.100**	**1.142.117.200**	**1.291.077.850**	**399.897.100**	**958.306.029**	**88,1%**	**94,4%**	83,9%
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah lintas sektor/ organisasi masyarakat/ organisasi profesi/ dunia usaha yang bermitra dengan UKBM	Jumlah organisasi yang melakukan mitra tentang UKBM dibagi jumlah organisasi	1.465.331.400	423.830.100	1.142.117.200	1.291.077.850	399.897.100	958.306.029	88,1%	94,4%	83,9%
Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah media KIE yang digunakan dalam satu tahun**	**Jumlah tema KIE yang ditayangkan dalam media**	**2.573.417.275**	**390.655.300**	**65.000.000**	**2.135.408.189**	**340.394.406**	**57.254.000**	**83,0%**	**87,1%**	88,1%
Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat	Jumlah tema KIE program prioritas yang dipromosikan melalui media	Jumlah Tema KIE yang di promosikan oleh media dalam satu tahun	2.573.417.275	390.655.300	65.000.000	2.135.408.189	340.394.406	57.254.000	83,0%	87,1%	88,1%
	Persentase Rumah Tangga Sehat (10 Indikator)										
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya	**Tingkat partisipasi kesehatan masyarakat skala desa**	**Jumlah kader yang ikut dalam partisipasi kesehatan masyarakat**	**446.446.561**	**2.324.156.193**	**38.005.900**	**336.298.150**	**1.435.880.250**	**30.024.000**	**75,3%**	**61,8%**	**79,0%**
	Cakupan promosi kesehatan tingkat desa	**Jumlah penyuluhan yang dilakukan oleh kader desa dalam satu tahun**									

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran (*Impact*), Program (*Outcome*), Kegiatan dan Sub Kegiatan (*Output*) Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Formula/Rumus/Dasar Penghitungan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024	Anggaran Pada Tahun			Realisasi Anggaran Pada Tahun			Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Cakupan kelompok kesehatan masyarakat yang dibina**	**Jumlah kelompok kesehatan masyarakat yang dibina selama 1 tahun**									
	Persentase Posyandu Purnama Mandiri (PURI)	**Jumlah posyandu PURI dibagi jumlah seluruh posyandu yang ada dikalikan 100**									
	Persentase poskesdes purnama mandiri (PURI)	**Jumlah poskesdes PURI dibagi jumlah seluruh poskesdes yang ada dikalikan 100**									
	Persentase poskestren purnama mandiri (PURI)	**Jumlah poskestren PURI dibagi jumlah seluruh poskestren yang ada dikalikan 100**									
	Persentase saka Bhakti Husada (SBH) purnama Mandiri (PURI)	**Jumlah posyandu SBH dibagi jumlah seluruh SBHyang ada dikalikan 100**									
	Persentase desa-kelurahan siaga aktif	**Jumlah desa yang melaksanakan desa siaga aktif dibagi jumlah seluruh desa yang ada dikalikan 100**									
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya	Frekuensi bimbingan teknis dan supervisi UKBM yang dilakukan selama satu tahun	Jumlah frekuensi bimbingan teknis UKBM di wilayah Kabupaten yang dilaksanakan	446.446.561	2.324.156.193	38.005.900	336.298.150	1.435.880.250	30.024.000	**75,3%**	61,8%	79,0%
TOTAL			**299.291.362.596**	**327.947.380.389**	**452.122.815.837**	**249.689.347.736**	**287.262.159.590**	**415.701.034.115**	**83,4%**	**87,6%**	**91,9%**

2.4 KELOMPOK SASARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka melaksanakan fungsi pelayanan publik serta mendukung pembangunan bidang kesehatan, Dinas Kesehatan menetapkan kelompok sasaran pelayanan yang menjadi prioritas dalam setiap program dan kegiatan. Kelompok sasaran ini merupakan pihak-pihak yang secara langsung maupun tidak langsung menerima manfaat dari intervensi kebijakan dan layanan pemerintah daerah di bidang kesehatan.

Kelompok sasaran pelayanan Dinas Kesehatan terdiri dari :

a. Individu :

   Setiap orang yang membutuhkan pelayanan kesehatan baik itu pemeriksaan , pengobatan maupun rehabilitasi

b. Keluarga

   Unit terkecil dalam masyarakat yang memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan anggotanya

c. Kelompok

   Kumpulan individu dengan karakteristik tertentu yang memiliki masalah kesehatan serupa, misalnya kelompok lansia, ibu hamil, atau penderita penyakit tertentu

d. Masyarakat

   Keseluruhan populasi di suatu wilayah yang membutuhkan pelayanan kesehatan dari Dinas Kesehatan.

Selain itu Dinas Kesehatan juga memberikan perhatian kepada pelaku usaha pangan industri rumah tangga. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Dalam Rangka Penyelenggaraan Perizinan berusaha Berbasis Risiko diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan memberikan kemudahan berusaha terutama pada proses perijinan bagi pelaku usaha termasuk Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP).

Upaya pengendalian dan pengawasan pangan terus dilakukan baik pada pre market atau sebelum produk beredar di masyarakat maupun pada post market atau setelah produk beredar di masyarakat. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menjamin bahwa pangan yang diproduksi memenuhi persyaratan keamanan pangan, sehingga dapat meminimalkan resiko terjadinya ketidaksesuaian yang dapat

membahayakan keselamatan dan kesehatan. Sehubungan dengan hal tersebut maka setiap IRTP yang mengajukan sertifikasi harus melakukan pemenuhan komitmen, dimana pemenuhan komitmen meliputi: mengikuti penyuluhan keamanan pangan dan dilakukan pemeriksaan pada sarana produksi pangan. Penyuluhan keamanan pangan dapat memberikan tambahan informasi dan pengetahuan produsen tentang standar yang harus diperhatikan untuk memproduksi pangan yang aman dan bermutu. Sedangkan pemeriksaan lokasi produksi diperlukan untuk menilai kesesuaian sarana produksi dengan standar yang ada.

Di wilayah Kabupaten Kediri fasilitasi dalam rangka pengawasan pre market diberikan secara gratis. Sasaran pada kegiatan fasilitasi pemenuhan komitmen ini baik pada penyuluhan keamanan pangan maupun pemeriksaan adalah produsen pangan yang telah mengajukan permohonan pada aplikasi OSS.RBA.

Sedangkan untuk pengawasan post market dilakukan kegiatan pengawasan pada produk pangan, sarana produksi dan distribusi pangan olahan IRTP, juga pembinaan pada masyarakat/kelompok masyarakat. Pengawasan pada produk pangan dilakukan dengan melakukan sampling dan uji laboratorium pada produk pangan olahan yang beredar di wilayah Kabupaten Kediri. Selain itu juga dilakukan pengawasan pada label dan iklan pangan. Pengawasan dan pembinaan pada sarana produksi, distribusi pangan (toko, swalayan, dsb) juga dilakukan sebagai upaya untuk melindungi masyarakat dari bahaya pangan. Selain itu upaya memberikan edukasi kepada masyarakat tentang keamanan pangan juga dilakukan. Kegiatan meliputi pemberian informasi kepada masyarakat/kelompok masyarakat dengan penyuluhan, sosialisasi. Seluruh kegiatan pengawasan pre dan post market dilakukan sebagai upaya untuk melindungi masyarakat dari bahaya akibat pangan dan meminimalkan resiko terjadinya ketidaksesuaian yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko bahwa dalam pelaksanaan perizinan tersebut wajib dilakukan pengawasan. Dinas Kesehatan merupakan Dinas teknis yang melakukan penilaian kesesuaian izin. Selain itu Dinas Kesehatan juga melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di Apotek/Toko Obat, sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pengawasan dilakukan melalui

Pemeriksaan di lapangan secara rutin. Pemeriksaan sarana juga dapat dilakukan secara insidental (jika ada indikasi pelanggaran/ada aduan dari masyarakat dan pelaku usaha).Pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pelayanan kefarmasian (yang terdiri dari pengelolaan sediaan farmasi, alkes, BMHP dan pelayanan farmasi klinik) juga dilakukan.

Di Dinas Kesehatan juga terdapat program Kesehatan Kerja dan Olahraga. Dalam penyelenggaraan Kesehatan Kerja mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 48 Tahun 2016 tentang Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perkantoran.

Program ini membawahi beberapa kegiatan seperti olahraga/aktifitas fisik, pembinaan pada kelompok olahraga yang ada di masyarakat, K3 perkantoran, K3 fasyankes, K3 RS, GP2SP dan Pos UKK. K3 perkantoran ini meliputi K3 perkantoran pada kantor OPD, kantor kecamatan maupun kantor Desa. Untuk K3 Fasyankes meliputi K3 pada Puskesmas dan Klinik. Untuk program gerakan pekerja perempuan sehat produktif (GP2SP) dilaksanakan pada pekerja perempuan di tempat kerja baik formal maupun informal. Sedangkan untuk Pos upaya pelayanan kesehatan kerja (Pos UKK) khusus diperuntukkan bagi tenaga kerja informal dengan jumlah pekerja minimal 10 orang.

Keseluruhan kegiatan yang dilaksanakan pada program kesehatan kerja dan olahraga ini semuanya bertujuan untuk menciptakan karyawan yang sehat, bugar, produktif dan aman, serta menciptakan lingkungan kerja yang aman agar produktifitas dari karyawan bisa seoptimal mungkin dan mengurangi angka kesakitan agar meminimalisir kehilangan waktu kerja.

2.5 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PADA DINAS KESEHATAN

Dinas Kesehatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang kesehatan tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri. Tantangan yang paling nyata dihadapi kedepan terkait dengan kesehatan adalah bahwa dinamika pembangunan kesehatan di wilayah harus bergerak cepat yang diakibatkan oleh adanya perkembangan global

diberbagai sektor kehidupan masyarakat yang tidak dapat dihindari, seiring dengan perkembangan global tersebut, telah diantisipasi dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pemerintah provinsi, hal ini tentu berimplikasi pula terhadap kebijakan yang harus dikeluarkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kediri agar adanya sinergi dan kesesuaian dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan. Tehnik menyimpulkan isu strategis perangkat daerah tertuang dalam tabel berikut :

Tabel 2.26 Tehnik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS Yang Relevan Dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
Akses layanan kesehatan	Pilar 1: Layanan Primer a. Belum optimalnya Upaya promotif dan Preventif b. Pengelolaan data kesehatan yang belum optimal c. Keterbatsan sumber daya manusia dan infrastruktur d. Integrasi Layanan primer yang belum optimal e. Koordinasi antar sektor yang masih perlu ditingkatkan f. Koordinasi Antar Sektor yang belum optimalf. g. Isu Terkait Gizi dan Stunting h. Peran Serta Masyarakat dalam menjaga kesehatan diri dan lingkungan masih terus perlu ditingkatkan	Peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan	Perubahan iklim dan lingkungan yang sedang terjadi cuaca ekstrem, permukaan air laut dan deforestasi. Dampaknya : Meningkatnya risiko bencana alam dan kasus penyakit menular	Penguatan layanan kesehatan primer	Penguatan layanan kesehatan primer	Optimalisasi kualitas layanan kesehatan primer
	Pilar 2 : Layanan Rujukan a. Belum optimalnya koordinasi antar fasilitas kesehatan sehingga menyebabkan keterlambatan penanganan pasien, duplikasi layanan, bahkan rujukan datang tidak tepat b. Keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas kesehatan	Peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan	Penguatan dekarbonisasi dan pembangunan hijau (green Development) perlu ada penguatan perbaikan lingkungan secara fisik dan perilaku	Penguatan layanan kesehatan rujukan	Penguatan layanan kesehatan rujukan	Optimalisasi kualitas layanan kesehatan rujukan

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS Yang Relevan Dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
	c. Keterbatasan aksesibiltas dan kualitas layanan fasilitas kesehatan rujukan yang berbeda beda d. Banyak masyarakat yang belum memahami prosedur rujukan e. Jumlah dan jenis sarana, prasarana serta alat kesehatan masih ada yang belum memenuhi standar f. Kurangnya komitmen rumah sakit dalam memenuhi dan mempertahankan kualitas/mutu pasca akreditasi g. Masih rendahnya pelayanan kesehatan yang menggunakan sistem digitalisasi h. Sistem rujukan pelayanan kesehatan masih belum optimal					
	Pilar 3 : Ketahanan Kesehatan a. Belum optimalnya upaya pencegahan dan pengendalian penyakit, baik menular maupun tidak menular b. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang Perilaku Hidup Bersih dan sehat (PHBS) c. Tantangan dalam hal ketersediaan dan pemerataan sumber daya manusia dan infrastruktur kesehatan d. Tantangan terkait ketersediaan obat/farmasi	Partisipasi publik dalam pembangunan	Perubahan iklim dan lingkungan yang sedang terjadi cuaca ekstrem, permukaan air laut dan deforestasi. Dampaknya : Meningkatnya risiko bencana alam dan kasus penyakit menular	Permasalahan kesehatan berkaiatan dengan tingginya kasus PTM, stunting, insidensi TB serta tantangan penyediaan pelayanan kesehatan bagi penduduk lansia yang meningkat	Peningkatan aksesibilitas pelayanan kesehatan terutama bagi masyarakat di wilayah terpencil dan rentan Pengawasan yang ketat terhadap standar mutu dan keamanan obat, makanan, dan produk kesehatan lainnya.	Belum optimalnya pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan di tingkat fasilitas kesehatan dasar dan lanjutan

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS Yang Relevan Dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	Pilar 4 : Pendanaan a. Pengelolaan keuangan yang belum optimal b. Pemanfaatan dana yang belum efisien c. Peningkatan biaya kesehatan d. Tantangan pencapaian target kesehatan nasional e. Penguatan Jaminan Kesehatan Nasional	Keberlanjutan fiskal daerah	Ketidakpastian ekonomi global	Ketergantungan pada transfer pusat	Keterbatasan anggaran daerah	Peningkatan biaya kesehatan membutuhkan komitmen dan dukungan anggaran yang memadai
	Pilar 5 : SDM Kesehatan a. Manajemen dan pengelolaan fasilitas kesehatan perlu ditingkatkan, budaya mutu di puskesmas masih belum terbentuk sehingga capaiannya belum konsisten b. Cakupan dan kemampuan SDM di bidang kesehatan yang belum optimal	Akses dan pemerataan pembangunan SDM	Kesenjangan kapasitas aparatur	Reformasi birokrasi nasional	Ketimpangan kapasitas daerah	Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme SDM serta pemerataan distribusi tenaga kesehatan yang profesional dan responsif
	Pilar 6 : Teknologi Kesehatan a. Belum optimalnya sistem data base terintegrasi b. Regulasi dan kapasitas SDM yang belum memadai c. Masih rendahnya pelayanan kesehatan yang menggunakan sistem digitalisasi	Digitalisasi layanan publik	Perkembangan teknologi telah sampai pada perkembangan AI. Ketergantungan terhadap teknologi berdampak pada sektor kesehatan	Arah SPBE dan digitalisasi nasional	Infrastruktur TIK yang belum merata	Penguatan Sistem Informasi dan Integrasi Data Kesehatan

Identifikasi permasalahan bidang kesehatan yang dirumusakan berdasarkan RPJMD Kabupaten Kediri tahun 2025-2029 antara lain :

a. Manajemen dan pengelolaan fasilitas kesehatan perlu ditingkatkan
b. Cakupan dan kemapuan SDM bidang kesehatan yang belum optimal
c. Kualitas pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak belum optimal
d. Penanggulangan TBC yang belum optimal
e. Belum semua masyarakat menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional

Permasalahan utama yang teridentifikasi dalam RPJMD Tahun 2025-2029 adalah belum optimalnya capaian pada beberapa indikator yaitu : persentase kecamatan STBM, Angka kematian Ibu, Angka Kematian Bayi, persentase kecukupan rasio dan kompetensi tenaga kesehatan . selain itu pada RSUD SLG, persentase pemenuhan penunjang pemerintah daerah belum optimal. Demikian pula pada RSUD Kabupaten Kediri, persentase tersedianya peralatan dan mesin di rumah sakit belum optimal.

Berdasarkan analisis permasalahan dan gambaran pelayanan perangkat daerah, berikut rumusan isu strategis yang dapat dijadikan fokus Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri lima tahun ke depan :

1. **Optimalisasi kualitas layanan primer**, akibat belum optimalnya integrasi pelayanan primer yang dilakukan di faskes tingkat pertama, peran serta masyarakat dalam menjaga kesehatan diri dan lingkungan masih harus terus ditingkatkan, serta upaya promotif preventif yang belum maksimal dilakukan;
2. **Optimalisasi kualitas layanan rujukan**, akibat belum optimalnya koordinasi antar fasilitas kesehatan sehingga menyebabkan keterlambatan penanganan pasien, duplikasi layanan, bahkan rujukan datang tidak tepat. Disamping itu juga disebabkan kurangnya komitmen rumah sakit dalam mmemnuhi dan mempertahankan kualitas/mutu pasca akreditasi, keterbatasan aksesibiltas dan kualitas layanan fasilitas rujukan yang berbeda-beda, serta masih banyak masyarakat yang belum memahami prosedur rujukan;
3. **Belum optimalnya pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan dasar dan rujukan**, akibat semakin tingginya kebutuhan masyarakat

akan layanan kesehatan;

4. **Peningkatan biaya kesehatan membutuhkan komitmen dan dukungan anggaran yang memadai**, sebagai akibat dari pengelolaan keuangan yang belum optimal, peningkatan biaya kesehatan, serta tantangan pencapaian target kesehatan nasional;
5. **Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas SDM serta pemerataan distribusi tenaga kesehatan yang profesional dan responsif,** akibat dari belum optimalnya cakupan dan kemampuan SDM bidang kesehatan;
6. **Penguatan sistem informasi dan integrasi data kesehatan;** akibat dari belum optimalnya sistem data base terintegrasi, regulasi dan kapasitas SDM yang belum memadai, serta masih rendahnya pelayanan kesehatan yang menggunakan digitalisasi.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan rencana strategis perangkat daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Rencana strategis perangkat daerah merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan pada setiap urusan pemerintahan yang disusun oleh setiap perangkat daerah di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kediri.

Dalam Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2025-2029 tidak ada visi misi Dinas Kesehatan, tetapi mengikuti Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2025-2029 yaitu "***Kabupaten Kediri Berbudaya, Religius, Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan".***

Visi di atas dilandasi pemikiran bahwa Kabupaten harus menjadi wilayah yang maju, berdaya saing, dan layak huni sejajar dengan wilayah lain di Indonesia dengan tetap mengedepankan budi luhur dan karakter nasionalis-religius yang mengakar kuat. Kabupaten Kediri dapat menjadi wilayah yang unggul dalam bidang ekonomi, teknologi informasi, lingkungan, kesehatan, pendidikan, juga transportasi yang selaras dengan perkembangan zaman serta mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, setara, berkarakter, dan berbudaya, serta saling menghormati pada sesama manusia, dan lingkungan sekitar.

Kabupaten Kediri yang Berbudaya dan Religius dapat berarti sifat moralitas tinggi, etika yang baik, dan tindakan yang baik dalam kehidupan sehari-hari, sekaligus urgensi memelihara budaya dan nilai-nilai lokal. Visi ini diinterpretasikan ke dalam lingkup birokrasi yang meliputi kepemimpinan, profesionalitas, dan integritas. Pada tahun 2029, Kabupaten Kediri berkeadilan melalui pembangunan tata kelola pemerintahan yang baik dengan menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas serta pelaksanaan pelayanan publik terbaik yang efisien, responsif, dan berkualitas. Di dalam masyarakat, karakter demikian juga ditanamkan agar dapat menjadi modal dasar dalam mempertahankan warisan budaya dan tradisi yang unik, sehingga dapat menjaga kekuatan

identitas daerah dan rasa kebanggaan masyarakat Kabupaten Kediri melalui pemantapan I terhadap identitas diri dan daerahnya. Tidak hanya itu, nilai spiritual dan agama yang menjadi basis dalam membentuk moral dan etika di masyarakat juga termaktub dalam visi ini. Makna di dalamnya mengarahkan pada toleransi antar agama dan memberikan dasar yang kuat bagi kerukunan antar warga. Pada aspek kearifan lokal, Kabupaten Kediri menjunjung tinggi kemanusiaan dan menunjukkan sifat Kabupaten Kediri yang berbudaya serta berkarakter nasionalis dan religius. Nilai kebersamaan dan gotong royong dijaga kekuatannya melalui pemahaman dan praktik kehidupan bermasyarakat yang inklusif dan toleran sebagai fondasi masyarakat yang demokratis dan adil sehingga tercipta lingkungan yang mendukung kesejahteraan bersama dan menjunjung tinggi perdamaian dan harmoni.

Kabupaten Kediri yang Maju dapat berarti berjalan (bergerak) ke muka, tampil ke muka; menjadi lebih baik (laku, pandai, dan sebagainya), berkembang; telah mencapai atau berada pada tingkat peradaban yang tinggi; cerdas, berkembang pikirannya, dan berpikir dengan baik. Pada tahun 2029, Kabupaten Kediri sebagai wilayah yang maju, sumber pertumbuhan perekonomiannya berkelanjutan, berbasiskan pengetahuan dan inovasi yang berakar pada budaya dengan masyarakatnya cerdas dan memiliki pemikiran yang terus berkembang sesuai perubahan zaman. Kabupaten Kediri menjadi wilayah modern dan inovatif sehingga memiliki daya saing yang tinggi di kancah domestik dan global, ketahanan ekonomi yang kuat terhadap gejolak dan perubahan global serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Kabupaten Kediri yang Sejahtera dapat berarti aman sentosa dan makmur, selamat (terlepas dari segala macam gangguan). Pada tahun 2029, Kabupaten Kediri sebagai wilayah yang penduduknya memiliki pendapatan per kapita yang tinggi, disertai dengan menurunnya kemiskinan dan ketimpangan, serta kabupaten yang memiliki daya saing daerah tinggi. Selain itu, masyarakat Kabupaten Kediri terhindar dan terlindungi dari serangan, bahaya, ancaman dan kerusuhan yang mengancam ketenteraman kehidupan dan aktivitas masyarakat. Pemerintah Kabupaten Kediri akan mewujudkan ketertiban masyarakat melalui peningkatan peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan

dan ketertiban umum demi suksesnya pembangunan di Kabupaten Kediri.

Kabupaten Kediri yang Berkelanjutan dapat berarti berlangsung terus menerus; berkesinambungan. Sebagai kabupaten yang berkomitmen untuk terus menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan, pada tahun 2029, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kediri yang tinggi seimbang dengan pembangunan sosial, keberlanjutan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup, serta tata kelola lingkungan yang baik. Kualitas hidup masyarakat Kabupaten Kediri ditandai dengan kehidupan yang sejahtera secara merata, kesehatan dan pendidikan yang prima, serta lingkungan yang asri dan lestari, lingkungan permukiman hidup yang layak dan nyaman, bebas polusi udara, air, suara dan sampah, serta kondisi alam beserta isinya yang terjaga dengan baik. Tidak hanya itu, dituju pula kondisi Kabupaten Kediri yang sejahtera melalui pembangunan ekonomi berkelanjutan berbasis pengembangan agraris dan industri yang kompetitif dan berdaya saing dan peningkatan kualitas lingkungan hidup bagi seluruh masyarakat. Visi ini menunjukkan komitmen Kabupaten Kediri dalam pelestarian lingkungan dan penggunaan energi terbarukan.

Memperhatikan visi serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, maka dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Kediri Tahun 2025–2029, maka ditetapkan misi pembangunan Kabupaten Kediri Tahun 2025–2029, yaitu sebagai berikut:

- Misi 1 : Pengembangan SDM yang Berkarakter Unggul dan Berdaya Saing Serta Nasionalis-Religius
- Misi 2 : Pengembangan Ekonomi Kerakyatan, Revitalisasi Pertanian Melalui Pemanfaatan Potensi Lokal
- Misi 3 : Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
- Misi 4 : Pembangunan Wilayah dan Infrastruktur
- Misi 5 : Pengembangan Pariwisata, Seni Budaya, Olahraga, dan Kreativitas Pemuda
- Misi 6 : Penguatan Ketahanan Wilayah Terhadap Risiko Bencana dan Keberlanjutan Lingkungan
- Misi 7 : Kemandirian Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun mendatang. Tujuan Strategis ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis, Sehingga dapat mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Misi dan Visi. Berdasarkan tujuan yang akan ditetapkan, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri akan dapat mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya. Sesuai RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2025-2029, Dinas Kesehatan mengampu:

- Misi 1 : yaitu “Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berkarakter Unggul dan Berdaya Saing, serta Nasionalis-Religius”,
- Tujuan 1 : yaitu ”Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkarakter Unggul dan Berdaya Saing serta Nasionalis/Religius”,
- Sasaran 2 : yaitu “Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat, dengan indikator Usia Harapan Hidup”

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh lembaga dalam jangka waktu tertentu. Sasaran adalah salah satu dasar dalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga merupakan alat pemicu bagi organisasi terhadap sesuatu yang harus dicapai, sejalan dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2025-2029, maka dirumuskan **Sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri Tahun 2025-2029 adalah “*Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Yang Bermutu dan Terjangkau*”.** Dengan **Indikator Sasaran**:

1. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kesehatan
2. Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita
3. Cakupan Kepesertaan Jaminan Nasional (JKN)

Sebagai acuan dalam melaksanakan kinerja tujuan dan sasaran maka Dinas Kesehatan mempunyai target sebagai berikut :

Tabel 3.1 Tehnik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri Tahun 2025-2029

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
Misi 1 : Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berkarakter Unggul dan Berdaya Saing, serta Nasionalis-Religius Tujuan 1 : Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkarakter Unggul dan Berdaya Saing serta Nasionalis/Religius Sasaran 2 : Meningkatnya Derajat Keesehatan Masyarakat	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat		Usia Harapan Hidup (UHH)	75,18	75,44	75,70	75,95	76,21	76,47	
		Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Yang Bermutu dan Terjangkau	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kesehatan	82%	83%	84%	85%	86%	87%	
			Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita	16,23%	15,65%	15,07%	14,49%	12,47%	11,97%	
			Cakupan Kepesertaan Jaminan Nasional (JKN)	98%	98%	98%	98%	98%	98%	

3.2 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH DALAM MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA TAHUN 2025-2029

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Srategis (Renstra) Dinas Kesehatan Tahun 2025-2029, maka diperlukan strategi yang tepat serta arah kebijakan yang terfokus, terintegrasi, dan selaras dengan sasaran pembangunan daerah khususnya dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Tabel 3.2 Penahapan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri Tahun 2025-2029

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
Fase konsolidasi dan penguatan fondasi :	**Fase akselerasi dan inovasi**	**Fase konsolidasi :**	**Fase optimalisasi dan sustainability:**	**Fase evaluasi dan transisi :**
– Peningkatan kompetensi tenaga kesehatan dalam penurunan AKI, Akbal dan stunting – Peningkatan kompetensi tenaga medis untuk meningkatkan kompetensi layanan di RSUD – Pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar baik di puskesmas maupun Rumah Sakit	– Program pemeriksaan kesehatan dan pemberian imunisasi di sekolah	– Sistem rujukan terintegrasi berbasis digital	– Sistem informasi kesehatan terintegrasi	Evaluasi program Jaminan Kesehatn Nasional (JKN) dapat bertahan secara keuangan dalam jangka panjang
– Analisis kebutuhan puskesmas rawat inap berdasarkan demografi, geografi dan kebutuhan masyarakat – Analisis kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) puskesmas rawat inap sesuai standar – Analisis kebutuhan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan (SPA) puskesmas rawat inap sesuai standar	– Peningkatan status puskesmas menjadi rawat inap – Registrasi, perijinan dan akreditasi – Pemenuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) dan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan (SPA) puskesmas rawat inap sesuai standar – Monitoring mutu pelayanan kesehatan puskesmas	– Peningkatan status puskesmas menjadi rawat inap – Registrasi, perijinan dan akreditasi – Pemenuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) dan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan (SPA) puskesmas rawat inap sesuai standar – Monitoring mutu pelayanan kesehatan puskesmas	– Peningkatan status puskesmas menjadi rawat inap – Registrasi, perijinan dan akreditasi – Pemenuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) dan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan (SPA) puskesmas rawat inap sesuai standar – Monitoring mutu pelayanan kesehatan puskesmas	– Penguatan sistem surveilans kematian maternal – Evaluasi mutu pelayanan kesehatan puskesmas dan rumah sakit
– Pemetaan populasi target Pemeriksaaan Kesehatan Gratis (PKG) – Pemetaan kebutuhan SDM pemberi layanan PKG – Pemetaan kebutuhan alat kesehatan penunjang PKG – Pemetaan kebutuhan reagen dan BMHP penunjang PKG – Pemenuhan kebutuhan alat kesehatan, reagen dan BMHP penunjang PKG	– Pemetaan populasi target Pemeriksaaan Kesehatan Gratis (PKG) – Pemetaan kebutuhan SDM pemberi layanan PKG – Pemetaan kebutuhan alat kesehatan penunjang PKG – Pemetaan kebutuhan reagen dan BMHP penunjang PKG – Pemenuhan kebutuhan alat kesehatan, reagen dan BMHP penunjang PKG	– Evaluasi kemajuan program TB untuk mencapai target eliminasi tuberculosis – Pemetaan populasi target Pemeriksaaan Kesehatan Gratis (PKG) – Pemetaan kebutuhan SDM pemberi layanan PKG – Pemetaan kebutuhan alat kesehatan penunjang PKG – Pemetaan kebutuhan reagen dan BMHP penunjang PKG – Pemenuhan kebutuhan alat kesehatan, reagen dan BMHP penunjang PKG	– Evaluasi kemajuan program TB untuk mencapai target eliminasi tuberculosis – Pemetaan populasi target Pemeriksaaan Kesehatan Gratis (PKG) – Pemetaan kebutuhan SDM pemberi layanan PKG – Pemetaan kebutuhan alat kesehatan penunjang PKG – Pemetaan kebutuhan reagen dan BMHP penunjang PKG – Pemenuhan kebutuhan alat kesehatan, reagen dan BMHP penunjang PKG	– Peningkatan status puskesmas menjadi rawat inap

Secara umum **strategi** yang dikembangkan Dinas Kesehatan difokuskan pada penguatan standarisasi kualitas layanan kesehatan dan peningkatan kepuasan masyarakat terhadap layanan kesehatan.

Adapun **arah kebijakan** yang ditempuh dalam kurun waktu 2025-2029 antara lain meliputi :

1. Peningkatan akses fasilitas kesehatan dengan pemenuhan sarana, prasarana pendukung pelayanan kesehatan, serta perbekalan kesehatan
2. Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat melalui perbaikan mutu yang berkesinambungan dan/atau perbaikan mutu kolaboratif
3. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan rumah sakit melalui perbaikan kinerja yang berkesinambungan
4. Peningkatan mutu dan pemerataan distribusi SDM kesehatan
5. Optimalisasi surveilans dan epidemiologi dan penanggulangan wabah
6. Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) melalui PSC 119, EMAS, dan Si PANJI KARDIA
7. Memobilisasi masyarakat dalam rangka mendukung UKBM dan menumbuhkembangkan kemitraan dalam upaya kesehatan
8. Peningkatan promotif dan preventif dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat

Melalui strategi dan arah kebijakan tersebut, diharapkan derajat kesehatan masyarakat semakin meningkat.

Tabel 3.3 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

No	Operasionalisasi NSPK	Strategi RPJMD	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Dinas Kesehatan	Ket.
1	*2*		*3*	*4*	*5*
1	Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kediri di Bidang Kesehatan	Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP	Rehabilitasi dan pemeliharaan rumah sakit, puskesmas, dan fasilitas kesehatan lainnya	Peningkatan akses fasilitas kesehatan dengan pemenuhan sarana dan prasarana pendukung pelayanan kesehatan	
			Pengadaan alat kesehatan/penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	Peningkatan pelayanan, sarana dan prasarana serta perbekalan kesehatan	
			Pengembangan layanan rumah sakit	Peningkatan mutu pelayanan kesehatan rumah sakit melalui perbaikan kinerja yang berkesinambungan	

No	Operasionalisasi NSPK	Strategi RPJMD	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Dinas Kesehatan	Ket.
		Menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan	Pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	Optimalisasi surveilans dan epidemiologi dan penanggulangan wabah	
			Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Peningkatan aksesibilitas pelayanan kesehatan masyarakat yang bermutu	
			Penyediaan dan pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Penyediaan dan pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) melalui PSC 119, EMAS dan SI PANJI KARDIA	
			Pengelolaan kawasan tanpa asap rokok	Membentuk PERDA KTR	
			Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak, kelanjutusiaan, dan layanan imunisasi	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak, kelanjutusiaan, dan layanan imunisasi	
			Pengelolaan pelayanan kesehatan jiwa dan NAPZA	Pengelolaan pelayanan kesehatan jiwa dan NAPZA - Penanganan Orang Dengan Ganggun Jiwa (ODGJ) sesuai standart - Bebas Pasung	
		Mengalokasikan kebutuhan dan pendayagunaan sumberdaya manusia kesehatan	Perencanaan dan distribusi serta pemerataan sumberdaya manusia kesehatan yang sesuai standar	Peningkatan mutu dan pemerataan SDM Kesehatan - Peningkatan Rasio Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan terhadap Populasi - Peningkatan Persentase RS Pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar - Peningkatan Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar - Persentase tersedianya dokumen perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan di Fasilitas Kesehatan Pemerintah	
			Pembinaan dan pengawasan sumberdaya manusia kesehatan	- Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan melalui pengisian instrumen binwas SDMK dan penilaian fasyankes - Pemantauan dan evaluasi data SISDMK - Penerbitan SIP Named dan Nakes setelah memenuhi persyaratan	
		Mengembangkan mutu dan meningkatkan	Meningkatkan kompetensi dan	Peningkatan kualitas sumber daya manusia kesehatan - Peningkatan Persentase	

No	Operasionalisasi NSPK	Strategi RPJMD	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Dinas Kesehatan	Ket.
		kompetensi teknis sumberdaya manusia kesehatan	kualifikasi sumberdaya manusia kesehatan	tenaga medis dan tenaga kesehatan yang bekerja di instansi pemerintah daerah yang melakukan peningkatan kompetensi (melalui pendidikan dan/atau pelatihan dan/atau kegiatan peningkatan kompetensi lainnya)	
		Advokasi, memberdayakan, kemitraan, meningkatkan peran serta masyarakat dan lintas sektor	Peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat	Memobilisasi masyarakat dalam rangka mendukung UKBM (Poskestren dan SBH) dan menumbuhkembangkan kemitraan dalam upaya kesehatan	
			Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat	Peningkatan promotif dan preventif dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat dengan berbagai media promosi yang ada	
			Penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan derajat kesehatan keluarga dan lingkungan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat	Peningkatan Promosi kesehatan berdasarkan siklus hidup untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di 5 tatanan (rumah tangga, tempat tempat umum, sekolah, tempat layanan kesehatan, tempat kerja)	
		Mendukung pelaksanaan akreditasi seluruh puskesmas dan rumah sakit milik pemerintah daerah	Peningkatan mutu fasilitas pelayanan kesehatan	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat melalui perbaikan mutu yang berkesinambungan dan/atau perbaikan mutu kolaboratif	

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikasi rencana program prioritas SKPD berisi program-program, baik untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan SKPD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan.

Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) yang ada di dalam RPJMD selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi SKPD dalam penyusunan Renstra SKPD, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kinerja program (outcome) di masing-masing urusan wajib/pilihan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD Kabupaten Kediri.

Provinsi dan APBN maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dalam rangka mewujudkan sasaran organisasi dengan indikator sasaran sebagai tolak ukur keberhasilannya, maka Dinas Kesehatan menetapkan Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif untuk pelaksanaan program Kesehatan kurun waktu 2025 - 2029. Adapun Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan dalam kurun waktu 2025-2029 adalah sebagai berikut:

4.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN PENDANAANNYA

Pada tahun 2025 - 2029, dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, terdapat 5 (lima) program yang akan dilaksanakan pada tahun 2025-2029

sebagai berikut:

4.1.1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA

Program tersebut di dukung oleh kegiatan sebagai berikut:

1. **Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**; dengan sub kegiatan:
   a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
   b) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2. **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**; dengan sub kegiatan:
   a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   b) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
   c) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
   d) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
   e) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
3. **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**; dengan sub kegiatan:
   a) Pengadaan pakaian dinas berserta atribut kelengkapannya
4. **Administrasi Umum Perangkat Daerah**; dengan sub kegiatan :
   a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
   b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   c) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
   d) Penyediaan Barang Logistik Kantor
   e) Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
   f) Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan
   g) Fasilitasi Kunjungan Tamu
   h) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD
5. **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**; dengan sub kegiatan :

a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
c) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
d) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

6. **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**; dengan sub kegiatan :
   a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
   b) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan
   c) Pemeliharaan Mebel
   d) Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya
   e) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
   f) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
   g) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
7. **Peningkatan Pelayanan BLUD**; dengan sub kegiatan :
   Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD

4.1.2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Program tersebut di dukung oleh kegiatan sebagai berikut :

1. **Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kab/Kota**; dengan Sub Kegiatan :
   a) Pembangunan Puskesmas
   b) Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya
   c) Pengembangan Puskesmas
   d) Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya
   e) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas
   f) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya
   g) Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
   h) Pemeliharaan Rutin Dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang

Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan

i) Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan

j) Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Habis Pakai, Makanan dan Minuman Ke Fasilitas Kesehatan

2. **Penyediaan Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota**; dengan Sub Kegiatan:

a) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

b) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

c) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

d) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita

e) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar

f) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif

g) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut

h) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

i) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Militus

j) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat

k) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkolusis

l) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV

m) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi KLB

n) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana

o) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat

p) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olah Raga

q) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan

r) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya

s) Pengelolaan Surveilans Kesehatan

t) Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular Dan Tidak Menular

u) Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat

v) Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB

ke Laboratorium Rujukan/Nasional

w) Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat
x) Operasional Pelayanan Puskesmas
y) Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya
z) Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota
å) Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi Dan Pemberian Obat Massal)
ä) Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Dan Respon Wabah
ö) Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat darurat Terpadu (SPGDT)
aa) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberculosis
bb) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan HIV (ODHIV)
ff) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria
dd) Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak
hh) Pengelolaan Layanan Imunisasi
ii) Pengelolaan Layanan Kesehatan Haji

3. **Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**; dengan Sub kegiatan:
   a) Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan

4. **Penerbitan Izin Rumah Sakit Type C dan D Serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**; dengan Sub kegiatan:
   a) Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan
   b) Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan

4.1.3 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

1. **Pemberian Izin Praktek Tenaga Kesehatan di Kabupaten/ Kota**; dengan sub kegiatan :
   a) Pembinaan Dan Pengawasan Tenaga Kesehatan Serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan

2. **Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan Untuk UKP dan UKM di Wilayah Kab/Kota**; dengan Sub kegiatan:
   a) Perencanaan dan Distribusi Serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan
   b) Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan

3. **Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;** dengan sub kegiatan:
   a) Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan

4.1.4 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN

1. **Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**; dengan Sub Kegiatan

   Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)

2. **Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P- IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga**; dengan Sub kegiatan :

   Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga

3. **Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot air Minum (DAM)**

   Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/ Restoran dan

Depo Air Minum (DAM)

4. **Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan sentra Makanan Jajanan**

   Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan

5. **Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga**

   Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan

4.1.5 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN

1. **Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**

   Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Kabupaten/ Kota

2. **Pelaksanaan Sehat Dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**

   Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat

3. **Pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) tingkat daerah Kab/Kota**

   Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

Tabel 4.1 Rencana Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan dan Pendanaan Dinas Kesehatan Tahun 2025-2030

Kode Rekening						Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator (*Outcome/Output*)	Baseline 2024		Target dan Pagu Indikatif Tahun											
								Satuan	2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
										Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)
Tujuan						Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Umur Harapan Hidup (UHH)		75,07	75,18		75,44		75,7		75,95		76,21		76,47	
Sasaran						Meningkatnya pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan kesehatan	Persen	81,25	82		83		84		85		86		87	
							Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	Persen	16,8	16,23		15,65		15,07		14,49		12,49		11,97	
							Cakupan Kepesertaan Jamina Kesehatan Nasional (JKN)	Persen	96,91	98		98		98		98		98		98	
1	02					Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan					441.291.749.797,00		490.236.544.742,00		493.278.190.816,00		505.395.334.792,00		517.238.064.295,00		529.362.260.301,00
1	02	01				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota															
						Tercapainya dukungan yang optimal untuk kelancaran pelaksanaan	Persentase tertib adminitrasi layanan pemerintahan	*Persen*	*100*	*100*	*261.336.818.718,00*	*100*	*268.322.709.004,00*	*100*	*273.700.760.731,00*	*100*	*279.012.812.575,00*	*100*	*283.987.210.152,00*	*100*	*288.998.327.469,00*

Kode Rekening						Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator (*Outcome/Output*)	Baseline 2024		Target dan Pagu Indikatif Tahun									
								Satuan	2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
										Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)
						urusan pemerintahan daerah													
1	02	02				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT													
						Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	*Angka Kematian Ibu*	*Per 100.000 KH*	*43,9*	*53,00*	*176.800.580.819*	*53,00*	*218.222.937.686*	*53,00*	*227.824.746.944*	*53,00*	*237.849.035.809*	*53,00*	*248.314.393.384*	*53,00*	*259.240.226.692*
							Angka Kematian Bayi	*Per 1.000 KH*	*2,48*	*12,62*		*11,63*		*10,97*		*10,46*		*9,96*		*9,46*	
							Jumlah Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	*Desa/ Kelurahan*	*16*	*20*		*30*		*35*		*40*		*45*		*50*	
							Porsentase Angka keberhasilan pengobatan TBC (TBC Succes Rate)	*Persen*	*83*	*84*		*85*		*86*		*87*		*88*		*90*	
							Cakupan imunisasi bayi lengkap	*Persen*	*92,14*	*93*		*94*		*95*		*95*		*95*		*95*	
							Cakupan Penerima pemeriksaaan Kesehatan gratis	*Persen*	*N/A*	*15*		*20*		*25*		*30*		*40*		*50*	

Kode Rekening						Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator (*Outcome/Output*)	Baseline 2024		Target dan Pagu Indikatif Tahun											
								Satuan	2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
										Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)
							Persentase Puskesmas Rawat Inap	*Persen*	*21,6*	*32,4*		*43,2*		*51,35*		*56,75*		*59,45*		*67,5*	
							Persentase pelayanan kesehatan yang diberikan pada kondisi darurat	*Persen*	*100*	*100*		*100*		*100*		*100*		*100*		*100*	
							Persentase Puskesmas dengan fasilitas kesehatan sesuai standar	*Persen*	*10*	*12*		*15*		*20*		*25*		*30*		*35*	
1	02	03				PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN															
						Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Rasio Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan terhadap Populasi	*Rasio*	*1,91*	*1,92*	*1.547.611.000*	*1,93*	*2.040.981.200*	*1,94*	*2.081.850.940*	*1,95*	*2.122.256.016*	*1,96*	*2.160.092.791*	*1,97*	*2.198.208.868*
1	02	04				PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN															
						Meningkatnya kualitas dan distribusi	*Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat*	*Persen*	*60*	*61*	*606.520.060*	*62*	*723.157.000*	*63*	*737.637.897*	*64*	*751.954.155*	*65*	*765.360.417*	*66*	*778.865.640*

Kode Rekening						Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator (*Outcome/Output*)	Baseline 2024		Target dan Pagu Indikatif Tahun											
								Satuan	2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
										Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)
						sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	*Kesehatan dan Makanan Minuman*														
1	02	05				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN															
						Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	*Persentase Puskesmas yang mengembangkan UKBM sesuai standar*	*Persen*	*85*	*86*	*1.000.219.200*	*88*	*926.759.852,00*	*90*	*945.317.805,00*	*92*	*963.664.766,00*	*94*	*980.845.524,00*	*96*	*998.153.106,00*

Tabel 4.2 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Dinas Kesehatan Tahun 2025-2030

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	*OUTCOME*	*OUTPUT*	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
NSPK : melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Bidang Kesehatan Sasaran RPJMD : Meningkatnya Derajat Kesehatan	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat				Umur Harapan Hidup (UHH)		
		Meningkatnya Pelayanan Kesehatan yang Bermutu dan terjangkau			Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kesehatan		
					Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita		
					Cakupan Kepesertaan Jaminan Nasional (JKN)		
			Tercapainya dukungan yang optimal untuk kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan daerah		Persentase tertib adminitrasi layanan pemerintahan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Persentase Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja yang disusun*	*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan yang disusun*	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Tersedianya Administrasi Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	
				Terlaksananya P enatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	*OUTCOME*	*OUTPUT*	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	*Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	
				Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan pakaian Dinas beserta atributnya	
				Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan peralatan rumah tangga	
				Tersedianya Barang Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Barang Logistik Kantor	
				Tersedianya Barang Cetakan dan Penggadaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan	
				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
				Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	*OUTCOME*	*OUTPUT*	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daera	*Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Tersedinya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Pemeliharaan Mebel	
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	*OUTCOME*	*OUTPUT*	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Di pelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Di pelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Jumlah Unit Layanan BLUD	*Jumlah puskesmas yang melakukan pelayanan BLUD*	*Peningkatan Pelayanan BLUD*	
				Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	
			Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat		Angka Kematian Ibu	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Angka Kematian Bayi		
					Jumlah Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)		
					Porsentase Angka keberhasilan pengobatan TBC (TBC Succes Rate)		
					Cakupan imunisasi bayi lengkap		
					Cakupan Penerima pemeriksaaan Kesehatan gratis		
					Persentase Puskesmas Rawat Inap		
					Persentase pelayanan kesehatan yang diberikan pada kondisi darurat		
					Persentase Puskesmas dengan fasilitas kesehatan sesuai standar		
				Tersedianya Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pemenuhan dan Pengelolaan Sarana Prasarana, Alkes, Obat, BMHP, Makanan Minuman*	*Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota*	
					Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dengan Perbekalan Kesehatan Sesuai Standar		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	*OUTCOME*	*OUTPUT*	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
					Terbangunnya Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)	Pembangunan Puskesmas	
					Terbangunnya Fasilitas Kesehatan Lainnya	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	
					Tersedianya Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Pengembangan Puskesmas	
					Terlaksananya Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnnya	
					Tersedianya Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Puskesmas	Rehabitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	
					Tersedianya Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	Rehabitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnnya	
					Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	
					Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	
					Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	
					Terlaksananya Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin,Makanan ke Fasilitas Kesehatan	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	
					Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	*OUTCOME*	*OUTPUT*	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
				Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin*	*Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*	
					Persentase Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		
					Persentase Pelayanan Kesehatan Balita		
					Persentase Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar		
					Persentase Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif		
					Persentase Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut		
					Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi		
					Persentase Hipertensi dalam Pengendalian		
					Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Militus		
					Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		
					Persentase Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberculosis		
					Persentase ODHIV baru yang ditemukan yang mendapat pengobatan ARV		
					Persentase layanan kesehatan pada penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana serta layanan kegawatdaruratan		
					Underweight		
					Wasting		
					Persentase pekerja mendapatkan pelayanan kesehatan kerja		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	*OUTCOME*	*OUTPUT*	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
					Persentase fasyankes yang memenuhi syarat kesehatan lingkungan		
					Persentase penyehat tradisional / hatra yang memiliki STPT		
					Imunisasi lengkap 14 antigen mencapai target		
					Persentase Pelayanan dan penanganan kasus penyakit menular		
					Cakupan kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)		
					Jumlah Kecamatan yang melaksanakan KKS		
					Jumlah Desa/kelurahan sehat iklim		
					Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terakreditasi		
				Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	
				Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	
				Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	
				Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	
				Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	
				Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	
				Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	*OUTCOME*	*OUTPUT*	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
				Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	
				Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Militus Sesuai Standar	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Militus	
				Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	
				Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	
				Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Sesuai Standar	Jumlah orang terduga menderita HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	
				Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi KLB Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi KLB	
				Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau berpotensi bencana sesuai standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	
				Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	
				Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olah Raga	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olah Raga	
				Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan lingkungan	
				Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	
				Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	*OUTCOME*	*OUTPUT*	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
				Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	
				Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah dokumen hasil pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	
				Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	
				Terdistribusinya Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah paket spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	
				TerselenggaranyaKabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	
				Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Operasional Pelayanan Puskesmas	
				Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	
				Terlaksananya Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi di kabupaten/kota	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Investigasi Awal Kejadian Tidak diharapkan (Kejadian Ikutan pasca Imunisasi dan pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak diharapkan (Kejadian Ikutan pasca Imunisasi dan pemberian Obat Massal)	Investigasi Awal Kejadian Tidak diharapkan (Kejadian Ikutan pasca Imunisasi dan pemberian Obat Massal)	
				Terlaksananya Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	
				Tersedia dan Terkelolanya Public Safety Center (PSC 119) yang Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	
				Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkolusis	Jumlah orang dengan tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standart	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkolusis	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	*OUTCOME*	*OUTPUT*	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah Orang dengan HIV (ODHIV) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standart	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan HIV (ODHIV)	
				Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria IKK	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	
				Terlaksananya Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	
				Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan layanan imunisasi	Pengelolaan Layanan Imunisasi	
				TerlaksananyaPengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah Dokumen Pengelolaan Pelayanan Kesehatan haji	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	
				Terselenggaranya Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	*Tingkat ketersediaan sistem informasi kesehatan*	*Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi*	
				Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan sistem informasi kesehatan	Pengelolaan sistem informasi kesehatan	
				Terlaksananya Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase FKTL (Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut) dan Fasyankes Lainnya yang memiliki izin operasional*	*Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*	
					Jumlah FKTL (Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjut) dan Fasyankes Lainnya yang terakreditasi minimal utama		
				Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	
				Terlaksananya Penyiapan Perumusan dan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	
					Rasio Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan terhadap Populasi	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	*OUTCOME*	*OUTPUT*	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
			Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	*Terlaksananya Pemberian Ijin Praktek Tenaga Kesehatan di Kabupaten/Kota*	*Persentase ijin praktik Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis yang diterbitkan setelah memenuhi persyaratan*	*Pemberian Ijin Praktek Tenaga Kesehatan di Kabupaten/Kota*	
				Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	
				Terlaksananya Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kab/Kota	*Persentase RS Pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar*	*Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kab/Kota*	
					Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar		
				Terlaksananya Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	
				Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	
				Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan*	*Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*	
				Terlaksananya Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	
			Meningkatnya Kualitas dan Distribusi Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman		Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	
				Terlaksananya Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT	*Persentase Rekomendasi/Data Teknis/Sertifikat Standar/Berita Acara Pemeriksaan Apotek, Toko Obat, Toko Alkes dan Optikal, UMOT yang Memenuhi Standar*	*Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT*	
				Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	*OUTCOME*	*OUTPUT*	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
					Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		
				Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P- IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	*Persentase pemenuhan komitmen dan atau penerbitan izin (Nomor P- IRT) untuk Produksi Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga*	*Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P- IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga*	
				Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	
				Terlaksananya Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot air Minum (DAM)	*Persentase TPP dengan tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat*	*Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot air Minum (DAM)*	
				Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/ Restoran dan Depo Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lainJasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/ Restoran dan Depo Air Minum (DAM)	
				Terlaksananya Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan sentra Makanan Jajanan	*Puskesmas dengan persentase pangan olahan siap saji memenuhi syarat (POSS)*	*Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan sentra Makanan Jajanan*	
				Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	*OUTCOME*	*OUTPUT*	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
				Terlaksananya Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	*Persentase produsen industri rumah tangga dan produk makanan minuman yang memenuhi syarat*	*Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga*	
				Terlaksananya Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	
			Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan		Persentase Puskesmas yang mengembangkan UKBM sesuai standar	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	
				Terlaksananya Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabuapen/Kota	*Persentase kegiatan Kampanye Germas di tingkat Kabupaten (Pembudayaan Germas)*	*Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabuapen/Kota*	
				Terlaksananya Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen hasil kegiatan kemitraan bersama dengan LS/Ormas/ Organisasi Profesi/Dunia Usaha dalam rangka peningkatan Promosi Program Kesehatan Prioritas dan Kesehatan Komunitas	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Kabupaten/ Kota	
				Terlaksananya Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah tema KIE program kesehatan prioritas yang dipromosikan melalui berbagai saluran media*	*Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*	
				Terselenggaranya Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	
				Terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Kabupaten	*Persentase Posyandu di Kabupaten dengan minimal 75% Posyandu siklus hidup yang aktif*	*Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Kabupaten*	
					Persentase kader posyandu strata madya		
					Jumlah Puskesmas yang mempunyai Poskestren dan melaksanakan Pembinaan Poskestren Madya, Purnama dan Mandiri sesuai standar		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	*OUTCOME*	*OUTPUT*	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
				Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	

Tabel 4.3 Rencana Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan dan Pendanaan Dinas Kesehatan Tahun 2025-2030

Kode Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator (*Outcome/Output*)	Baseline 2024		Target dan Pagu Indikatif Tahun											
			Satuan	2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)
Tujuan	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Umur Harapan Hidup (UHH)		75,07	75,18		75,44		75,7		75,95		76,21		76,47	
Sasaran	Meningkatnya pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan kesehatan	Persen	81,25	82		83		84		85		86		87	
		Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	Persen	16,8	16,23		15,65		15,07		14,49		12,47		11,97	
		Cakupan Kepesertaan Jaminan Nasional (JKN)	Persen	96,91	98		98		98		98		98		98	
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					441.291.749.797,00		490.236.544.742,00		505.290.314.317,00		520.699.723.321,00		536.207.902.268,00		552.213.781.774,00
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase tertib administrasi layanan pemerintahan	Persen	100	100	261.336.818.718,00	100	268.322.709.004,00	100	273.700.760.731,00	100	279.012.812.575,00	100	283.987.210.152,00	100	288.998.327.469,00

Kode Rekening						Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator (*Outcome/Output*)	Baseline 2024		Target dan Pagu Indikatif Tahun									
								Satuan	2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
										Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)
						KABUPATEN/KOTA													
1	***02***	***01***	***2***	***01***		***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja yang disusun***	***Dokumen***	***6***	***6***	***105.037.700,00***	***6***	***312.053.200,00***	***6***	***250.550.520,00***	***6***	***261.939.180,00***	***6***	***273.327.840,00***	***6***	***284.716.500,00***
1	02	01	2	01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	2	2	56.076.000,00	2	187.230.000,00	2	113.245.000,00	2	118.392.500	2	123.540.000	2	128.687.500
1	02	01	2	01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	4	4	48.961.700,00	4	124.823.200,00	4	137.305.520,00	4	143.546.680	4	149.787.840	4	156.029.000
1	***02***	***01***	***2***	***02***		***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan yang disusun***	***Laporan***	***13***	***13***	***156.146.114.866***	***13***	***164.412.383.248***	***13***	***166.613.347.449***	***13***	***169.586.242.069***	***13***	***172.180.428.169***	***13***	***174.744.458.670***
1	02	01	2	02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang /bulan	1.856	1.856	154.019.215.020	1.906	161.898.559.802	1.956	163.936.222.993	2.006	166.787.430.138	2.056	169.259.928.762	2106	171.702.271.788
1	02	01	2	02	0002	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	12	1.094.689.846	12	1.127.039.846	12	1.247.674.830	12	1.304.387.322,00	12	1.361.099.815	12	1.417.812.307

Kode Rekening						Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator (*Outcome/Output*)	Baseline 2024		Target dan Pagu Indikatif Tahun											
								Satuan	2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
										Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)
1	02	01	2	02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	60	60	917.840.000	60	1.189.500.000	60	1.308.449.626	60	1.367.924.609	60	1.427.399.592	60	1.486.874.575
1	02	01	2	02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	56.160.000	1	150.000.000	1	71.464.800	1	74.713.200	1	77.961.600,00	1	81.210.000
1	02	01	2	02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	12	58.210.000	12	47.283.600	12	49.535.200,00	12	51.786.800,00	12	54.038.400	12	56.290.000
1	***02***	***01***	***2***	***05***		***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	***Terlaksananya kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	***Persen***	***100***	***100***	***0***	***100***	***118.530.000***	***100***	***66.990.000***	***100***	***70.035.000***	***100***	***73.080.000***	***100***	***76.125.000***
1	02	01	2	05	0002	Pengadaan pakaian Dinas beserta atributnya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	0	0	1	118.530.000	1	66.990.000	1	70.035.000	1	73.080.000	1	76.125.000

Kode Rekening						Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator (*Outcome/Output*)	Baseline 2024		Target dan Pagu Indikatif Tahun									
								Satuan	2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
										Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)
1	***0 2***	***0 1***	***2***	***0 6***		***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***persen***	***100***	***100***	***346.903.100***	***100***	***488.050.170***	***100***	***845.868.340***	***100***	***918.407.810***	***100***	***990.947.280***	***100***	***1.063.486.750***
1	0 2	0 1	2	0 6	00 01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	2	2	45.696.500	2	44.497.400	2	50.266.150	2	52.550.975	2	54.835.800	2	57.120.625
1	0 2	0 1	2	0 6	00 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	3	3	69.970.000	3	107.290.000	3	76.967.000,00	3	80.465.500	3	83.964.000	3	87.462.500
1	0 2	0 1	2	0 6	00 03	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	11	11	25.518.300	11	39.503.600,00	11	42.138.470	11	44.053.855	11	45.969.240	11	47.884.625
1	0 2	0 1	2	0 6	00 04	Penyediaan Barang Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	14	14	121.176.100	14	162.827.400	14	179.110.140	14	187.251.510	14	195.392.880	14	203.534.250
1	0 2	0 1	2	0 6	00 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	7	7	50.290.200	7	59.620.040	10	65.989.220	10	68.988.730	10	71.988.240	10	74.987.750
1	0 2	0 1	2	0 6	00 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	12	0	12	6.911.730,00	12	7.240.860	12	7.569.990	12	7.899.120	12	8.228.250
1	0 2	0 1	2	0 6	00 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	12	34.252.000	12	67.400.000	12	74.156.500	12	77.527.250	12	80.898.000	12	84.268.750

Kode Rekening						Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator (*Outcome/Output*)	Baseline 2024		Target dan Pagu Indikatif Tahun									
								Satuan	2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
										Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)
1	02	01	2	06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	0	12	0	12	350.000.000	12	400.000.000	12	450.000.000	12	500.000.000
1	***02***	***01***	***2***	***08***		***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Terlaksananya kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***persen***	***100***	***100***	***1.065.648.300***	***100***	***1.312.553.800***	***100***	***1.572.316.130***	***100***	***1.643.785.045***	***100***	***1.715.253.960***	***100***	***1.786.722.875***
1	02	01	2	*08*	0001	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	1.000.000	12	2.500.000	12	2.750.000	12	2.875.000	12	3.000.000	12	3.125.000
1	02	01	2	*08*	0002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	574.195.300	12	523.143.800	12	636.619.830	12	665.557.095	12	694.494.360	12	723.431.625
1	02	01	2	*08*	0003	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	6	6	120.000.000	6	119.800.000,00	6	132.000.000	6	138.000.000	6	144.000.000	6	150.000.000
1	02	01	2	*08*	0004	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	370.453.000	12	667.110.000,00	12	800.946.300	12	837.352.950	12	873.759.600	12	910.166.250
1	***02***	***01***	***2***	***09***		***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan***	***Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Persen***	***100***	***100***	***886.200.472***	***100***	***1.055.969.200***	***100***	***1.716.055.519***	***100***	***1.844.058.042***	***100***	***1.972.060.566***	***100***	***2.125.063.090***

Kode Rekening						Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator (*Outcome/Output*)	Baseline 2024		Target dan Pagu Indikatif Tahun									
								Satuan	2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
										Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)
						Pemerintahan Daerah															
1	02	01	2	*09*	0001	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	10	11	24.800.000	11	24.800.000	11	27.280.000	11	28.520.000	11	29.760.000	11	31.000.000
1	02	01	2	*09*	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	10	11	394.873.700	11	498.574.200	11	647.596.070	11	677.032.255	11	706.468.440	11	735.904.625
1	02	01	2	*09*	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	0	0	10.000.000	2	10.000.000	2	11.000.000	2	11.500.000	2	12.000.000	2	12.500.000
1	02	01	2	*09*	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	40	40	174.710.200	45	212.595.000	45	170.181.220	45	177.916.730	45	185.652.240	45	193.387.750
1	02	01	2	*09*	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	281.816.572	1	310.000.000	1	309.998.229	1	324.089.057	1	338.179.886	1	352.270.715
1	02	01	2	*09*	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasana Gedung Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Unit	1	1	0	1	0	1	250.000.000	1	300.000.000	1	350.000.000	1	400.000.000,00

Kode Rekening						Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator (*Outcome/Output*)	Baseline 2024		Target dan Pagu Indikatif Tahun									
								Satuan	2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
										Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)
						atau Bangunan Lainnya	Lainnya yang Di pelihara/Direhabilitasi												
1	02	01	2	09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Di pelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	0	1	0	1	300.000.000	1	325.000.000	1	350.000.000	1	400.000.000
1	***02***	***01***	***2***	***10***		***Peningkatan Pelayanan BLUD***	***Jumlah puskesmas yang melakukan pelayanan BLUD***	***Unit***	***37***	***37***	***102.786.914.280,00***	***37***	***100.623.169.386***	***37***	***102.635.632.773***	***37***	***104.688.345.429***	***37***	***106.782.112.337***	***37***	***108.917.754.584***
1	02	01	2	*10*	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit	37	37	102.786.914.280,00	37	100.623.169.386	37	102.635.632.773	37	104.688.345.429	37	106.782.112.337	37	108.917.754.584
1	**02**	**02**				**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Angka Kematian Ibu**	Per 100.000 KH	**43,9**	**53,00**	**176.800.580.819**	**53,00**	**218.222.937.686**	**53,00**	**227.824.746.944**	**53,00**	**237.849.035.809**	**53,00**	**248.314.393.384**	**53,00**	**259.240.226.691**
							Angka Kematian Bayi	Per 1.000 KH	**2,48**	**12,62**		**11,63**		**10,97**		**10,46**		**9,96**		**9,46**	
							Jumlah Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Desa/ Kelurahan	**16**	**20**		**30**		**35**		**40**		**45**		**50**	
							Persentase Angka keberhasilan pengobatan TBC (TBC Succes Rate)	Persen	**83**	**84**		**85**		**86**		**87**		**88**		**90**	

Kode Rekening						Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator (*Outcome/Output*)	Baseline 2024		Target dan Pagu Indikatif Tahun											
								Satuan	2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
										Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)
							Cakupan imunisasi bayi lengkap	Persen	92,14	93		94		95		95		95		95	
							Cakupan Penerima pemeriksaaan Kesehatan gratis	Persen	N/A	15		20		25		30		40		50	
							Persentase Puskesmas Rawat Inap	Persen	21,6	32,4		43,2		51,35		56,75		59,45		67,5	
							Persentase pelayanan kesehatan yang diberikan pada kondisi darurat	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
							Persentase Puskesmas dengan fasilitas kesehatan sesuai standar	Persen	10	12		15		20		25		30		35	
1	***02***	***02***	***2***	***01***		***Kegiatan: Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM danUKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota***	***Persentase pemenuhan dan pengelolaan sarana prasarana, alkes, obat, BMHP, Makanan Minuman***	***Persen***	***70***	***70***	***31.317.031.509***	***70***	***51.335.916.970***	***70***	***59.098.661.465***	***70***	***68.495.410.595***	***70***	***77.557.815.028***	***70***	***81.090.806.846***
							Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	***Persen***	***60***	***61***		***62***		***63***		***64***		***65***		***66***	
1	02	02	2	01	0002	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	Unit	6 (Ngadi, Pranggang, Kepung, Ngadiluwih, Sumberjo, Pare, Adan-Adan	3 (Ngadi, Pranggang, Pagu)	12.597.960.000	3 (Grogol, Semen, Ngancar)	22.600.420.000	3 (puncu, Tiron, Wonorejo)	27.760.257.539	3 (Sidorejo, Kepung, Wates)	33.100.295.906	3 (Kandangan, Tanon Kras)	38.690.866.871	3 (Mojo, Gampeng, Keling)	37.435.262.589

Kode Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator (*Outcome/Output*)	Baseline 2024		Target dan Pagu Indikatif Tahun											
			Satuan	2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)
1 02 02 2 01 00 03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang dibangun	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2.000.000.000
1 02 02 2 01 00 06	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Unit	17 (kontruksi 7, IPAL 3, Genset 7)	4 (Konstruksi Silir, Adan-adan, Genset Adan-Adan, Tarokan	2.053.999.468	4 (Pranggang, Ngadi)	9.228.944.090	7	2.218.082.799	4	8.802.025.032	4	4.160.557.372	4	3.662.027.591
1 02 02 2 01 00 07	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Unit	0	0	0	0	0	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000
1 02 02 2 01 00 09	Rehabitasi dan pemeliharaan Puskesmas	Jumlah sarana, prasarana, dan alat kesehatan yang telah dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan oleh puskesmas	Unit	1 (Wates)	4 (pustu langenharjo, Pagung, sidomulyo,	864.427.050	4 (Pustu Tempurejo, Kemiri, Butuh, Branggahan)	1.805.318.262	4	2.780.827.370	4	3.116.928.546	4	3.470.866.677	4	3.861.896.448,00
1 02 02 2 01 00 10	Rehabitasi dan pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnnya	Jumlah Sarana, prasarana, dan alat kesehatan yang telah dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	Unit	0	0	0	1	0	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000
1 02 02 2 01 00 14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan	Unit	12 (2 Mesin TCM, 2 Blosafety	8 (Fotometer)	14.822.161.252	3 (Smoke analyser)	82.236.000	10 (Mesin ULV (Ulrea Light Volume)1	640.000.000	9 (Smoke analyser 5, EKG 4)	240.000.000	9 (Smoke analyser 5, EKG 4)	240.000.000	9 (Smoke analyser 5, EKG 4)	240.000.000

Kode Rekening						Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator (*Outcome/Output*)	Baseline 2024		Target dan Pagu Indikatif Tahun									
								Satuan	2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
										Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)
						Pelayanan Kesehatan	Kesehatan yangDisediakan		Cabinet, 8 Fotometer)					, Smoke analyzer 5, EKG 4)								
1	2	02	2	01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Unit	97	97	231.855.800	97	287.406.600	97	316.149.460	97	330.519.890	97	344.890.320	97	359.260.750
1	02	02	2	01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai,Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin,Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	paket	65	65	529.427.939	65	17.143.960.018	70	24.808.344.297	70	22.318.141.221	70	30.050.633.788	70	32.919.859.468
1	02	02	2	01	0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,Vaksin,Makanan ke Fasilitas Kesehatan	Paket	37	37	217.200.000	37	187.632.000	37	275.000.000	37	287.500.000,00	37	300.000.000	37	312.500.000
1	***02***	***02***	***2***	***02***		***Penyediaan Layanan***	***Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil***	***Persen***	***92,49***	***100***	***144.697.737.450***	***100***	***166.128.551.716***	***100***	***167.922.089.579***	***100***	***168.523.765.864***	***100***	***169.900.855.556***	***100***	***177.267.833.595***

Kode Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator (*Outcome/Output*)	Baseline 2024		Target dan Pagu Indikatif Tahun											
			Satuan	2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)
	Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin*	*Persen*	*93,1*	*100*		*100*		*100*		*100*		*100*		*100*	
		Persentase Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	*Persen*	*98,65*	*100*		*100*		*100*		*100*		*100*		*100*	
		Persentase Pelayanan Kesehatan Balita	*Persen*	*97,92*	*100*		*100*		*100*		*100*		*100*		*100*	
		Persentase Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	*Persen*	*95,8*	*100*		*100*		*100*		*100*		*100*		*100*	
		Persentase Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	*Persen*	*94,6*	*100*		*100*		*100*		*100*		*100*		*100*	
		Persentase Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	*Persen*	*99,31*	*100*		*100*		*100*		*100*		*100*		*100*	
		Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	*Persen*	*93,2*	*100*		*100*		*100*		*100*		*100*		*100*	
		Persentase Hipertensi dalam Pengendalian	*Persen*	*11*	*15*		*20*		*25*		*30*		*35*		*40*	
		Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Militus	*Persen*	*93,6*	*100*		*100*		*100*		*100*		*100*		*100*	
		Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	*Persen*	*100*	*100*		*100*		*100*		*100*		*100*		*100*	

Kode Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator (*Outcome/Output*)	Baseline 2024		Target dan Pagu Indikatif Tahun											
			Satuan	2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)
		Persentase Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberculosis	*Persen*	*100*	*100*		*100*		*100*		*100*		*100*		*100*	
		Persentase ODHIV baru yang ditemukan yang mendapat pengobatan ARV	*Persen*	*100*	*100*		*100*		*100*		*100*		*100*		*100*	
		Persentase layanan kesehatan pada penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana serta layanan kegawatdaruratan	*Persen*	*100*	*100*		*100*		*100*		*100*		*100*		*100*	
		Underweight	*Persen*	*15,9*	*15*		*14*		*13*		*12*		*11*		*10*	
		Wasting	*Persen*	*8,5*	*8*		*7,5*		*7*		*6,5*		*6*		*5,5*	
		Persentase pekerja mendapatkan pelayanan kesehatan kerja	*Persen*	*0*	*10*		*20*		*30*		*40*		*50*		*60*	
		Persentase fasyankes yang memenuhi syarat kesehatan lingkungan	*Persen*	*100*	*100*		*100*		*100*		*100*		*100*		*100*	
		Persentase penyehat tradisional / hatra yang memiliki STPT	*Persen*	*44*	*48*		*49*		*50*		*51*		*52*		*53*	

Kode Rekening						Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator (*Outcome/Output*)	Baseline 2024		Target dan Pagu Indikatif Tahun									
								Satuan	2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
										Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)
							Imunisasi lengkap 14 antigen mencapai target	***Persen***	***N/A***	***74***		***78***		***82***		***86***		***90***		***90***	
							Persentase Pelayanan dan penanganan kasus penyakit menular	***Persen***	***59***	***80***		***90***		***100***		***100***		***100***		***100***	
							Cakupan kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	***Persen***	***77,27***	***80***		***80***		***80***		***80***		***80***		***80***	
							Jumlah Kecamatan yang melaksanakan KKS	***Kec***	***24***	***26***		***26***		***26***		***26***		***26***		***26***	
							Jumlah Desa/kelurahan sehat iklim	***Desa***	***0***	***20***		***50***		***100***		***125***		***150***		***200***	
							Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terakreditasi	***Persen***	***90,17***	***92,86***		***94,64***		***96,43***		***98,21***		***99,11***		***100***	
1	0 2	0 2	2	0 2	00 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	16746	16.750	104.524.600	16.760	165.620.000	16.770	182.182.000	16.780	190.463.000	16.790	198.744.000	16.800	207.025.000
1	0 2	0 2	2	0 2	00 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	16.043	16.750	56.335.750	16.760	126.740.000	16.770	139.414.000	16.780	145.751.000	16.790	152.088.000	16.800	158.425.000
1	0 2	0 2	2	0 2	00 03	Pengelolaan Pelayanan	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan	Orang	15.806	15.825	46.663.500	15.830	97.500.000	15.840	107.250.000	15.850	112.125.000	15.860	117.000.000	15.880	121.875.000

Kode Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator (*Outcome/Output*)	Baseline 2024		Target dan Pagu Indikatif Tahun											
			Satuan	2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)
	Kesehatan Bayi Baru Lahir	Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar														
1 02 02 2 02 0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	94.002	94.025	73.363.500	94.020	149.955.000	94.050	164.957.100	94.060	172.455.150	94.065	179.953.200	94.070	187.451.250
1 02 02 2 02 0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	200.022	200.030	66.568.500	200.040	162.157.760	200.050	178.407.900	200.060	186.517.350	200.070	194.626.800	200.080	202.736.250
1 02 02 2 02 0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	994.350	1.081.201	203.328.400	1.082.231	279.527.400	1.083.261	331.075.140	1.084.291	346.124.010	1.085.321	361.172.880	1.086.351	376.221.750
1 02 02 2 02 0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	223156	253.920	67.209.500	253.920	112.409.540	253.930	115.229.180	253.940	120.466.870	253.950	125.704.560	253.960	130.942.250
1 02 02 2 02 0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	88.078	107661	76.492.000	114237	106.795.380	120813	152.674.500	127389	159.614.250	133965	166.554.000	140541	173.493.750
1 02 02 2 02 0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Militus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	32.096	36336	56.310.500	37361	84.943.500	38386	93.475.250	39411	97.724.125	40436	101.973.000	41461	106.221.875

Kode Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator (*Outcome/Output*)	Baseline 2024		Target dan Pagu Indikatif Tahun											
			Satuan	2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)
1 02 02 2 02 0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang	3211	3531	133.440.200	3581	291.089.680	3631	320.198.670	3681	334.753.155	3731	349.307.640	3781	363.862.125
1 02 02 2 02 0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	18485	18451	310.346.800	15803	310.347.000	13590	341.381.700	12010	356.899.050	10807	372.416.400	9879	387.933.750
1 02 02 2 02 0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang terduga menderita HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	Orang	31910	31570	128.525.000	31570	173.647.800	31570	191.012.580	31570	199.694.970	31570	208.377.360	31570	217.059.750
1 02 02 2 02 0013	Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi KLB	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Dokumen	12	1	51.852.000	1	91.000.000	1	82.500.000	1	86.250.000	1	90.000.000	1	93.750.000
1 02 02 2 02 0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau berpotensi bencana sesuai standar	Dokumen	12	12	49.525.000	12	62.670.000	12	68.937.000	12	72.070.500	12	75.204.000	12	78.337.500

Kode Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator (*Outcome/Output*)	Baseline 2024		Target dan Pagu Indikatif Tahun											
			Satuan	2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)
1 02 02 2 02 0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	1	1	472.038.000	1	491.343.000	1	540.477.300	1	565.044.450	1	589.611.600	1	614.178.750
1 02 02 2 02 0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olah Raga	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	Dokumen	1	1	138.330.000	1	181.562.000	1	199.718.200	1	208.796.300	1	217.874.400	1	226.952.500
1 02 02 2 02 0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	1	1	126.245.100	1	148.472.056	1	162.223.270	1	169.597.055	1	176.970.840	1	184.344.625
1 02 02 2 02 0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	12	1	621.895.200	1	622.091.000	1	345.943.400	1	361.668.100	1	377.392.800	1	393.117.500
1 02 02 2 02 0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Dokumen	1	1	71.145.400	1	103.282.800	1	113.611.080	1	118.775.220	1	123.939.360,00	1	129.103.500
1 02 02 2 02 0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	12	12	226.441.000	12	239.066.500	12	274.201.950	12	286.665.675	12	299.129.400	12	311.593.125
1 02 02 2 02 0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah dokumen hasil pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	Dokumen	8	8	406.548.200	8	375.974.000	8	413.571.070	8	432.369.755	8	451.168.440	8	469.967.125

Kode Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator (*Outcome/Output*)	Baseline 2024		Target dan Pagu Indikatif Tahun											
			Satuan	2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)
1 02 02 2 02 0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	1	1	140.300.855.800	1	160.446.289.500	1	160.446.289.500	1	160.446.289.500	1	161.193.298.560	1	167.909.686.000
1 02 02 2 02 0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah paket spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Paket	2	2	74.743.500	12	85.757.500	12	476.357.750	12	498.010.375	12	519.663.000	12	541.315.625
1 02 02 2 02 0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Dokumen	1	1	38.200.000	1	50.000.000	1	55.000.000	1	57.500.000	1	60.000.000	1	62.500.000
1 02 02 2 02 0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
1 02 02 2 02 0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dokumen	1	1	123.316.000	1	300.491.300	1	135.647.600	1	141.813.400	1	147.979.200	1	154.145.000
1 02 02 2 02 0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi di kabupaten/kota	Unit	101	104	0	106	0	108	1.193.972.739,00	110	1.488.975.054,00	111	1.817.381.716,00	112	2.166.298.345,00
1 02 02 2 02 0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak diharapkan (Kejadian Ikutan pasca Imunisasi dan pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak diharapkan (Kejadian Ikutan pasca Imunisasi dan pemberian Obat Massal)	Laporan	12	12	92.880.000	12	100.380.000	0	0	0	0	-	0	-	0

Kode Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator (*Outcome/Output*)	Baseline 2024		Target dan Pagu Indikatif Tahun											
			Satuan	2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)
1 02 02 2 02 0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Dokumen	12	12	37.247.000	12	75.000.000	12	82.500.000	12	86.250.000	12	90.000.000	12	93.750.000
1 02 02 2 02 0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Unit	1	1	370.193.000	1	464.760.000	1	511.236.000	1	534.474.000	1	557.712.000	1	580.950.000
1 02 02 2 02 0040	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkolusis	Jumlah orang dengan tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standart	Orang	2815	3.796	0	3.252	0	2.796	100.000.000	2.471	110.000.000	2.224	115.000.000	2.033	120.000.000
1 02 02 2 02 0041	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah Orang dengan HIV(ODHIV) yang Mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standart	Orang	903	2956	0	3377	50.000.000	3545	55.000.000	3722	60.000.000	3908	65.000.000	4103	70.000.000
1 02 02 2 02 0042	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Orang	8	10	16.532.000	10	23.037.000	10	25.340.700	10	26.492.550	10	27.644.400	10	28.796.250
1 02 02 2 02 0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Dokumen	1	1	156.642.000	1	156.642.000	1	172.304.000	1	180.136.000	1	187.968.000	1	195.800.000

Kode Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator (*Outcome/Output*)	Baseline 2024		Target dan Pagu Indikatif Tahun											
			Satuan	2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)
1 02 02 2 02 0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan layanan imunisasi	Dokumen	N/A	12	0	12	0	12	100.000.000	12	110.000.000	12	120.000.000	12	130.000.000
1 02 02 2 02 0050	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah Dokumen Pengelolaan Pelayanan Kesehatan haji	Dokumen	1	1	0	1	0	1	50.000.000	1	60.000.000	1	70.000.000	1	80.000.000
1 02 02 2 03	***Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi***	***Tingkat ketersediaan sistem informasi kesehatan***	***Unit***	***37***	***37***	***296.920.760***	***37***	***341.200.000***	***37***	***345.000.000***	***37***	***350.000.000***	***37***	***355.000.000***	***37***	***360.000.000***
1 02 02 2 03 0002	Pengelolaan sistem informasi kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan sistem informasi kesehatan	Dokumen	1	1	296.920.760	1	341.200.000	1	345.000.000	1	350.000.000	1	355.000.000	1	360.000.000
1 02 02 2 04	***Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***	***Persentase FKTL (Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut) dan Fasyankes Lainnya yang memiliki izin operasional***	***Persen***	***100***	***100***	***488.891.100***	***100***	***417.269.000***	***100***	***458.995.900***	***100***	***479.859.350***	***100***	***500.722.800***	***100***	***521.586.250***
		Jumlah FKTL (Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjut) dan Fasyankes Lainnya yang terakreditasi minimal utama	***Unit***	***17***	***17***		***18***		***18***		***18***		***18***		***18***	
1 02 02 2 04 0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	Unit	135	140	452.019.600	145	357.400.000	150	393.140.000	155	411.010.000	160	428.880.000	165	446.750.000

Kode Rekening						Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator (*Outcome/Output*)	Baseline 2024		Target dan Pagu Indikatif Tahun									
								Satuan	2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
										Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)
1	02	02	2	04	0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Dokumen	2 RS 1 UTD	1 RS 1 KU	36.871.500	1 RS 1 KU	59.869.000	2 RS	65.855.900	4 RS 3 KU 1 Lab	68.849.350	2 RS 1 UTD	71.842.800	1 RS 1 KU	74.836.250
1	**02**	**03**				**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Rasio Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan terhadap Populasi**	**Rasio**	**1,91**	**1,92**	**1.547.611.000**	**1,93**	**2.040.981.200**	**1,94**	**2.081.850.940**	**1,95**	**2.122.256.016**	**1,96**	**2.160.092.791**	**1,97**	**2.198.208.868**
1	***02***	***03***	***2***	***01***		***Pemberian Ijin Praktek Tenaga Kesehatan di Kabupaten/Kota***	***Persentase ijin praktik Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis yang diterbitkan setelah memenuhi persyaratan***	***Persen***	***100***	***100***	***33.174.800***	***100***	***221.859.540***	***100***	***232.424.280***	***100***	***242.989.020***	***100***	***253.553.760***	***100***	***264.118.500***
1	02	03	2	01	0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah dokumen hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Dokumen	4	4	33.174.800	4	221.859.540	4	232.424.280	4	242.989.020	4	253.553.760	4	264.118.500
1	***02***	***03***	***2***	***02***		***Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kab/Kota***	***Persentase RS Pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar***	***Persen***	***100***	***100***	***140.416.400***	***100***	***10.289.580***	***100***	***10.779.560***	***100***	***11.269.540***	***100***	***11.759.520,00***	***100***	***12.249.500***
							Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar	***Persen***	**98**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**	

Kode Rekening						Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator (*Outcome/Output*)	Baseline 2024		Target dan Pagu Indikatif Tahun											
								Satuan	2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
										Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)
1	02	03	2	02	0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dokumen	1	1	9.799.600	1	10.289.580	1	10.779.560	1	11.269.540	1	11.759.520,00	1	12.249.500
1	02	3	2	02	0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah dokumen hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dokumen	1	1	130.616.800	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
1	***02***	***3***	***2***	***03***		***Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***	***Jumlah dokumen kegiatan pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan***	***Dokumen***	***2***	***2***	***1.374.019.800***	***2***	***1.808.832.080***	***2***	***1.838.647.100***	***2***	***1.867.997.456***	***2***	***1.894.779.511***	***2***	***1.921.840.868***
1	02	3	2	03	0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persen	95	96	1.374.019.800	97	1.808.832.080	98	1.838.647.100	99	1.867.997.456	100	1.894.779.511	100	1.921.840.868
1	**02**	**04**				**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman**	**Persen**	**60**	**61**	**606.520.060**	**62**	**723.157.000**	**63**	**737.637.897**	**64**	**751.954.155**	**65**	**765.360.417**	**66**	**778.865.640**

Kode Rekening						Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator (*Outcome/Output*)	Baseline 2024		Target dan Pagu Indikatif Tahun									
								Satuan	2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
										Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)
1	***02***	***04***	***2***	***01***		***Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT***	***Persentase Rekomendasi/Data Teknis/Sertifikat Standar/Berita Acara Pemeriksaan Apotek, Toko Obat, Toko Alkes dan Optikal, UMOT yang Memenuhi Standar***	*Persen*	***60***	***61***	***195.203.000***	***62***	***52.500.000***	***63***	***55.000.000***	***64***	***57.500.000***	***65***	***60.000.000***	***66***	***62.500.000***
1	02	04	2	01	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Dokumen	25	32	195.203.000	34	52.500.000	35	55.000.000	38	57.500.000	39	60.000.000	40	62.500.000
1	***02***	***04***	***2***	***03***		***Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P- IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga***	***Persentase pemenuhan komitmen dan atau penerbitan izin (Nomor P- IRT) untuk Produksi Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga***	*Persen*	***30***	***32***	***0***	***35***	***57.750.000***	***38***	***60.500.000***	***40***	***63.250.000***	***42***	***66.000.000***	***45***	***68.750.000***

Kode Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator (*Outcome/Output*)	Baseline 2024		Target dan Pagu Indikatif Tahun											
			Satuan	2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)
1 02 04 2 03 00 01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Dokumen	60	65	0	66	57.750.000	67	60.500.000	68	63.250.000	69	66.000.000	70	68.750.000
1 02 04 2 04	***Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot air Minum (DAM)***	***Persentase TPP dengan tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat***	*Persen*	***0***	***20***	***45.980.000***	***25***	***79.584.214***	***30***	***50.000.000***	***35***	***50.000.000***	***40***	***50.000.000***	***50***	***50.000.000***
1 02 04 2 04 00 01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi	Jumlah dokumen hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi	Dokumen	1	1	45.980.000	1	79.584.214	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000

Kode Rekening						Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator (*Outcome/Output*)	Baseline 2024		Target dan Pagu Indikatif Tahun											
								Satuan	2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
										Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)
						Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/ Restoran dan Depo Air Minum (DAM)	Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lainJasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)														
1	***02***	***04***	***2***	***05***		***Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan sentra Makanan Jajanan***	***Puskesmas dengan persentase pangan olahan siap saji memenuhi syarat (POSS)***	***Persen***	***0***	***25***	***19.550.000***	***30***	***79.584.213***	***35***	***50.000.000***	***40***	***50.000.000***	***45***	***50.000.000***	***50***	***50.000.000***
1	02	04	2	05	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah dokumen hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Dokumen	1	1	19.550.000	1	79.584.213	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000
1	***02***	***04***	***2***	***06***		***Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga***	***Persentase produsen industri rumah tangga dan produk makanan minuman yang memenuhi syarat***	***Persen***	***50***	***52***	***345.787.060***	***54***	***453.738.573***	***56***	***522.137.897***	***58***	***531.204.155***	***60***	***539.360.417***	***62***	***547.615.640***
1	02	04	2	06	0001	Pemeriksaan Post Market pada	Jumlah Produk dan Sarana Produksi	Unit	60	62	345.787.060	64	453.738.573	66	522.137.897	68	531.204.155	72	539.360.417	75	547.615.640

Kode Rekening						Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator (*Outcome/Output*)	Baseline 2024		Target dan Pagu Indikatif Tahun									
								Satuan	2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
										Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)
						Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan														
1	**0 2**	**0 5**				**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Puskesmas yang mengembangkan UKBM sesuai standar**	**Persen**	**85**	**86**	**1.000.219.200**	**88**	**926.759.852,00**	**90**	**945.317.805,00**	**92**	**963.664.766,00**	**94**	**980.845.524,00**	**96**	**998.153.106,00**
1	***0 2***	***0 5***	***2***	***0 1***		***Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabuapen/kota***	***Persentase kegiatan Kampanye Germas di tingkat Kabupaten (Pembudayaan Germas)***	***Persen***	***50***	***60***	***793.625.800***	***70***	***574.230.010***	***80***	***340.386.115,00***	***90***	***331.236.181,00***	***100***	***320.920.044,00***	***100***	***313.980.731,00***
1	0 2	0 5	2	0 1	00 01	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Kabupaten/ kota	Jumlah dokumen hasil kegiatan kemitraan bersama dengan LS/Ormas/ Organisasi Profesi/Dunia Usaha dalam rangka peningkatan Promosi Program Kesehatan Prioritas dan Kesehatan Komunitas	Dokumen	2	2	793.625.800	2	574.230.010	2	340.386.115,00	2	331.236.181,00	2	320.920.044,00	2	313.980.731,00

Kode Rekening						Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator (*Outcome/Output*)	Baseline 2024		Target dan Pagu Indikatif Tahun									
								Satuan	2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
										Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)
1	***02***	***05***	***2***	***02***		***Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***	***Jumlah tema KIE program kesehatan prioritas yang dipromosikan melalui berbagai saluran media***	***Laporan***	***6***	***6***	***38.697.400***	***6***	***68.250.000***	***6***	***71.500.000***	***6***	***74.750.000***	***6***	***78.000.000***	***6***	***78.000.000***
1	02	05	2	02	0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Dokumen	NA	1	38.697.400	1	68.250.000	1	71.500.000	1	74.750.000	1	78.000.000	1	78.000.000
1	***02***	***05***	***2***	***03***		***Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Kabupaten***	***Persentase Posyandu di Kabupaten dengan minimal 75% Posyandu siklus hidup yang aktif***	***Persen***	***55***	***60***	***167.896.000***	***65***	***284.279.842***	***70***	***533.431.690***	***80***	***557.678.585***	***85***	***581.925.480***	***90***	***606.172.375***
							Persentase kader posyandu strata madya	***Persen***	***5***	***10***		***20***		***30***		***40***		***50***		***60***	
							Jumlah Puskesmas yang mempunyai Poskestren dan melaksanakan Pembinaan Poskestren Madya, Purnama dan Mandiri sesuai standar	***Unit***	***26***	***27***		***28***		***28***		***29***		***31***		***31***	
1	02	05	2	03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	Dokumen	1	1	167.896.000	1	284.279.842	1	533.431.690	1	557.678.585	1	581.925.480	1	606.172.375

Kode Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator (*Outcome/Output*)	Baseline 2024		Target dan Pagu Indikatif Tahun											
			Satuan	2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)
	Masyarakat (UKBM)															

Tabel 4.4 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*
1.02.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Kesehatan				
1.	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
			1.02.02.2.01.0002 - Pembangunan Puskesmas	
			1.02.02.2.01.0006 - Pengembangan Puskesmas	
			1.02.02.2.01.0009 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	
			1.02.02.2.01.0014 - Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	
			1.02.02.2.01.0020 - Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	
			1.02.02.2.01.0023 - Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	
			1.02.02.2.01.0026 - Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	
			1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			1.02.02.2.02.0026 - Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	
			1.02.02.2.02.0034 - Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	
			1.02.02.2.02.0035 - Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	
			1.02.02.2.03 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	
			1.02.02.2.03.0002 - Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	
			1.02.02.2.04 - Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			1.02.02.2.04.0003 - Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	
			1.02.02.2.04.0004 - Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
2.	1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	1.02.03.2.02 - Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	
			1.02.03.2.02.0001 - Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	
			1.02.03.2.03 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			1.02.03.2.03.0001 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
3.	1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	1.02.04.2.01 - Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	
			1.02.04.2.01.0001 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	
			1.02.04.2.03 - Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	
			1.02.04.2.03.0001 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	
			1.02.04.2.04 - Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	
			1.02.04.2.04.0001 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	
			1.02.04.2.05 - Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	
			1.02.04.2.05.0001 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	
			1.02.04.2.06 - Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	
			1.02.04.2.06.0001 - Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
4.	1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	1.02.05.2.01 - Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			1.02.05.2.01.0001 - Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	
			1.02.05.2.02 - Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			1.02.05.2.02.0001 - Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	
			1.02.05.2.03 - Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			1.02.05.2.03.0001 - Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1	Usia Harapan Hidup	Tahun	**75,18**	**75,44**	**75,69**	**75,95**	**76,21**	**76,47**	
2	Indeks Kepuasaan Masyarakat terhadap Layanan Kesehatan	Persen	**82**	**83**	**84**	**85**	**86**	**87**	
3	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita	Persen	**16,23**	**15,65**	**15,07**	**14,49**	**12,47**	**11,97**	
4	Cakupan Kepesertaan Jaminan Nasional (JKN)	Persen	**98**	**98**	**98**	**98**	**98**	**98**	

Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	Persen	98	98	98	98	98	98	

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri Tahun 2025-2029 disusun sebagai wujud komitmen perangkat daerah dalam menjaga kesinambungan dan konsistensi perencanaan pembangunan sektor kesehatan secara berkelanjutan. Renstra ini merupakan instrumen strategis yang menjembatani arah kebijakan pembangunan kesehatan jangka panjang daerah dengan perencanaan jangka menengah serta tahunan, sehingga tercipta kesinambungan antara visi, misi, tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan kesehatan di Kabupaten Kediri.

Penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri Tahun 2025 – 2029 dilakukan dengan memperhatikan keselarasan dan keterpaduan terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah, khususnya RPJPD Kabupaten Kediri, RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2025 – 2029, serta kebijakan nasional dan provinsi di bidang kesehatan. Dengan demikian Renstra ini berfungsi sebagai pedoman bagi seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara terarah, terukur, dan berkesinambungan.

Melalui Renstra ini, diharapkan tercipta kesinambungan kebijakan dan program pembangunan kesehatan antar periode perencanaan, sekaligus menjamin keberlanjutan capaian kinerja sektor kesehatan. Hal tersebut menjadi landasan penting dalam meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas penyelenggaraan urusan kesehatan, serta memastikan bahwa pembangunan kesehatan di Kabupaten Kediri mampu menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan.

Akhir kata, dengan tersusunnya Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri Tahun 2025-2029 ini semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak dan mampu menjawab Visi Kabupaten Kediri, yaitu "Kabupaten Kediri Berbudaya, Religius, Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan ".

Kediri, 2025
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Kediri

AHMAD KHOTIB

BUPATI KEDIRI,

HANIDHITO HIMAWAN PRAMANA

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

INSPEKTORAT

Jalan Soekarno Hatta Nomor 1, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri 64182
Telepon (0354) 691052, Pos-el: inspektorat@kedirikab.go.id
Laman: www.inspektorat.kedirikab.go.id

Kediri, 17 September 2025

Nomor : 700.1.2.1/43/418.11/2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu)
Hal : Laporan Hasil Reviu Rancangan Akhir Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029.

Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kediri
di Kediri

Menindaklanjuti Surat Saudara Nomor: 000.7.6.4/190/418.54/2025 tanggal 11 Agustus 2025 perihal Permohonan Reviu Renstra Perangkat Daerah Tahun 20252029, Inspektorat telah melaksanakan reviu berdasarkan Surat Tugas Nomor: 700.1.2.1/407/418.11/2025 tanggal 25 Agustus 2025. Adapun hasil reviu dan saran, kami uraikan dalam Laporan Hasil Reviu sebagaimana terlampir.

Demikian atas perhatian dan kerja samanya disampaikan terima kasih.

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Plt. Inspektur Kabupaten Kediri,

Wirawan, S.E., M.M., Ak, CA.
Pembina Utama Muda
NIP. 197105301997031005

Tembusan:
1. Bupati Kediri;
2. Gubernur Jawa Timur Cq. Inspektur Provinsi Jawa Timur.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

INSPEKTORAT

Jalan Soekarno Hatta Nomor 1, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri 64182
Telepon (0354) 691052, Pos-el: inspektorat@kedirikab.go.id
Laman: www.inspektorat.kedirikab.go.id

LAPORAN HASIL REVIU
RANCANGAN AKHIR
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2025 – 2029

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

INSPEKTORAT

Jalan Soekarno Hatta Nomor 1, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri 64182
Telepon (0354) 691052, Pos-el: inspektorat@kedirikab.go.id
Laman: www.inspektorat.kedirikab.go.id

LAPORAN HASIL REVIU RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 2029 PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, INSPEKTORAT, BADAN PENDAPATAN DAERAH, SEKRETARIAT DAERAH, DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN, BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA, SEKRETARIAT DPRD, DINAS KESEHATAN, BADAN KEUANAGN DAN ASET DAERAH, DINAS PENDIDIKAN, DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, SERTA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN KEDIRI

Nomor : 700.1.2.1/43/418.11/2025
Tanggal :17 September 2025
Lampiran : 1 (satu) lampiran

I. RINGKASAN EKSEKUTIF

1. Inspektorat Kabupaten Kediri sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) telah melakukan reviu atas Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2025 – 2029 berupa pengujian terbatas terhadap penyajian bab-bab dalam dokumen Rancangan Akhir Renstra Tahun 2025 – 2029 mulai tahap penyusunan rancangan dokumen sampai dengan siap ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Reviu ditujukan untuk membantu terlaksananya penyusunan dan penyajian dokumen Renstra serta memberikan keyakinan terbatas mengenai kepatuhan dan keabsahan informasi telah sesuai dengan kaidah-kaidah perencanaan kepada Kepala Daerah sehingga dapat menghasilkan dokumen Renstra yang berkualitas.

Dalam pelaksanaan reviu, kami telah melakukan serangkaian aktivitas untuk menguji proses penyusunan penyajian bab-bab dalam dokumen Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 dengan dokumen pendukung lainnya, permintaan keterangan mengenai proses

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

penyusunan untuk mengetahui hubungan dan hal-hal yang tidak terdapat dalam dokumen penyajian.

2. Berdasarkan hasil reviu yang kami lakukan, kami menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:
    a. Subkegiatan, Kegiatan, dan Program **telah selarah** dan **mendukung** Tujuan dan Sasaran perangkat daerah. Meskipun demikian terdapat beberapa hal perlu diperhatikan, yaitu:
        1) Tujuan perangkat daerah bersifat lebih spesifik dari sasaran yang ditetapkan (Bappeda, Disparbud);
        2) Tujuan perangkat daerah sama dengan *output* salah satu program yang ditetapkan (Bappeda);
        3) Sasaran belum dapat mendefinisikan/relevan dengan tujuan yang ditetapkan secara keseluruhan (BKAD);
        4) Sasaran perangkat daerah sama dengan *outcome* salah satu program yang ditetapkan (DPUPR);
        5) Sasaran yang terdapat dalam aplikasi E-REVIU SIPD berbeda dengan dokumen rancangan akhir Renstra (Bappeda);
        6) Subkegiatan yang ditetapkan selaras dan mampu mendukung kegiatan dan program, namun beberapa Subkegiatan yang ditetapkan belum mampu memberikan dukungan secara optimal untuk mencapai *outcome* program (bersifat persial) (DPKP).
    b. Indikator kinerja **telah selaras** dengan bidang urusan perangkat daerah dan mendukung pencapaian tujuan dan sasaran. Meskipun demikian terdapat beberapa hal perlu diperhatikan, yaitu:
        1) Penetapan IKD perangkat daerah belum mengacu kepada IKD dan/atau Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2025 – 2029 (Bappeda, Inspektorat, Bapenda, Sekretariat Daerah, Disparbud, BKPSDM, Dinkes, Sekretariat DPRD, Disdik, BKAD, DPUPR dan DPKP);
        2) Indikator sasaran yang terdapat pada aplikasi E-REVIU SIPD berbeda dengan indikator sasaran yang tercantum dalam rancangan akhir Renstra 2025 – 2029 (Bappeda);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3) IKU yang terdapat pada aplikasi berbeda dengan IKU pada dokumen Rancangan Akhir Renstra (Bapenda, Sekretariat Daerah);
4) Indikator kinerja yang kurang SMART (*specific, measureable, achieveable, relevant,* dan *time bond*) (DPKP);
5) Tidak dapat dilakukan reviu karena pada aplikasi tidak terdapat data yang terkoneksi (Disparbud).

c. Program perangkat daerah yang tetapkan dan/atau akan dilaksanakan pada Renstra 2025 – 2029 **telah mengakomodasi** program prioritas pada RPJMD Tahun 2025 – 2029. Meskipun demikian terdapat beberapa hal perlu diperhatikan, yaitu:
1) Program prioritas yang ditetapkan dalam aplikasi SIPD berbeda dengan program prioritas yang tercantum dalam Dokumen RPJMD Tahun 2025 – 2029 (Inspektorat, Dinkes, Disdik, DPUPR, dan DPKP);
2) Tidak dapat dilakukan reviu karena pada aplikasi tidak terdapat data yang terkoneksi (Bappeda, Bapenda, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, dan BKAD).

d. Program yang ditetapkan dan/atau akan dilaksanakan pada Renstra Tahun 2025 – 2029 **telah selaras** dan **mengakomodasi** program yang ditetapkan dalam Bab IV RPJMD Tahun 2025 – 2029.

e. Penetapan target IKU pada rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029 **belum seluruhnya sesuai** dan memperhatikan capaian hasil pengendalian dan evaluasi periode sebelumnya yang diambil pada tahun terakhir.

f. Penetapan target IKD pada rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029 **belum seluruhnya sesuai** dan memperhatikan capaian hasil pengendalian dan evaluasi periode sebelumnya yang diambil pada tahun terakhir.

g. Pengujian terhadap keselarasan penetapan target Subkegiatan dengan Data Statistik Sektoral Daerah (SDDS) **tidak dapat dilakukan** pada seluruh perangkat daerah sampling dikarenakan pada aplikasi tidak terdapat data yang terkoneksi.

II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pembangunan Nasional;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kediri sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2024;
9. Surat Tugas Inspektur Kabupaten Kediri Nomor: 700.1.2.1/407/418.11/2025 tanggal 25 Agustus 2025 untuk melaksanakan Reviu Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025 2029 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Badan Pendapatan Daerah, Sekretariat Daerah, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Sumber Daya Manusia, Sekretariat DPRD, Dinas Kesehatan, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kediri.

III. TUJUAN REVIU

Reviu Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2025 – 2029 bertujuan untuk membantu terlaksananya penyusunan dan penyajian dokumen Renstra serta memberikan keyakinan terbatas mengenai kepatuhan dan keabsahan informasi telah sesuai dengan kaidah-kaidah perencanaan sehingga dapat menghasilkan dokumen Renstra yang berkualitas.

IV. RUANG LINGKUP REVIU

Ruang lingkup reviu Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Kabupaten Kediri Tahun 2025 – 2029 dilakukan dengan pengujian atas:

1. Keselarasan Program, Kegiatan dan Subkegiatan dengan Tujuan dan Sasaran pada Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah;
2. Keselarasan Indikator Kinerja Perangkat Daerah dengan Bidang Urusan pada Perangkat Daerah;
3. Konsistensi dan Keterhubungan Program Prioritas pada RPJMD dengan Program pada Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah;
4. Konsistensi dan Keterhubungan Program Perangkat Daerah pada RPJMD dengan Program pada Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah;
5. Keselarasan Penetapan Target IKU dengan Pengendalian dan Evaluasi Hasil Capaian Periode Sebelumnya;
6. Keselarasan Penetapan Target IKD dengan Pengendalian dan Evaluasi Hasil Capaian Periode Sebelumnya;
7. Keselarasan Penetapan Target Subkegiatan dengan Data Statistik Sektoral Daerah.

V. METODOLOGI REVIU

Reviu dilaksanakan melalui aplikasi E-REVIU Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) melalui tautan https://sipd-ri.kemendagri.go.id/ereviu/login yang didukung dengan permintaan keterangan dan telaah dokumen. Data

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

yang disajikan dalam aplikasi E-REVIU SIPD terbatas pada data yang diinput sebelum ditetapkannya Surat Perintah Tugas (SPT) melalui aplikasi. Reviu dilakukan terhadap data yang terdapat pada aplikasi E-REVIU SIPD. Pengujian terhadap kesesuaian program perangkat daerah dilakukan secara sampling pada 12 (dua belas) perangkat daerah sebagaimana tersebut dalam SPT. Pelaksanaan reviu berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029.

VI. GAMBARAN UMUM

Setiap perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Kediri telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Rancangan awal Renstra tersebut kemudian disesuaikan dan disempurnakan menjadi rancangan akhir yang setelah direviu dan dibahas bersama DPRD akan ditetapkan sebagai Renstra perangkat daerah Tahun 2025 – 2029. Penyusunan rancangan akhir Renstra Tahun 2025 – 2029 mengacu kepada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029.

Reviu rancangan akhir Renstra Tahun 2025 – 2029 dilaksanakan pada:

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)

   Bappeda merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang daerah bidang perencanaan pembangunan daerah. Bappeda dipimpin oleh Kepala Badan yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan pembangunan daerah.

   Tujuan dan Sasaran Bappeda sebagaimana yang ditetapkan dalam rancangan akhir Rencana Strategis Tahun 2025 – 2026 adalah sebagai berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

- Tujuan Bappeda meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dengan indikator kinerja Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah.
- Sasaran Bappeda Meningkatnya akuntabilitas dan profesionalitas perencanaan pembangunan daerah dengan indikator kinerja Persentase capaian target indikator sasaran pada RPJMD.

2. Inspektorat

   Inspektorat merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang pengawasan dengan tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah. Fungsi yang dijalankan oleh inspektorat antara lain: merumuskan kebijakan teknis pengawasan, melaksanakan pengawasan internal dan pengawasan untuk tujuan tertentu, penyusunan laporan pengawasan, koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi, reformasi birokrasi, serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

   Tujuan dan Sasaran Inspektorat sebagaimana yang ditetapkan dalam rancangan akhir Rencana Strategis Tahun 2025 – 2026 adalah sebagai berikut:

   - Tujuan Inspektorat meningkatkan kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan indikator maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
   - Sasaran Inspektorat meningkatnya efektivitas pengawasan dan pembinaan internal dengan indikator: 1) Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK tahun anggaran N-1; 2) Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan internal tahun N-1; 3) Kapabilitas APIP; dan 4) Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD).

3. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda)

   Bapenda merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang bidang keuangan yang dipimpin oleh Kepala Badan dan bertugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan.

   Tujuan dan Sasaran Bapenda sebagaimana yang ditetapkan dalam rancangan akhir Rencana Strategis Tahun 2025 – 2026 adalah sebagai berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

- Tujuan Bapenda Mendorong kemandirian fiskal daerah dengan indikator kinerja berupa Indeks Kemandirian Fiskal Daerah.
- Sasaran Bapenda Optimalisasi Penerimaan PAD dengan inidkator kinerja berupa: 1) Rasio efektivitas PAD dan 2) Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan.

4. Sekretariat Daerah

   Susunan organisasi sekretariat daerah terdiri atas Sekretaris Daerah yang membawahi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, serta Asisten Administrasi Umum. Masing-masing asisten membawahi beberapa bagian yang secara keseluruhan adalah 1) Bagian Tata Pemerintahan; 2) Bagian Kesejahteraan Rakyat; 3) Bagian Hukum; 4) Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam; 5) Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan; 6) Bagian Umum; 7) Bagian Organisasi; 8) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan; dan 9) Bagian Perencanaan dan Keuangan. Tujuan Sekretariat Daerah sebagaimana yang ditetapkan dalam rancangan akhir Rencana Strategis Tahun 2025 – 2026 adalah Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien dengan indikator kinerja berupa Indeks Reformasi Birokrasi dan Indeks Akses Keuangan Daerah.

5. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud)

   Disparbud merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang pariwisata dan urusan pemerintahan daerah di bidang kebudayaan yang dipimpin oleh kepala dinas. Tugas Disparbud tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pariwisata dan kebudayaan.

   Tujuan dan Sasaran Disparbud sebagaimana yang ditetapkan dalam rancangan akhir Rencana Strategis Tahun 2025 – 2026 adalah sebagai berikut:

   - Tujuan Disparbud meningkatnya kunjungan wisatawan melalui peningkatan daya tarik destinasi wisata dengan indikator kinerja tingkat pertumbuhan wisatawan.
   - Sasaran Disparbud meningkatnya pendapatan sektor pariwisata dengan melestarikan budaya daerah yang diukur dengan indikator

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

pertumbuhan pendapatan sektor kepariwisataan dan persentase cakupan *event* pariwisata dan budaya yang diikuti.

6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)

   Tugas BKPSDM Kabupaten Kediri berdasarkan Peraturan Bupati Kediri Nomor 64 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kediri adalah secara teknis membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dan/atau Pengembangan Kompetensi Aparatur.

   Tujuan dan Sasaran BKPPSDM sebagaimana yang ditetapkan dalam rancangan akhir Rencana Strategis Tahun 2025 – 2026 adalah sebagai berikut:

   - Tujuan BKPSDM meningkatkan profesionalitas ASN dalam rangka mendukung Pelayanan Publik dengan indikator kinerja Indeks Pelayanan Publik
   - Sasaran BKPSDM Meningkatnya kompetensi, kualifikasi, kinerja dan disiplin ASN dengan indikator berupa Indeks Profesionalitas ASN serta Meningkatnya pelayanan kepegawaian dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat.

7. Sekretariat DPRD

   Sekretariat DPRD sebagai unsur perangkat daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan fungsi koordinasi, mengintegrasikan dan menyelaraskan seluruh penyelenggaraan tugas pimpinan dan anggota DPRD. Sekretariat DPRD, dalam melaksanakan tugasnya dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati Kediri melalui Sekretaris Daerah. Sekretariat DPRD Kabupaten Kediri mempunyai tugas penyelenggaraan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tujuan dan Sasaran Sekretariat DPRD sebagaimana yang ditetapkan dalam rancangan akhir Rencana Strategis Tahun 2025 – 2026 adalah sebagai berikut:

- Tujuan DPRD Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dengan indikator Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD.
- Sasaran DPRD Terlaksananya fasilitasi Sekretariat DPRD terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dengan indikator berupa Terlaksananya fasilitasi Sekretariat DPRD terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD (%).

8. Dinas Kesehatan

   Dinkes merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di Bidang Kesehatan yang dipimpin oleh kepala dinas. Dinkes mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang kesehatan.

   Tujuan dan Sasaran Dinkes sebagaimana yang ditetapkan dalam rancangan akhir Rencana Strategis Tahun 2025 – 2026 adalah sebagai berikut:

   - Tujuan Dinkes Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat dengan indikator Usia Harapan Hidup (UHH).
   - Sasaran Dinkes Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Yang Bermutu dan Terjangkau dengan indikator 1) Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Layanan Kesehatan; 2) Prevalensi *Stunting* (pendek dan sangat pendek) pada Balita; dan Cakupan Kepesertaan Jaminan Nasional (JKN).

9. Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD)

   BKAD merupakan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. BKAD bertugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan.

   Tujuan dan Sasaran BKAD sebagaimana yang ditetapkan dalam rancangan akhir Rencana Strategis Tahun 2025 – 2026 adalah sebagai berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

- Tujuan BKAD Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel dengan indikator Opini BPK atas Laporan Keuangan.
- Sasaran BPKAD Meningkatnya Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) dengan indikator Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD).

10.Dinas Pendidikan

Disdik merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang Pendidikan dan urusan pemerintahan daerah di bidang Kepemudaan dan Olahraga yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Disdik bertugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.

Tujuan dan Sasaran Disdik sebagaimana yang ditetapkan dalam rancangan akhir Rencana Strategis Tahun 2025 – 2026 adalah sebagai berikut:

- Tujuan Disdik Terwujudnya kualitas layanan pendidikan yang unggul dan merata dan meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan dan prestasi olahraga guna peningkatan daya tarik wisata dengan indikator kinerja 1) Harapan Lama Sekolah; 2) Rata-rata Lama Sekolah; dan 3) Indeks daya saing kepemudaan keolahragaan.
- Sasaran 1 Disdik Meningkatnya layanan pendidikan yang inklusif, terdepan, menyenangkan, dan bersinergi dengan indikator Indeks SPM bidang pendidikan.
- Sasaran 2 Disdik Meningkatnya daya saing kepemudaan dengan indikator 1) Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri; dan 2) Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan organisasia kemasyarakatan.
- Sasaran 3 Disdik Meningkatnya daya saing keolahragaan dengan indikator Peningkatan prestasi olahraga.

11.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR)

DPUPR merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang dipimpin oleh Kepala

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. DPUPR bertugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

Tujuan dan Sasaran DPUPR sebagaimana yang ditetapkan dalam rancangan akhir Rencana Strategis Tahun 2025 – 2026 adalah sebagai berikut:

- Tujuan DPUPR Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan ramah lingkungan
- Sasaran 1 DPUPR Meningkatnya aksesibiltas masyarakat yang nyaman dan aman dengan indikator Prosentase Jalan Kondisi Mantap
- Sasaran 2 DPUPR Meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi dengan indikator Prosentase Jaringan Irigasi Kondisi Baik
- Sasaran 3 DPUPR Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang dengan indikator Prosentase Capaian Penyelenggaraan Penataan Ruang

12. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP)

DPKP merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan urusan pemerintahan di bidang pertanahan yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. DPKP bertugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan.

Tujuan dan Sasaran DPKP sebagaimana yang ditetapkan dalam rancangan akhir Rencana Strategis Tahun 2025 – 2026 adalah sebagai berikut:

- Tujuan DPKP Terpenuhinya akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan dengan indikator Persentase Rumah Tangga dengan akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan.
- Sasaran DPKP Meningkatnya akses rumah layak huni dan utilitas hunian dengan indikator 1) Cakupan rumah tangga dengan Layanan Utilitas Hunian; 2) Cakupan Penanganan Rumah Tidak Layak Huni

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

(RTLH); 3) Cakupan Kawasan Bebas Kumuh; dan 4) Persentase Rumah Korban Bencana yang ditangani.

Tujuan dan sasaran yang dirumuskan oleh perangkat daerah merupakan penjabaran dari visi dan misi Kepala Daerah yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025 2029 Pemerintah Kabupaten Kediri.

VII. URAIAN HASIL REVIU

1. Pengujian atas Keselarasan Program, Kegiatan dan Subkegiatan dengan Tujuan dan Sasaran pada Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah

   Reviu tersebut dilakukan untuk memastikan program, kegiatan dan subkegiatan yang ditetapkan oleh perangkat daerah mendukung pencapaian atas tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

   Hasil pengujian pada masing-masing perangkat daerah sampling diuraikan sebagai berikut:

   a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)

      Hasil pengujian terhadap 58 Subkegiatan yang ditetapkan dalam rancangan akhir Renstra Tahun 2025 – 2029 diketahui bahwa Subkegiatan, Kegiatan, dan Program telah selaras dan mendukung tujuan dan sasaran perangkat daerah. Sasaran telah selaras dengan tujuan, meskipun tujuan bersifat lebih spesifik dari sasaran yang ditetapkan. Tujuan perangkat daerah sama dengan *outcome* salah satu program serta sasaran yang terdapat dalam aplikasi E-REVIU SIPD berbeda dengan dokumen rancangan akhir Renstra Bappeda.

   b. Inspektorat

      Hasil pengujian terhadap 40 Subkegiatan yang ditetapkan dalam rancangan akhir Renstra Tahun 2025 – 2029 diketahui bahwa Subkegiatan, Kegiatan, dan Program telah selaras dan mendukung tujuan dan sasaran perangkat daerah. Indikator Subkegiatan dan *outcome* program telah mengacu kepada ketentuan yang berlaku serta sasaran telah selaras dengan tujuan perangkat daerah.

   c. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Hasil pengujian terhadap 32 Subkegiatan yang ditetapkan dalam rancangan akhir Renstra Tahun 2025 – 2029 diketahui bahwa Subkegiatan, Kegiatan, dan Program telah selaras dan mendukung tujuan dan sasaran perangkat daerah. Indikator Subkegiatan dan *outcome* program telah mengacu kepada ketentuan yang berlaku serta sasaran telah selaras dengan tujuan perangkat daerah.

d. Sekretariat Daerah

Hasil pengujian terhadap 117 Subkegiatan yang ditetapkan dalam rancangan akhir Renstra Tahun 2025 – 2029 diketahui bahwa Subkegiatan, Kegiatan, dan Program telah selaras dan mendukung tujuan dan sasaran perangkat daerah. Indikator Subkegiatan dan *outcome* program telah mengacu kepada ketentuan yang berlaku serta sasaran telah selaras dengan tujuan perangkat daerah.

e. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud)

Hasil pengujian terhadap 53 Subkegiatan yang ditetapkan dalam rancangan akhir Renstra Tahun 2025 – 2029 diketahui bahwa Subkegiatan, Kegiatan, dan Program telah selaras dan mendukung tujuan dan sasaran perangkat daerah. Indikator Subkegiatan dan *outcome* program telah mengacu kepada ketentuan yang berlaku serta sasaran telah selaras dengan tujuan perangkat daerah. Meskipun sasaran telah selaras dengan tujuan, namun tujuan bersifat lebih spesifik daripada sasaran yang ditetapkan.

f. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)

Hasil pengujian terhadap 39 Subkegiatan yang ditetapkan dalam rancangan akhir Renstra Tahun 2025 – 2029 diketahui bahwa Subkegiatan, Kegiatan, dan Program telah selaras dan mendukung tujuan dan sasaran perangkat daerah. Indikator Subkegiatan dan *outcome* program telah mengacu kepada ketentuan yang berlaku serta sasaran telah selaras dengan tujuan perangkat daerah.

g. Sekretariat DPRD

Hasil pengujian terhadap 67 Subkegiatan yang ditetapkan dalam rancangan akhir Renstra Tahun 2025 – 2029 diketahui bahwa Subkegiatan, Kegiatan, dan Program telah selaras dan mendukung

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

tujuan dan sasaran perangkat daerah. Indikator Subkegiatan dan *outcome* program telah mengacu kepada ketentuan yang berlaku serta sasaran telah selaras dengan tujuan perangkat daerah.

h. Dinas Kesehatan

Hasil pengujian terhadap 87 Subkegiatan yang ditetapkan dalam rancangan akhir Renstra Tahun 2025 – 2029 diketahui bahwa Subkegiatan, Kegiatan, dan Program telah selaras dan mendukung tujuan dan sasaran perangkat daerah. Indikator Subkegiatan dan *outcome* program telah mengacu kepada ketentuan yang berlaku serta sasaran telah selaras dengan tujuan perangkat daerah.

i. Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD)

Hasil pengujian terhadap 84 Subkegiatan yang ditetapkan dalam rancangan akhir Renstra Tahun 2025 – 2029 diketahui bahwa Subkegiatan, Kegiatan, dan Program telah selaras dan mendukung tujuan dan sasaran perangkat daerah. Indikator Subkegiatan dan *outcome* program telah mengacu kepada ketentuan yang berlaku serta sasaran telah selaras dengan tujuan perangkat daerah. Meskipun demikian sasaran yang ditetapkan belum sepenuhnya relevan dengan tujuan secara keseluruhan. Tujuan Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah “Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel”. Namun, tujuan tersebut dijabarkan dalam sasaran “Meningkatnya Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)”, di mana IPKD hanya mengukur kualitas pengelolaan keuangan tanpa mencakup aspek pengelolaan aset daerah. Oleh karena itu, diperlukan penambahan ukuran kinerja lain, seperti Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah (IPBMD), agar sasaran yang ditetapkan lebih relevan dan sejalan dengan tujuan perangkat daerah secara menyeluruh.

j. Dinas Pendidikan

Hasil pengujian terhadap 118 Subkegiatan yang ditetapkan dalam rancangan akhir Renstra Tahun 2025 – 2029 diketahui bahwa Subkegiatan, Kegiatan, dan Program telah selaras dan mendukung tujuan dan sasaran perangkat daerah. Indikator Subkegiatan dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

outcome program telah mengacu kepada ketentuan yang berlaku serta sasaran telah selaras dengan tujuan perangkat daerah.

k. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR)

Hasil pengujian terhadap 105 Subkegiatan yang ditetapkan dalam rancangan akhir Renstra Tahun 2025 – 2029 diketahui bahwa Subkegiatan, Kegiatan, dan Program telah selaras dan mendukung tujuan dan sasaran perangkat daerah. Indikator Subkegiatan dan *outcome* program telah mengacu kepada ketentuan yang berlaku serta sasaran telah selaras dengan tujuan perangkat daerah. Meskipun sasaran telah selaras, namun sasaran perangkat daerah sama dengan *outcome* salah satu program yang ditetapkan.

l. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP)

Hasil pengujian terhadap 43 Subkegiatan yang ditetapkan dalam rancangan akhir Renstra Tahun 2025 – 2029 diketahui bahwa Subkegiatan, Kegiatan, dan Program telah selaras dan mendukung tujuan dan sasaran perangkat daerah. Indikator Subkegiatan dan *outcome* program telah mengacu kepada ketentuan yang berlaku serta sasaran telah selaras dengan tujuan perangkat daerah. Meskipun Subkegiatan yang ditetapkan selaras dan mampu mendukung kegiatan dan program, namun beberapa Subkegiatan yang ditetapkan belum mampu memberikan dukungan secara optimal untuk mencapai *outcome* program (bersifat persial).

2. Pengujian atas Keselarasan Indikator Kinerja Perangkat Daerah dengan Bidang Urusan pada Perangkat Daerah

Reviu Kesesuaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah per bidang urusan dengan Target yang ditetapkan dilakukan untuk memastikan Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang dituangkan ke dalam Rancangan Akhir Renstra PD sesuai dengan Bidang Urusan dan mendukung pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah.

Hasil pengujian pada masing-masing perangkat daerah sampling diuraikan sebagai berikut:

a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)

Hasil pengujian terhadap 2 (dua) indikator kinerja menunjukkan bahwa keduanya telah selaras dengan bidang urusan perangkat

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

daerah serta mendukung pencapaian tujuan dan sasaran. Pada e-reviu SIPD, kedua indikator kinerja tersebut masing-masing ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Daerah (IKD) dan Indikator Kinerja Utama (IKU). Namun demikian, penetapan IKD perangkat daerah belum sepenuhnya mengacu pada IKD dan/atau Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029. Selain itu, indikator sasaran yang terdapat dalam e-reviu SIPD berbeda dengan indikator sasaran yang tercantum dalam rancangan akhir Renstra Tahun 2025– 2029.

b. Inspektorat

Hasil pengujian terhadap 5 (lima) indikator kinerja menunjukkan bahwa seluruhnya telah selaras dengan bidang urusan perangkat daerah serta mendukung pencapaian tujuan dan sasaran. Dari 5 (lima) indikator tersebut, sebagian ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) dan sebagian lainnya sebagai Indikator Kinerja Daerah (IKD). Namun demikian, masih terdapat 1 (satu) indikator perangkat daerah yang belum mengacu pada IKD dan/atau Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029.

c. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda)

Hasil pengujian terhadap 1 (satu) indikator kinerja menunjukkan bahwa seluruhnya telah selaras dengan bidang urusan perangkat daerah serta mendukung pencapaian tujuan dan sasaran. Namun demikian, IKU yang terdapat pada aplikasi berbeda dengan IKU pada dokumen Rancangan Akhir Renstra serta belum dilakukan penentuan IKD perangkat daerah berdasarkan RPJMD.

d. Sekretariat Daerah

Hasil pengujian terhadap 9 (sembilan) indikator kinerja menunjukkan bahwa keduanya telah selaras dengan bidang urusan perangkat daerah serta mendukung pencapaian tujuan dan sasaran. Keseluruhan indikator tersebut ditetapkan sebagai IKU namun belum ada yang sekaligus ditetapkan/di-*tagging* sebagai IKD sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2025 – 2029. Selain itu, IKU

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

yang terdapat pada aplikasi E-REVIU SIPD berbeda dengan IKU yang tercantum dalam dokumen rancangan akhir Renstra Tahun 2025 – 2029.

e. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud)

   Pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tidak dapat dilakukan reviu karena pada aplikasi tidak terdapat data yang terkoneksi.

f. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)

   Hasil pengujian terhadap 3 (tiga) indikator kinerja menunjukkan bahwa keduanya telah selaras dengan bidang urusan perangkat daerah serta mendukung pencapaian tujuan dan sasaran. Indikator tersebut, 2 (dua) indikator ditetapkan sebagai IKD dan telah sesuai dengan RPJMD Tahun 2025 – 2029 sedangkan 1 (satu) indikator yang merupakan IKU belum sekaligus ditetapkan/di-*tagging* sebagai IKD sesuai dengan RPJMD Tahun 2025 – 2029.

g. Sekretariat DPRD

   Hasil pengujian terhadap 2 (dua) indikator kinerja menunjukkan bahwa keduanya telah selaras dengan bidang urusan perangkat daerah serta mendukung pencapaian tujuan dan sasaran. Pada aplikasi E-REVIU SIPD kedua indikator kinerja masing-masing ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Daerah (IKD) dan Indikator Kinerja Utama. Penetapan IKD perangkat daerah belum mengacu kepada IKD dan/atau Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2025 – 2029.

h. Dinas Kesehatan

   Hasil pengujian terhadap 3 (tiga) indikator kinerja menunjukkan bahwa keduanya telah selaras dengan bidang urusan perangkat daerah serta mendukung pencapaian tujuan dan sasaran. Pada aplikasi e-reviu, 2 (dua) indikator ditetapkan sebagai IKU dan 1 (satu) indikator sebagai IKD. Namun demikian IKU tersebut belum sekaligus ditetapkan/di*tagging* sebagai IKD sesuai dengan RPJMD Tahun 2025 – 2029.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

i. Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD)

Hasil pengujian terhadap 1 (satu) indikator kinerja menunjukkan bahwa keduanya telah selaras dengan bidang urusan perangkat daerah serta mendukung pencapaian tujuan dan sasaran. Indikator tersebut ditetapkan sebagai IKU dan bukan merupakan IKD. Namun demikian, berdasarkan IKD dan/atau IKK yang ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2025 – 2029 terdapat indikator bidang keuangan yang belum ditetapkan sebagai IKD perangkat daerah.

j. Dinas Pendidikan

Hasil pengujian terhadap 7 (tujuh) indikator kinerja menunjukkan bahwa keduanya telah selaras dengan bidang urusan perangkat daerah serta mendukung pencapaian tujuan dan sasaran. Dari 7 (tujuh) indikator tersebut, sebagian ditetapkan sebagai IKU dan sebagian lainnya sebagai IKD. Namun demikian penetapan IKD perangkat daerah belum mengacu kepada IKD dan/atau IKK yang ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2025 – 2029.

k. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR)

Hasil pengujian terhadap 4 (indikator) indikator kinerja menunjukkan bahwa keduanya telah selaras dengan bidang urusan perangkat daerah serta mendukung pencapaian tujuan dan sasaran. Pada aplikasi e-reviu, 3 (dua) indikator ditetapkan sebagai IKD dan 1 (satu) indikator sebagai IKU. Namun demikian IKU tersebut belum sekaligus ditetapkan/di-*tagging* sebagai IKD sebagaimana tercantum dalam RPJMD Tahun 2025 – 2029.

l. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP)

Hasil pengujian terhadap 5 (lima) indikator kinerja menunjukkan bahwa keduanya telah selaras dengan bidang urusan perangkat daerah serta mendukung pencapaian tujuan dan sasaran. Dari 5 (lima) indikator tersebut, sebagian ditetapkan sebagai IKU dan sebagian lainnya sebagai IKD. Namun demikian penetapan IKD perangkat daerah belum mengacu kepada IKD dan/atau Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2025 – 2029. Selain itu terdapat indikator kinerja yang kurang SMART (*spesific, measureable, achieveable,*

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

relevant, dan *time bond*), yaitu indikator kinerja yang diukur berdasarkan “cakupan”.

3. Pengujian atas Konsistensi dan Keterhubungan Program Prioritas pada RPJMD dengan Program pada Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah.

   Reviu konsistensi Program Prioritas pada RPJMD dengan Renstra PD dilakukan untuk memastikan Program Prioritas yang terdapat pada BAB III Rancangan Akhir RPJMD diakomodir pada Rancangan Akhir Renstra PD sebagai program yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah. Hasil pengujian pada masing-masing perangkat daerah sampling diuraikan sebagai berikut:

   a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)

      Tidak dapat dilakukan reviu karena pada aplikasi tidak terdapat data yang terkoneksi.

   b. Inspektorat

      Program prioritas yang ditetapkan dalam Dokumen RPJMD Tahun 2025 – 2029 tidak mencakup urusan pengawasan. Namun pada aplikasi e-reviu terdapat 1 (satu) program yang tercatat sebagai program prioritas, yaitu program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.

   c. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda)

      Tidak dapat dilakukan reviu karena pada aplikasi tidak terdapat data yang terkoneksi.

   d. Sekretariat Daerah

      Tidak dapat dilakukan reviu karena pada aplikasi tidak terdapat data yang terkoneksi.

   e. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud)

      Hasil pengujian diketahui bahwa program perangkat daerah yang tetapkan dan/atau akan dilaksanakan pada Renstra 2025 – 2029 telah mengakomodasi program prioritas pada RPJMD Tahun 2025 – 2029.

   f. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Hasil pengujian diketahui bahwa program perangkat daerah yang tetapkan dan/atau akan dilaksanakan pada Renstra 2025 – 2029 telah mengakomodasi program prioritas pada RPJMD Tahun 2025 – 2029.

g. Sekretariat DPRD

Tidak dapat dilakukan reviu karena pada aplikasi tidak terdapat data yang terkoneksi.

h. Dinas Kesehatan

Hasil pengujian diketahui bahwa program perangkat daerah yang tetapkan dan/atau akan dilaksanakan pada Renstra 2025 – 2029 telah mengakomodasi program prioritas pada RPJMD Tahun 2025 – 2029. Namun demikian terdapat hal yang perlu diperhatikan, yaitu *tagging* program prioritas (1 program) pada aplikasi E-REVIU SIPD belum sesuai dengan dokumen RPJMD Tahun 2025 – 2029.

i. Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD)

Tidak dapat dilakukan reviu karena pada aplikasi tidak terdapat data yang terkoneksi.

j. Dinas Pendidikan

Hasil pengujian diketahui bahwa program perangkat daerah yang tetapkan dan/atau akan dilaksanakan pada Renstra 2025 – 2029 telah mengakomodasi program prioritas pada RPJMD Tahun 2025 – 2029. Namun demikian terdapat hal yang perlu diperhatikan, yaitu *tagging* program prioritas (3 program) pada aplikasi E-REVIU SIPD belum sesuai dengan dokumen RPJMD Tahun 2025 – 2029.

k. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR)

Hasil pengujian diketahui bahwa program perangkat daerah yang tetapkan dan/atau akan dilaksanakan pada Renstra 2025 – 2029 telah mengakomodasi program prioritas pada RPJMD Tahun 2025 – 2029. Namun demikian terdapat hal yang perlu diperhatikan, yaitu dalam program prioritas terdapat urusan yang diakomodir melalui penetapan program pada 2 (dua) perangkat daerah yang berbeda (DPKP dan DPUPR) serta *tagging* program prioritas (Program Penyelenggaraan Penataan Ruang) pada aplikasi E-REVIU SIPD belum sesuai dengan dokumen RPJMD Tahun 2025 – 2029.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

l. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP)

Hasil pengujian diketahui bahwa program perangkat daerah yang tetapkan dan/atau akan dilaksanakan pada Renstra 2025 – 2029 telah mengakomodasi program prioritas pada RPJMD Tahun 2025 – 2029. Namun demikian terdapat hal yang perlu diperhatikan, yaitu dalam program prioritas terdapat urusan yang diakomodir melalui penetapan program pada 2 (dua) perangkat daerah yang berbeda (DPKP dan DPUPR) serta *tagging* program prioritas (2 program) pada aplikasi E-REVIU SIPD belum sesuai dengan dokumen RPJMD Tahun 2025 – 2029.

4. Pengujian Konsistensi dan Keterhubungan Program Perangkat Daerah pada RPJMD dengan Program pada Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah.

Reviu konsistensi Program Perangkat Daerah pada RPJMD dengan Renstra PD dilakukan untuk memastikan Program perangkat daerah yang terdapat pada BAB IV Rancangan Akhir RPJMD diakomodir pada Rancangan Akhir Renstra PD sebagai program yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah.

Hasil pengujian pada masing-masing perangkat daerah sampling diuraikan sebagai berikut:

a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)

Hasil pengujian diketahui bahwa 3 (tiga) program yang ditetapkan dan/atau akan dilaksanakan pada Renstra Tahun 2025 – 2029 telah selaras dan mengakomodasi program yang ditetapkan dalam Bab IV RPJMD Tahun 2025 – 2029.

b. Inspektorat

Hasil pengujian diketahui bahwa 3 (tiga) program yang ditetapkan dan/atau akan dilaksanakan pada Renstra Tahun 2025 – 2029 telah selaras dan mengakomodasi program yang ditetapkan dalam Bab IV RPJMD Tahun 2025 – 2029.

c. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda)

Hasil pengujian diketahui bahwa 3 (tiga) program yang ditetapkan dan/atau akan dilaksanakan pada Renstra Tahun 2025 – 2029 telah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

selaras dan mengakomodasi program yang ditetapkan dalam Bab IV RPJMD Tahun 2025 – 2029.

d. Sekretariat Daerah

Hasil pengujian diketahui bahwa 3 (tiga) program yang ditetapkan dan/atau akan dilaksanakan pada Renstra Tahun 2025 – 2029 telah selaras dan mengakomodasi program yang ditetapkan dalam Bab IV RPJMD Tahun 2025 – 2029.

e. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud)

Hasil pengujian diketahui bahwa 3 (tiga) program yang ditetapkan dan/atau akan dilaksanakan pada Renstra Tahun 2025 – 2029 telah selaras dan mengakomodasi program yang ditetapkan dalam Bab IV RPJMD Tahun 2025 – 2029.

f. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)

Hasil pengujian diketahui bahwa 3 (tiga) program yang ditetapkan dan/atau akan dilaksanakan pada Renstra Tahun 2025 – 2029 telah selaras dan mengakomodasi program yang ditetapkan dalam Bab IV RPJMD Tahun 2025 – 2029.

g. Sekretariat DPRD

Hasil pengujian diketahui bahwa 3 (tiga) program yang ditetapkan dan/atau akan dilaksanakan pada Renstra Tahun 2025 – 2029 telah selaras dan mengakomodasi program yang ditetapkan dalam Bab IV RPJMD Tahun 2025 – 2029.

h. Dinas Kesehatan

Hasil pengujian diketahui bahwa 3 (tiga) program yang ditetapkan dan/atau akan dilaksanakan pada Renstra Tahun 2025 – 2029 telah selaras dan mengakomodasi program yang ditetapkan dalam Bab IV RPJMD Tahun 2025 – 2029.

i. Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD)

Hasil pengujian diketahui bahwa 3 (tiga) program yang ditetapkan dan/atau akan dilaksanakan pada Renstra Tahun 2025 – 2029 telah selaras dan mengakomodasi program yang ditetapkan dalam Bab IV RPJMD Tahun 2025 – 2029.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

j. Dinas Pendidikan

Hasil pengujian diketahui bahwa 3 (tiga) program yang ditetapkan dan/atau akan dilaksanakan pada Renstra Tahun 2025 – 2029 telah selaras dan mengakomodasi program yang ditetapkan dalam Bab IV RPJMD Tahun 2025 – 2029.

k. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR)

Hasil pengujian diketahui bahwa 3 (tiga) program yang ditetapkan dan/atau akan dilaksanakan pada Renstra Tahun 2025 – 2029 telah selaras dan mengakomodasi program yang ditetapkan dalam Bab IV RPJMD Tahun 2025 – 2029.

l. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP)

Hasil pengujian diketahui bahwa 3 (tiga) program yang ditetapkan dan/atau akan dilaksanakan pada Renstra Tahun 2025 – 2029 telah selaras dan mengakomodasi program yang ditetapkan dalam Bab IV RPJMD Tahun 2025 – 2029.

5. Pengujian atas Keselarasan Penetapan Target IKU dengan Pengendalian dan Evaluasi Hasil Capaian Periode Sebelumnya.

Reviu Kesesuaian Target Kinerja pada rancangan akhir Renstra PD dengan Pengendalian dan Evaluasi Hasil Capaian Tahun Sebelumnya merupakan proses penelaahan dan penjaminan terbatas bahwa targettarget yang ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk proyeksi periode Renstra PD 5 (lima) tahun ke depan dengan memperhatikan capaian hasil pengendalian dan evaluasi periode sebelumnya yang diambil pada tahun terakhir.

Hasil pengujian pada masing-masing perangkat daerah sampling diuraikan sebagai berikut:

a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)

Pengujian dilakukan untuk menelaah dan meyakinkan secara terbatas bahwa target-target yang ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk proyeksi periode Renstra PD 5 (lima) tahun ke depan telah memperhatikan capaian hasil pengendalian dan evaluasi periode sebelumnya yang diambil pada tahun terakhir. Hasil pengujian diketahui bahwa IKU Renstra 2025 – 2029, yaitu Indeks Perencanaan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pembangunan Daerah belum dapat diyakini penetapannya. Hal tersebut disebabkan belum adanya *baseline* dan kertas kerja penghitungan dan/atau data pendukung meskipun penetapan target capaian telah meningkat setiap tahunnya.

b. Inspektorat

Pengujian dilakukan untuk menelaah dan meyakinkan secara terbatas bahwa target-target yang ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk proyeksi periode Renstra PD 5 (lima) tahun ke depan telah memperhatikan capaian hasil pengendalian dan evaluasi periode sebelumnya yang diambil pada tahun terakhir. Hasil pengujian diketahui bahwa IKU Renstra 2025 – 2029, sebanyak 4 IKU telah dilengkapi dengan *baseline* dan target capaian yang memperhatikan capaian periode sebelumnya dan meningkat setiap tahunnya. Meskipun demikian kertas kerja penghitungan belum dapat ditunjukkan

c. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda)

Pengujian dilakukan untuk menelaah dan meyakinkan secara terbatas bahwa target-target yang ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk proyeksi periode Renstra PD 5 (lima) tahun ke depan telah memperhatikan capaian hasil pengendalian dan evaluasi periode sebelumnya yang diambil pada tahun terakhir. Hasil pengujian diketahui bahwa IKU Renstra 2025 – 2029, IKU merupakan indikator baru sehingga tidak terdapat data capaian tahun/periode sebelumnya. *Baseline* dan target tahunan telah direncanakan meningkat setiap tahunnya dengan memperhatikan perhitungan dasar berdasarkan rumusan/formulasi indikator meskipun belum dapat ditunjukkan kertas kerja penghitungannya.

d. Sekretariat Daerah

Pengujian dilakukan untuk menelaah dan meyakinkan secara terbatas bahwa target-target yang ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk proyeksi periode Renstra PD 5 (lima) tahun ke depan telah memperhatikan capaian hasil pengendalian dan evaluasi periode sebelumnya yang diambil pada tahun terakhir. Hasil pengujian diketahui bahwa IKU Renstra 2025 – 2029, dari 9 IKU sebanyak 8

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

indikator telah dilengkapi dengan *baseline* dan target capaian yang memperhatikan capaian periode sebelumnya dan meningkat setiap tahunnya, meskipun demikian kertas kerja penghitungan secara detail belum dapat ditunjukkan. Sedangkan 1 IKU, yaitu Nilai IKM *baseline* dan target capaian kinerja T0-T5 ditetapkan lebih rendah dari capaian kinerja tahun terakhir periode renstra sebelumnya.

e. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud)

   Tidak dapat dilakukan reviu karena pada aplikasi tidak terdapat data yang terkoneksi.

f. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)

   Pengujian dilakukan untuk menelaah dan meyakinkan secara terbatas bahwa target-target yang ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk proyeksi periode Renstra PD 5 (lima) tahun ke depan telah memperhatikan capaian hasil pengendalian dan evaluasi periode sebelumnya yang diambil pada tahun terakhir. Hasil pengujian diketahui bahwa IKU Renstra 2025 – 2029, IKU merupakan indikator baru sehingga tidak terdapat data capaian tahun/periode sebelumnya. *Baseline* dan target tahunan telah direncanakan meningkat setiap tahunnya dengan memperhatikan perhitungan dasar berdasarkan rumusan/formulasi indikator meskipun belum dapat ditunjukkan kertas kerja penghitungannya.

g. Sekretariat DPRD

   Pengujian dilakukan untuk menelaah dan meyakinkan secara terbatas bahwa target-target yang ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk proyeksi periode Renstra PD 5 (lima) tahun ke depan telah memperhatikan capaian hasil pengendalian dan evaluasi periode sebelumnya yang diambil pada tahun terakhir. Hasil pengujian diketahui bahwa IKU Renstra 2025 – 2029, IKU telah dilengkapi dengan *baseline* dan target capaian yang memperhatikan capaian periode sebelumnya dan meningkat setiap tahunnya.

h. Dinas Kesehatan

   Pengujian dilakukan untuk menelaah dan meyakinkan secara terbatas bahwa target-target yang ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

(IKU) untuk proyeksi periode Renstra PD 5 (lima) tahun ke depan telah memperhatikan capaian hasil pengendalian dan evaluasi periode sebelumnya yang diambil pada tahun terakhir. Hasil pengujian diketahui bahwa dari dua IKU Renstra 2025 – 2029, salah satu IKU telah memperhatikan capaian kinerja periode sebelumnya, yaitu indikator Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) meskipun targetnya sama di setiap tahunnya. Sedangkan untuk indikator Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) belum dapat diyakini penetapannya karena dihitung dengan rumusan baru dan menggunakan hasil survei tahun 2023 untuk *baseline*-nya meskipun penetapan *baseline* dan target capaian telah meningkat setiap tahunnya. Kertas kerja penghitungan secara detail belum dapat ditunjukkan.

i. Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD)

   Pengujian dilakukan untuk menelaah dan meyakinkan secara terbatas bahwa target-target yang ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk proyeksi periode Renstra PD 5 (lima) tahun ke depan telah memperhatikan capaian hasil pengendalian dan evaluasi periode sebelumnya yang diambil pada tahun terakhir. Hasil pengujian diketahui bahwa IKU Renstra 2025 – 2029, IKU telah dilengkapi dengan *baseline* dan target capaian yang memperhatikan capaian periode sebelumnya. Target tidak mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun target tersebut merupakan target dengan capaian/level tertinggi.

j. Dinas Pendidikan

   Pengujian dilakukan untuk menelaah dan meyakinkan secara terbatas bahwa target-target yang ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk proyeksi periode Renstra PD 5 (lima) tahun ke depan telah memperhatikan capaian hasil pengendalian dan evaluasi periode sebelumnya yang diambil pada tahun terakhir. Hasil pengujian diketahui bahwa dari tiga IKU Renstra 2025 – 2029 diketahui bahwa 2 IKU telah memperhatikan capaian kinerja periode sebelumnya, yaitu indikator Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah. Sedangkan untuk indikator Indeks Daya Saing Kepemudaan dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Keolahragaan yang merupakan IKU baru sehingga tidak terdapat data capaian tahun/periode sebelumnya. *Baseline* dan target tahunan telah direncanakan meningkat setiap tahunnya dengan memperhatikan perhitungan dasar berdasarkan rumusan/formulasi indikator meskipun belum dapat ditunjukkan kertas kerja penghitungannya.

k. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR)

Pengujian dilakukan untuk menelaah dan meyakinkan secara terbatas bahwa target-target yang ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk proyeksi periode Renstra PD 5 (lima) tahun ke depan telah memperhatikan capaian hasil pengendalian dan evaluasi periode sebelumnya yang diambil pada tahun terakhir. Hasil pengujian diketahui bahwa IKU yang terdapat pada aplikasi SIPD berbeda dengan dokumen rancangan akhir Renstra Tahun 2025 – 2029 (terbalik/salah *tagging* dengan IKD). Indikator Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) merupakan indikator baru sehingga tidak terdapat data capaian tahun/periode sebelumnya. *Baseline* dan target tahunan telah direncanakan meningkat setiap tahunnya dengan memperhatikan perhitungan dasar berdasarkan rumusan/formulasi indikator meskipun belum dapat ditunjukkan kertas kerja penghitungannya.

l. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP)

Pengujian dilakukan untuk menelaah dan meyakinkan secara terbatas bahwa target-target yang ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk proyeksi periode Renstra PD 5 (lima) tahun ke depan telah memperhatikan capaian hasil pengendalian dan evaluasi periode sebelumnya yang diambil pada tahun terakhir. Hasil pengujian diketahui bahwa IKU Renstra 2025 – 2029, yaitu Indeks Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan belum dapat diyakini penetapannya. Hal tersebut disebabkan belum adanya *baseline* dan kertas kerja penghitungan dan/atau data pendukung meskipun penetapan target capaian telah meningkat setiap tahunnya.

6. Pengujian atas Keselarasan Penetapan Target IKD dengan Pengendalian dan Evaluasi Hasil Capaian Periode Sebelumnya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Reviu Kesesuaian Target Kinerja pada rancangan akhir Renstra PD dengan Pengendalian dan Evaluasi Hasil Capaian Tahun Sebelumnya merupakan proses penelaahan dan penjaminan terbatas bahwa targettarget yang ditetapkan dalam Indikator Kinerja Daerah (IKD) untuk proyeksi periode Renstra PD 5 (lima) tahun ke depan dengan memperhatikan capaian hasil pengendalian dan evaluasi periode sebelumnya yang diambil pada tahun terakhir.

Hasil pengujian pada masing-masing perangkat daerah sampling diuraikan sebagai berikut:

a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)

   Pengujian dilakukan untuk menelaah dan meyakinkan secara terbatas bahwa target-target yang ditetapkan dalam Indikator Kinerja Daerah (IKD) untuk proyeksi periode Renstra PD 5 (lima) tahun ke depan telah memperhatikan capaian hasil pengendalian dan evaluasi periode sebelumnya yang diambil pada tahun terakhir. Hasil pengujian diketahui bahwa IKD Renstra 2025 – 2029, yaitu Indeks Persentase indikator sasaran pada RPJMD yang targetnya terpenuhi belum dapat diyakini penetapannya. Hal tersebut disebabkan belum adanya *baseline* dan kertas kerja penghitungan dan/atau data pendukung meskipun penetapan target capaian telah meningkat setiap tahunnya.

b. Inspektorat

   Pengujian dilakukan untuk menelaah dan meyakinkan secara terbatas bahwa target-target yang ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKD) untuk proyeksi periode Renstra PD 5 (lima) tahun ke depan telah memperhatikan capaian hasil pengendalian dan evaluasi periode sebelumnya yang diambil pada tahun terakhir. Hasil pengujian diketahui bahwa IKD Renstra 2025 – 2029, IKD merupakan indikator baru sehingga tidak terdapat data capaian tahun/periode sebelumnya. *Baseline* dan target tahunan telah direncanakan meningkat setiap tahunnya dengan memperhatikan perhitungan dasar berdasarkan hasil penilaian meskipun belum dapat ditunjukkan kertas kerja penghitungannya.

c. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tidak dapat dilakukan reviu karena pada aplikasi tidak terdapat data yang terkoneksi.

d. Sekretariat Daerah

Tidak dapat dilakukan reviu karena pada aplikasi tidak terdapat data yang terkoneksi.

e. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud)

Tidak dapat dilakukan reviu karena pada aplikasi tidak terdapat data yang terkoneksi.

f. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)

Pengujian dilakukan untuk menelaah dan meyakinkan secara terbatas bahwa target-target yang ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKD) untuk proyeksi periode Renstra PD 5 (lima) tahun ke depan telah memperhatikan capaian hasil pengendalian dan evaluasi periode sebelumnya yang diambil pada tahun terakhir. Hasil pengujian diketahui bahwa IKD Renstra 2025 – 2029, IKD merupakan indikator baru sehingga tidak terdapat data capaian tahun/periode sebelumnya. *Baseline* dan target tahunan telah direncanakan meningkat setiap tahunnya dengan memperhatikan perhitungan dasar berdasarkan rumusan/formulasi indikator meskipun belum dapat ditunjukkan kertas kerja penghitungannya.

g. Sekretariat DPRD

Pengujian dilakukan untuk menelaah dan meyakinkan secara terbatas bahwa target-target yang ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKD) untuk proyeksi periode Renstra PD 5 (lima) tahun ke depan telah memperhatikan capaian hasil pengendalian dan evaluasi periode sebelumnya yang diambil pada tahun terakhir. Hasil pengujian diketahui bahwa IKD Renstra 2025 – 2029, IKU telah dilengkapi dengan *baseline* dan target capaian yang memperhatikan capaian periode sebelumnya. Target tidak mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun target tersebut merupakan target dengan capaian/level tertinggi.

h. Dinas Kesehatan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pengujian dilakukan untuk menelaah dan meyakinkan secara terbatas bahwa target-target yang ditetapkan dalam Indikator Kinerja Daerah (IKD) untuk proyeksi periode Renstra PD 5 (lima) tahun ke depan telah memperhatikan capaian hasil pengendalian dan evaluasi periode sebelumnya yang diambil pada tahun terakhir. Hasil pengujian diketahui bahwa IKD Renstra 2025 – 2029, IKD telah dilengkapi dengan *baseline* dan target capaian yang memperhatikan capaian periode sebelumnya serta meningkat setiap tahunnya. Meskipun demikian belum dapat ditunjukkan kertas kerja penghitungan dan/atau data pendukungnya.

i. Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD)

   Tidak dapat dilakukan reviu karena pada aplikasi tidak terdapat data yang terkoneksi.

j. Dinas Pendidikan

   Pengujian dilakukan untuk menelaah dan meyakinkan secara terbatas bahwa target-target yang ditetapkan dalam Indikator Kinerja Daerah (IKD) untuk proyeksi periode Renstra PD 5 (lima) tahun ke depan telah memperhatikan capaian hasil pengendalian dan evaluasi periode sebelumnya yang diambil pada tahun terakhir. Hasil pengujian diketahui bahwa IKD Renstra 2025 – 2029, keempat IKD merupakan indikator baru sehingga tidak terdapat data capaian tahun/periode sebelumnya. *Baseline* dan target tahunan telah direncanakan meningkat setiap tahunnya dengan memperhatikan perhitungan dasar berdasarkan rumusan/formulasi indikator meskipun belum dapat ditunjukkan kertas kerja penghitungannya.

k. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR)

   Pengujian dilakukan untuk menelaah dan meyakinkan secara terbatas bahwa target-target yang ditetapkan dalam Indikator Kinerja Daerah (IKD) untuk proyeksi periode Renstra PD 5 (lima) tahun ke depan telah memperhatikan capaian hasil pengendalian dan evaluasi periode sebelumnya yang diambil pada tahun terakhir. Hasil pengujian diketahui bahwa IKD yang terdapat pada aplikasi SIPD berbeda dengan dokumen rancangan akhir Renstra Tahun 2025 – 2029 (terbalik/salah *tagging* dengan IKU). Indikator merupakan indikator

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

baru sehingga tidak terdapat data capaian tahun/periode sebelumnya. Dua indikator tidak dilengkapi dengan *baseline* sehingga belum dapat diyakini penetapannya. Target tahunan telah direncanakan meningkat setiap tahunnya dengan memperhatikan perhitungan dasar berdasarkan rumusan/formulasi indikator meskipun belum dapat ditunjukkan kertas kerja penghitungan dan/atau data pendukungnya.

l. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP)

Pengujian dilakukan untuk menelaah dan meyakinkan secara terbatas bahwa target-target yang ditetapkan dalam Indikator Kinerja Daerah (IKD) untuk proyeksi periode Renstra PD 5 (lima) tahun ke depan telah memperhatikan capaian hasil pengendalian dan evaluasi periode sebelumnya yang diambil pada tahun terakhir. Hasil pengujian diketahui bahwa IKD Renstra 2025 – 2029, merupakan indikator baru sehingga tidak terdapat hasil capaian pada periode sebelumnya. Indikator belum dilengkapi dengan *baseline* yang menjadi penentuan target tahunan sehingga belum dapat diyakini penetapannya. Selain itu kertas kerja penghitungan dan/atau data pendukung belum dapat ditunjukkan meskipun penetapan target capaian telah meningkat setiap tahunnya.

7. Pengujian atas Keselarasan Penetapan Target Subkegiatan dengan Data Statistik Sektoral Daerah

Reviu kesesuaian penetapan target subkegiatan dengan data statistik sektoral daerah merupakan proses penelaahan atas rancangan akhir Renstra PD yang dilakukan untuk memastikan subkegiatan yang ditetapkan perangkat daerah telah sesuai dengan data statistik sektoral daerah.

Pengujian tidak dapat dilakukan kepada seluruh perangkat daerah sampling dikarenakan pada aplikasi tidak terdapat data yang terkoneksi.

VIII. PENUTUP

1. Saran

Berdasarkan hasil Berdasarkan hasil Reviu Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 masih terdapat

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

kelemahan/kekurangan sehingga disarankan kepada: a. Kepala Bappeda agar:

1) Menelaah kembali perumusan tujuan dan sasaran perangkat daerah;
2) Memastikan kembali kesesuaian sasaran pada aplikasi SIPD dengan dokumen rancangan akhir Renstra 2025 – 2029 (*hard copy*);
3) Memastikan kembali kesesuaian indikator sasaran pada aplikasi SIPD dengan dokumen rancangan akhir Renstra 2025 – 2029 (*hard copy*);
4) Mereviu kembali penetapan IKU dan IKD perangkat daerah sesuai dengan RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2025 – 2029;
5) Melengkapi penetapan target capaian IKU dan IKD Renstra 2015 – 2029 dengan nilai *baseline* dan kertas kerja penghitungan target dan/atau data pendukung.

b. Inspektur agar:

1) Mereviu kembali penetapan IKU dan IKD perangkat daerah sesuai dengan RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2025 – 2029;
2) Memastikan kembali kesesuaian program prioritas perangkat daerah pada aplikasi SIPD dengan dokumen rancangan akhir Renstra 2025 – 2029 (*hard copy*);
3) Melengkapi penetapan target capaian IKU dan IKD Renstra 2015 – 2029 dengan nilai *baseline* dan kertas kerja penghitungan target dan/atau data pendukung.

c. Kepala Bapenda agar:

1) Mereviu kembali penetapan IKU dan IKD perangkat daerah sesuai dengan RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2025 – 2029;
2) Memastikan kembali kesesuaian IKU pada aplikasi SIPD dengan dokumen rancangan akhir Renstra 2025 – 2029 (*hard copy*);
3) Melengkapi penetapan target capaian IKU dan IKD Renstra 2015 – 2029 dengan nilai *baseline* dan kertas kerja penghitungan target dan/atau data pendukung.

d. Sekretaris Daerah agar:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1) Mereviu kembali penetapan IKU dan IKD perangkat daerah sesuai dengan RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2025 – 2029;
2) Memastikan kembali kesesuaian IKU pada aplikasi SIPD dengan dokumen rancangan akhir Renstra 2025 – 2029 (*hard copy*);
3) Melengkapi penetapan target capaian IKU dan IKD Renstra 2015 – 2029 dengan nilai *baseline* dan kertas kerja penghitungan target dan/atau data pendukung.

e. Kepala Disparbud agar:
1) Menelaah kembali perumusan tujuan dan sasaran perangkat daerah;
2) Mereviu kembali penetapan IKU dan IKD perangkat daerah sesuai dengan RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2025 – 2029.

f. Kepala BKPSDM agar:
1) Mereviu kembali penetapan IKU dan IKD perangkat daerah sesuai dengan RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2025 – 2029;
2) Melengkapi penetapan target capaian IKU dan IKD Renstra 2015 – 2029 dengan nilai *baseline* dan kertas kerja penghitungan target dan/atau data pendukung.

g. Sekretaris DPRD agar mereviu kembali penetapan IKU dan IKD perangkat daerah sesuai dengan RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2025 – 2029.

h. Kepala Dinkes agar:
1) Mereviu kembali penetapan IKU dan IKD perangkat daerah sesuai dengan RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2025 – 2029;
2) Memastikan kembali kesesuaian program prioritas perangkat daerah pada aplikasi SIPD dengan dokumen rancangan akhir Renstra 2025 – 2029 (*hard copy*);
3) Melengkapi penetapan target capaian IKU dan IKD Renstra 2015 – 2029 dengan nilai *baseline* dan kertas kerja penghitungan target dan/atau data pendukung.

i. Kepala Disdik agar:
1) Mereviu kembali penetapan IKU dan IKD perangkat daerah sesuai dengan RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2025 – 2029;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2) Memastikan kembali kesesuaian program prioritas perangkat daerah pada aplikasi SIPD dengan dokumen rancangan akhir Renstra 2025
– 2029 (*hard copy*);
3) Melengkapi penetapan target capaian IKU dan IKD Renstra 2015 – 2029 dengan nilai *baseline* dan kertas kerja penghitungan target dan/atau data pendukung.

j. Kepala BKAD agar:
1) Menelaah kembali perumusan tujuan dan sasaran perangkat daerah;
2) Mereviu kembali penetapan IKU dan IKD perangkat daerah sesuai dengan RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2025 – 2029.

k. Kepala DPUPR agar:
1) Menelaah kembali perumusan tujuan dan sasaran perangkat daerah;
2) Mereviu kembali penetapan IKU dan IKD perangkat daerah sesuai dengan RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2025 – 2029;
3) Memastikan kembali kesesuaian program prioritas perangkat daerah pada aplikasi SIPD dengan dokumen rancangan akhir Renstra 2025 – 2029 (*hard copy*);
4) Melengkapi penetapan target capaian IKU dan IKD Renstra 2015 – 2029 dengan nilai *baseline* dan kertas kerja penghitungan target dan/atau data pendukung.

l. Kepala DPKP agar:
1) Menelaah kembali pemilihan Subkegiatan guna menunjang ketercapaian *output* program secara optimal;
2) Mereviu kembali perumusan indikator kinerja (IKD) agar lebih SMART;
3) Mereviu kembali penetapan IKU dan IKD perangkat daerah sesuai dengan RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2025 – 2029;
4) Memastikan kembali kesesuaian program prioritas perangkat daerah pada aplikasi SIPD dengan dokumen rancangan akhir Renstra 2025 – 2029 (*hard copy*);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

5) Melengkapi penetapan target capaian IKU dan IKD Renstra 2015 – 2029 dengan nilai *baseline* dan kertas kerja penghitungan target dan/atau data pendukung.

2. Apresiasi

Inspektorat Kabupaten Kediri menyampaikan terima kasih kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kediri serta seluruh perangkat daerah di Pemerintah Kabupaten Kediri atas tersusunnya Rancangan Akhir Renstra Kabupaten Kediri Tahun 2025 – 2029 serta kesediaan memberikan data/dokumen yang diperlukan sehingga dapat mendukung terlaksananya kegiatan reviu. Harapan kami terhadap reviu yang telah dilakukan dapat memberikan perbaikan dalam penyusunan dokumen Renstra Kabupaten Kediri Tahun 2025 – 2029.

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Plt. Inspektur Kabupaten Kediri,

Wirawan, S.E., M.M., Ak, CA.
Pembina Utama Muda
NIP. 197105301997031005

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jalan Soekarno Hatta Nomor 1, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri 64182
Telepon (0354) 689995 Pos-el bappeda@kedirikab.go.id
Laman: www.kedirikab.go.id

Kediri, 17 September 2025

Nomor : 000.7.4/83/418.54/2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Laporan Hasil Verifikasi Rancangan Akhir Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2025-2029

Yth. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan
di
K e d i r i

Dalam rangka pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang diselaraskan dengan program pembangunan Provinsi Jawa Timur maupun Pemerintah Pusat, penyusunan RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 dilakukan secara bersamaan/simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029. Sebagian substansi Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025- 2029 merupakan bagian dari RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029. Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri melalui kewenangannya sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri (InMendagri) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, telah menyusun dokumen Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

I. Ringkasan Eksekutif

Rencana Strategis (Renstra) adalah sebuah dokumen perencanaan yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan yang ingin dicapai dalam jangka waktu 5 tahun. Perumusan Rankhir Renstra PD Tahun 2025-2029 merupakan proses penyempurnaan Rancangan Renstra PD

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tahun 2025-2029 menjadi Rankhir Renstra PD berdasarkan Perda tentang RPJMD Tahun 2025-2029; dan Perumusan Rankhir Renstra PD dilakukan untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program/kegiatan/ subkegiatan PD berdasarkan strategi, arah kebijakan, program prioritas yang ditetapkan dalam Perda tentang RPJMD. Penetapan Perkada Renstra PD Tahun 2025-2029 paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perda tentang RPJMD Tahun 2025-2029 ditetapkan.

II. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kediri;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2025-2029.

III. Tujuan Verifikasi

Memastikan bahwa dokumen Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2025-2029 telah disusun sesuai ketentuan, standar, rencana, atau norma guna meningkatkan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

IV. Metodologi Verifikasi

Metodologi verifikasi Renstra melibatkan serangkaian langkah untuk memastikan bahwa dokumen Renstra telah disusun dengan benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku:

1. Pencermatan Sistematika Renstra:
    a. Memastikan semua bagian Renstra, seperti pendahuluan, gambaran umum, analisis lingkungan strategis, visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan, indikator kinerja, dan rencana anggaran, telah termuat dalam dokumen.
    b. Verifikasi keterkaitan antara visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan program/kegiatan. Pastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan benar-benar mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
    c. Memastikan konsistensi data dan informasi yang disajikan dalam berbagai bagian Renstra tidak ada data atau informasi yang bertentangan atau tidak sesuai.
2. Pencermatan Substansi Renstra:
    a. Verifikasi visi dan misi yang ditetapkan dalam Renstra telah sejalan dengan tujuan jangka panjang organisasi.
    b. Verifikasi analisis lingkungan strategis yang dilakukan untuk mengidentifikasi peluang dan tantangan yang relevan dengan organisasi. Pastikan bahwa analisis tersebut dilakukan secara komprehensif dan mendalam.
    c. Verifikasi tujuan dan sasaran yang ditetapkan realistis, terukur, dapat dicapai, relevan, dan memiliki jangka waktu yang jelas (SMART).
    d. Verifikasi strategi dan kebijakan yang dirumuskan relevan dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
    e. Verifikasi program dan kegiatan yang direncanakan sesuai dengan strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, serta apakah program dan kegiatan tersebut dapat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.
    f. Verifikasi indikator kinerja yang digunakan dapat mengukur pencapaian tujuan dan sasaran organisasi secara efektif dan efisien.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

V. Uraian Hasil Verifikasi

Pengujian atas Kesesuaian Rancangan Akhir Renstra PD dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Berdasarkan pengujian diperoleh hasil sebagai berikut:

a. Sistematika : Sudah Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

b. BAB I :

   1) Pada subbab dasar hukum nomor regulasi belum lengkap;

   2) Pada subbab dasar hukum belum mencantumkan Inmendagri Nomor 2 tahun 2025.

c. BAB II :

   1) Data-data capaian kinerja yang disajikan belum menggunakan 5 tahun terakhir yakni dari tahun 2020 sampai tahun 2024;

   2) Penyajian hasil evaluasi capaian kinerja masih data Indikator Kinerja Utama (IKU), data Indikator Kinerja Kunci (IKK) belum disajikan;

   3) Identifikasi permasalahan belum dirumuskan berdasarkan RPJMD Tahun 2025-2029 yang berkaitan dengan pelayanan Dinas Kesehatan dan Laporan KLHS RPJMD 2025-2029 yang berkaitan dengan pelayanan Dinas Kesehatan, ataupun hasil penjaringan aspirasi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan.

d. BAB III :

   1) Penulisan nama tabel pada “tabel teknik merumuskan tujuan dan sasaran renstra PD” belum sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

   2) Pada kolom sasaran, baris belum lurus dengan indikator sasaran;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3) Indikator Tingkat Kepuasan Pasien tidak ada dalam Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada RPJMD Kabupaten Kediri tahun 2025-2029. Disarankan menggunakan Tingkat Kepuasan Masyarakat (IKM).

4) Belum tampak Lokasi Prioritas Kegiatan.

e. BAB IV

1) Belum ada pernyatan eksplisit yang menyatakan program tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan Dinas Kesehatan.

2) Daftar Indikator Kinerja Kunci (IKK) dalam Renstra belum sesuai dalam Indikator Kinerja Daerah (IKD) dalam RPJMD.

f. BAB V

-

Saran

Berdasarkan hasil Verifikasi disarankan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri agar:

1. Menyesuaikan Indikator Kinerja Dinas Kesehatan dengan RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2025-2029;
2. Memperhatikan pohon kinerja dan cascading
3. Menyesuaikan dokumen Renstra Dinas Kesehatan dengan hasil evaluasi ini, sehingga Rencana Strategis Dinas Kesehatan ditetapkan sesuai batas waktu yang diamanahkan oleh Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

VI. APRESIASI

Bappeda Kabupaten Kediri menyampaikan terima kasih kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri atas tersusunnya Rancangan Akhir Renstra PD Tahun 2025-2029 serta kesediaan memberikan data/dokumen yang diperlukan sehingga dapat mendukung terlaksananya kegiatan Verifikasi. Harapan kami terhadap Verifikasi yang telah dilakukan dapat ditindaklanjuti dan memberikan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

perbaikan dalam penyusunan dokumen Rancangan Akhir Renstra PD Tahun 2025-2029.

Verifikator:

Nama : DONI HENDRA HARTONO, SE.

Jabatan : PERENCANA AHLI MUDA

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Plt. Kepala Bappeda



JOKO SUWONO, S.Sos,.M.AP.
Pembina Utama Muda
NIP. 197501031993111001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN

LAPORAN HASIL VERIFIKASI RENCANA STRATEGIS
OPD : DINKES

NO	RENSTRA	ADA/TIDAK	KESESUAIAN DENGAN INMEN	KETERANGAN
1.	SISTEMATIKA	Ada	Sesuai	
	BAB I			
2.	Merumuskan latar belakang penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029 berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renstra PD Tahun 2025-2029 dan dilengkapi definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis Renstra PD.	Ada	Sesuai	
3.	Mengidentifikasi dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029, serta disusun sesuai dengan kaidah penyusunan produk hukum.	Ada	Tidak Sesuai	- Pada dasar hukum nomor regulasi tidak lengkap - Kurang Inmendagri Nomor 2 2025
4.	Menguraikan maksud dan tujuan penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029.	Ada	Sesuai	
5.	Menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing-masing bab dalam Renstra PD Tahun 2025-2029.	Ada	Sesuai	
	BAB II			
6.	Menyajikan data-data dan informasi terkait pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab PD disertai dengan hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2020 hingga tahun 2024 dan data-data lainnya yang relevan sesuai dengan kebutuhan. Data dan Informasi yang disajikan dianalisis dengan analisis deskriptif dan analisis diagnostic	Ada	Tidak Sesuai	Tahun hasil evaluasi capaian pelaksanaan belum menyajikan data 5 tahun terakhir dari tahun 2020 sampai tahun 2024
7.	Penyajian hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab PD 5 (lima) tahun terakhir diutamakan berkaitan dengan capaian IKU dan indikator kinerja kunci (IKK)	Ada	Tidak Sesuai	- Penyajian hasil evaluasi capaian hanya berdasarkan IKU, belum berdasarkan IKK
8.	Data dan informasi yang disajikan dalam bentuk tabel,	Ada	Sesuai	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

	grafik, dan gambar agar dinarasikan kesimpulan datanya (bukan menarasikan data).			
9.	Penyajian pada bab ini memuat sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut: a. Tugas, fungsi dan struktur PD; b. Sumber daya PD; c. Kinerja penyelenggaraan pelayanan PD; d. Kelompok sasaran pelayanan PD; e. Mitra PD dalam pemberian pelayanan (jikalau ada); f. Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja PD (jikalau ada); dan g. Kerja sama daerah yang menjadi tanggung jawab PD (jikalau ada).	Ada	Sesuai	
10.	Mengidentifikasi permasalahan yang dirumuskan dari Bab II, Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025-2029 yang berkaitan dengan pelayanan PD dan Laporan KLHS RPJMD 2025-2029 yang berkaitan dengan pelayanan PD, ataupun hasil penjaringan aspirasi yang dilakukan oleh PD. Rumusan permasalahan merupakan pernyataan kondisi (realita) yang dapat disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia. Perumusan permasalahan dapat menggunakan kertas kerja sehingga yang disajikan dalam subbab ini berupa permasalahan yang bersifat dominan.	Ada	Belum Sesuai	Identifikasi permasalahan belum dirumuskan berdasarkan RPJMD Tahun 2025-2029 yang berkaitan dengan pelayanan Dinas Kesehatan dan Laporan KLHS RPJMD 2025-2029 yang berkaitan dengan pelayanan Dinas Kesehatan, ataupun hasil penjaringan aspirasi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan
11.	Permasalahan agar disajikan ringkas tanpa menyajikan data-data yang berlebih dan berpotensi menimbulkan duplikasi dengan data-data yang sudah disajikan di bab-bab sebelumnya.	Ada	Sesuai	
12.	Mengidentifikasi isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional) yang dapat mempengaruhi PD baik secara langsung ataupun tidak langsung. Isu strategis ini dapat	Ada	Sesuai	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

	dirumuskan dari berbagai sumber yang dapat dipertangungjawabkan antara lain RPJMN 2025-2029, Renstra K/L, laporan resmi dari lembaga pemerintah/lembaga luar negeri, Laporan KLHS RPJMD 2025-2029, ataupun hasil penjaringan aspirasi yang dilakukan oleh PD.			
13.	Merumuskan isu strategis daerah (dapat menggunakan kertas kerja) disimpulkan dari: a. permasalahan; b. isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional); dan c. potensi daerah yang menjadi kewenangan PD yang dapat dikembangkan percepatan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.	Ada	Sesuai	
14.	Tabel Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD	Ada	Sesuai	
	BAB III			
15.	Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 yang penentuannya didasarkan pada: a. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya; dan b. Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029	Ada	Sesuai	
16.	Mempertimbangkan kondisi PD yang ada saat ini, direkomendasikan agar Renstra PD cukup memiliki 1 (satu) tujuan.	Ada	Sesuai	
17.	Jika PD mengampu lebih dari satu urusan, tujuan Renstra PD direkomendasikan tetap 1 (satu) dengan menggabungkan kedua urusan dimaksud. Namun untuk sasarannya dapat dirumuskan sesuai dengan masing-masing urusan yang diampu.	Ada	Sesuai	
18.	Tabel Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra PD	Ada	Tidak Sesuai	- Penulisan nama tabel pada “tabel teknik merumuskan tujuan dan sasaran renstra PD” belum sesuai dengan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

				Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. - Pada kolom sasaran, row belum lurus dengan indicator sasaran.
19.	Perumusan tujuan dan sasaran Renstra PD disusun dengan: a. kalimat kondisi; b. dapat diukur untuk jangka waktu 5 (lima) tahun; c. disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami; dan d. bersifat lebih khas sesuai dengan tugas dan fungsi PD serta merupakan intermediate outcome.	Ada	Sesuai	
20.	Strategi Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra PD.	Ada	Sesuai	
21.	Penahapan pembangunan dimaksud adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Penahapan Renstra PD dapat disajikan seperti pada tabel di bawah ini.	Ada	Sesuai	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

22.	Tabel Penahapan Renstra PD	Ada	Sesuai	
23.	Penyajian lokus Renstra PD untuk provinsi dapat disajikan berdasarkan kabupaten/kota dan/atau berdasarkan wilayah pengembangan serta dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pengembangan daerah.	-	-	Kewenangan Provinsi
24.	Penyajian lokus Renstra PD untuk kabupaten/kota dapat disajikan berdasarkan kecamatan dan/atau berdasarkan wilayah pengembangan serta dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pengembangan daerah.	Tidak Ada	Tidak Sesuai	Belum tampak Lokasi Prioritas Kegiatan
25.	Arah Kebijakan Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD.	Ada	Sesuai	
26.	Tabel Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD	Ada	Sesuai	
	BAB IV			
27.	Program, kegiatan dan subkegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome, dan output.	Ada	Sesuai	
28.	Program, kegiatan dan subkegiatan mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemutakhirannya.	Ada	Sesuai	
29.	Daftar program, kegiatan, dan subkegiatan dalam mencapai kinerja PD dimulai dari tahun 2025 hingga tahun 2030 sehingga perlu pernyataan eksplisit bahwa program tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan PD yaitu pijakan penyusunan Renja PD Tahun 2030.	Ada	Tidak Sesuai	Belum ada pernyatan eksplisit yang menyatakan program tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan PD
30.	Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Indikator yang disajikan merupakan indikator yang terseleksi.	Ada	Sesuai	
31.	Penentuan target penyelenggaraan urusan melalui	Ada	Sesuai	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

	Indikator Kinerja Kunci (IKK)			
32.	IKU dan IKK berlaku dari tahun 2025 hingga tahun 2030.	Ada	Sesuai	
33.	Tabel Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD	Ada	Sesuai	
34.	Tabel Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan	Ada	Sesuai	
35.	Tabel Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	Ada	Sesuai	
36.	Tabel Indikator Kinerja Utama PD	Ada	Sesuai	
37.	Tabel Indikator Kinerja Kunci	Ada	Belum Sesuai	Daftar Indikator Kinerja Kunci (IKK) dalam Renstra tidak ada dalam Indikator Kinerja Daerah (IKD) dalam RPJMD
	BAB V			
38.	Kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.	Ada	Sesuai	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

RENCANA STRATEGIS

DINAS KESEHATAN

TAHUN 2025 - 2029

© 2025 DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEDIRI

dinkes.kedirikab.go.id @dinkes.kabkediri @dinkeskedirikab Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri